

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021-2026**



“OKU SELATAN BERSINAR”

(**B**erkembangnya **E**konomi **R**akyat melalui **S**inergitas pembangunan
Infrastruktur yang **A**spiratif dan **R**esponsif)

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

- (1) Dokumen RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan kepala daerah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. PD dalam menyusun Renstra-PD;
 - b. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BAB VIII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB IX KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB X PENUTUP

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra-PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda Litbang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 13 September 2021
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 13 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ROMZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (5-96/2021)



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.3.1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	I-9
1.3.2. RPJMD Dengan Renstra PD	I-10
1.3.3. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	I-10
1.3.4. RPJMD dan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	I-11
1.3.5. RPJMD dan KLHS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	I-11
1.3.6. RPJMD dan RPJMN	I-11
1.3.7. RPJMD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan	I-12
1.4. Maksud dan Tujuan	I-12
1.4.1. Maksud.....	I-12
1.4.2. Tujuan	I-13
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-13
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Kondisi Geografi dan Demografi	II-2
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-2
2.1.2. Wilayah Rawan Bencana.....	II-11
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah	II-19
2.1.4. Kondisi Demografi.....	II-22
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-27
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-27
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-35
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-48
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-49
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	II-49
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	II-126
2.3.3. Penunjang Urusan	II-133
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-138
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-138
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-140
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-141
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-144



2.5. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-145
2.5.1. SPM Pendidikan	II-145
2.5.2. SPM Kesehatan	II-147
2.5.3. SPM Pekerjaan Umum	II-152
2.5.4. SPM Perumahan Rakyat	II-153
2.5.5. SPM Bencana	II-154
2.5.6. SPM Sosial	II-158
2.6. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Ogan Komering Ulu Selatan	II-160
2.6.1. Pilar 1 (Pembangunan Sosial)	II-161
2.6.2. Pilar 2 (Pembangunan Ekonomi)	II-177
2.6.3. Pilar 3 (Pembangunan Lingkungan)	II-184
2.6.4. Pilar 4 (Tata Kelola Pelaksanaan)	II-195
2.7. Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	II-201

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-3
3.1.2. Neraca Daerah	III-18
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-34
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-34
3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-37
3.3. Kerangka Pendanaan	III-41
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Wajib Mengikat	III-41
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendapatan	III-59

BAB IV PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.1. Telaah RPJPD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2005-2025	IV-2
4.1.2. Telaah RPJMN Tahun 2020-2024	IV-4
4.1.3. Telaah RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023	IV-7
4.1.4. Telaah RTRW	IV-9
4.1.5. Telaah SDGs	IV-41
4.1.6. Telaahan KLHS	IV-62
4.1.7. Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19)	IV-68
4.1.8. Permasalahan Indikator Makro	IV-69
4.1.9. Permasalahan Per Urusan	IV-72
4.1.10. Permasalahan Utama	IV-80
4.2. Isu-Isu Strategis	IV-94

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi	V-1
5.2. Misi	V-2
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-2
5.4. Prioritas Pembangunan	V-10



BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	VI-1
6.2. Program Pembangunan	VI-9

BAB VII ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

7.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kewilayahan	VII-1
7.2. Sistem Pusat Kegiatan.....	VII-4
7.3. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	VII-9
7.3.1. Jaringan Jalan	VII-9
7.3.2. Jaringan Sungai Danau dan Penyebrangan	VII-12
7.3.3. Jaringan Transportasi Udara	VII-13
7.3.4. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.....	VII-14
7.3.5. Sistem Jaringan Telekomunikasi	VII-16
7.3.6. Sistem Jaringan Sumber Daya Air	VII-17
7.3.7. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.....	VII-21

BAB VIII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB IX KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB X PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.....	II-3
Tabel II.2	Topografi Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	II-4
Tabel II.3	Geologi Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	II-5
Tabel II.4	Jenis Tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	II-7
Tabel II.5	Nama Sungai dan Panjang Sungai Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	II-8
Tabel II.6	Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	II-9
Tabel II.7	Tutupan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	II-10
Tabel II.8	Penggunaan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	II-11
Tabel II.9	Wilayah Potensi Gerakan Tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	II-12
Tabel II.10	Kejadian Bencana Alam Menurut Jenisnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016	II-14
Tabel II.11	Kejadian Bencana Alam Menurut Jenisnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017	II-15
Tabel II.12	Kejadian Bencana Alam Menurut Jenisnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018	II-16
Tabel II.13	Kejadian Bencana Alam Menurut Jenisnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019	II-17
Tabel II.14	Kejadian Bencana Alam Menurut Jenisnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020	II-18
Tabel II.15	Rencana Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	II-20
Tabel II.16	Rencana Kawasan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	II-21
Tabel II.17	Rencana Kawasan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	II-22
Tabel II.18	Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015-2020	II-23
Tabel II.19	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-24
Tabel II.20	Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-24
Tabel II.21	Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020	II-25
Tabel II.22	Kepadatan Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-26
Tabel II.23	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-29
Tabel II.24	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-30
Tabel II.25	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020 (persen).....	II-32



Tabel II.26	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-33
Tabel II.27	Indikator Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-37
Tabel II.28	Persentase Balita Gizi Buruk, Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-40
Tabel II.29	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-42
Tabel II.30	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-43
Tabel II.31	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-44
Tabel II.32	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-44
Tabel II.33	Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-45
Tabel II.34	Produksi Tanaman Pangan (ton) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-46
Tabel II.35	Produksi Sayur-Sayuran (ton) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-46
Tabel II.36	Provitas Sayur-Sayuran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-46
Tabel II.37	Produksi Buah-Buahan (ton) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-46
Tabel II.38	Provitas Buah-Buahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-47
Tabel II.39	Populasi Ternak (ekor) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-47
Tabel II.40	Produksi Perkebunan (ton) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-47
Tabel II.41	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-48
Tabel II.42	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-49
Tabel II.43	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-50
Tabel II.44	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-51
Tabel II.45	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-51
Tabel II.46	Angka Kelulusan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-52
Tabel II.47	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-52
Tabel II.48	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-52
Tabel II.49	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-53
Tabel II.50	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-53



Tabel II.51	Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-54
Tabel II.52	Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-54
Tabel II.53	Persentase SMA/MA Berakreditasi Minimal B Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-54
Tabel II.54	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-55
Tabel II.55	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-56
Tabel II.56	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-56
Tabel II.57	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-57
Tabel II.58	Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-57
Tabel II.59	Kematian Bayi dan Kematian Ibu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-58
Tabel II.60	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-58
Tabel II.61	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-59
Tabel II.62	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-59
Tabel II.63	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-60
Tabel II.64	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-60
Tabel II.65	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-61
Tabel II.66	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-61
Tabel II.67	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-61
Tabel II.68	Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-62
Tabel II.69	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-62
Tabel II.70	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-63
Tabel II.71	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-63



Tabel II.72	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-63
Tabel II.73	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-64
Tabel II.74	Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-64
Tabel II.75	Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-65
Tabel II.76	Penderita Diare Yang Ditangani Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-65
Tabel II.77	Angka Kejadian Malaria Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-65
Tabel II.78	Tingkat Kematian Akibat Malaria Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-66
Tabel II.79	Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-66
Tabel II.80	Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-66
Tabel II.81	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-67
Tabel II.82	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-67
Tabel II.83	Cakupan Puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-67
Tabel II.84	Cakupan Pembantu Puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-68
Tabel II.85	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-68
Tabel II.86	Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-69
Tabel II.87	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-69
Tabel II.88	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-69
Tabel II.89	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-70
Tabel II.90	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-70
Tabel II.91	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-70
Tabel II.92	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-71
Tabel II.93	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-71



Tabel II.94	Puskesmas Yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-72
Tabel II.95	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-72
Tabel II.96	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-73
Tabel II.97	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-73
Tabel II.98	Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin di Puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-74
Tabel II.99	Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-74
Tabel II.100	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-75
Tabel II.101	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-75
Tabel II.102	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-75
Tabel II.103	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-76
Tabel II.104	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-76
Tabel II.105	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-77
Tabel II.106	Persentase Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-77
Tabel II.107	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-77
Tabel II.108	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-78
Tabel II.109	Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-78
Tabel II.110	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-79
Tabel II.111	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-79
Tabel II.112	Jumlah Bangunan Ber-IMB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-79
Tabel II.113	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-80



Tabel II.114	Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-80
Tabel II.115	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-80
Tabel II.116	Backlog Rumah Tinggal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-81
Tabel II.117	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-81
Tabel II.118	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-81
Tabel II.119	Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-82
Tabel II.120	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-82
Tabel II.121	Jumlah Linmas Pemilu Per Jumlah 10.000 Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-82
Tabel II.122	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-83
Tabel II.123	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-83
Tabel II.124	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-83
Tabel II.125	Jumlah Desa Tangguh Bencana Yang Terbentuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-83
Tabel II.126	Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Serta Kebencanaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-84
Tabel II.127	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-84
Tabel II.128	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-85
Tabel II.129	Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-85
Tabel II.130	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-85
Tabel II.131	Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-86
Tabel II.132	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-86
Tabel II.133	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-87



Tabel II.134	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020.....	II-87
Tabel II.135	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-88
Tabel II.136	Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-88
Tabel II.137	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-89
Tabel II.138	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-89
Tabel II.139	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-89
Tabel II.140	Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-90
Tabel II.141	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-90
Tabel II.142	Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-90
Tabel II.143	Keselamatan dan Perlindungan Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-91
Tabel II.144	Perkembangan Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018-2020	II-92
Tabel II.145	Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017-2020	II-93
Tabel II.146	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-94
Tabel II.147	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-94
Tabel II.148	Rasio KDRT Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-95
Tabel II.149	Jumlah Kebijakan Yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020.....	II-95
Tabel II.150	Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Manajerial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-95
Tabel II.151	Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020.....	II-97
Tabel II.152	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020.....	II-98
Tabel II.153	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-98
Tabel II.154	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-98



Tabel II.155	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Dari Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	II-99
Tabel II.156	Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	II-100
Tabel II.157	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-100
Tabel II.158	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-100
Tabel II.159	Terverifikasi Hak Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan Tradisional Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-100
Tabel II.160	Penetapan Hak MHA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-101
Tabel II.161	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-101
Tabel II.162	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-101
Tabel II.163	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-101
Tabel II.164	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-102
Tabel II.165	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	II-102
Tabel II.166	Timbulan Sampah Yang Ditangani Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-102
Tabel II.167	Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-103
Tabel II.168	Persentase Cakupan Area Pelayanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-103
Tabel II.169	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-103
Tabel II.170	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA Di Kabupaten/ Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-103
Tabel II.171	Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-104
Tabel II.172	Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-104
Tabel II.173	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-104
Tabel II.174	Kualitas Air Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-105



Tabel II.175	Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-105
Tabel II.176	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-106
Tabel II.177	Rasio Penduduk berKTP Per Satuan Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-106
Tabel II.178	Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-106
Tabel II.179	Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-107
Tabel II.180	Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-107
Tabel II.181	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-107
Tabel II.182	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-107
Tabel II.183	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-108
Tabel II.184	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-108
Tabel II.185	Jumlah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-109
Tabel II.186	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-109
Tabel II.187	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-109
Tabel II.188	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-110
Tabel II.189	Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-110
Tabel II.190	Persentase PKK Aktif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-110
Tabel II.191	Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-111
Tabel II.192	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-111
Tabel II.193	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-111
Tabel II.194	Ratio Akseptor KB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-112
Tabel II.195	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-112
Tabel II.196	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-112



Tabel II.197	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-113
Tabel II.198	Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-113
Tabel II.199	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-114
Tabel II.200	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-114
Tabel II.201	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-114
Tabel II.202	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-114
Tabel II.203	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-115
Tabel II.204	Cakupan Peserta KB aktif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-115
Tabel II.205	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-115
Tabel II.206	Rasio Ijin Trayek Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-116
Tabel II.207	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-116
Tabel II.208	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-116
Tabel II.209	Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-117
Tabel II.210	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-117
Tabel II.211	Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-117
Tabel II.212	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/ Telepon Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-118
Tabel II.213	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-118
Tabel II.214	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-118
Tabel II.215	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-119
Tabel II.216	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-119
Tabel II.217	Jumlah BPR/LKM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-119



Tabel II.218	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-120
Tabel II.219	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-120
Tabel II.220	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-121
Tabel II.221	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-121
Tabel II.222	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-121
Tabel II.223	Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-122
Tabel II.224	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-122
Tabel II.225	Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-122
Tabel II.226	Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-123
Tabel II.227	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-123
Tabel II.228	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-123
Tabel II.229	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-124
Tabel II.230	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-124
Tabel II.231	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-124
Tabel II.232	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-125
Tabel II.233	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-125
Tabel II.234	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/ Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-125
Tabel II.235	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-125
Tabel II.236	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-126
Tabel II.237	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-126
Tabel II.238	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-126
Tabel II.239	Potensi dan Objek Wisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	II-127
Tabel II.240	Kunjungan wisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-128



Tabel II.241	Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-128
Tabel II.242	PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-128
Tabel II.243	Kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-129
Tabel II.244	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-129
Tabel II.245	Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-129
Tabel II.246	Rasio Elektrifikasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-130
Tabel II.247	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-131
Tabel II.248	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Terhadap PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-131
Tabel II.249	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-132
Tabel II.250	Persentase Transmigran Swakarsa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-132
Tabel II.251	Produksi Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-132
Tabel II.252	Konsumsi Ikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-132
Tabel II.253	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-133
Tabel II.254	Produksi perikanan kelompok nelayan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-133
Tabel II.255	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-134
Tabel II.256	Persentase SiLPA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-134
Tabel II.257	Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-135
Tabel II.258	Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-135
Tabel II.259	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-135
Tabel II.260	Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-136
Tabel II.261	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-136
Tabel II.262	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-136
Tabel II.263	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-137
Tabel II.264	Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-137



Tabel II.265	Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-137
Tabel II.266	Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-138
Tabel II.267	Jumlah Temuan BPK Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-138
Tabel II.268	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-138
Tabel II.269	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-139
Tabel II.270	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-140
Tabel II.271	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-140
Tabel II.272	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-141
Tabel II.273	Luas Wilayah Produktif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-141
Tabel II.274	Angka Kriminalitas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-142
Tabel II.275	Lama Proses Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-142
Tabel II.276	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-142
Tabel II.277	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-143
Tabel II.278	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-143
Tabel II.279	Persentase Desa Berstatus Swasembada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-143
Tabel II.280	Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-146
Tabel II.281	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-146
Tabel II.282	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SMP Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-146
Tabel II.283	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-147
Tabel II.284	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-147
Tabel II.285	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-147
Tabel II.286	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-148
Tabel II.287	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-148



Tabel II.288	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-149
Tabel II.289	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-149
Tabel II.290	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-149
Tabel II.291	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-150
Tabel II.292	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-150
Tabel II.293	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-151
Tabel II.294	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-151
Tabel II.295	Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-151
Tabel II.296	Capaian Pelayanan SPALD-S Akses Dasar Air Limbah Domestik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-152
Tabel II.297	Capaian Pelayanan SPALD- S Akses Aman Air Limbah Domestik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-152
Tabel II.298	Capaian Pelayanan SPALD-T Akses Aman Air Limbah Domestik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-153
Tabel II.299	Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-153
Tabel II.300	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-153
Tabel II.301	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-154
Tabel II.302	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-154
Tabel II.303	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-155
Tabel II.304	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-155
Tabel II.305	Pembuatan Rencana Kontinjensi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-155



Tabel II.306	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-156
Tabel II.307	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-156
Tabel II.308	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-156
Tabel II.309	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-157
Tabel II.310	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-157
Tabel II.311	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-157
Tabel II.312	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-158
Tabel II.313	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-158
Tabel II.314	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-158
Tabel II.315	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-159
Tabel II.316	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-159
Tabel II.317	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-160
Tabel II.318	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-160
Tabel II.319	Pencapaian Pilar 1 (Pembangunan Sosial)	II-162
Tabel II.320	Pencapaian Pilar 2 (Pembangunan Ekonomi)	II-178
Tabel II.321	Pencapaian Pilar 3 (Pembangunan Lingkungan)	II-185
Tabel II.322	Pencapaian Pilar 4 (Tata Kelola Pelaksanaan)	II-196
Tabel II.323	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-202
Tabel III.1	Skala interval Otonomi Fiskal	III-2
Tabel III.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	III-3
Tabel III.3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	III-7
Tabel III.4	Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	III-10
Tabel III.5	Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	III-13



Tabel III.6	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	III-20
Tabel III.7	Rasio Lancar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	III-25
Tabel III.8	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	III-27
Tabel III.9	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	III-29
Tabel III.10	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	III-31
Tabel III.11	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	III-33
Tabel III.12	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	III-34
Tabel III.13	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	III-36
Tabel III.14	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	III-38
Tabel III.15	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	III-40
Tabel III.16	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026	III-43
Tabel III.17	Proyeksi SiLPA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021-2026	III-46
Tabel III.18	Struktur Proyeksi RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021-2026	III-48
Tabel III.19	Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026	III-53
Tabel III.20	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026	III-61
Tabel III.21	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026	III-63
Tabel IV.1	Hasil Telaahan RPJPD Periode Perencanaan Tahun 2021-2026	IV-2
Tabel IV.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023	IV-8
Tabel IV.3	Indikasi Program Utama	IV-10
Tabel IV.4	Skenario Perubahan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sampai Tahun 2030	IV-65
Tabel IV.5	Proyeksi Perubahan Tutupan Lahan 2019 dan 2030	IV-66
Tabel IV.6	Perekonomian Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020	IV-88
Tabel V.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026	V-4
Tabel V.2	Keterkaitan Misi dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026	V-10
Tabel VI.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026	VI-2



Tabel VI.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022-2026	VI-9
Tabel VI.3	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026	VI-10
Tabel VII.1	Pengembangan Fungsi Pusat Pelayanan Kabupaten	VII-5
Tabel VII.2	Rencana Pengembangan Jaringan Jalan	VII-10
Tabel VIII.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	VIII-2
Tabel VIII.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022-2026	VIII-3
Tabel IX.1	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022-2026	IX-2
Tabel IX.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022-2026	IX-3
Tabel IX.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022-2026	IX-6



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-8
Gambar I.2	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Anggaran	II-9
Gambar II.1	Peta Administrasi.....	II-3
Gambar II.2	Piramida Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020	II-26
Gambar II.3	Perkembangan PDRB Perkapita (juta rupiah) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-34
Gambar II.4	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-35
Gambar II.5	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-36
Gambar II.6	Angka Melek Huruf Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-37
Gambar II.7	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020.....	II-38
Gambar II.8	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020.....	II-39
Gambar II.9	Angka Harapan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020.....	II-39
Gambar II.10	Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan (<i>Purchasing Power Parity/PPP</i>) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-41
Gambar II.11	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015-2020	II-42
Gambar II.12	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-45
Gambar II.13	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-92
Gambar II.14	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-93
Gambar II.15	Luas Kawasan Hutan (ha) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020	II-130
Gambar II.16	Nilai Tukar Petani Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	II-139
Gambar II.17	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020	II-144
Gambar II.18	Rasio Ketergantungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020.....	II-145
Gambar III.1	Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020 (juta rupiah).....	III-3
Gambar IV.1	Persentase Penduduk Kabupaten OKU Selatan Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Tahun 2011-2020	IV-42
Gambar IV.2	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan, Tahun 2020	IV-44
Gambar IV.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2020.....	IV-44



Gambar IV.4	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Kelahiran, Tahun 2020.....	IV-45
Gambar IV.5	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan Yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik Baik Dari PLN dan Bukan PLN, Tahun 2020.....	IV-46
Gambar IV.6	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021	IV-47
Gambar IV.7	Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak Pada Usia Kurang Dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021	IV-47
Gambar IV.8	Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan ASI eksklusif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021	IV-48
Gambar IV.9	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021	IV-49
Gambar IV.10	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021	IV-50
Gambar IV.11	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≤ 18 Tahun, Tahun 2020	IV-50
Gambar IV.12	Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) Atau Pasangannya Yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021	IV-51
Gambar IV.13	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2020	IV-52
Gambar IV.14	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-52
Gambar IV.15	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-53
Gambar IV.16	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah, Tahun 2020	IV-54
Gambar IV.17	Rasio Elektrifikasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-54
Gambar IV.18	PDRB Per Kapita ADHB (juta rupiah) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020.....	IV-55
Gambar IV.19	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-55
Gambar IV.20	Jumlah Wisatawan Mancanegara Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-56
Gambar IV.21	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-56
Gambar IV.22	Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-57
Gambar IV.23	Koefisien Gini Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-57



Gambar IV.24	Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020	IV-58
Gambar IV.25	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak, Tahun 2020	IV-59
Gambar IV.26	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-59
Gambar IV.27	Jumlah Desa Tangguh Bencana Yang Terbentuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-60
Gambar IV.28	Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-61
Gambar IV.29	Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran Yang Disetujui Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-62
Gambar IV.30	Target dan Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-69
Gambar IV.31	Target dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-70
Gambar IV.32	Target dan Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-70
Gambar IV.33	Target dan Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-71
Gambar IV.34	Target dan Capaian Indikator Pendapatan Per Kapita Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-71
Gambar IV.35	Target dan Capaian Indikator Indeks Gini Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020	IV-72
Gambar IV.36	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020	IV-81
Gambar IV.37	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020	IV-82
Gambar IV.38	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020	IV-83
Gambar IV.39	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020	IV-84
Gambar IV.40	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020	IV-91
Gambar IV.41	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020	IV-92
Gambar IV.42	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2020	IV-93



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu anugerah bagi seluruh masyarakat Indonesia sekaligus tanggungjawab besar dalam mengisi setiap tahapan pembangunan dari awal kemerdekaan hingga masa mendatang. Oleh karena itulah, segenap pendiri bangsa Indonesia merumuskan suatu cita-cita luhur Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, di mana keempat tujuan pembangunan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

Guna memberikan arah dan fokus pembangunan secara berkelanjutan, dibutuhkan suatu proses perumusan kebijakan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya seefektif dan seefisien mungkin melalui sebuah perencanaan pembangunan. Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Implementasi pasal tersebut, tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Lebih lanjut, dalam pasal 3 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Tujuan ini selaras dengan tujuan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni untuk



mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarfungsi Pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, serta pengoptimalan partisipasi masyarakat dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada tanggal 9 Desember 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026. Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan Popo Ali Martopo, B. Commerce sebagai Bupati dan Sholehien Abuasir, S.P.,M.Si sebagai Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Periode 2021-2026 serta telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkan dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

- a. Pendekatan politik, dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- b. Pendekatan teknokratik, di mana proses penyusunan RPJMD melalui metode dan kerangka berpikir ilmiah guna memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pendekatan partisipatif, di mana penyusunan RPJMD telah melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, kesetaraan dan keterbukaan. Sehingga tercipta konsensus pada semua tahapan pengambilan keputusan, seperti perumusan isu strategis dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.
- d. Pendekatan *bottom up* dan *top down*, di mana perencanaan dilakukan sesuai jenjang pemerintahan yang selanjutnya diselaraskan melalui musyawarah baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa.



RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2021-2026 merupakan RPJMD Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 adalah “OKU Selatan Bersinar” dalam rangka mencapai visi tersebut dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat.
3. Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik.
4. Menciptakan kondisi investasi yang kondusif.

RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan juga dijadikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 25 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (1).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 mengacu pada landasan konstitusional dan landasan operasional. Landasan konstitusional berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sementara landasan operasionalnya yakni peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32. Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Keberadaan Dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 memiliki hubungan dan tidak terlepas dengan dokumen perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan umumnya disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Adapun hubungan Dokumen RPJMD

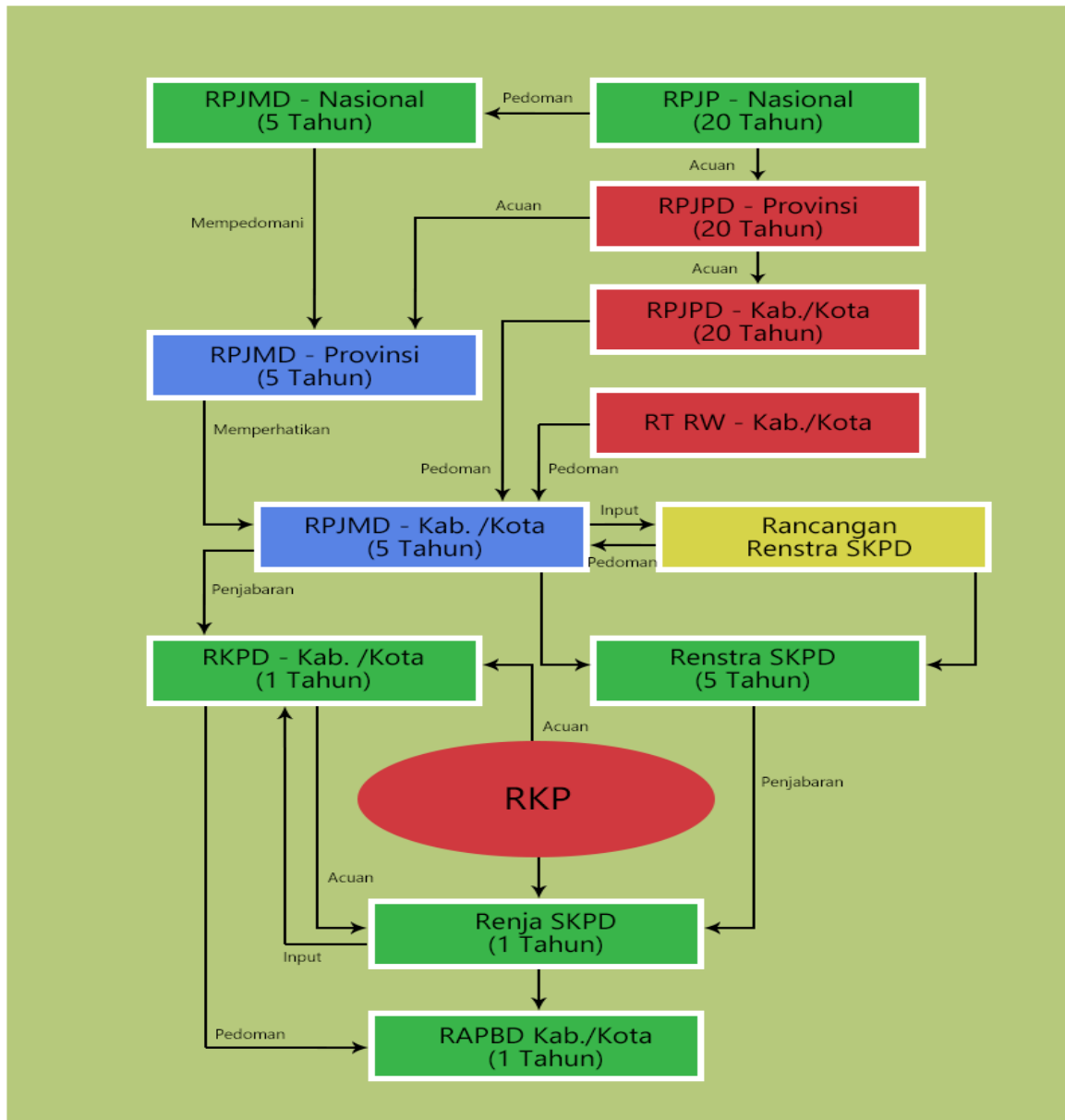


Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya adalah, sebagai berikut:

- a. Dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan implementasi RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kondisi, kebutuhan serta tantangan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- b. Penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 berpedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan arahan pemanfaatan ruang
- c. Dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman umum terhadap penyusunan Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada periode yang sama.
- d. Penjabaran operasional tahunan dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 dilakukan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- e. Penjabaran dari Renstra PD adalah Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi setiap OPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

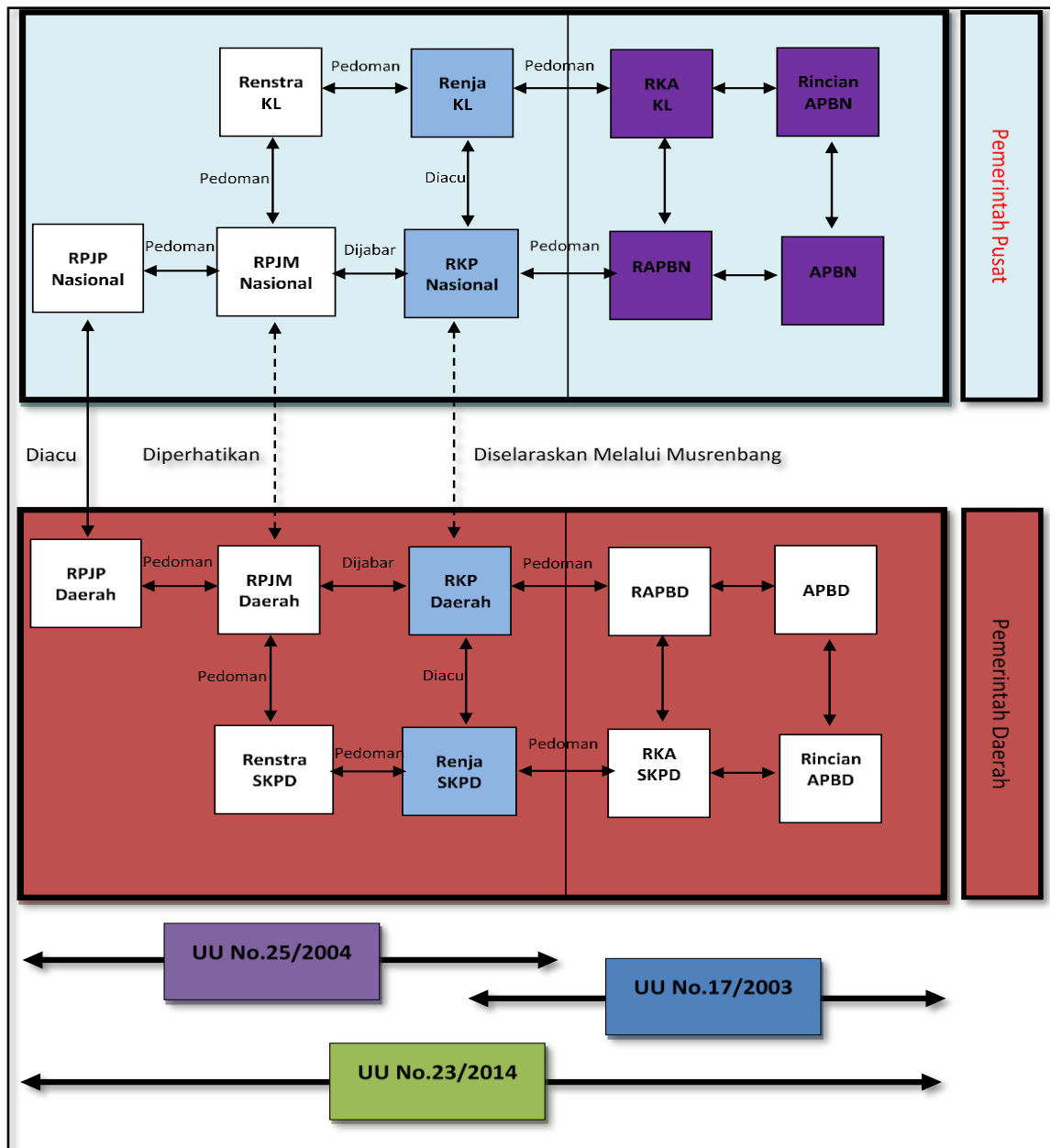
Hubungan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut:

Gambar I.1
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Secara garis besar, RPJMD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dapat ditunjukkan sesuai Gambar I.2 berikut:

Gambar I.2
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Anggaran



Dengan melihat gambar di atas dalam rangka untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan wilayah dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat sehingga RPJMD menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu. Berikut penjabaran keterkaitan antar dokumen perencanaan:

1.3.1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 tahap terakhir (keempat). RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan lanjutan dari tahap ketiga dalam rangka mencapai kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2025. Pada RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2005-



2025 dinyatakan visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2025 adalah: “Kabupaten OKU Selatan Yang Mandiri Dan Sejahtera Tahun 2025”.

Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.
2. Mewujudkan Pengembangan Perekonomian dan Daya Saing Daerah.
3. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Professional dan Akuntabel.
4. Mewujudkan Pengembangan Infrastruktur.
5. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan.

Tahap keempat RPJMD ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Selatan yang Mandiri dan Sejahtera melalui percepatan pembangunan disegala bidang dengan menekankan pengembangan teknologi melalui upaya-upaya: pemantapan lumbung pangan dan lumbung energi nasional; pemantapan teknologi informasi dan komunikasi; pemantapan pusat agribisnis; pemantapan pusat industri; dan pemantapan pariwisata sebagai ekonomi kreatif.

1.3.2. RPJMD Dengan Renstra PD

Renstra PD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari Renstra Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dituangkan di dalam Renstra masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Bupati yang telah dijabarkan dalam RPJMD.

1.3.3. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui RKPD. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Bupati dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik, kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam



rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah setiap tahun diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan Pemerintah Daerah.

1.3.4. RPJMD dan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional.

Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam RPJMD merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW.

1.3.5. RPJMD dan KLHS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Instrumen perlindungan di tingkat perencanaan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Peraturan Pemerintah ini mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan kata lain KLHS ini dibuat dan dilaksanakan untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Oleh karenanya, dokumen KLHS inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dan penyempurnaan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang akan dirumuskan dalam RPJMD.

1.3.6. RPJMD dan RPJMN

RPJMD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*,



prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Visi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi, yaitu: Misi 1 Peningkatan kualitas manusia Indonesia; Misi 2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; Misi 3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan; Misi 4 Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; Misi 5 Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; Misi 6 Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; Misi 7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; Misi 8 Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; Misi 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

1.3.7. RPJMD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

RPJMD juga harus memedomani RPJMD Provinsi Sumatera Selatan sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk sinkronisasi kebijakan.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program organisasi perangkat daerah, lintas organisasi perangkat daerah dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara



perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara nyata dan bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 adalah, sebagai berikut:

1. Menerjemahkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam berbagai prioritas dan kebijakan pembangunan.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah periode pembangunan tahun 2021-2026 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang.
6. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJMD, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan proyeksi kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (Provinsi dan Nasional).

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.



**BAB VII ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Bab ini menguraikan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2021-2026 disusun melalui pendekatan spasial dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040 dan potensi pengembangan wilayah Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta memperhtikan arah kebijakan pengembangan wilayah yang akan dilakukan Provinsi Sumatera Selatan terhadap Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**BAB VIII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH;**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan

BAB IX KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB X PENUTUP

Bab ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan daerah merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam perwujudan cita-cita setiap daerah dalam menyejahterakan penduduknya. Setiap gerak langkah Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunannya akan memberi dampak positif dalam kehidupan masyarakat sehingga visi pembangunan yang diemban dapat terlaksana tanpa suatu kendala yang berarti. Hal ini tentu saja sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari keempat tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia adalah ingin memberikan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian kepada seluruh warga negara. Dalam hierarki kedaerahan, poin utama pembentukan wilayah administrasi sebagai upaya pemerataan pembangunan adalah “kesejahteraan”. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan harus dirancang dan dirumuskan secara seksama untuk menjadikannya relevan dan valid dalam mewujudkan tujuan yang dimaksud.

Rumusan setiap detail kebijakan pembangunan daerah harus memiliki pijakan untuk pemandu batasan-batasan kebijakan yang harus ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tidak tepatnya berbagai program pembangunan yang akan direalisasikan. Oleh karena itu, data dan informasi yang terangkum dalam gambaran umum kondisi daerah akan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam perkembangan pembangunan daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, salah satu daerah administrasi di Provinsi Sumatera Selatan ini berupaya untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan digulirkan dalam pembangunan lima tahun ke depan dengan menjadikan setiap data dan informasi pembangunan sebagai acuan baik itu terkait kondisi geografi dan demografi maupun capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, serta capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Berikut analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.



2.1. Kondisi Geografi dan Demografi

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis utamanya dalam memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga klimatologi wilayah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah dan daerah rawan bencana yang dijabarkan lebih lanjut dalam perencanaan tata ruang wilayah.

Analisis aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Ibukotanya Muaradua merupakan salah satu Kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir. Luas Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) dan menggunakan batas administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri serta batas indikatif antar Kabupaten memiliki luas wilayah kurang lebih 437.687 Ha. Adapun secara administrasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu; dan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

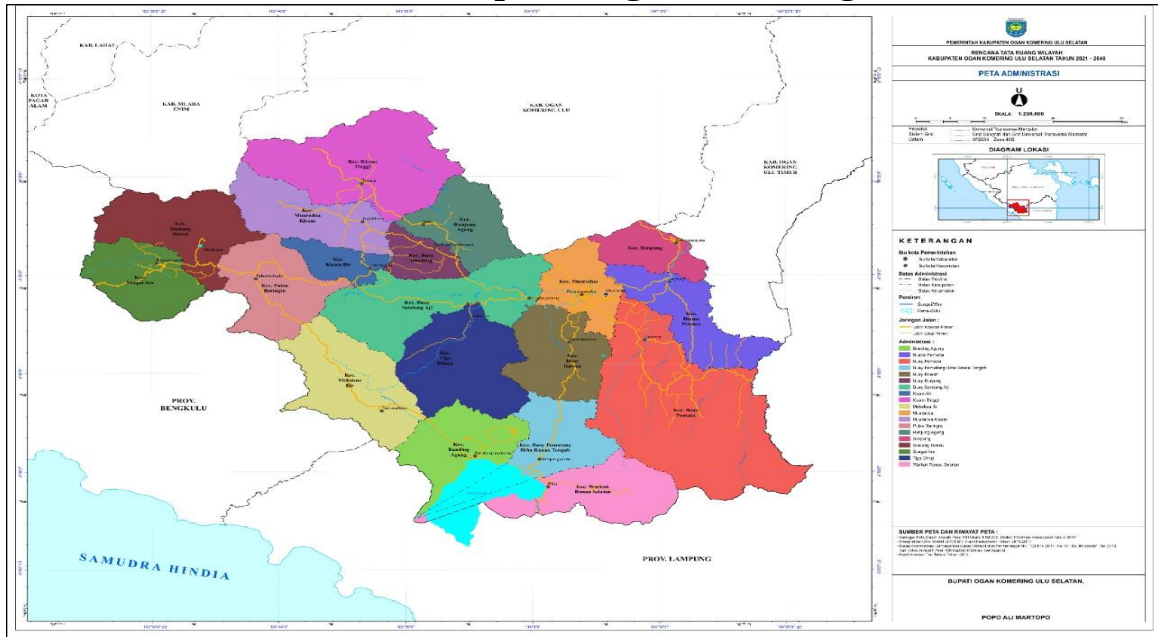


Tabel II.1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020

Kode	Kecamatan	Luas (ha)	%	Kelurahan	Desa
16.09.01	Muaradua	13,937	3.20	5	9
16.09.02	Pulau Beringin	21,611	4.90	-	13
16.09.03	Banding Agung	21,272	4.90	1	21
16.09.04	Muaradua Kisam	20,523	4.70	-	18
16.09.05	Simpang	10,777	2.50	-	7
16.09.06	Buay Sandang Aji	31,273	7.10	-	16
16.09.07	Buay Runjung	8,108	1.90	-	14
16.09.08	Mekakau Ilir	27,485	6.30	-	15
16.09.09	Buay Pemaca	63,874	14.60	-	22
16.09.10	Kisam Tinggi	39,097	8.90	-	19
16.09.11	Kisam Ilir	7,748	1.80	-	9
16.09.12	BPR Ranau Tengah	20,337	4.60	1	21
16.09.13	Warkuk Ranau Selatan	24,128	5.50	-	16
16.09.14	Runjung Agung	16,954	3.90	-	9
16.09.15	Sungai Are	18,339	4.20	-	9
16.09.16	Sindang Danau	24,057	5.50	-	7
16.09.17	Buana Pemaca	19,418	4.40	-	8
16.09.18	Tiga Dihaji	28,482	6.50	-	8
16.09.19	Buay Rawan	20,266	4.60	-	11
Jumlah		437,687	100.00	7	252

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

Gambar II.1
Peta Administrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak di antara 103°24'22.36"-104°22'8.72" Bujur Timur 4°12'58.36"-4°55'26.97" Lintang Selatan.



2.1.1.3. Topografi/Ketinggian Wilayah

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagian besar berada pada ketinggian 100-750 m dpl. Ketinggian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan wilayah yang bergelombang dan berbukit. Sedangkan di bagian barat dan selatan merupakan wilayah pegunungan (ketinggian 750-1000 m dpl dan >1000 m dpl). Kondisi topografi dapat dilihat pada Tabel II.2 berikut ini.

Tabel II.2
Topografi Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Kecamatan	Ketinggian dari permukaan laut (meter Dpl)					Jumlah
		0-200	200-500	500-750	750-1000	>1000	
1.	Muaradua	7,210	6,505	200	22	-	13,937
2.	Pulau Beringin	-	116	3,978	9,449	8,067	13,543
3.	Banding Agung	-	132	17,686	1,683	1,771	19,501
4.	Muaradua Kisam	-	70	6,103	3,498	10,853	9,671
5.	Simpang	5,445	4,746	548	38	-	10,777
6.	Buay Sandang Aji	3,838	21,225	5,571	612	27	31,246
7.	Buay Runjung	21	7,155	932	-	-	8,108
8.	Mekakau Ilir	-	5,773	14,483	4,330	2,899	24,586
9.	Buay Pemaca	5,199	30,026	15,234	6,899	6,516	57,358
10.	Kisam Tinggi	-	3,465	13,624	13,282	8,728	30,371
11.	Kisam Ilir	-	1,609	2,711	1,597	1,830	5,917
12.	BPR Ranau Tengah	-	3,918	12,830	2,244	1,345	18,992
13.	Warkuk Ranau Selatan	-	-	6,148	6,466	11,514	12,614
14.	Runjung Agung	43	15,135	1,717	59	-	16,954
15.	Sungai Are	-	749	6,845	7,525	3,219	15,119
16.	Sindang Danau	-	-	463	5,707	17,887	6,170
17.	Buana Pemaca	10,458	8,960	-	-	-	19,418
18.	Tiga Dihaji	882	19,906	7,386	294	15	28,468
19.	Buay Rawan	2,786	17,354	126	-	-	20,266
Jumlah		35,882	146,844	116,585	63,705	74,671	437,687

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

Dilihat dari faktor kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki kemiringan lereng yang cukup bervariasi yaitu sebagai berikut:

- Kemiringan lereng antara 0-5%, menunjukkan daerah dengan kemiringan landai. Wilayah dengan kemiringan ini masih dapat digunakan untuk pembangunan berbagai sumber daya buatan kecuali untuk lapangan terbang dan jalan kereta api.
- Kemiringan lereng antara 5-15%, menunjukkan daerah yang cukup miring. Wilayah dengan kemiringan ini masih memiliki kemampuan untuk pembangunan rekreasi umum, bangunan terstruktur, pembangunan daerah perkotaan, perumahan konvensional, jalan umum, dan kurang baik untuk pembangunan sistem septik tank, jalan raya, lapangan terbang, dan jalan kereta api.
- Kemiringan lereng 15-25%, menunjukkan daerah yang dengan kemiringan terjal. Kemiringan lereng dengan kemiringan ini apabila mempunyai tutupan lahan hutan dapat dikategorikan sebagai kawasan.



- Kemiringan lereng 25-40%, menunjukkan daerah dengan kemiringan sangat terjal. Pada daerah ini harus sudah diklasifikasikan sebagai kawasan lindung.
- Kemiringan lereng >40 menunjukkan daerah dengan fungsi sebagai kawasan lindung.

2.1.1.4. Morfologi Wilayah

Morfologi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu morfologi dataran/landai, bukit/perbukitan (bergelombang rendah-sedang) dan gunung/pegunungan (perbukitan terjal). Morfologi dataran rendah umumnya terdapat di daerah bagian tengah wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Morfologi perbukitan bergelombang rendah-sedang sebagian besar menempati daerah bagian barat Kabupaten. Wilayah perbukitan dan pegunungan terletak pada di bagian utara dan selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2.1.1.5. Geologi Wilayah

Secara geologis wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terbentuk pada zaman tersier dan kwarter oleh batuan granit, tufa andesit dan formasi andesit tua. Dari susunan batuan-batuan tersebut terkandung berbagai macam kekayaan alam yang potensial antara lain batubara, batu marmer, minyak bumi, batu kapur, emas, nikel, besi, intan, pasir, koral, dan lain-lainnya. Berdasarkan kondisi geologinya, jenis batuan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat pada Tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3
Geologi Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Kecamatan	Aluvium	Andesit Tua	Formasi Lahat Anggota Tufa Kikim	Formasi Palembang Anggota Bawah	Formasi Palembang Anggota Tengah	Tufa Ranau
1.	Banding Agung	0.00	0.00	64,738.06	0.00	0.00	22,167.94
2.	Mekakau Ilir						15,820.93
3.	Pulau Beringin						22,185.24
4.	Muaradua						551.04
5.	Kisam Tinggi	0.00	3,600.71	36,966.14	0.00	0.00	1,133.16
6.	Muaradua						20,506.96
7.	Buay Sandang						29,972.29
8.	Buay Runjung						2,184.97
9.	Simpang						22,015.38
10.	Buay Pemaca	0.00	0.00	31,725.36	0.00	3,449.62	36,277.02
Jumlah		5,155.79	28,280.87	303,749.44	17,765.85	23,627.11	172,814.94

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040



2.1.1.6. Jenis Tanah

Dilihat dari jenis tanahnya secara garis besar, jenis tanah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi jenis tanah andosol, podsolik, latosol, regosol, dan renzina. Di mana jenis tanah tersebut memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat menjadi suatu potensi maupun kendala dalam pemanfaatan lahan tertentu. Berikut adalah sifat-sifat tanah berdasarkan jenis tanahnya di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, adalah:

- Tanah Andosol, jenis tanah ini umumnya berwarna hitam, memiliki penampang yang berkembang, dengan horizon-A yang tebal, gembur dan kaya bahan organik. Sifat fisiknya baik, dengan kelulusan sedang. Sifat kimia sedang, peka terhadap erosi. Batuan asal adalah andesit, tufa andesit dan dasit. Di wilayah Indonesia pada umumnya, jenis tanah ini banyak terpakai untuk tanaman perdagangan karena kaya akan bahan organik, N dan K, tetapi miskin akan fosfor.
- Tanah Latosol, jenis tanah ini biasa disebut “laterit”. Penampang umumnya tebal, tanah atasnya mengandung beberapa persen bahan organik. Berwarna coklat, kuning, hingga kemerahan. Bersifat berbutir, teguh, mantap, mengandung kaolinit, bersifat tidak plastis, dan dapat diolah pertanian sepanjang tahun. Secara kimia tanah, jenis tanah ini miskin hara, pH rendah (4,5-5,0), unsur N miskin sehingga perlu pemupukan sempurna untuk pertanian. Jenis tanah ini bersifat meniris, tahan terhadap erosi. Jenis tanah ini cocok untuk tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, kebun karet, lada dan tegalan.
- Tanah Podsolik, jenis tanah ini bersifat gembur dan mempunyai perkembangan penampang. Cenderung tidak seberapa mantap dan teguh, peka terhadap pengikisan. Dari segi kimia, jenis tanah ini asam dan miskin, lebih asam dan lebih miskin dari tanah latosol. Untuk keperluan pertanian, jenis tanah ini perlu pemupukan lengkap dan tindak pengawetan. Untuk jenis tanah podsolik coklat biasanya dipakai untuk hutan lindung. Podsolik merah kuning cocok untuk persawahan, perladangan dan perkebunan Karet, Kopi dan Kelapa Sawit dengan perlakuan tambahan.
- Tanah Regosol, jenis tanah ini terbentuk dari bahan induk abu dan pasir vulkan intermedier. Bentuk wilayahnya berombak sampai bergunung. Tanah Regosol belum jelas menempatkan perbedaan horizon-horizon. tanah ini biasanya kasar, tanpa ada struktur tanah, konsistensi lepas sampai gembur dan keasaman tanah dengan pH sekitar 6-7. Dengan begitu, jenis tanah ini kurang baik untuk pertanian.



Jenis tanah di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Uu Selatan dapat dilihat pada Tabel II.4 berikut ini.

Tabel II.4

Jenis Tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Jenis Tanah	Lokasi (Kecamatan)
1.	Aluvial Gleik	Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Rawan, Buay Runjung, Buay Sandang Aji, Kisam Ilir, Mekakau Ilir, Muaradua, Pulau Beringin,
2.	Andosol Distrik	Buay Pemaca, Warkuk Ranau Selatan
3.	Andosol Eutrik	Sungai Are
4.	Andosol Litik	Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kisam Ilir, Mekakau Ilir, Muaradua Kisam, Sindang Danau, Sungai Are, Warkuk Ranau Selatan
5.	Andosol Umbrik	Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Sindang Danau, Sungai Are, Warkuk Ranau Selatan
6.	Gleisol Distrik	Banding Agung, Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Buay Runjung, Buay Sandang Aji, Kisam Ilir, Kisam Tinggi, Mekakau Ilir, Muaradua, Pulau Beringin, Simpang, Sindang Danau, Sungai Are, Warkuk Ranau Selatan
7.	Gleisol Fluvik	Buana Pemaca
8.	Kambisol Distrik	Banding Agung, Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Buay Rawan, Buay Runjung, Buay Sandang Aji, Kisam Ilir, Kisam Tinggi Mekakau Ilir, Muaradua, Muaradua Kisam, Pulau Beringin, Runjung Agung, Simpang, Sindang Danau, Sungai Are, Tiga Dihaji, Warkuk Ranau Selatan
9.	Kambisol Eutrik	Banding Agung, Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Buay Rawan, Buay Runjung, Buay Sandang Aji, Kisam Tinggi, Mekakau Ilir, Muaradua, Pulau Beringin, Runjung Agung, Sindang Danau, Tiga Dihaji, Warkuk Ranau Selatan
10.	Kambisol Gleik	Tengah, Buay Rawan, Buay Runjung, Buay Sandang Aji, Kisam Tinggi, Mekakau Ilir Muaradua, Muaradua Kisam, Pulau Beringin, Runjung Agung, Simpang, Tiga Dihaji, Warkuk Ranau Selatan
11.	Kambisol Litik	Banding Agung, Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Buay Rawan, Buay Runjung, Buay Sandang Aji, Kisam Ilir, Kisam Tinggi, Mekakau Ilir, Muaradua, Muaradua Kisam, Pulau Beringin, Runjung Agung, Simpang, Sindang Danau, Sungai Are, Tiga Dihaji
12.	Kambisol Oksik	Buay Sandang Aji, Kisam Ilir
13.	Litosol	Buay Pemaca
14.	Regosol Distrik	Buana Pemaca, Buay Sandang Aji, Muaradua, Simpang
15.	Regosol Eutrik	Pulau Beringi
16.	Singkapan Batuan	Banding Agung, Buay Pemaca, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Buay Sandang Aji, Kisam Ilir, Kisam Tinggi, Mekakau Ilir, Muaradua Kisam, Pulau Beringin, Sindang Danau, Sungai Are, Tiga Dihaji, Warkuk Ranau Selatan

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040



2.1.1.7. **Klimatologi**

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki iklim tropis dan basah, dengan variasi curah hujan tahunan antara 2500-3000 mm/th dan 3000-3500 mm/th. Berdasarkan kondisi curah hujan tahunan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat curah hujan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tergolong cukup tinggi. Secara umum wilayah dengan curah hujan tinggi akan mempunyai cadangan air hujan yang tinggi pula, yang dapat diatur untuk berbagai keperluan seperti waduk, irigasi, air minum, dan keperluan sehari-hari, pengisian air tanah, dan sebagainya. Sedangkan dibalik itu air hujan yang berlebihan dapat menimbulkan erosi yang besar, longsor tebing, banjir bandang, dan banjir (biasanya pengaruh banjir sering terasa di wilayah hilirnya).

2.1.1.8. **Hidrologi**

2.1.1.8.1. **Daerah Aliran Sungai**

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilalui oleh banyak sungai yang bermuara ke Sungai Komering. Sungai-sungai merupakan potensi untuk pengembangan irigasi guna mendukung kegiatan pengembangan pertanian di wilayah Ogan Komering Ulu Selatan. Selain itu juga keberadaan sungai-sungai tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk pengambilan sumber air baku (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan sub-sub DAS dari sub DAS Komering, Sub DAS Ogan, Sub DAS Mesuji Hulu, dan Sub DAS Lematang. Di mana sub DAS tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DAS Musi. Kondisi daerah aliran sungai dapat dilihat pada Tabel II.5 dan Tabel II.6 berikut ini.

Tabel II.5
Nama Sungai dan Panjang Sungai
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Nama Sungai		Panjang (km)	Nama Sungai		Panjang (km)
1.	Sungai Saka	60	12.	W. Telema	30
2.	A. Gilas	12	13.	Sungai Keruh	20
3.	A. Selulu	35	14.	Sungai Selabung	44
4.	Sungai Mangama	22	15.	W. Ruos	26
5.	Sungai Pilamasin	15	16.	W. Ngepah	10
6.	Sungai Giham	30	17.	Sungai Mekakau	40
7.	Sungai Tahmi	20	18.	A. Beangtai	15
8.	A. Seliam	9	19.	Sungai Kemu	35
9.	Sungai Furu	15	20.	A. Singau	23
10.	Sungai Imus	40	21.	A. Kisam	50
11.	A. Buyuk	25			

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040



Tabel II.6
Luas Daerah Aliran Sungai (DAS)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Nama Sungai		Luas (ha)	Nama Sungai		Luas (ha)
1.	Sungai Saka	6,000	16.	Sungai Ngepah	1,000
2.	Sungai Gilas	1,200	17.	Sungai Mekakau	4,000
3.	Sungai Selulu	3,500	18.	Seungai Beangtai	1,500
4.	Sungai Mangama	2,200	19.	Sungai Kemu	3,500
5.	Sungai Pilamasin	1,500	20.	Sungai Singau	2,300
6.	Sungai Giham	3,000	21.	Sungai Kisam	5,000
7.	Sungai Tahmi	2,000	22.	Sungai Luas Putih	1,500
8.	Sengai Seliam	9,000	23.	Sungai Luas Besar	2,000
9.	Sungai Furu	1,500	24.	Sungai Are	3,000
10.	Sungai Imus	4,000	25.	Sungai Asahan	1,500
11.	Sungai Buyuk	2,500	26.	Sungai Meleki	2,000
12.	Sungai Telema	3,000	27.	Sungai Singalaga	1,000
13.	Sungai Keruh	2,000	28.	Sungai Limping	1,000
14.	Sungai Selabung	4,400	29.	Sungai Keni	2,000
15.	Sungai Ruos	2,600			

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

2.1.1.8.2. Cekungan Air Tanah

Dalam undang-undang sumber daya air, daerah aliran air tanah disebut cekungan air tanah (CAT) yang didefinisikan sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumberdaya air selain air sungai dan air hujan. Cekungan air tanah berdasarkan Kepres Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia, terdapat cekungan air tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, meliputi:

- 1. Daerah Imbuhan Air Tanah untuk CAT Lintas Provinsi adalah:
 - a. CAT Muaroduo-Curup, meliputi:
 - 1) Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
 - 2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan meliputi Buay Runjung, Buay Sandang Aji, Kisam Ilir, Kisam Tinggi, Mekakau Ilir, Muaradua, Muaradua Kisam, Pulau Beringin, Runjung Agung, Simpang, Sindang Danau, Sungai Are, Tiga Dihaji.
 - b. CAT Metro-Kotabumi, meliputi:
 - 1) Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung
 - 2) Kecamatan Banding Agung, Buana Pemaca, Buay Pemaca, BPR Ranau Tengah, Buay Rawan, Buay Sandang Aji, Muaradua, Tiga Dihaji, Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.



- c. CAT Ranau, meliputi:
 - 1) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
 - 2) Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung
 - 3) Kecamatan Banding Agung, BPR Ranau Tengah, Buay Sandang Aji, Mekakau Ilir, Pulau Beringin, Sindang Danau, Tiga Dihaji, dan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
2. Daerah Imbuan Air Tanah untuk CAT Baturaja merupakan CAT lintas Kabupaten, meliputi :
 - a. Kecamatan Ulu Ogan dan Lengkiti di Kabupaten Ogan Komering Ulu
 - b. Kecamatan Buana Pemaca, dan Buay Pemaca, Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2.1.1.9. Tutupan Lahan

Apabila diamati dari pola tutupan lahan menunjukkan terdapat perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang mempengaruhi terhadap penataan pola ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kedepan. Tutupan Lahan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat pada Tabel II.7 berikut ini.

Tabel II.7
Tutupan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Tutupan Lahan	Luas (ha)
1.	Bendungan	1
2.	Danau/Situ	9,798
3.	Hutan Rimba	102,270
4.	Landasan Pacu	3
5.	Pasih/Bukit Pasir Darat	24
6.	Perkebunan/Kebun	230,053
7.	Permukiman dan Tempat Kegiatan	3,741
8.	Rawa	17
9.	Sawah	9,124
10.	Semak Belukar	66,775
11.	Sungai	1,830
12.	Tambak	1
13.	Tegalan/Ladang	14,050
Luas		437,687

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

2.1.1.10. Penggunaan Lahan

Secara garis besar pola pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Di mana sebagian besar pemanfaatannya didominasi oleh kawasan peruntukan budidaya, yaitu seluas 223.286 ha atau sekitar 51,01% dari luas total Kabupaten.



Tabel II.8
Penggunaan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Uraian	Luas (ha)	%
1.	Kawasan Peruntukan Lindung	179,203	40.94
	a. Kawasan hutan lindung	117,963	26.95
	b. Kawasan sempadan sungai	19,804	4.52
	c. Kawasan sempadan danau dan waduk	581	0.13
	d. Kawasan konservasi/suaka margasatwa	40,855	9.33
2.	Kawasan Peruntukan Budidaya	223,286	51.01
	a. Kawasan hutan produksi	17,967	4.10
	- Hutan produksi terbatas	10,247	2.34
	- Hutan produksi tetap	7,720	1.76
	b. Kawasan pertanian	205,319	46.91
	- Kawasan tanaman pangan	27,835	6.36
	- Kawasan hortikultura	29,342	6.70
	- Kawasan perkebunan	148,142	33.85
	Total	402,849	92.04

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki beberapa kawasan yang memiliki potensi bencana alam. Adapun bencana alam yang rawan terjadi adalah bencana gempa bumi, gerakan tanah/longsor, bencana banjir dan puting beliung. Kawasan potensi bencana alam ini membutuhkan perhatian khusus, agar dalam pengembangan kedepannya pun disertai upaya pengendalian pemanfaatan ruang serta mitigasi bencananya. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kawasan rawan bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2.1.2.1. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah/Longsor

Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah/batuan penyusun lereng. Penyebab longsoran dapat dibedakan menjadi penyebab yang berupa:

- Faktor pengontrol gangguan kestabilan lereng.
- Proses pemicu longsoran.

Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi (terutama kemiringan lereng), kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi untuk longsor, karena kondisi kemiringan lereng, batuan/tanah dan tata airnya, namun lereng tersebut belum akan longsor atau terganggu kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicu. Proses pemicu longsoran dapat berupa:



- Peningkatan kandungan air dalam lereng, sehingga terjadi akumulasi air yang merenggangkan ikatan antar butir tanah dan akhirnya mendorong butir-butir tanah untuk longsor. Peningkatan kandungan air ini sering disebabkan oleh meresapnya air hujan, air kolam/selokan yang bocor atau air sawah kedalam lereng.
- Getaran pada lereng akibat gempa bumi ataupun ledakan, penggalian, getaran alat/kendaraan. Gempa bumi pada tanah pasir dengan kandungan air sering mengakibatkan *liquefaction* (tanah kehilangan kekuatan geser dan daya dukung, yang diiringi dengan penggenangan tanah oleh air dari bawah tanah).
- Peningkatan beban yang melampaui daya dukung tanah atau kuat geser tanah. Beban yang berlebihan ini dapat berupa beban bangunan ataupun pohon-pohon yang terlalu rimbun dan rapat yang ditanam pada lereng lebih curam dari 40 derajat.
- Pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga

Dalam peta risiko bencana erosi/longsor yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), beberapa Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berpotensi mengalami bencana longsor, yaitu; Kecamatan Banding Agung, Muaradua, Muaradua Kisam, Pulau Beringin, Simpang, Buay Sandang Aji, Kisam Tinggi dan Mekakau Iilir. Wilayah potensi gerakan tanah Kabupaten dapat dilihat pada Tabel II.9 berikut ini.

Tabel II.9
Wilayah Potensi Gerakan Tanah

No.	Kecamatan	Potensi Gerakan Tanah
1.	Banding Agung	Menengah - Tinggi
2.	Muaradua	Menengah
3.	Muaradua Kisam	Menengah - Tinggi
4.	Pulau Beringin	Menengah - Tinggi

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

2.1.2.2. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Penyebab terjadinya gempa bumi.

1. Proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi
2. Aktivitas sesar di permukaan bumi
3. Pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuh tanah
4. Aktivitas gunung api
5. Ledakan Nuklir

Mekanisme perusakan terjadi karena energi getaran gempa dirambatkan ke seluruh bagian bumi. Di permukaan bumi, getaran tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan runtuhnya bangunan sehingga dapat menimbulkan korban jiwa. Getaran gempa juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuh batuan, dan kerusakan



tanah lainnya yang merusak permukiman penduduk. Gempa bumi juga menyebabkan bencana ikutan berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi serta banjir akibat runtuhnya bendungan maupun tanggul penahan lainnya. Posisi geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diantara 103°24'22.36"-104°22'8.72" Bujur Timur 4°12'58.36"-4°55'26.97" Lintang Selatan yang dekat dengan jalur sesar aktif Sumatera, menyebabkan daerah ini rawan terhadap gempa tektonik.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki tingkat resiko bencana gempa bumi yang tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu, mitigasi bencana untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana gempa bumi pun harus dipersiapkan.

2.1.2.3. Kawasan Rawan Banjir

Potensi bencana alam lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah bencana banjir. Kawasan yang rawan terhadap bencana banjir ini terdapat di Kecamatan Simpang dan Kecamatan Buay Sandang Aji. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki tingkat resiko bencana banjir yang rendah apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun begitu, mitigasi bencana untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana pun tetap harus dipersiapkan.

2.1.2.4. Kawasan Rawan Puting Beliung

Selain bencana tanah longsor, banjir, dan gempa bumi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pun rawan akan bencana angin puting beliung. Beberapa kawasan rawan puting beliung terdapat di Kecamatan Sungai Are, Kisam Tinggi, dan Simpang.

2.1.2.5. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdapat di Kecamatan Muaradua, Buana Pemaca, Buay Sandang Aji, dan Buay Rawan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah membentuk Satuan Tugas Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, yang mana Satgas ini sebagai motor penggerak dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.



Tabel II.10
Kejadian Bencana Alam Menurut Jenisnya
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016

No.	Nama Kecamatan	Kejadian Bencana							Jumlah
		Banjir	Tanah Longsor	Tanah Longsor dan Banjir	Kebakaran	Puting Beliung	Keracunan	Banjir Bandang	
1.	Mekakau Ilir	1	3	-	-	-	-	-	4
2.	Banding Agung	-	2	-	-	-	-	-	2
3.	Warkuk Ranau Selatan	-	1	-	1	-	-	-	2
4.	BPR Ranau Tengah	-	1	-	1	-	-	-	2
5.	Buay Pemaca	-	2	-	-	-	-	-	2
6.	Simpang	-	-	-	2	1	-	1	4
7.	Buana Pemaca	-	3	-	-	-	-	2	5
8.	Muaradua	1	6	-	-	-	-	1	8
9.	Buay Rawan	-	1	1	1	-	-	-	3
10.	Buay Sandang Aji	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Tiga Dihaji	1	1	-	-	-	-	-	2
12.	Buay Runjung	-	3	-	-	-	-	-	3
13.	Runjung Agung	1	-	-	1	-	-	-	2
14.	Kisam Tinggi	-	-	1	-	-	-	-	1
15.	Muaradua Kisam	-	4	1	-	-	-	-	5
16.	Kisam Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Pulau Beringin	-	3	-	-	-	1	-	4
18.	Sindang Danau	-	2	-	-	-	-	1	3
19.	Sungai Are	-	2	-	-	-	-	-	2
Total		4	34	3	6	1	1	5	54

Sumber: BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021



Tabel II.11
Kejadian Bencana Alam Menurut Jenisnya
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017

No.	Nama Kecamatan	Kejadian Bencana							Jumlah
		Banjir	Tanah Longsor	Tanah Longsor dan Banjir	Kebakaran	Puting Beliung	Keracunan	Banjir Bandang	
1.	Mekakau Ilir	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	Banding Agung	-	1	-	-	-	-	1	2
3.	Warkuk Ranau Selatan	-	1	-	-	-	-	-	1
4.	BPR Ranau Tengah	1	1	-	1	-	-	1	4
5.	Buay Pemaca	-	-	-	2	-	-	-	2
6.	Simpang	-	-	-	-	1	-	-	1
7.	Buana Pemaca	-	1	-	1	-	-	-	2
8.	Muaradua	-	-	-	3	-	-	-	3
9.	Buay Rawan	-	-	-	2	-	-	-	2
10.	Buay Sandang Aji	-	1	-	4	-	-	-	5
11.	Tiga Dihaji	-	-	-	-	-	-	-	0
12.	Buay Runjung	-	-	-	1	-	-	-	1
13.	Runjung Agung	-	1	-	-	-	-	-	1
14.	Kisam Tinggi	-	-	-	1	-	-	-	1
15.	Muaradua Kisam	-	-	-	-	1	-	-	1
16.	Kisam Ilir	-	-	-	-	-	-	-	0
17.	Pulau Beringin	-	2	-	-	-	-	-	2
18.	Sindang Danau	-	1	-	1	-	-	-	2
19.	Sungai Are	-	3	-	-	-	-	2	5
Total		1	13	0	16	2	0	4	36

Sumber: BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021



Tabel II.12
Kejadian Bencana Alam Menurut Jenisnya
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018

No.	Nama Kecamatan	Kejadian Bencana							Jumlah
		Banjir	Tanah Longsor	Tanah Longsor dan Banjir	Kebakaran	Puting Beliung	Keracunan	Banjir Bandang	
1.	Mekakau Ilir	-	1	-	1	-	-	-	2
2.	Banding Agung	-	-	-	3	-	1	-	4
3.	Warkuk Ranau Selatan	-	-	-	3	-	-	-	3
4.	BPR Ranau Tengah	-	-	-	5	-	-	-	5
5.	Buay Pemaca	-	-	-	1	-	-	-	1
6.	Simpang	-	-	-	1	-	-	-	1
7.	Buana Pemaca	-	1	-	2	-	-	-	3
8.	Muaradua	-	1	-	1	-	-	1	3
9.	Buay Rawan	-	-	-	1	-	-	-	1
10.	Buay Sandang Aji	-	1	-	3	-	-	-	4
11.	Tiga Dihaji	-	1	-	-	-	-	-	1
12.	Buay Runjung	-	1	-	-	-	-	-	1
13.	Runjung Agung	-	1	-	-	-	-	-	1
14.	Kisam Tinggi	-	1	-	-	-	-	-	1
15.	Muaradua Kisam	-	1	-	1	-	-	-	2
16.	Kisam Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Pulau Beringin	-	2	-	-	-	-	-	2
18.	Sindang Danau	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Sungai Are	-	-	-	-	-	-	1	1
Total		0	11	0	22	0	1	2	36

Sumber: BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021



Tabel II.13
Kejadian Bencana Alam Menurut Jenisnya
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019

No.	Nama Kecamatan	Kejadian Bencana							Jumlah
		Banjir	Tanah Longsor	Tanah Longsor dan Banjir	Kebakaran	Puting Beliung	Keracunan	Banjir Bandang	
1.	Mekakau Ilir	-	-	-	-	-	-	-	0
2.	Banding Agung	-	3	-	-	-	-	-	3
3.	Warkuk Ranau Selatan	1	-	-	1	-	-	-	2
4.	BPR Ranau Tengah	-	1	-	1	-	-	-	2
5.	Buay Pemaca	1	-	1	6	-	-	-	8
6.	Simpang	-	-	-	-	2	-	-	2
7.	Buana Pemaca	-	1	-	4	-	-	-	6
8.	Muaradua	1	3	-	4	-	-	1	10
9.	Buay Rawan	-	-	-	2	-	-	-	2
10.	Buay Sandang Aji	-	-	-	1	-	-	-	2
11.	Tiga Dihaji	-	-	-	-	-	-	-	0
12.	Buay Runjung	-	-	-	1	-	-	-	1
13.	Runjung Agung	-	-	-	1	-	-	-	1
14.	Kisam Tinggi	-	3	-	4	-	-	-	7
15.	Muaradua Kisam	-	3	-	2	-	-	-	5
16.	Kisam Ilir	-	-	-	-	-	-	-	0
17.	Pulau Beringin	-	1	-	-	-	-	-	1
18.	Sindang Danau	-	-	-	-	-	-	-	0
19.	Sungai Are	1	-	-	-	-	-	-	1
Total		4	15	1	27	2	0	1	53

Sumber: BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021



Tabel II.14
Kejadian Bencana Alam Menurut Jenisnya
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Kejadian Bencana								Jumlah
		Banjir	Tanah Longsor	Tanah Longsor dan Banjir	Kebakaran	Puting Beliung	Keracunan	Banjir Bandang	Karhutla	
1.	Mekakau Ilir	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Banding Agung	-	3	-	1	-	-	-	-	4
3.	Warkuk Ranau Selatan	-	2	-	-	-	-	-	-	2
4.	BPR Ranau Tengah	-	2	-	1	-	-	-	-	3
5.	Buay Pemaca	-	-	-	1	-	-	-	-	1
6.	Simpang	-	-	-	-	-	-	1	-	1
7.	Buana Pemaca	-	1	-	-	-	-	1	-	2
8.	Muaradua	1	1	-	1	-	-	2	-	5
9.	Buay Rawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Buay Sandang Aji	-	2	-	1	-	-	1	-	4
11.	Tiga Dihaji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Buay Runjung	-	-	-	4	-	-	-	-	4
13.	Runjung Agung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kisam Tinggi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
15.	Muaradua Kisam	-	1	-	1	-	-	-	-	2
16.	Kisam Ilir	-	-	-	-	-	-	1	-	1
17.	Pulau Beringin	-	3	-	-	-	-	-	-	3
18.	Sindang Danau	-	-	-	2	-	-	-	-	2
19.	Sungai Are	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		1	17	-	12	-	-	6	-	36

Sumber: BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021



2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040, kawasan peruntukan budidaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdiri dari:

1. Kawasan Hutan Produksi

Hutan produksi di Kabupaten Ogan komering ulu Selatan terdiri dari hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Luas kawasan hutan produksi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8094/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Tahun 2017. Untuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di bawah unit pengelolaan kawasan hutan oleh KPH Wilayah

a. Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan produksi terbatas adalah hutan produksi di mana eksploitasinya dengan cara tebang pilih. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8094/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Tahun 2017, diketahui bahwa luas kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah ± 10.247 ha. Kawasan hutan produksi terbatas terletak di Kecamatan Buay Pemaca dan Kecamatan Sungai Are.

b. Hutan Produksi Tetap

Kawasan hutan produksi tetap merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis. Tujuan dari kawasan hutan produksi ini adalah untuk mengekploitasi tanaman yang ada di dalam kawasan hutan dengan tidak merubah fungsi kawasan tersebut. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8094/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Tahun 2017, diketahui bahwa luas kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah ± 7.720 ha. Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak di Kecamatan Buana Pemaca dan Buay Pemaca.

2. Kawasan Pertanian

a. Kawasan Tanaman Pangan

Rencana pengembangan kawasan budidaya tanaman pangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diutamakan pada



komoditi padi sawah dan palawija (jagung). Adapun lokasi yang memiliki potensi pengembangan tanaman pangan adalah, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan komoditi padi sawah di Kecamatan Muaradua Kisam, Buay Pemaca, Buay Runjung, Pulau Beringin, Sindang Danau, Buay Sandang Aji, BPR Ranau Tengah, Kisam Ilir, Mekakau Ilir, Warkuk Ranau Selatan, Muaradua, Runjung Agung, Banding Agung, Buana Pemaca, Tiga Dihaji, Sungai Are, Kisam Tinggi, Simpang, dan Buay Rawan.
- 2) Pengembangan komoditi palawija di Kecamatan Muaradua, Simpang, Buay Rawan, Buay Sandang Aji, Tiga Dihaji, Buay Pemaca, Buana Pemaca, Runjung Agung, Banding Agung dan BPR Ranau Tengah.

Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan tersebar di setiap Kecamatan, secara keseluruhan luas kawasan pertanian tanaman pangan ±27.835 ha. Adapun masing-masing luas kawasan pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada Tabel II.15 berikut ini.

Tabel II.15
Rencana Kawasan Tanaman Pangan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Kecamatan	Tanaman Pangan (ha)	%
1.	Banding Agung	259	0.93
2.	Buana Pemaca	567	2.04
3.	Buay Pemaca	549	1.97
4.	BPR Ranau Tengah	715	2.57
5.	Buay Rawan	846	3.04
6.	Buay Runjung	6,560	23.57
7.	Buay Sandang Aji	3,384	12.16
8.	Kisam Ilir	766	2.75
9.	Kisam Tinggi	344	1.24
10.	Mekakau Ilir	1,438	5.17
11.	Muaradua	1,452	5.22
12.	Muaradua Kisam	2,355	8.46
13.	Pulau Beringin	666	2.39
14.	Runjung Agung	2,876	10.33
15.	Simpang	2,815	10.11
16.	Sindang Danau	386	1.39
17.	Sungai Are	58	0.21
18.	Tiga Dihaji	1,493	5.36
19.	Warkuk Ranau Selatan	306	1.10
Total		27,835	100.00

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040



Dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilaksanakan pengendalian fungsi dan pemantapan lahan pertanian pangan tanaman pangan melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas ±8,710 ha.

b. Kawasan Hortikultura

Arahan pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan seluas ±29.342 ha dengan arahan pengembangan komoditas hortikultura sebagai berikut:

- 1) Pengembangan komoditi sayuran di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Pulau Beringin, Banding Agung, BPR Ranau Tengah, Muaradua Kisam, dang Danau, Sungai Are, Kisam Ilir dan Mekakau Ilir
- 2) Pengembangan komoditi buah-buahan di Kecamatan Banding Agung, BPR Ranau Tengah, Buay Pemaca, Buay Rawan, Muaradua, Buay Sandang Aji, Simpang, dan Buana Pemaca.

Rencana kawasan hortikultura dapat dilihat pada Tabel II.16 berikut ini.

Tabel II.16
Rencana Kawasan Hortikultura
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Kecamatan	Hortikultura (ha)	%
1.	Banding Agung	1,543	5.26
2.	BPR Ranau Tengah	2,435	8.30
3.	Buay Runjung	123	0.42
4.	Buay Sandang Aji	499	1.70
5.	Kisam Ilir	326	1.11
6.	Kisam Tinggi	7,671	26.14
7.	Mekakau Ilir	3,780	12.88
8.	Muaradua Kisam	1,966	6.70
9.	Pulau Beringin	5,305	18.08
10.	Sindang Danau	1,010	3.44
11.	Sungai Are	927	3.16
12.	Tiga Dihaji	381	1.30
13.	Warkuk Ranau Selatan	3,377	11.51
Total		29,342	100.00

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

c. Kawasan Perkebunan

Dari hasil tanaman perkebunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat terlihat bahwa komoditi unggulan yang cukup dominan adalah kopi, lada, karet, kelapa, kelapa sawit dan kakao yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Rencana pengembangan kawasan perkebunan ini ±148,142 ha yang tersebar di setiap Kecamatan. Rencana kawasan perkebunan dapat dilihat pada Tabel II.17 berikut ini.



Tabel II.17
Rencana Kawasan Perkebunan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Kecamatan	Perkebunan (ha)	%
1.	Banding Agung	9,490	6.41
2.	Buana Pemaca	11,959	8.07
3.	Buay Pemaca	18,601	12.56
4.	BPR Ranau Tengah	5,823	3.93
5.	Buay Rawan	10,294	6.95
6.	Buay Runjung	322	0.22
7.	Buay Sandang Aji	14,927	10.08
8.	Kisam Ilir	3,870	2.61
9.	Kisam Tinggi	12,149	8.20
10.	Mekakau Ilir	11,263	7.60
11.	Muaradua	6,452	4.36
12.	Muaradua Kisam	7,628	5.15
13.	Pulau Beringin	4,680	3.16
14.	Runjung Agung	7,922	5.35
15.	Simpang	2,397	1.62
16.	Sindang Danau	558	0.38
17.	Sungai Are	910	0.61
18.	Tiga Dihaji	12,130	8.19
19.	Warkuk Ranau Selatan	6,768	4.57
Total		148,142	100.00

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

2.1.4. Kondisi Demografi

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan semakin meningkat dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2020 jumlah penduduk mencapai 416.797 jiwa. Sebagian besar penduduk berdomisili di Kecamatan Muaradua dengan jumlah penduduk yang tinggal sebanyak 50.997 jiwa dan disusul dengan Kecamatan Buay Pemaca yang ditinggali penduduk sebanyak 44.995 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Kisam Ilir dengan penduduk yang tinggal sebanyak 8.098 jiwa.



Tabel II.18
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015-2020

No.	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Muaradua	50,607	44,825	46,078	50,089	50,721	50,997
2.	Pulau Beringin	32,513	31,455	31,393	30,738	30,687	30,925
3.	Banding Agung	26,915	25,829	25,578	26,239	25,993	26,118
4.	Muaradua Kisam	21,616	20,948	20,769	20,643	20,587	20,734
5.	Simpang	17,252	17,305	17,449	18,004	18,064	18,598
6.	Buay Sandang Aji	23,615	21,016	20,991	22,503	22,427	22,435
7.	Buay Runjung	14,480	13,658	13,367	13,290	13,303	13,230
8.	Mekakau Ilir	25,237	24,383	24,128	23,798	24,001	24,246
9.	Buay Pemaca	42,802	46,458	46,594	44,915	45,193	44,995
10.	Kisam Tingi	20,272	20,719	20,692	20,102	20,024	19,940
11.	Kisam Ilir	8,004	6,762	7,866	8,025	8,077	8,098
12.	BPR. Ranau Tengah	25,872	26,300	26,294	26,387	26,530	26,605
13.	Warkuk Ranau Selatan	23,184	26,079	25,890	25,195	25,393	25,249
14.	Runjung Agung	13,372	14,575	14,159	14,613	14,579	14,316
15.	Sungai Are	10,301	11,336	11,396	11,407	11,594	11,729
16.	Sindang Danau	10,270	11,573	11,288	11,463	11,570	11,586
17.	Buana Pemaca	11,129	15,478	15,552	16,286	16,458	16,589
18.	Tiga Dihaji	13,963	11,811	12,311	11,408	11,410	11,277
19.	Buay Rawan	15,498	17,341	18,508	18,247	18,496	19,080
Jumlah		406,902	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

Penambahan jumlah penduduk yang terjadi mengindikasikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pada tahun 2020, pertumbuhan penduduk meningkat menjadi sebesar 0,41% dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,21%. Jika dirunut lebih dalam, maka angka tersebut disebabkan oleh kenaikan penduduk pada beberapa Kecamatan, di samping ada yang pertumbuhan negatif. Pertumbuhan penduduk paling tinggi terjadi di Kecamatan Buay Rawan dengan pertumbuhan penduduk sebesar 3,16% dan disusul oleh pertumbuhan penduduk Kecamatan Simpang sebesar 2,96%. Sedangkan wilayah dengan pertumbuhan penduduk negatif terbesar yakni Kecamatan Runjung Agung sebesar -1,80% dan Kecamatan Tiga Dihaji sebesar -1,17%. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel II.19 berikut ini.



Tabel II.19
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Nama Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Muaradua	(11.43)	2.80	8.70	1.26	0.54
2.	Pulau Beringin	(3.25	(0.20)	(2.09)	(0.17)	0.78
3.	Banding Agung	(4.03	(0.98)	2.58	(0.94)	0.48
4.	Muaradua Kisam	(3.09)	(0.85)	(0.61)	(0.27)	0.71
5.	Simpang	0.31	0.83	3.18	0.33	2.96
6.	Buay Sandang Aji	(11.01)	(0.12)	7.20	(0.34)	0.04
7.	Buay Runjung	(5.68)	(2.13)	(0.58)	0.10	(0.55)
8.	Mekakau Ilir	(3.38)	(1.05)	(1.37)	0.85	1.02
9.	Buay Pemaca	8.54	0.29	(3.60)	0.62	(0.44)
10.	Kisam Tinggi	2.21	(0.13)	(2.85)	(0.39)	(0.42)
11.	Kisam Ilir	(15.52)	16.33	2.02	0.65	0.26
12.	BPR Ranau Tengah	1.65	(0.02)	0.35	0.54	0.28
13.	Warkuk Ranau Selatan	12.49	(0.72)	(2.68)	0.79	(0.57)
14.	Runjung Agung	9.00	(2.28)	3.21	(0.23)	(1.80)
15.	Sungai Are	10.05	0.53	0.10	1.64	1.16
16.	Sindang Danau	12.69	(2.46)	1.55	0.93	0.14
17.	Buana Pemaca	39.08	0.48	4.72	1.06	0.80
18.	Tiga Dihaji	(15.41)	4.23	(7.33)	0.02	(1.17)
19.	Buay Rawan	11.89	6.74	(1.41)	1.36	3.16
OKU Selatan		0.23	0.60	0.96	0.21	0.41

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 216.826 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 199.971 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, maka didapatkan angka sex ratio sebesar 108 yang mengindikasikan bahwa diantara 100 perempuan terdapat 108 laki-laki.

Tabel II.20
Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Nama Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Muaradua	10.99	11.23	12.31	12.22	12.24
2.	Pulau Beringin	7.71	7.65	7.42	7.39	7.42
3.	Banding Agung	6.33	6.23	6.33	6.26	6.27
4.	Muaradua Kisam	5.14	5.06	4.98	4.96	4.97
5.	Simpang	4.24	4.25	4.35	4.35	4.46
6.	Buay Sandang Aji	5.15	5.12	5.43	5.40	5.38
7.	Buay Runjung	3.35	3.26	3.21	3.20	3.17
8.	Mekakau Ilir	5.98	5.88	5.74	5.78	5.82
9.	Buay Pemaca	11.39	11.36	10.84	10.89	10.80
10.	Kisam Tinggi	5.08	5.04	4.85	4.82	4.78
11.	Kisam Ilir	1.66	1.92	1.94	1.95	1.94
12.	BPR Ranau Tengah	6.45	6.41	6.37	6.39	6.38
13.	Warkuk Ranau Selatan	6.39	6.31	6.08	6.12	6.06
14.	Runjung Agung	3.57	3.45	3.53	3.51	3.43
15.	Sungai Are	2.78	2.78	2.75	2.79	2.81
16.	Sindang Danau	2.84	2.75	2.77	2.79	2.78
17.	Buana Pemaca	3.80	3.79	3.93	3.96	3.98
18.	Tiga Dihaji	2.90	3.00	2.75	2.75	2.71
19.	Buay Rawan	4.25	4.51	4.40	4.46	4.58
OKU Selatan		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021



Tabel II.21
Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Laki-Laki		Perempuan		L+P	
		N	%	N	%	N	%
1.	Muaradua	26,170	12.07	24,827	12.42	50,997	12.24
2.	Pulau Beringin	15,862	7.32	15,063	7.53	30,925	7.42
3.	Banding Agung	13,512	6.23	12,606	6.30	26,118	6.27
4.	Muaradua Kisam	10,873	5.01	9,861	4.93	20,734	4.97
5.	Simpang	9,629	4.44	8,969	4.49	18,598	4.46
6.	Buay Sandang Aji	11,730	5.41	10,705	5.35	22,435	5.38
7.	Buay Runjung	6,919	3.19	6,361	3.18	13,230	3.17
8.	Mekakau Ilir	12,639	5.83	11,607	5.80	24,246	5.82
9.	Buay Pemaca	23,605	10.89	21,390	10.70	44,995	10.80
10.	Kisam Tingi	10,506	4.85	9,434	4.72	19,940	4.78
11.	Kisam Ilir	4,183	1.93	3,915	1.96	8,098	1.94
12.	BPR. Ranau Tengah	13,889	6.41	12,716	6.36	26,605	6.38
13.	Warkuk Ranau Selatan	13,090	6.04	12,159	6.08	25,249	6.06
14.	Runjung Agung	7,452	3.44	6,864	3.43	14,316	3.43
15.	Sungai Are	6,172	2.85	5,557	2.78	11,729	2.81
16.	Sindang Danau	6,004	2.77	5,582	2.79	11,586	2.78
17.	Buana Pemaca	8,764	4.04	7,825	3.91	16,589	3.98
18.	Tiga Dihaji	5,957	2.75	5,320	2.66	11,277	2.71
19.	Buay Rawan	9,870	4.55	9,210	4.61	19,080	4.58
Total		216,826	100.00	199,971	100.00	416,797	100.00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

Secara umum, kepadatan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 76 jiwa/km² yang artinya terdapat 76 jiwa yang tinggal dalam cakupan 1 (satu) km². Wilayah paling padat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Kecamatan Muaradua dengan kepadatan penduduk sebesar 195 jiwa/km² dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebesar 105 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sungai Are dengan jumlah penduduk yang tinggal dalam 1 (satu) km² sebanyak 40 jiwa.

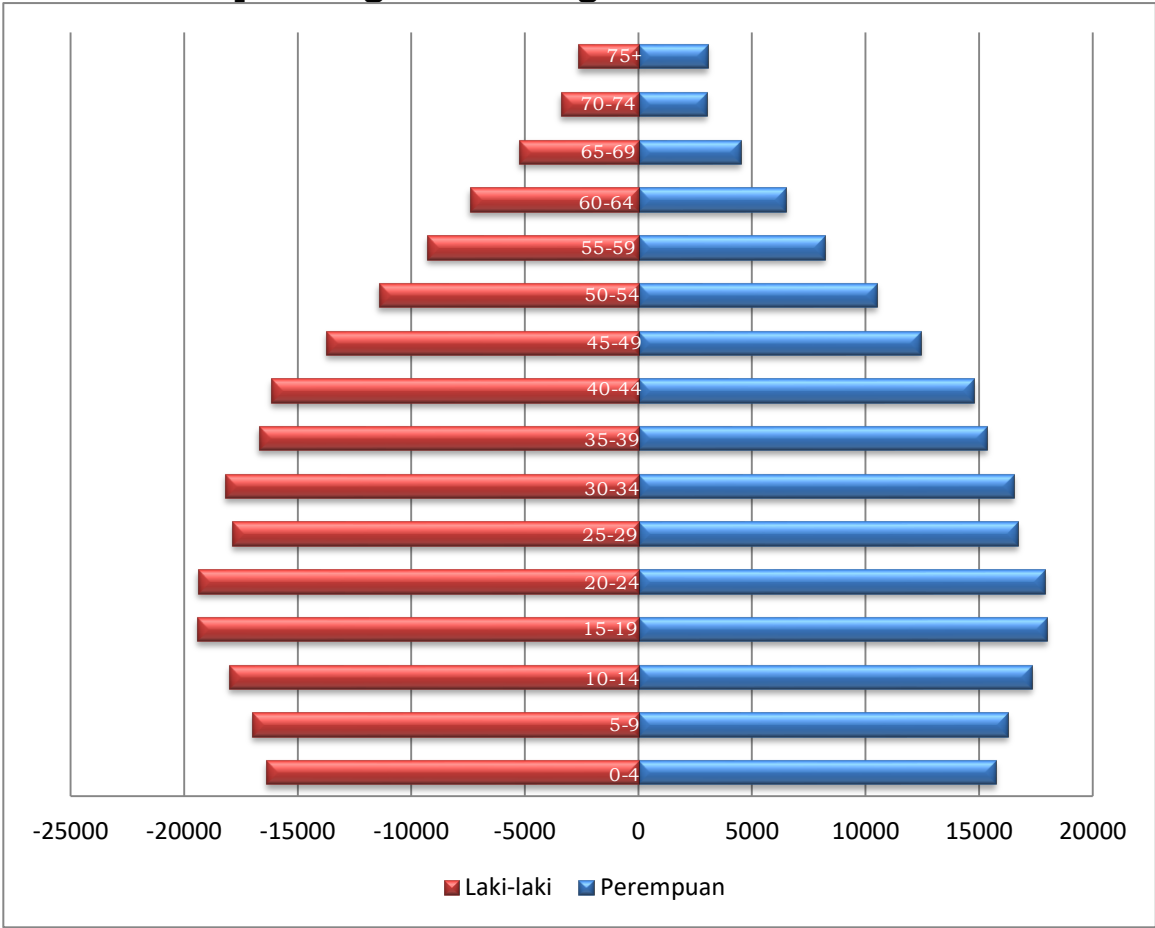


Tabel II.22
Kepadatan Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Nama Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Muaradua	171	176	195	194	195
2.	Pulau Beringin	66	66	65	64	65
3.	Banding Agung	93	93	95	94	95
4.	Muaradua Kisam	95	94	94	94	94
5.	Simpang	51	51	53	53	54
6.	Buay Sandang Aji	47	47	50	50	50
7.	Buay Runjung	80	78	78	78	77
8.	Mekakau Ilir	93	92	91	92	93
9.	Buay Pemaca	65	65	63	63	63
10.	Kisam Tinggi	50	50	48	48	48
11.	Kisam Ilir	50	58	59	59	60
12.	BPR Ranau Tengah	74	74	75	75	75
13.	Warkuk Ranau Selatan	109	108	105	106	105
14.	Runjung Agung	93	90	93	93	91
15.	Sungai Are	38	38	38	39	40
16.	Sindang Danau	55	54	55	55	55
17.	Buana Pemaca	81	82	86	87	87
18.	Tiga Dihaji	77	80	74	74	73
19.	Buay Rawan	104	111	109	111	114
OKU Selatan		74	75	75	76	76

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

Gambar II.2
Piramida Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021



Dalam analisis demografi, terdapat analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk, yang dapat digunakan, baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program kependudukan selama ini (utamanya keluarga berencana).

Jika dilihat dari persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dalam bentuk piramida penduduk, penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berada pada usia muda cukup banyak, di mana pada umumnya masih memiliki ketergantungan tinggi, memerlukan biaya pendidikan dan belum produktif dalam bekerja. Selain itu, penduduk usia anak-anak juga cukup tinggi yang mengindikasikan besarnya potensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Sehingga perlu adanya program yang mengarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan visi pembangunan (utamanya jangka panjang).

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat akan menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ini akan terlihat sebuah “potret kehidupan” masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta analisis dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.



Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur Perekonomian Wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, Indeks Gini hingga Pendapatan Regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Nilai tambah produk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang terlihat dari kenaikan PDRB dari 7,01 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 8,98 triliun rupiah pada tahun 2020. Angka ini tentu saja capaian positif dalam perekonomian makro daerah yang diharapkan akan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.



Tabel II.23
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,354.13	2,477.69	2,580.39	2,733.33	2,790.48
B	Pertambangan dan penggalian	126.98	133.57	146.57	159.13	160.91
C	Industri pengolahan	493.00	570.52	624.74	699.05	712.98
D	Pengadaan listrik dan gas	5.38	6.77	7.28	7.83	8.77
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2.62	3.25	3.66	4.11	4.44
F	Konstruksi	1,154.27	1,287.98	1,418.98	1,509.98	1,512.80
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	1,474.84	1,627.25	1,777.04	2,002.74	2,019.14
H	Transportasi dan pergudangan	57.77	68.60	76.99	83.49	81.73
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	65.04	72.79	82.31	96.81	99.19
J	Informasi dan komunikasi	39.02	46.88	54.15	61.47	68.77
K	Jasa keuangan dan asuransi	69.79	74.30	78.34	80.86	81.66
L	Real estate	312.63	336.45	378.66	425.97	440.83
MN	Jasa perusahaan	1.54	1.80	2.11	2.39	2.43
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	418.83	408.59	410.00	416.60	432.90
P	Jasa pendidikan	308.35	328.68	338.23	347.33	369.50
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	81.41	91.79	95.64	106.24	116.87
RSTU	Jasa lainnya	49.02	55.23	61.37	68.37	72.36
Produk Domestik Regional Bruto		7,014.61	7,592.14	8,136.43	8,795.70	8,975.76

*angka sementara

**angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021



Tabel II.24
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,819.79	1,878.20	1,933.02	2,009.94	2,021.02
B	Pertambangan dan penggalian	91.25	95.92	102.23	109.40	109.25
C	Industri pengolahan	344.13	374.44	396.82	433.66	430.01
D	Pengadaan listrik dan gas	2.62	2.83	3.03	3.31	3.64
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1.50	1.65	1.80	1.98	2.09
F	Konstruksi	767.37	819.66	883.88	931.39	931.13
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	896.53	914.55	976.16	1,038.90	1,028.51
H	Transportasi dan pergudangan	40.54	40.75	43.74	46.47	44.81
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	38.81	41.51	44.97	50.46	50.18
J	Informasi dan komunikasi	26.68	28.99	32.13	35.34	38.81
K	Jasa keuangan dan asuransi	50.55	51.56	52.75	53.31	53.92
L	Real estate	247.78	264.89	283.48	303.80	312.55
MN	Jasa perusahaan	1.15	1.28	1.40	1.49	1.46
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	289.18	304.78	315.38	320.07	322.58
P	Jasa pendidikan	228.98	242.01	248.88	246.87	251.72
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	60.68	64.37	66.58	70.98	75.49
RSTU	Jasa lainnya	44.03	47.67	50.32	53.20	54.73
Produk Domestik Regional Bruto		4,951.56	5,175.05	5,436.56	5,710.53	5,731.91

*angka sementara

**angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021



Struktur ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara umum dapat dilihat dari Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di mana pada tahun 2020 memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah sebesar 31,09%. Selain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor lain yang memiliki dominasi cukup tinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi kendaraan bermotor (22,50%) dan sektor konstruksi (16,85%). Sedangkan sektor yang minim kontribusi adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan sektor jasa perusahaan dengan kontribusi perekonomian sebesar 0,03%.



Tabel II.25
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020 (persen)

No	Sektor	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019*		Tahun 2020**	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	33.56	36.75	32.63	36.29	31.71	35.56	31.08	35.20	31.09	35.26
B	Pertambangan dan penggalian	1.81	1.84	1.76	1.85	1.80	1.88	1.81	1.92	1.79	1.91
C	Industri pengolahan	7.03	6.95	7.51	7.24	7.68	7.30	7.95	7.59	7.94	7.50
D	Pengadaan listrik dan gas	0.08	0.05	0.09	0.05	0.09	0.06	0.09	0.06	0.10	0.06
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03	0.05	0.04
F	Konstruksi	16.46	15.50	16.96	15.84	17.44	16.26	17.17	16.31	16.85	16.24
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	21.03	18.11	21.43	17.67	21.84	17.96	22.77	18.19	22.50	17.94
H	Transportasi dan pergudangan	0.82	0.82	0.90	0.79	0.95	0.80	0.95	0.81	0.91	0.78
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0.93	0.78	0.96	0.80	1.01	0.83	1.10	0.88	1.11	0.88
J	Informasi dan komunikasi	0.56	0.54	0.62	0.56	0.67	0.59	0.70	0.62	0.77	0.68
K	Jasa keuangan dan asuransi	0.99	1.02	0.98	1.00	0.96	0.97	0.92	0.93	0.91	0.94
L	Real estate	4.46	5.00	4.43	5.12	4.65	5.21	4.84	5.32	4.91	5.45
M,N	Jasa perusahaan	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	5.97	5.84	5.38	5.89	5.04	5.80	4.74	5.60	4.82	5.63
P	Jasa pendidikan	4.40	4.62	4.33	4.68	4.16	4.58	3.95	4.32	4.12	4.39
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.16	1.23	1.21	1.24	1.18	1.22	1.21	1.24	1.30	1.32
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.70	0.89	0.73	0.92	0.75	0.93	0.78	0.93	0.81	0.95
Total		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*angka sementara

**angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021



Secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup ekstrim, yaitu dari 5,04% pada tahun 2019 menjadi 0,37% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan terjadinya pandemi *Covid-19* yang menghambat beberapa kegiatan ekonomi pada tahun 2020.

Tabel II.26
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015-2020

No.	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2.13	3.04	3.21	2.92	3.98	0.55
B	Pertambangan dan penggalian	7.18	1.90	5.12	6.58	7.01	-0.14
C	Industri pengolahan	2.45	4.29	8.81	5.98	9.28	-0.83
D	Pengadaan listrik dan gas	11.43	20.51	8.10	7.06	9.26	10.08
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	8.69	4.14	10.01	9.47	9.98	5.25
F	Konstruksi	4.35	6.52	6.81	7.83	5.38	-0.03
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	10.49	7.61	2.01	6.74	6.43	-1.00
H	Transportasi dan pergudangan	4.81	4.47	0.52	7.33	6.25	-3.58
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	8.58	9.96	6.96	8.32	12.21	-0.54
J	Informasi dan komunikasi	8.76	8.81	8.66	10.86	9.98	9.83
K	Jasa keuangan dan asuransi	5.33	4.06	2.01	2.30	1.07	1.15
L	Real estate	4.09	8.26	6.90	7.02	7.17	2.88
M,N	Jasa perusahaan	5.13	12.71	11.27	8.88	6.44	-2.13
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3.46	3.76	5.39	3.48	1.49	0.78
P	Jasa pendidikan	6.60	8.99	5.69	2.84	-0.81	1.96
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3.61	5.72	6.08	3.44	6.61	6.35
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.75	6.30	8.27	5.56	5.72	2.87
Produk Domestik Regional Bruto		4.54	5.19	4.51	5.05	5.04	0.37

*angka sementara

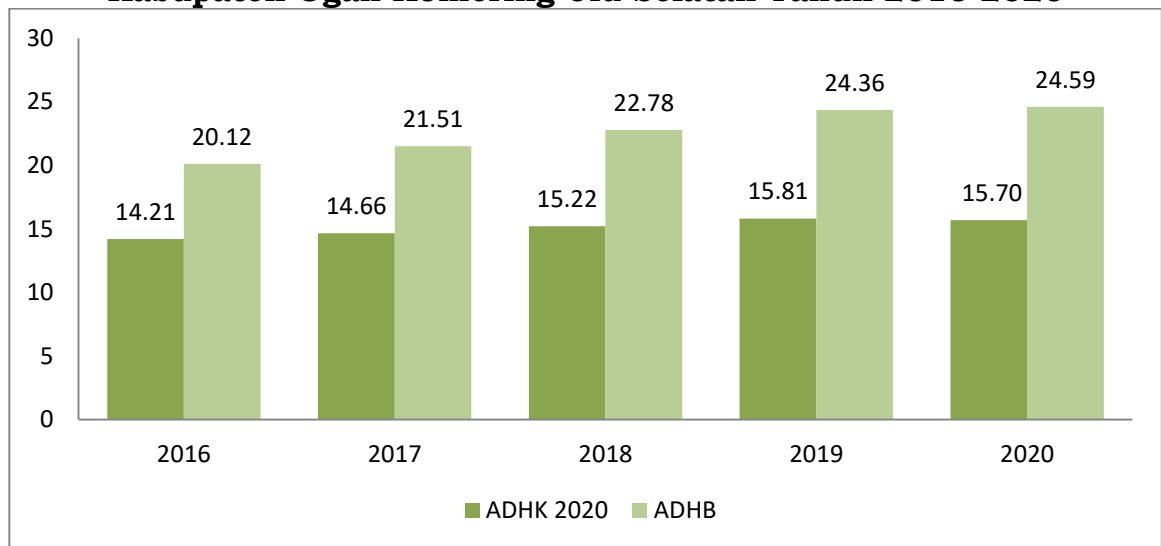
**angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.2.1.2. PDRB Per Kapita

Tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara makro berdasarkan PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun setidaknya dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. PDRB perkapita mengalami peningkatan di setiap tahunnya di mana hal ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mencapai 24,59 juta rupiah per tahun per kapita.

Gambar II.3
Perkembangan PDRB Per Kapita (juta rupiah)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



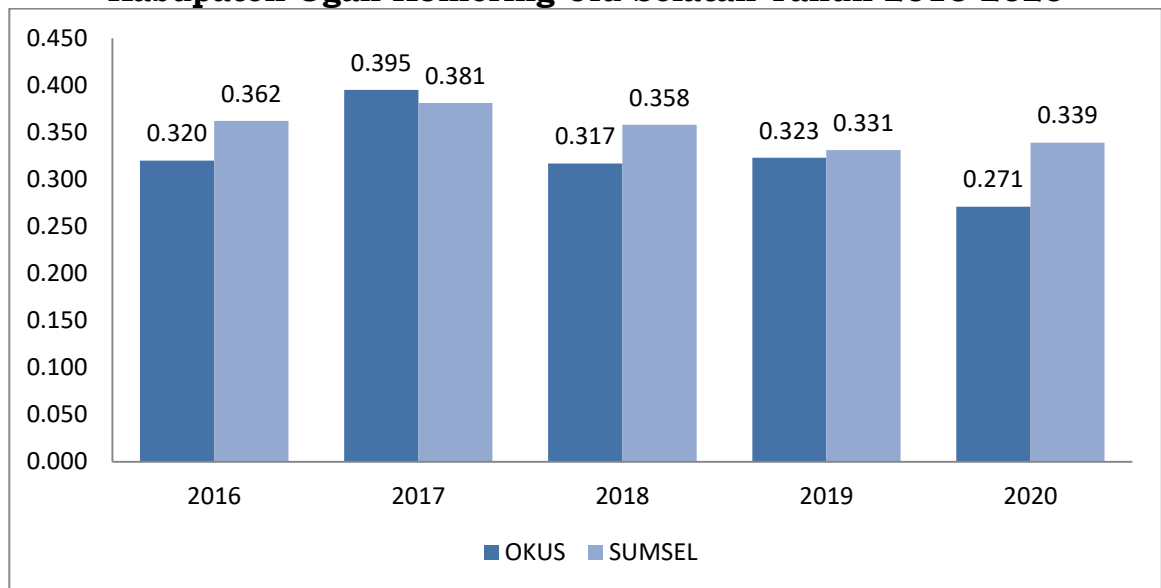
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.2.1.3. Indeks Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian, orientasi pemerataan merupakan upaya untuk memerangi kemiskinan. Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan maka digunakan pendekatan Teori Indeks Gini yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi.

Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0-1 (>0 dan <1). Terlihat Indeks Gini Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sempat mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan kembali menurun hingga tahun 2020 mencapai 0,271 di mana termasuk kategori pemerataan tinggi/ketimpangan rendah.

Gambar II.4
Perkembangan Indeks Gini
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Salah satu upaya pemerataan ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah menekan tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terlihat berhasil menekan angka kesenjangan ekonomi hingga mencapai 0,271 di tahun 2020. Angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,339. Terjadinya ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sedikitnya lapangan kerja, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pengangguran.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Keberhasilan pembangunan daerah dapat terwujud apabila selaras dengan pembangunan manusia. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia, salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan), serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

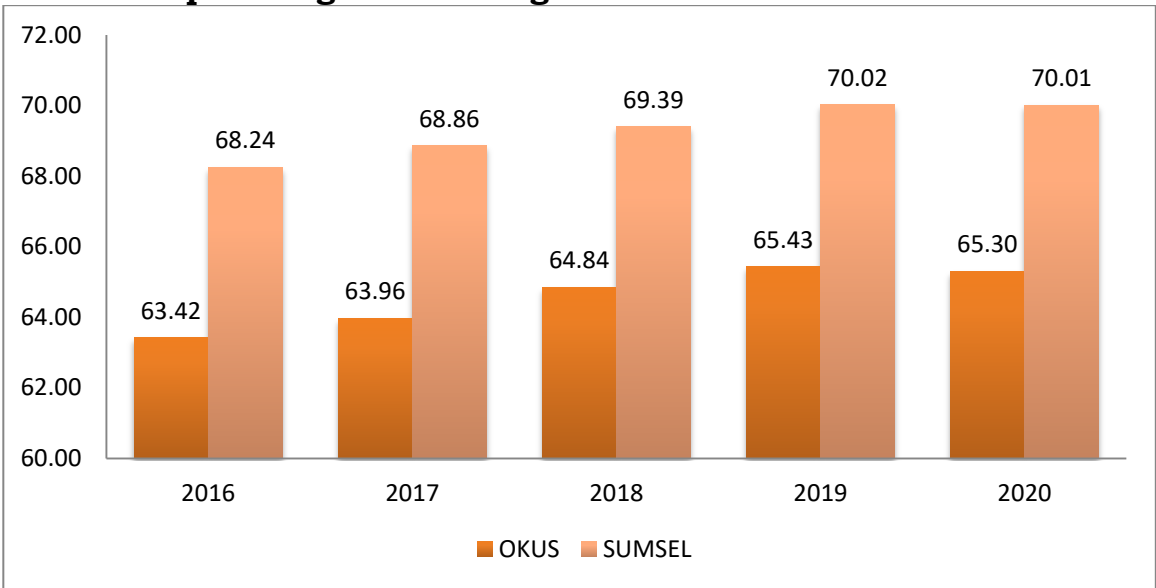


2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Keberhasilan pembangunan daerah dapat terwujud apabila selaras dengan pembangunan manusia. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia, salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan), serta pengeluaran perkapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami kenaikan di setiap tahunnya di mana pada tahun 2019 mencapai 65,43, kemudian turun menjadi 65,30 pada tahun 2020. Meskipun demikian, beberapa komponen penyusun IPM mengalami peningkatan di mana angka harapan hidup selama 67,04 tahun; rata-rata lama sekolah selama 7,84 tahun; harapan lama sekolah selama 11,75 tahun; dan paritas daya beli sebesar 8.580 ribu per kapita per tahun menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 8.830 ribu per kapita per tahun.

Gambar II.5
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021



Tabel II.27
Indikator Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	66.16	66.24	66.49	66.76	67.04
Harapan Lama Sekolah	11.58	11.72	11.73	11.74	11.75
Rata-rata Lama Sekolah	7.47	7.66	7.82	7.83	7.84
Pengeluaran riil per kapita	7902	7997	8445	8830	8580

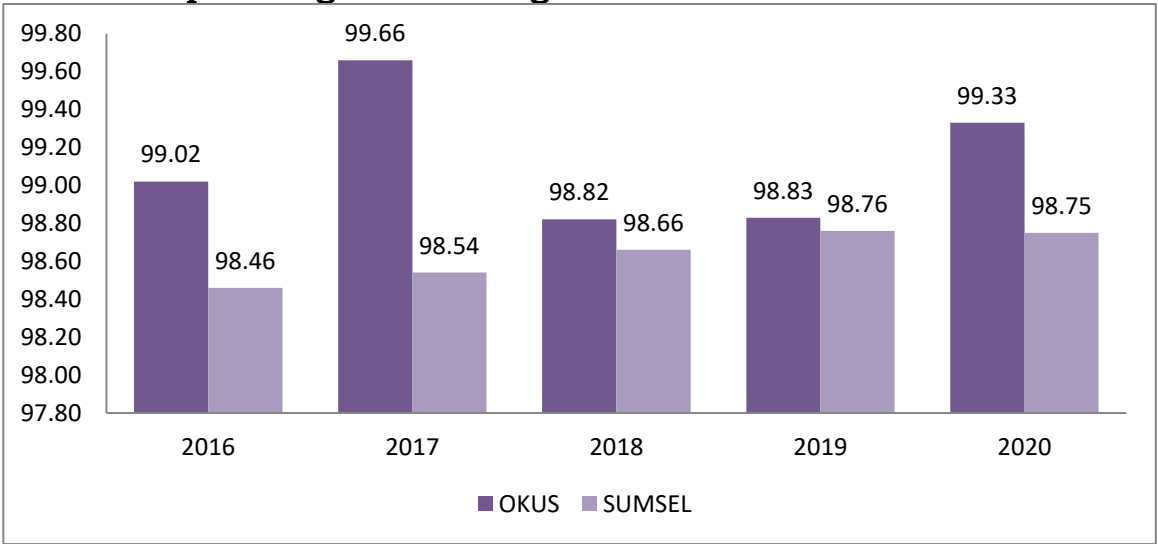
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.2.2.1.1. Pendidikan

Pembangunan daerah akan mampu diperoleh secara optimal jika sumber daya manusia pelaksana pembangunan lebih berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dalam hal ini diindikasikan dengan tingkat pendidikan individu. Indikator pertama dalam pendidikan adalah angka melek huruf yang menggambarkan kemampuan membaca dan menulis masyarakat suatu wilayah. Kemampuan membaca dan menulis dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu agar memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Angka Melek Huruf Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami kenaikan dari tahun 2016-2017 hingga mencapai 99,66%. Namun pada tahun 2018, angka melek huruf menurun kembali menjadi 98,82%, kembali meningkat menjadi 98,83% pada tahun 2019, terakhir di tahun 2020 meningkat menjadi 99,33%. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar kepada masyarakat.

Gambar II.6
Angka Melek Huruf
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



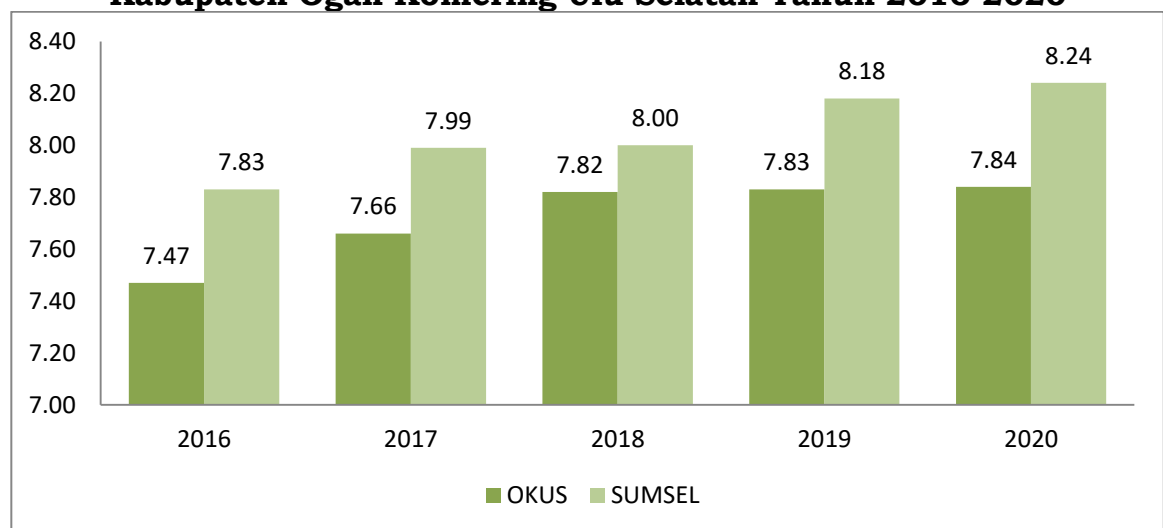
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Pendidikan juga merupakan pembentuk IPM di mana indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS)

menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 mencapai 7,84 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan rata-rata mengenyam pendidikan selama 7 tahun atau memiliki jenjang pendidikan hingga SMP kelas VII.

Gambar II.7
Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

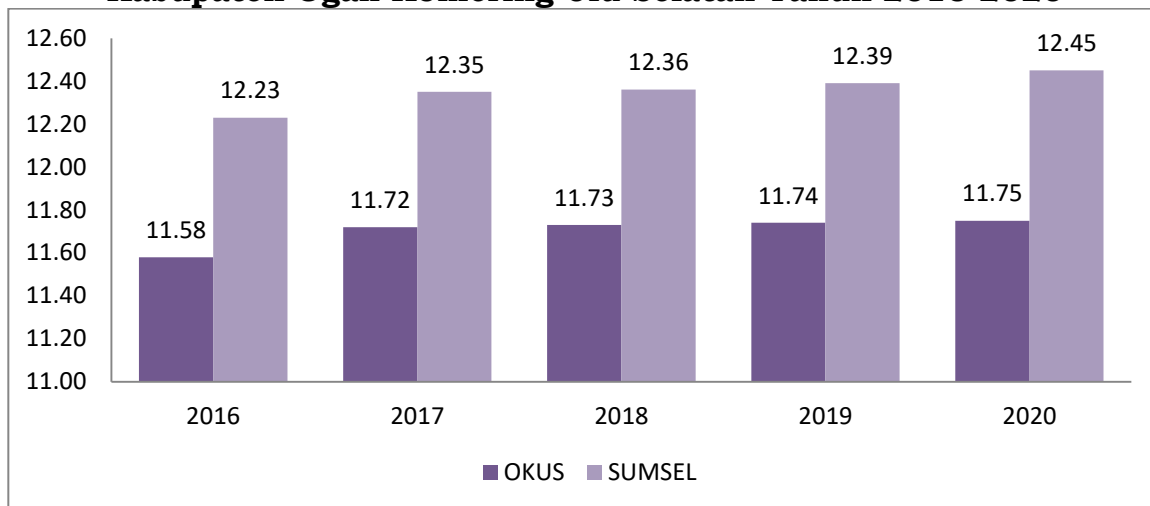


Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Selain rata-rata lama sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). Harapan lama sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya di mana pada tahun 2020 mencapai 11,75 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas pada tahun 2020 memiliki kesempatan atau harapan untuk bersekolah hingga 11,75 tahun atau mengenyam pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas Kelas XI.

Gambar II.8
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



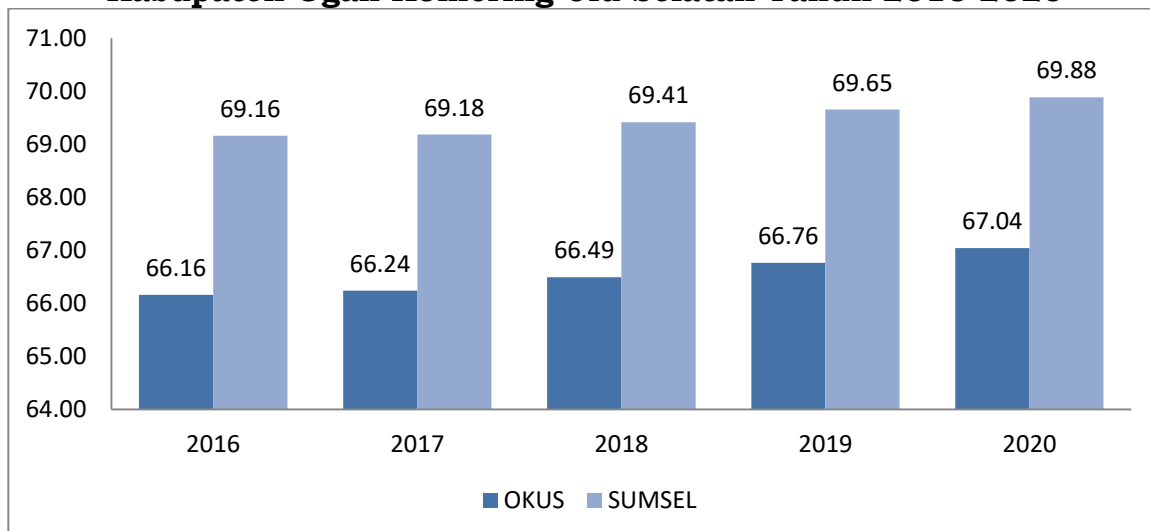
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.2.2.1.2. Kesehatan

Angka harapan hidup (AHH) merupakan indikator penyusun indeks pembangunan manusia dalam bidang kesehatan di mana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Angka harapan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang mengindikasikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020, angka harapan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mencapai 67,04 tahun yang artinya seorang bayi yang lahir pada tahun 2020 akan memiliki harapan hidup hingga berumur 67-68 tahun.

Gambar II.9
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021



Selain angka harapan hidup, terdapat beberapa indikator yang mengindikasikan kesejahteraan sosial masyarakat meskipun bukan merupakan komponen penyusun IPM. Salah satu indikator yang diperhatikan dalam melihat kesejahteraan sosial pada urusan kesehatan adalah persentase balita gizi buruk di mana pada tahun 2020 meningkat menjadi 158 kasus dengan persentasenya menjadi 0,420%. Selain itu terdapat juga kenaikan balita gizi kurang dengan jumlah kasus sebanyak 92 kasus. Diharapkan meningkatnya permasalahan terhadap balita ini dapat segera ditangani oleh perangkat daerah terkait.

Tabel II.28
Persentase Balita Gizi Buruk,
Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Cakupan Desa Siaga Aktif
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

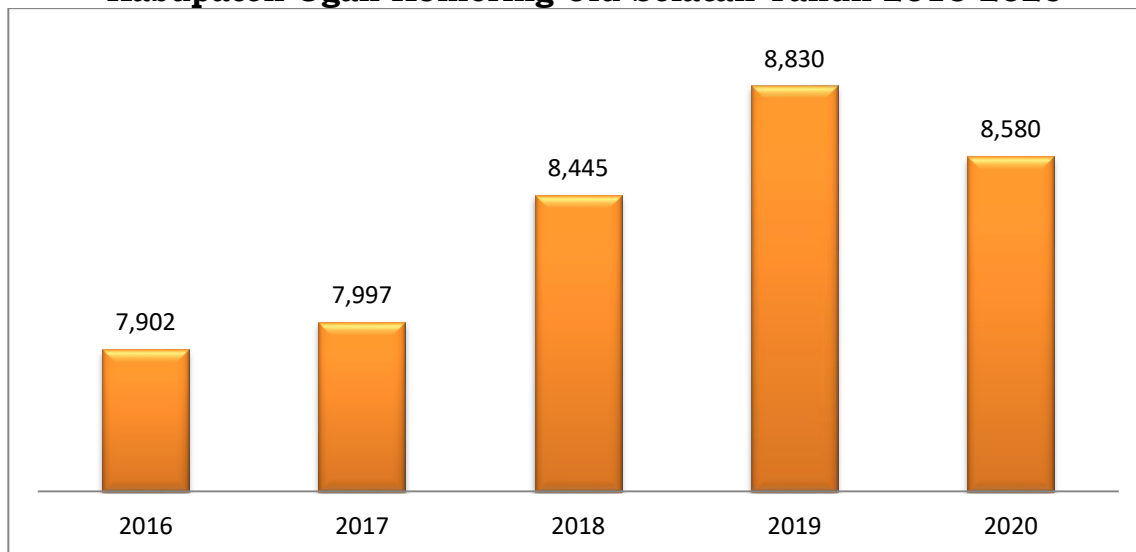
No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah balita gizi buruk	13	17	10	37	158
2.	Jumlah balita	35,183	35,883	36,693	49,053	37,641
3.	Persentase balita gizi buruk	0.037	0.047	0.027	0.075	0.420
1.	Bayi berat badan lahir rendah	4,172	4,263	4,354	5,106	92
2.	Jumlah balita	35,183	35,883	36,693	49,053	37,641
3.	Prevalensi balita gizi kurang	11.86	11.88	11.87	10.41	0.24
1.	Jumlah desa siaga aktif	215	219	225	229	229
2.	Jumlah desa siaga yang dibentuk	259	259	259	259	259
3.	Cakupan Desa Siaga Aktif	83.01	84.55	86.87	88.41	88.41

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.2.2.1.3. Ekonomi

Indeks daya beli merupakan salah satu komponen IPM. Indeks daya beli dicerminkan oleh pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Indeks daya beli penduduk menggambarkan kondisi relatif daya beli antar wilayah dan antar waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, daya beli penduduk yang dicerminkan dari komponen IPM ini tidak dapat diinterpretasikan berdasarkan angka nominalnya, melainkan harus diinterpretasi secara riil, dengan membandingkannya antar wilayah dan antar waktu. Daya beli masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2016 sebesar 7.902 ribu per kapita per tahun, meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2019 sebesar 8.830 ribu per kapita per tahun, dan pada tahun 2020 turun menjadi 8.580 per kapita per tahun.

Gambar II.10
Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan
(Purchasing Power Parity/PPP)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.2.2.2. Sosial

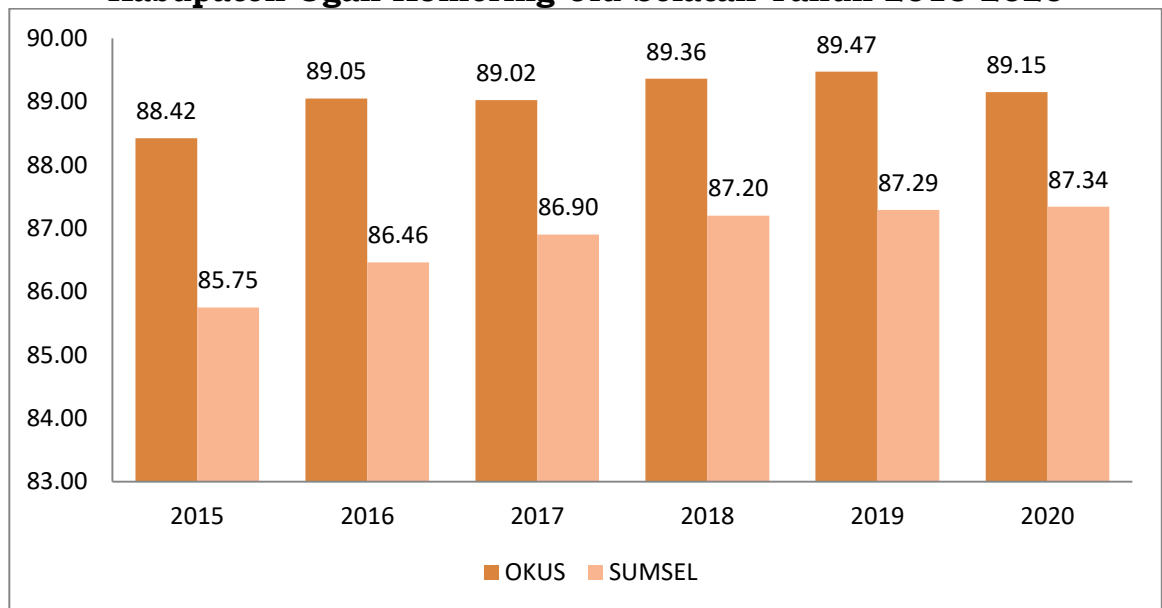
2.2.2.2.1. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, penduduk yang mampu dan sejahtera diasumsikan merupakan penduduk di atas garis kemiskinan. Penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami penurunan begitu pula dengan persentasenya. Pada tahun 2020, persentase penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mencapai 89,15%.

Dengan memperhatikan persoalan kemiskinan serta tingkat kemiskinan yang ada, beban dan tantangan penanggulangan kemiskinan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sangatlah besar. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 10,85%, hal ini sebabkan terjadinya pandemi *Covid-19* yang terjadi seluruh wilayah di dunia.

Jika dilihat dari sisi jumlah, kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan cenderung berfluktuatif mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin meningkat dari 38,42 ribu jiwa pada tahun 2016 menjadi 38,63 ribu jiwa pada tahun 2017. Kemudian menurun menjadi 37,87 ribu jiwa pada tahun 2018, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 37,92 ribu jiwa terus berlanjut sampai tahun 2020 menjadi 39,50 ribu jiwa.

Gambar II.11
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015-2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Tabel II.29
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2016	38.42	10.95	0.89	0.11	273,594
2017	38.63	10.98	1.65	0.42	286,157
2018	37.87	10.64	1.20	0.22	310,717
2019	37.92	10.53	1.34	0.31	319,333
2020	39.50	10.85	1.17	0.23	341,148

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Selama periode 2016-2020, indeks kedalaman kemiskinan (P1) menunjukkan adanya kecenderungan penurunan. Pada tahun 2016, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,89 dan nilai tersebut terus mengalami fluktuasi ke tahun 2020 yang menunjukkan angka 1,17. Angka terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,89 dan mengalami kenaikan tajam pada tahun 2017, serta kembali lagi turun pada tahun 2018 menjadi 1,20. Trenn penurunan nilai indeks ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran dan konsumsi penduduk miskin cenderung makin meningkat dan mendekati nilai garis kemiskinan.

Sedikit berbeda dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2) juga mengalami fluktuasi, namun dengan kecenderungan stagnansi dari tahun 2016 ke tahun 2020. Stagnansi pada angka indeks keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan terjadinya perubahan variasi (gap) antar penduduk miskin dari tahun ke tahun. Stagnansi pada angka keparahan kemiskinan mengindikasikan tidak



ada perubahan (baik perbaikan atau sebaliknya) bagi penduduk yang sangat miskin di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Upaya penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang secara simultan dilaksanakan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Daerah khususnya indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup upaya dalam bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya.

2.2.2.2.2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keberhasilan program keluarga berencana tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang secara bersama-sama mensukseskan program dimaksud yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tahapan atau tingkatan kesejahteraan keluarga, maka setiap keluarga dapat dikelompokkan kepada 5 (lima) tahapan keluarga yaitu: Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera Tahap I, Keluarga Sejahtera Tahap II, Keluarga Sejahtera Tahap III, dan Keluarga Sejahtera Tahap III plus.

Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS), yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*). Sedangkan Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI), yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis (*psychological needs*) keluarga.

Tabel II.30
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	47742	39658	39658	39658	39658
2.	Jumlah rumah tangga	93345	93398	94504	95557	97202
3.	(1/2 x 100)	51.15	42.46	41.96	41.50	40.80

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Selain penduduk miskin, status sosial suatu wilayah juga dapat dilihat dari jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di mana kedua status keluarga tersebut *notabene* merupakan masyarakat menengah ke bawah. Pada tahun 2016-2020, jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I mengalami penurunan, terakhir pada tahun 2020 sebesar 40,80%.



2.2.2.3. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Kemandirian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat dari besarnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2020, angka PAD menurun dibanding tahun 2019 yakni sebesar 3,45% dengan jumlah PAD sebesar 46,95 milyar rupiah.

Tabel II.31

Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pendapatan Asli Daerah	35,696	89,506	42,993	57,669	46,947
2.	Jumlah pendapatan daerah	1,135,991	1,222,264	1,268,126	1,394,328	1,362,341
3.	(1/2 x 100)	3.14	7.32	3.39	4.14	3.45

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, Tahun 2021

2.2.2.4. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Tabel II.32

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2021

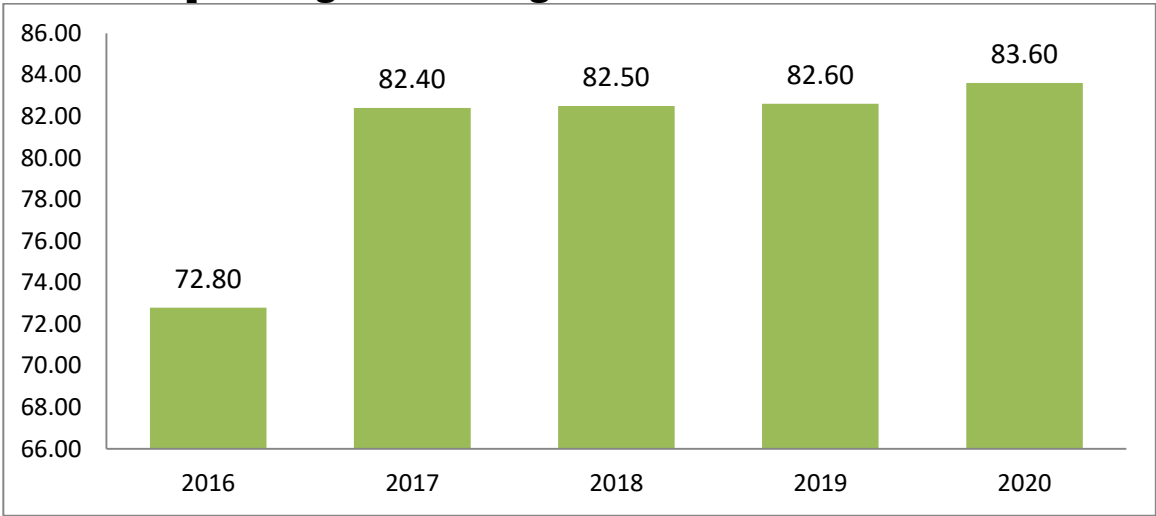
Pada tahun 2020, opini BPK Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ini didapatkan Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama lima tahun berturut-turut yang mengindikasikan semakin meningkatnya administrasi pengelolaan keuangan daerah.

2.2.2.5. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. Menurut FAO-RA-PA, PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.



Gambar II.12
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2021

Peningkatan skor pola pangan harapan merupakan rapor positif bagi *stakeholder* terkait di mana pada tahun 2020 mencapai angka 83,60 padahal pada tahun 2016 hanya sebesar 72,80. Hal ini tentu saja cukup baik mengingat semakin hari semakin mendekati skor ideal yakni skor PPH 100. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat, namun demikian perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan pengenalagaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian pola pangan harapan.

2.2.2.6. Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan Pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan Pemerintah terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok.

Tabel II.33
Penguatan Cadangan Pangan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah cadangan pangan masyarakat (ton)	N.A	N.A	N.A	16.77	31.17
2.	100 ton	N.A	N.A	N.A	100	100
3.	(1/2 x 100)	N.A	N.A	N.A	16.77	31.17

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2021



2.2.2.7. Produksi Sektor Pertanian

Produksi sektor pertanian mengalami peningkatan pada beberapa jenis barang tertentu dan mengalami penurunan pada jenis barang lainnya. Beberapa yang mengalami peningkatan produksi seperti Jagung, maupun Duku yang merupakan buah-buahan. Namun terdapat juga jenis barang yang mengalami penurunan produksi seperti Padi, Ketela Pohon, Kubis, Cabai, dan lain sebagainya.

Tabel II.34
Produksi Tanaman Pangan (ton)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Padi	201,654.22	242,846.00	203,126.88	180,221.76	194,779.62
2.	Jagung	72,820	249,228.67	353,646.00	352,133.60	365,193.40
3.	Ketela Pohon	2,540	1,878	1,168.18	1,013.76	1,238.04
4.	Ketela Rambat	822	129	150.57	56.96	139.68
5.	Kedelai	810	0	232,534	1,100	194.40
6.	Kacang Hijau	8,45	1.27	1.30	0	1.25

Sumber: Dinas Pertanian, Tahun 2021

Tabel II.35
Produksi Sayur-Sayuran (ton)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bawang Daun	110	94,070	738	289.8	1,844
2.	Kentang	180	0	0	0	0
3.	Kubis	1,100	40,270	1,295	760	1,954
4.	Petsai/Sawi	280	42,798	123	198	1,611
5.	Kacang Merah	280	0	106	38	563
6.	Kacang Panjang	840	41,128	198	265.3	1,352
7.	Cabe Besar	1,234	75,369	8,096	3,164.7	12,924
8.	Cabe Rawit	7,100	86,496	7,314	4,432.4	15,443

Sumber: Dinas Pertanian, Tahun 2021

Tabel II.36
Provitas Sayur-Sayuran
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Provitas cabe (ton/ha)	9.00	10.00	12.00	9.60	10.29
2.	Provitas bawang merah (ton/ha)	21.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Sumber: Dinas Pertanian, Tahun 2021

Tabel II.37
Produksi Buah-Buahan (ton)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Alpukat	800	524,104	364,898	342,261.60	6,014
2.	Duku	3,100	37,636	173,335	2,111.90	9,190
3.	Durian	125	609,997	441,899	100,164.30	1,979
4.	Jeruk	955	308	344	5.80	15,111
5.	Mangga	325	1,360.06	3,845	1,727.70	15,630
6.	Nangka	665	197.85	15,352	946.10	164
7.	Pepaya	310	23,778	3,383	205.20	7,464
8.	Pisang	912	2,787.42	105,618	91,257.00	632.63

Sumber: Dinas Pertanian, Tahun 2021



Tabel II.38
Provitas Buah-Buahan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Provitas Pisang (ton/ha)	58.00	58.00	28.00	32.67	63.26
2.	Provitas Alpukat (ton/ha)	3.00	3.00	15.00	23.00	23.18
3.	Provitas Durian (ton/ha)	30.00	2.50	32.00	35.00	35.19
4.	Provitas Duku (ton/ha)	15.00	17.00	20.00	17.00	17.00

Sumber: Dinas Pertanian, Tahun 2021

Populasi ternak secara umum juga mengalami penurunan di mana pada tahun 2020 populasi Sapi menurun menjadi 13.840 ekor. Selain itu, seluruh populasi ternak juga mengalami penurunan termasuk Kerbau, Domba maupun Kambing.

Tabel II.39
Populasi Ternak (ekor)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sapi	15.945	12.719	16.975	14.061	13.840
2.	Kerbau	521	440	533	450	370
3.	Domba	2.582	60	2.880	45	67
4.	Kambing	38.455	27.300	41.557	30.000	31.857

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan, Tahun 2021

2.2.2.8. Produksi Sektor Perkebunan

Produksi perkebunan, secara umum terjadi penurunan produksi seperti pada jenis barang Karet, Kakao, Lada, dan Tembakau, namun tidak untuk produksi Kopi Robusta.

Tabel II.40
Produksi Perkebunan (ton)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kopi Robusta	47,000	48,522.75	49,173.52	49,453.20	50,854.44
2.	Karet	5,188	4,232.80	3,907.20	3,860.40	3,481.50
3.	Kakao	1,078.78	631.20	64.20	588.00	554.40
4.	Lada	3,071.80	2,869.20	2,231.60	2,761.65	2,749.75
5.	Tembakau	236.00	140.00	41.50	46.80	26.40

Sumber: Dinas Pertanian, Tahun 2021

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan penghasil Kopi Robusta terbesar di Sumatera Selatan dengan luas tanaman Kopi mencapai 70.799 ha, dengan produksi 50,85 ribu ton yang tersebar di 19 Kecamatan yang kesemuanya diusahakan oleh rakyat/perkebunan rakyat. Tanaman Kopi merupakan komoditi unggulan dengan rata-rata produksi 0,69 ton/ha. Beberapa faktor penyebab masih sangat rendahnya produksi diantaranya belum optimalnya pengembangan dan pemasaran hasil Kopi rakyat, kualitas SDM yang belum merata untuk mendukung usaha perkebunan dan hama penyakit.



2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Bidang sosial budaya dan kehidupan beragama merupakan aspek yang fundamental dan berperan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan manusia yang diejawantahkan dalam wujud peningkatan kesejahteraan dan kualitas taraf hidup masyarakat. Pada titik ini, nilai-nilai budaya bangsa yang mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945 perlu direvitalisasi ke dalam suatu pranata-pranata yang aplikatif sehingga secara substansial mampu menaungi sekaligus menjadi pijakan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam prakteknya selama ini, ternyata nilai-nilai ideologis bangsa ini masih belum terimplementasikan secara utuh dan nyata. Lebih dari itu, sejalan dengan penyelenggaraan pembangunan yang mengacu kepada karakteristik dan spesifikasi daerah, serta dalam kerangka memperkuat kohesi dan ketahanan sosial yang menyangkut interaksi antar individu atau kelompok masyarakat dapat dirasakan adanya kecenderungan terabaikannya budaya daerah yang memuat nilai-nilai, sikap, perilaku, kebiasaan (*custom*), tradisi, adat istiadat, dan bentuk-bentuk kearifan lokal lainnya.

Tabel II.41
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah grup kesenian	42	48	48	49	52
2.	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1
3.	Jumlah gedung olahraga	1	1	1	6	6
4.	Jumlah organisasi olahraga	14	15	15	27	27
5.	Jumlah kegiatan olahraga	14	16	16	1	-

Sumber: Dinas Parbud; dan Dinas Kepora, Tahun 2021

Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik. Permasalahan pembangunan olahraga di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga. Permasalahan ini menjadikan peringkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Pekan Olahraga Provinsi kurang memuaskan.

Prestasi olahraga dihasilkan dari pembinaan yang berkelanjutan dan pembibitan atlet dimulai dari tingkat sekolah dasar. Permasalahan peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan antara lain belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan, masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, serta terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memenuhi standar Nasional dan Internasional. Permasalahan tersebut yang menjadikan prestasi olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di tingkat Provinsi dan Nasional belum memuaskan.



2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian aspek pelayanan umum akan dijelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, baik pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan serta penunjang urusan. Berikut penjabaran aspek pelayanan umum sebagai bagian dari hasil pembangunan daerah selama ini.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1. Pendidikan

Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam lingkup *sustainable development goals*, aspek pendidikan menjadi salah satu aspek terpenting untuk diperhatikan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030.

2.3.1.1.1.1. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang PAUD (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang PAUD (umur 3-6 tahun). Jumlah siswa pada jenjang PAUD cukup fluktuatif namun terjadi peningkatan pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya yang terlihat pada Tabel II.42 di bawah ini.

Tabel II.42
Angka Partisipasi Kasar
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak	5,040	7,500	6,042	6,790	8,679
2.	Jumlah anak usia 4-6 Tahun	19,551	22,447	18,050	18,512	18,227
3.	(1/2 x 100)	25.78	33.41	33.47	36.68	47.62

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021

2.3.1.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukan tingkat partisipasi pendidikan secara umum di suatu daerah pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.



Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100%, menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya. Atau bisa juga disebabkan oleh adanya anak yang bersekolah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akan tetapi domisilinya di luar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Tabel II.43
Angka Partisipasi Kasar

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
- SD/MI	119.27	112.28	111.45	112.19	110.60
- SLTP/MTS	93.74	92.17	86.44	86.65	87.88
- SLTA/SMK/MA	74.31	75.09	84.94	75.21	76.53

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel II.43 di atas, APK SD dari tahun 2016-2020 selalu di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah yang belum mencukupi umur atau sudah melebihi umur yang seharusnya pada jenjang pendidikan SD. Selain itu, APK di atas 100% juga dapat mengindikasikan adanya penduduk Kabupaten lain yang berada di perbatasan yang bersekolah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Untuk jenjang SMP, APK SMP pada tahun 2020 sebesar 87,88%, sedangkan untuk jenjang SMA sebesar 76,53%. Dari Tabel II.49 di atas juga dapat dilihat bahwa, APK SD selalu lebih tinggi daripada APK SMP dan SMA dari tahun ke tahun, begitupun APK SMP selalu lebih tinggi dari APK SMA. Hal ini menunjukkan bahwa, partisipasi pendidikan secara umum pada jenjang yang lebih tinggi semakin menurun, sehingga perlu perhatian khusus bagaimana Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat menjamin terlaksananya Wajar 12 Tahun dapat dinikmati oleh seluruh penduduk yang usianya bersesuaian.

2.3.1.1.1.3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM), yaitu tingkat partisipasi penduduk kelompok umur 7-12 tahun, kelompok umur 13-15 tahun, dan kelompok umur 16-18 tahun di masing-masing jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA. APM mencerminkan partisipasi dan akses penduduk bersekolah di jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut (bersekolah tepat waktu). Tetapi APM memiliki kelemahan tidak dapat menggambarkan anak yang sekolah di luar kelompok umur di suatu jenjang, seperti anak usia 5-6 tahun dan di atas 12 tahun yang masih bersekolah di SD/ sederajat.



Tabel II.44
Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
- SD/MI	99.33	99.72	99.70	99.21	99.00
- SMP/MTs	85.12	83.48	79.75	78.67	78.68
- SMA/SMK/MA	63.33	61.04	61.07	60.96	61.83

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.3.1.1.1.4. Angka Partisipasi Sekolah

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Meningkatnya APS, berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS mempunyai keunggulan dapat mencerminkan partisipasi/akses pendidikan sesuai kelompok usia sekolah, sehingga jelas menggambarkan seberapa besar penduduk yang sedang menikmati pendidikan. Tetapi kelemahannya, APS tidak dapat melihat di jenjang apa seseorang tersebut bersekolah/menikmati pendidikan.

Tabel II.45
Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
- 7-12	100.00	100.00	99.70	99.74	99.60
- 13-15	90.21	91.76	92.00	91.39	91.61
- 16-18	70.85	69.34	70.65	69.41	71.03

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel II.45 di atas, menunjukkan bahwa semakin tinggi umur APS semakin kecil, mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. APS anak-anak usia 7-12 tahun (usia SD) pada tahun 2020 telah mencapai angka 99,60%, hal ini berarti hampir seluruh anak usia 7-12 tahun bersekolah. Pada tahun 2020 untuk kelompok umur 13-15 tahun (usia SLTP), APS naik menjadi 91,61% dibandingkan pada tahun 2019. Sedangkan, pada kelompok umur 16-18 tahun (usia SMA), pada tahun 2020 APS juga naik menjadi 71,03%.

2.3.1.1.1.5. Angka Kelulusan

Angka kelulusan, adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan, Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah.



Tabel II.46
Angka Kelulusan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021

2.3.1.1.1.6. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) sekolah adalah persentase jumlah yang lulus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Indikator capaian pembangunan ini penting terkait dengan program wajib belajar 12 tahun. Tingkat AM sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pendidikan pada masing-masing jenjang dan penyediaan fasilitasi belajar pada jenjang pendidikan selanjutnya, serta bantuan pembiayaan untuk siswa yang akan melanjutkan dan terkendala oleh biaya.

Tabel II.47
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	N.A	N.A	4,271	5,851	5,704
2.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya	N.A	N.A	6,585	6,444	6,461
3.	$(1/2 \times 100)$	N.A	N.A	64.86	90.80	88.28

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021

2.3.1.1.1.7. Angka Melanjutkan (AM) Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.48 berikut ini.

Tabel II.48
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	N.A	N.A	N.A	3,824	4,142
2.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya	N.A	N.A	N.A	5,391	5,925
3.	$(1/2 \times 100)$	N.A	N.A	N.A	70.93	69.91

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021

2.3.1.1.1.8. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Perkembangan sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.49 berikut ini.



Tabel II.49
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	198	200	239	247	266
2.	Jumlah seluruh sekolah SD/MI	285	285	285	285	285
3.	(1/2 x 100)	69.47	70.18	83.86	86.67	93.33

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021

Persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 69,47% meningkat menjadi sebesar 93,33% pada tahun 2020.

2.3.1.1.1.9. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik

Perkembangan sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.50 berikut ini.

Tabel II.50
Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sekolah pendidikan SMP/SMA/ SMK/MA kondisi bangunan baik	67	68	69	79	120
2.	Jumlah seluruh sekolah SMP/ SMA/SMK/MA	134	134	135	136	137
3.	(1/2 x 100)	50.00	50.75	51.11	58.09	87.59

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021

Persentase sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 50% meningkat menjadi sebesar 87,59% pada tahun 2020.

2.3.1.1.1.10. Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013). Persentase SD/MI berakreditasi minimal B adalah perbandingan antara jumlah SD/MI dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SD/MI. Periode waktu akreditasi berlaku 5 tahunan, namun data akreditasi dapat dikumpulkan tahunan.



Tabel II.51
Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah SD/MI dengan akreditasi A dan B pada periode tertentu	44	66	67	84	148
2.	Jumlah SD/MI pada periode yang sama	285	285	285	285	285
3.	$(1/2 \times 100)$	15.44	23.16	23.51	29.47	51.93

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021

2.3.1.1.1.11. Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013). Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B adalah perbandingan antara jumlah SMP/MTs dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SMP/ MTs. Periode waktu akreditasi berlaku 5 tahunan, namun data akreditasi dapat dikumpulkan tahunan.

Tabel II.52
Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi A dan B pada periode tertentu	28	32	39	40	40
2.	Jumlah SMP/MTs pada periode yang sama	87	88	88	93	93
3.	$(1/2 \times 100)$	32.18	36.36	43.32	43.01	43.01

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021

2.3.1.1.1.12. Persentase SMA/MA Berakredirasi Minimal B

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013). Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B adalah perbandingan antara jumlah SMA/MA dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SMA/ MA. Periode waktu akreditasi berlaku 5 tahunan, namun data akreditasi dapat dikumpulkan tahunan.

Tabel II.53
Persentase SMA/MA Berakredirasi Minimal B
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah SMA/MA dengan akreditasi A dan B pada periode tertentu	0	0	0	0	30
2.	Jumlah SMA/MA pada periode yang sama	33	46	47	45	44
3.	$(1/2 \times 100)$	0	0	0	0	68.18

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021



2.3.1.1.1.13. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah. Semakin rendah rasio berarti semakin baik kondisi pelayanan pendidikan sebuah daerah. Rasio ketersediaan sekolah yang rendah memiliki arti bahwa penambahan jumlah murid diikuti dengan penambahan jumlah sekolah. Meninjau bahwa nilai rasio ketersediaan sekolah menunjukkan tren yang menurun, berarti kecepatan penambahan kapasitas sekolah oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mampu mengikuti kecepatan penambahan murid.

Tabel II.54
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk
Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI					
a.	Jumlah sekolah (SD/MI)	285	285	285	285	285
b.	Jumlah penduduk kelompok usia (7-12 Tahun)	40,278	40,636	40,934	41,249	47,457
c.	Rasio	1 : 141	1 : 143	1 : 144	1 : 145	1 : 167
2.	SMP/MTs					
a.	Jumlah sekolah (SMP/MTs)	87	88	88	93	93
b.	Jumlah penduduk kelompok usia (13-15 Tahun)	23,577	24,430	24,785	23,570	30,317
c.	Rasio	1 : 271	1 : 278	1 : 282	1 : 253	1 : 326

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel II.54 di atas menunjukkan bahwa rasio ketersediaan sekolah pada jenjang SD/MI pada tahun 2019 sebesar 1 : 254 turun menjadi 1 : 167 pada tahun 2020, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2019 sebesar 1 : 253 meningkat menjadi 1 : 326 pada tahun 2020.

2.3.1.1.1.14. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.



Tabel II.55
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI					
a.	Jumlah guru (SD/ MI)	3,295	3,305	3,320	3,310	3,237
b.	Jumlah murid (SD/MI)	41,618	42,640	42,845	43,276	40,314
c.	Rasio	1 : 12.63	1 : 12.90	1 : 12.91	1 : 13.07	1 : 12.45
2.	SMP/MTs					
a.	Jumlah guru (SMP/ MTs)	1,044	1,096	1,136	1,203	1,283
b.	Jumlah murid (SMP/ MTs)	13,975	16,052	17,931	15,581	17,310
c.	Rasio	1 : 13.39	1 : 14.65	1 : 15.78	1 : 12.95	1 : 13.49

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021

Jumlah guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2016 sebanyak 3.295 guru, mengalami penurunan menjadi 3.237 guru pada tahun 2020. Rasio guru terhadap murid di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2020 adalah 1 : 12,45 yang artinya 1 guru dapat mengajar 12 murid SD. Sedangkan pada tahun 2020 rasio guru dan murid tingkat pendidikan sekolah menengah pertama adalah 1 : 13,49 yang artinya 1 guru dapat mengajar 13 murid SMP.

2.3.1.1.1.15. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

Jumlah guru jenjang pendidikan SMA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2016 sebanyak 767 guru, mengalami peningkatan menjadi 815 guru pada tahun 2020. Rasio guru dan murid jenjang pendidikan SMA pada tahun 2016 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah 1 : 12,23 artinya 1 guru dapat mengajar 12 murid SMA. Sedangkan pada tahun 2020 rasio guru terhadap murid 1 : 13,37 artinya 1 guru dapat mengajar 13 murid SMA. Hal ini masih sesuai dengan standar minimal peserta didik terhadap tenaga pengajar pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 di mana jumlah murid terhadap guru maksimal adalah 1 : 20 di mana 1 guru untuk 20 siswa.

Tabel II.56
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Guru (SMA/MA/ SMK)	767	828	828	796	815
2.	Jumlah Murid (SMA/ MA/SMK)	9,378	10,131	10,252	10,078	10,893
3.	Rasio	1 : 12.23	1 : 12.24	1 : 12.38	1 : 12.66	1 : 13.37

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021

2.3.1.1.1.16. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Seorang guru dikatakan profesional jika memiliki keahlian, kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu serta memerlukan pendidikan profesi. Oleh karena itu, guru disyaratkan memenuhi



kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau D4 yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai seorang pendidik. Pada tahun 2016 persentase guru memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 70,02% meningkat menjadi sebesar 84,55% pada tahun 2019, kemudian turun menjadi sebesar 75,11% pada tahun 2020.

Tabel II.57
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah guru berijazah S1/D-IV	3,575	3,647	3,731	4,489	4,007
2.	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	5,106	5,229	5,284	5,309	5,335
3.	(1/2 x 100)	70.02	69.75	70.61	84.55	75.11

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021

2.3.1.1.2. Kesehatan

Perkembangan bidang kesehatan suatu daerah menjadi salah satu tujuan pokok Pemerintah Daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Terkait dengan hal tersebut, bidang kesehatan sendiri juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, hingga tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah.

2.3.1.1.2.1. Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan adalah rasio antara banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu di bagi dengan jumlah penduduk pada suatu waktu. Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk dan biasanya dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan selama sebulan sebelum pencacahan hingga mengganggu aktifitas sehari-hari.

Tabel II.58
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka kesakitan	17.32	19.07	31.27	26.01	17.46

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Pada tahun 2020, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 17,46%. Dengan melihat kondisi ini, Pemerintah harus tetap meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan pelayanan dan kemudahan akses dalam memperoleh pelayanan



kesehatan, sehingga ketika masyarakat mengalami keluhan langsung memperoleh pengobatan dengan cepat.

2.3.1.1.2.2. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Tabel II.59
Kematian Bayi dan Kematian Ibu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kematian bayi	30	23	49	50	46
2.	Jumlah kematian ibu	5	1	8	4	5

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

Jumlah kematian bayi semakin menurun hingga tahun 2020 di mana pada tahun 2019 mencapai 50 kematian bayi/balita. Lain halnya dengan jumlah kematian ibu yang menurun hingga tahun 2019 mencapai 4 kematian ibu, terakhir tahun 2020 menjadi 5 kematian ibu.

2.3.1.1.2.3. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Jumlah posyandu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2020 sebanyak 325 posyandu dan jumlah balita sebanyak 37.641 jiwa. Dengan demikian rasio posyandu terhadap balita hanya bisa memenuhi 8,63% dari jumlah seluruh balita atau bisa digambarkan 1 : 116 balita, masih jauh dari standar sistem pelayanan kesehatan yang rasio idealnya adalah 1 : 50, sehingga perlu adanya peningkatan jumlah posyandu.

Tabel II.60
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah posyandu	324	324	324	325	325
2.	Jumlah balita	35,183	35,883	36,693	49,053	37,641
3.	(1/2 x 1.000)	9.21	9.03	8.83	6.63	8.63

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.4. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu merupakan perhitungan untuk mengetahui suatu wilayah dalam cakupannya untuk



memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Tujuan agar pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Tabel II.61
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas	19	19	19	19	19
2.	Jumlah Poliklinik Swasta	7	7	7	7	6
3.	Jumlah Pustu	39	39	39	38	45
4.	Jumlah Penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
5.	(4 : 1+2+3)	1 : 6,275	1 : 6,312	1 : 6,373	1 : 6,486	1 : 5,954

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel II.61 di atas menunjukkan bahwa rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 1 : 5.954 pada tahun 2020. Semakin tinggi nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin banyak penduduk yang dilayani oleh puskesmas, poliklinik, dan pustu. Sedangkan semakin rendah nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin sedikit penduduk yang dilayani oleh puskesmas, poliklinik, dan pustu.

2.3.1.1.2.5. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

Tabel II.62
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah sakit	1	1	1	1	1
2.	Jumlah penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 1.000)	0.00245	0.00244	0.00241	0.00241	0.00240

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel II.62 di atas menunjukkan bahwa nilai rasio rumah sakit per satuan penduduk dirasa nilainya terlalu kecil, sehingga diperlukan perencanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan agar kedepannya pelayanan kesehatan tetap optimal dalam melayani penduduk.

2.3.1.1.2.6. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain



itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Tabel II.63
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah dokter	25	33	49	25	31
2.	Jumlah penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 1.000)	0.061	0.080	0.118	0.060	0.074

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel II.63 di atas menunjukkan bahwa rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,074 meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,060. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu setiap dokter melayani 2.500 penduduk. Berdasarkan fakta yang ada, di Indonesia jumlah dokter dan dokter spesialis belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter di Indonesia belum merata serta perlu ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu diperlukan penanganan agar pemenuhan tenaga kesehatan terpenuhi.

2.3.1.1.2.7. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Perkembangan rasio tenaga medis per satuan penduduk tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.64 berikut ini.

Tabel II.64
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah tenaga medis	909	1062	1078	988	1105
2.	Jumlah penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 1.000)	2.23	2.59	2.60	2.38	2.65

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel II.64 di atas menunjukkan bahwa rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2020 sebesar 2,65 meningkat dari tahun 2019 sebesar 2,38. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu setiap tenaga medis melayani 1.000 penduduk. Berdasarkan fakta yang ada di Indonesia masih ada beberapa tenaga medis yang belum merata pemenuhan kebutuhannya. Oleh karena itu diperlukan pemerataan pemenuhan kebutuhan tenaga medis.

2.3.1.1.2.8. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2020 jumlah sasaran ibu bersalin mencapai 7.439 orang, dari jumlah tersebut yang mendapat pertolongan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebanyak 7.061 orang atau sebesar 94,92%. Sudah tercapai cukup baik sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.



Tabel II.65
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	5,952	6,109	5,857	7,409	7,061
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	8,289	8,363	8,798	9,207	7,439
3.	(1/2 x 100)	71.80	73.05	66.57	80.47	94.92

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.9. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Desa UCI adalah Desa/Kelurahan di mana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di Desa/Kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Tabel II.66
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	140	243	242	219	215
2.	Jumlah seluruh Desa/Kelurahan	259	259	259	259	259
3.	(1/2 x 100)	54.05	93.82	93.44	84.56	83.01

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum mencapai target nasional sebesar 100%, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu melakukan upaya-upaya peningkatan Cakupan Desa/Kelurahan UCI.

2.3.1.1.2.10. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan medis di bagi jumlah balita gizi buruk yang ada di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Tabel II.67
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	13	17	10	76	158
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	13	17	10	76	158
3.	(1/2 x 100)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021



Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu tercapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya perhatian Pemerintah serta masyarakat di lingkungan sekitar.

2.3.1.1.2.11. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

Persentase imunisasi campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur satu tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur satu tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia satu tahun adalah anak usia 12-23 bulan.

Tabel II.68
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	7,822	7,698	7,790	7,003	6,233
2.	Jumlah anak usia 1 tahun	7,822	7,698	7,790	7,003	6,902
3.	(1/2 x 100)	100.00	100.00	100.00	100.00	90.31

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

Indikator ini merupakan ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar. Karena imunisasi campak diberikan pada usia 9-11 bulan, sehingga dapat menunjukkan kelengkapan imunisasi anak. Di samping itu imunisasi campak yang diberikan kepada anak, dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit campak, yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kematian balita. Semakin besar persentase balita usia satu tahun yang diimunisasi campak di suatu wilayah pada periode tertentu, maka semakin banyak balita yang telah mendapatkan imunisasi tersebut.

2.3.1.1.2.12. Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Pneumonia merupakan infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Pneumonia dapat menyerang siapa saja, terutama kelompok usia balita. Pneumonia merupakan salah satu penyakit infeksi penyebab kematian tertinggi pada balita.

Tabel II.69
Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani	28	18	11	2	4
2.	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	518	518	518	1,102	1,102
3.	(1/2 x 100)	5.41	3.47	2.12	0.18	0.36

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021



2.3.1.1.2.13. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB (BTA+) periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.70 berikut ini.

Tabel II.70

**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	110	145	463	519	412
2.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	518	518	1,102	1,102	1,256
3.	(1/2 x 100)	21.24	27.99	42.01	47.10	32.80

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.14. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Perkembangan tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.71 berikut ini.

Tabel II.71

**Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	110	145	463	519	412
2.	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 100.000)	26.97	35.34	111.77	125.03	98.85

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.15. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Perkembangan tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.72 berikut ini.

Tabel II.72

**Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Paise TB yang meninggal	0	0	0	3	2
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 100.000)	0	0	0	0.72	0.48

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021



2.3.1.1.2.16. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Perkembangan proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.73 berikut ini.

Tabel II.73
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis
Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	110	145	463	519	412
2.	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada	518	518	1,102	1,102	1,256
3.	(1/2 x 100)	21.24	27.99	42.01	47.10	32.80

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.17. Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 sebesar 100%. Namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 99,42% dan kembali mengalami peningkatan menjadi 99,51% pada tahun 2020.

Tabel II.74
Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati
dan Sembuh Dalam Program DOTS
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	110	145	463	516	410
2.	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati	110	145	463	519	412
3.	(1/2 x 100)	100.00	100.00	100.00	99.42	99.51

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari total penderita yang ditemukan merupakan persentase jumlah penderita yang ditemukan dan diobati. Persentase ini mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebesar 100%.



Tabel II.75
Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	0	5	6	88	33
2.	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	0	5	6	88	33
3.	(1/2 x 100)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.19. Penderita Diare Yang Ditangani

Penyakit diare yang disebabkan penyakit menular selalu berada pada 10 penyakit terbesar setiap tahunnya. Terdapat 2.956 kasus diare ditangani untuk semua usia atau sebesar 46,41% dari target penemuan diare di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020.

Tabel II.76
Penderita Diare Yang Ditangani
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader	4,045	4,811	4,811	4,385	2,956
2.	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370
3.	(1/2 x 100)	63.50	75.53	75.53	68.84	46.41

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.20. Angka Kejadian Malaria

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk *Anopheles*. Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini *Annual Parasite Incidence* (API). API adalah angka kesakitan per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Angka API digunakan untuk menentukan tingkat *endemisitas* malaria di suatu daerah. *Endemisitas* malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk.

Tabel II.77
Angka Kejadian Malaria
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	207	168	223	338	11
2.	Jumlah penduduk berisiko pada kurun waktu 1 tahun	89,547	81,050	352,994	353,952	353,135
3.	(1/2 x 1000)	2.31	2.07	0.63	0.95	0.03

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021



2.3.1.1.2.21. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Perkembangan tingkat kematian akibat malaria periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.78 berikut ini.

Tabel II.78
Tingkat Kematian Akibat Malaria
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kematian tersangka malaria	0	0	1	1	0
2.	Jumlah penduduk beresiko	89,547	81,050	352,994	353,952	353,135
3.	(1/2 x 1000)	0.000	0.000	0.003	0.003	0.000

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.22. Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat

Perkembangan proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.79 berikut ini.

Tabel II.79
Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang
Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun	3	0	1	1	3
2.	Jumlah penderita positif dalam 1 tahun	3	0	1	1	3
3.	(1/2 x 100)	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.23. Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. Prevalensi HIV pada populasi dewasa adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan umur 15-49 tahun yang positif HIV dibagi dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada umur yang sama (yaitu 15-49 tahun).

Tabel II.80
Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pasien HIV dan AIDS	3	2	4	4	2
2.	Jumlah penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 100)	0.0007	0.0005	0.0010	0.0010	0.0005

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021



2.3.1.1.2.24. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Dalam upaya meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan serta perlindungan kesehatan secara finansial, Pemerintah (Pusat dan Daerah) membiayai iuran peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Dengan demikian. Diharapkan seluruh masyarakat miskin dan tak mampu dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus memikirkan biaya yang dikeluarkan.

Tabel II.81

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	3,972	2,790	2,158	2,661	30,685
2.	Jumlah seluruh miskin Kabupaten	38,420	38,630	37,870	37,920	39,500
3.	(1/2 x 100)	10.34	7.22	5.70	7.02	77.68

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.25. Cakupan Kunjungan Bayi

Perkembangan cakupan kunjungan bayi tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.82 berikut ini.

Tabel II.82

Cakupan Kunjungan Bayi

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar	7,810	6,993	7,254	6,611	6,674
2.	Jumlah bayi lahir	7,822	7,698	7,790	7,003	6,700
3.	(1/2 x 100)	99.85	90.84	93.12	94.40	99.61

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.26. Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas diperlukan karena bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan di masyarakat. Biasanya cakupannya adalah Kecamatan tergantung jumlah penduduknya.

Tabel II.83

Cakupan Puskesmas

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah puskesmas	19	19	19	19	19
2.	Jumlah penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 100)	0.0047	0.0046	0.0046	0.0046	0.0046

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021



2.3.1.1.2.27. Cakupan Pembantu Puskesmas

Cakupan puskesmas pembantu (pustu) diperlukan karena bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan di masyarakat. puskesmas pembantu biasanya cakupannya adalah Desa dan atau Kelurahan tergantung jumlah penduduknya.

Tabel II.84
Cakupan Pembantu Puskesmas
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pembantu Puskesmas	39	39	39	39	39
2.	Jumlah seluruh Desa	252	252	252	252	252
3.	(1/2 x 100)	15.48	15.48	15.48	15.48	15.48

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel II.84 di atas menunjukkan bahwa, sampai dengan tahun 2020 cakupan puskesmas pembantu baru mencapai 15,48%. Hal ini menunjukkan bahwa puskesmas pembantu belum mampu secara maksimal dalam melayani wilayah pelayanannya. Cakupan pelayanan puskesmas pembantu perlu ditingkatkan salah satu caranya dengan menambah jumlah puskesmas pembantu.

2.3.1.1.2.28. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan ibu hamil dengan K4 menggambarkan besaran ibu hamil yang melakukan kontak dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang ditetapkan, yaitu paling sedikit 4 (empat) kali dengan distribusi waktu 1 (satu) kali pada trimester pertama, 1 (satu) kali pada trimester kedua, dan 2 (dua) kali pada trimester ketiga. Cakupan ibu hamil dengan K4 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama kurun waktu tahun 2016- 2020 masih fluktuatif.

Tabel II.85
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	7,892	8,032	8,259	7,876	7,747
2.	Jumlah sasaran ibu hamil	8,289	8,363	8,798	9,207	7,977
3.	(1/2 x 100)	95.21	96.04	93.87	85,54	97.12

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.29. Cakupan Pelayanan Nifas

Pada saat masa nifas (paska persalinan) masih terjadi kemungkinan kematian ibu maternal, sehingga perlu mendapatkan pelayanan kesehatan paska persalinan minimal 3 (tiga) kali.



Tabel II.86
Cakupan Pelayanan Nifas
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	0	8,478	8,798	7,025	7,061
2.	Seluruh ibu nifas	0	8,478	8,798	7,025	7,439
3.	(1/2 x 100)	0.00	100.00	100.00	100.00	94.92

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

Cakupan pelayanan kepada ibu paska persalinan yang sesuai standar pada tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami penurunan yaitu sebesar 94,92% dibanding tahun sebelumnya sebesar 100%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa jangkauan dan kualitas pelayanan terhadap ibu paska melahirkan telah merata dan sesuai standar.

2.3.1.1.2.30. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan

Tabel II.87
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	0	1,118	1,070	1,043	988
2.	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	0	1,151	1,073	1,050	1,005
3.	(1/2 x 100)	0.00	97.13	99.72	99.33	98.31

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.31. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Perkembangan cakupan pelayanan anak balita tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.88 berikut ini.

Tabel II.88
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	4,352	4,543	4,851	6,611	26,448
2.	Jumlah seluruh anak balita	35,183	35,883	36,693	49,053	37,641
3.	(1/2 x 100)	12.37	12.66	13.22	13.48	70.26

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021



2.3.1.1.2.32. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Perkembangan cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.89 berikut ini.

Tabel II.89
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI
Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	0	2,347	2,359	2,446	3,163
2.	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	0	2,347	2,359	2,446	3,163
3.	(1/2 x 100)	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.33. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Perkembangan cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.90 berikut ini.

Tabel II.90
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	3,081	3,502	3,979	5,561	4,284
2.	Jumlah murid SD dan setingkat	41,618	42,640	42,845	43,276	40,314
3.	(1/2 x 100)	7.40	8.21	9.29	12.85	10.63

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.34. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.91 berikut ini.

Tabel II.91
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1	24,563	8,109	35,261	8,602	30,685
2.	Jumlah seluruh masyarakat miskin	38,420	38,630	37,870	37,920	39,500
3.	(1/2 x 100)	63.93	20.99	93.11	22.68	77.68

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021



2.3.1.1.2.35. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Perkembangan cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.92 berikut ini.

Tabel II.92
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1
Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pelayanan gawat darurat level 1	0	0	0	1	1
2.	Jumlah RS	1	1	1	1	1
3.	(1/2 x 100)	0	0	0	100.00	100.00

Sumber: RSUD Muaradua, Tahun 2021

2.3.1.1.2.36. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam

Kemampuan wilayah memberikan jaminan hidup yang sejahtera bagi penduduknya salah satunya dapat dilihat dari cakupan penanganan terhadap Desa/Kelurahan yang terkena Kejadian Luar Biasa (KLB). Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang terkena KLB selama lima tahun terakhir tidak ada setiap tahunnya.

Tabel II.93
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB
Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu	0	0	0	0	0
2.	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	0-	0	0	0	0
3.	(1/2 x 100)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.37. Puskesmas Yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mengutamakan pada aspek promotif dan preventif di samping aspek kuratif dan rehabilitatif. Untuk itulah upaya kesehatan jiwa sudah harus dimulai dari tingkat puskesmas dan diharapkan minimal 20% puskesmas di setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah RI dapat menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dengan target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya. Kriteria puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa adalah: 1). Memiliki tenaga kesehatan yang sudah terlatih kesehatan jiwa; 2).



Melakukan kegiatan promotif kesehatan jiwa; 3). Melakukan deteksi dini; 4). Layanan pengobatan dasar dan rujukan kesehatan jiwa.

Tabel II.94
Puskesmas Yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	0	19	19	19	19

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.38. Persentase Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: Sangat Pendek: Zscore <-3,0; dan Pendek: Zscore ≥ - 3,0 s/d Zscore < -2,0.

Tabel II.95
Persentase Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)
Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak baduta sangat pendek (stunting)	735	755	741	590	931
2.	Jumlah anak 0-4 tahun	35,024	35,530	35,294	35,018	33,314
3.	(1/2 x 100)	2.10	2.12	2.10	1.68	2.79

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak



2.3.1.1.2.39. Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. STBM meliputi 5 (lima) kriteria yaitu: (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Tabel II.96
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	28	45	132	193	221

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.40. Jumlah Desa/Kelurahan Yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Stop buang air besar sembarangan (BABS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Adapun manfaatnya adalah memantau pelaksanaan STBM di Desa/Kelurahan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel II.97
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Open Defecation Free (ODF)/
Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	0	46	87	128	171

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.41. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Di Puskesmas

Jumlah puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin esensial dinyatakan dalam satuan persen (%). Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai



dengan fungsi dan tingkatnya. Batasan atau standar kecukupan mengacu pada daftar obat esensial nasional puskesmas tahun 2013 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 312/MENKES/SK/IX/2013.

Tabel II.98
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin	19	19	19	19	19
2.	Jumlah seluruh puskesmas	19	19	19	19	19
3.	(1/2 x 100)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.42. Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan

Untuk mengukur kepadatan tenaga kesehatan di suatu wilayah dapat digunakan rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain (UU Kesehatan No. 36 Tahun 2014).

Tabel II.99
Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah tenaga kesehatan	909	1,062	1,078	988	1,105
2.	Jumlah penduduk seluruhnya	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 1000)	2.23	2.59	2.60	2.38	2.65

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2.43. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. JKN secara bertahap direncanakan sebagai jaminan kesehatan semesta (*universal health coverage*) bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah perbandingan banyaknya penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan dengan jumlah seluruh penduduk dan dinyatakan dalam satuan persen (%).



Tabel II.100
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk yang mendapat Jaminan Perlindungan kesehatan (JKN)	157,000	157,000	225,557	225,557	255,633
2.	Jumlah penduduk seluruhnya	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 100)	38.49	38.26	54.45	54.34	61.33

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.1.3.1. Pekerjaan Umum

2.3.1.1.3.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Salah satu fokus pembangunan infrastruktur dasar pembangunan adalah pembangunan sarana jalan yang merupakan salah satu bagian dari pembangunan suatu wilayah. Kondisi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi seperti sekarang ini, menuntut tersedianya prasarana jalan yang memadai. Ketersediaan prasarana jalan yang memadai dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki proporsi panjang jalan dalam kondisi baik yang meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2020 mencapai 53,37% panjang jalan dalam kondisi baik.

Tabel II.101
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang jalan kondisi baik (km)	60.133	138.844	164.0417	288.52	334.56
2.	Panjang jalan seluruhnya (km)	162.039	297.311	323.5536	554.66	626.87
3.	(1/2 x 100)	37.11	46.70	50.70	52.02	53.37

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

2.3.1.1.3.1.2. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Perkembangan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.102 berikut ini.

Tabel II.102
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah panjang jalan	162.039	297.311	323.5536	554.66	626.87
2.	Jumlah penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 100)	0.0397	0.0725	0.0781	0.1336	0.1504

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021



2.3.1.1.3.1.3. Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)

Perkembangan persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.103 berikut ini.

Tabel II.103
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan dranesi (Km)	1,67	3,03	3,33	7,88	12,98
2.	Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	162.039	297.311	323.5536	554.66	626.87
3.	(1/2 x 100)	1.03	1.03	1.30	1.42	2.07

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

2.3.1.1.3.1.4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen.

Tabel II.104
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	24,292	34,090	43,998	43,641	68,285
2.	Jumlah rumah tinggal	84,406	85,259	86,120	86,990	87,868
3.	(1/2 x 100)	28.78	39.98	51.09	50.17	77.71

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2021

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2019. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2016 sebesar 28,78% dan meningkat menjadi 39,98% di tahun 2017. Pada tahun 2018 persentase rumah tangga dengan akses sanitasi sebanyak 51,09% dan menurun menjadi 50,17% pada tahun 2019, dan meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi sebesar 77,71%.



**2.3.1.1.3.1.5. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/
Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat**

Drainase berfungsi untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Drainase merupakan salah satu cara untuk membuang kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah. Selain itu tujuan dari drainase adalah salah satu unsur dari prasarana kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat.

Tabel II.105
**Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/
Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)	25.10	44.90	51.62	58.35	75.83
2.	Panjang seluruh drainase di daerah Kabupaten (Km)	139.48	149.54	160.32	164.82	186.28
3.	(1/2 x 100)	18.00	30.03	32.20	35.40	40.71

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

2.3.1.1.3.1.6. Persentase Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Perkembangan persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.106 berikut ini.

Tabel II.106
**Persentase Pembangunan Turap Di Wilayah
Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	6.521	7.180	8.879	14.248	14.605
2.	Jumlah seluruh wilayah rawan longsor	93.74	93.74	93.74	93.74	93.74
3.	(1/2 x 100)	6.96	7.66	9.47	15.20	15.58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

2.3.1.1.3.1.7. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Perkembangan luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.107 berikut ini.

Tabel II.107
**Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	4,167	4,177	3,192	3,404	3,483
2.	Luas Irigasi Kabupaten	5,179	5,179	5,179	5,179	5,179
3.	(1/2 x 100)	80.46	80.65	61.63	65.73	67.25

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021



Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan daerah irigasi yang mempunyai kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 67,25%. Apabila dilihat perkembangan selama tahun 2016-2020 kondisi kerusakan daerah irigasi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 dan tahun 2017. Maka untuk keberlanjutan pengelolaan irigasi dan dapat dipertahankan keberfungsian, salah satunya diperlukan partisipasi petani melalui organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

2.3.1.1.3.1.8. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terus meningkat. Pada tahun 2016 sebesar 70% terus meningkat hingga menjadi sebesar 83,26% pada tahun 2020.

Tabel II.108
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penduduk berakses air minum	285,496	295,582	328,460	332,829	347,025
2.	Jumlah penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 100)	70.00	72.04	79.29	80.18	83.26

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

2.3.1.1.3.1.9. Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen.

Tabel II.109
Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak	25,184	31,083	37,594	43,994	53,289
2.	Jumlah rumah tangga seluruhnya	93,345	93,398	94,504	95,557	97,202
3.	1/2 x 100	26.98	33.28	39.78	46.04	54.82

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

Sampai dengan tahun 2020, masih banyak rumah tangga di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum menggunakan air bersih



dalam kehidupan sehari-hari. Rumah tangga yang telah menggunakan air bersih hanya mencapai 54,82% saja. Tentu hal ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ada dua faktor penyebab rendahnya penggunaan air bersih oleh rumah tangga di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang pertama yaitu sulit akses terhadap air bersih, dan yang kedua adalah tingkat pengetahuan dan budaya masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah harus terus mengupayakan program penyediaan dan pemerataan sarana air bersih juga sekaligus penyebarluasan informasi dan pengetahuan tentang air bersih, serta perubahan kebiasaan dalam penggunaan air.

2.3.1.1.3.1.10. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Perkembangan rasio tempat ibadah per satuan penduduk tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.110 berikut ini.

Tabel II.110

**Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah tempat ibadah	450	450	415	415	456
2.	Jumlah penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 100)	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

2.3.1.1.3.2. Penataan Ruang

Dari sisi penataan ruang, terlihat bahwa rasio ruang terbuka hijau meningkat hingga 50,72% yang mengindikasikan fokus Pemerintah dalam penghijauan sangat baik. Selain itu, jumlah bangunan ber-IMB secara umum juga meningkat hingga mencapai 687 IMB di tahun 2020.

Tabel II.111

**Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas ruang terbuka hijau	0	0	54,005.43	278,652.60	278,652.60
2.	Luas wilayah (Ha)	549,394	549,394	549,394	549,394	549,394
3.	(1/2)	0	0	9.83	50.72	50.72

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

Tabel II.112

**Jumlah Bangunan Ber-IMB
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah bangunan ber-IMB	355	404	506	648	687

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tahun 2021

2.3.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Secara umum, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mengalami penurunan di mana persentase rumah layak huni pada tahun 2016 sebesar 77,93% menjadi sebesar 77,13% pada tahun 2020, dan rasio permukiman layak huni mencapai 0,96.



2.3.1.1.4.1. Persentase Rumah Layak Huni

Perkembangan persentase rumah layak huni tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.113 berikut ini.

Tabel II.113
Persentase Rumah Layak Huni
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah unit rumah layak huni	65,774	66,274	66,274	67,274	67,774
2.	Jumlah unit rumah tinggal Kabupaten	84,406	85,259	86,120	86,990	87,868
3.	(1/2 x 100)	77.93	77.73	76.96	77.34	77.13

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2021

2.3.1.1.4.2. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman.

Tabel II.114
Rasio Permukiman Layak Huni
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas permukiman layak huni	1,042	1,251	2,119	3,337.35	3,346.33
2.	Luas wilayah permukiman	3,474.25	3,474.25	3,474.25	3,474.25	3,474.25
3.	(1/2)	0.30	0.36	0.61	0.96	0.96

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2021

2.3.1.1.4.3. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Perkembangan persentase lingkungan permukiman kumuh tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.115 berikut ini.

Tabel II.115
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas lingkungan permukiman kumuh (ha)	312.70	194.60	137.90	136.90	127.97
2.	Luas wilayah permukiman (ha)	3,474.25	3,474.25	3,474.25	3,474.25	3,474.25
3.	(1/2 x 100)	9.00	5.60	3.97	3.94	3.68

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2021

2.3.1.1.4.4. Backlog Rumah Tinggal

Perkembangan backlog rumah tinggal tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.116 berikut ini.



Tabel II.116
Backlog Rumah Tinggal
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	86,019	87,144	88,232	89,276	90,271
2.	Jumlah unit rumah tinggal (RT)	84,406	85,259	86,120	86,990	87,868
3.	(1-2)	1,613	1,885	2,112	2,286	2,403

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2021

2.3.1.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
2.3.1.1.5.1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Perkembangan cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 2016-2020 disajikan pada Tabel II.117 berikut ini.

Tabel II.117
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah mobil pemadam kebakaran	7	7	7	7	7
2.	Jumlah penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 10.000)	0.1716	0.1706	0.1690	0.1686	0.1679

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2021

2.3.1.1.5.2. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Perkembangan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) 2016-2020 disajikan pada Tabel II.118 berikut ini.

Tabel II.118
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	N.A	N.A	N.A	14	9
2.	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK	N.A	N.A	N.A	19	12
3.	(1/2 x 100)	N.A	N.A	N.A	73.68	75.00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2021

2.3.1.1.5.3. Persentase Penegakan Perda

Perkembangan persentase penegakan Perda tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.119 berikut ini.



Tabel II.119
Persentase Penegakan Perda
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	11	13	7	12	17
2.	Jumlah pelanggaran PERDA	20	20	10	15	17
3.	(1/2 x 100)	55.00	65.00	70.00	80.00	100.00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2021

2.3.1.1.5.4. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja merupakan aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas Pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Tabel II.120
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	274	273	280	277	277
2.	Jumlah penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 10.000)	6.72	6.65	6.76	6.67	6.65

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel II.120 di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk di Kabupaten Komering Ulu Selatan sebesar 6,65, menurun dari tahun 2019 sebesar 6,67. Semakin besar rasio jumlah Polisi Pamong Praja maka akan semakin besar ketersediaan Polisi Pamong Praja yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.3.1.1.5.5. Jumlah Linmas Pemilu Per Jumlah 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.

Tabel II.121
Jumlah Linmas Pemilu Per Jumlah 10.000 Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Linmas	3,699	3,699	3,852	3,902	3,902
2.	Jumlah penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 10.000)	90.69	90.15	92.99	94.00	93.62

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2021



2.3.1.1.5.6. Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP

Perkembangan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.122 berikut ini.

Tabel II.122

**Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	1	1	1	1	1

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2021

2.3.1.1.5.7. Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Perkembangan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.123 berikut ini.

Tabel II.123

**Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	1	1	1

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2021

2.3.1.1.5.8. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

Perkembangan jumlah organisasi kemasyarakatan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.124 berikut ini.

Tabel II.124

**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ormas terdaftar	17	17	17	24	25

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2021

2.3.1.1.5.9. Jumlah Desa Tangguh Bencana Yang Terbentuk

Lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah adalah daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencana daerah.

Tabel II.125

**Jumlah Desa Tangguh Bencana Yang Terbentuk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	0	0	1 (Desa Cukoh Nau)	2 (Desa Sadau Jaya)	2 (Desa Sadau Jaya dan Cukoh Nau)

Sumber: BPBD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.3.1.1.5.10. Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca Dan Iklim Serta Kebencanaan

Jumlah sistem peringatan dini adalah sistem pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu kota oleh lembaga yang berwenang.



Tabel II.126
Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Serta Kebencanaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Banyaknya sistem peringatan dini	0	0	0	0	1 (WFR/Deteksi Gempa BMKG)

Sumber: BPBD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.3.1.1.5.11. Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Tabel II.127
Dokumen Strategi Pengurangan Risiko
Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD),	0	0	0	0	0
2.	Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB),	0	0	0	0	0
3.	Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).	0	0	0	0	0
4.	Rencana kontigensi Menghadapi Bencana Banjir Kabupaten OKU Selatan	0	1	1	1	1
5.	Kajian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Kabupaten OKU Selatan	1	1	1	1	1

Sumber: BPBD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.3.1.1.6. Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan yang diperhatikan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial.

2.3.1.1.6.1. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Perkembangan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.128 berikut ini.



Tabel II.128
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	2,674	2,826	49,053	62,208	35,593
2.	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	125,615	125,615	125,615	125,615	125,615
3.	(1/2 x 100)	2.13	2.25	39.05	49.52	28.33

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2021

2.3.1.1.6.2. Persentase PMKS Yang Tertangani

Perkembangan persentase PMKS yang tertangani tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.129 berikut ini.

Tabel II.129
Persentase PMKS Yang Tertangani
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PMKS yang tertangani	101,246	106,773	55,873	62,634	35,593
2.	Jumlah PMKS yang ada	125,615	125,615	125,615	125,615	125,615
3.	(1/2 x 100)	80.60	85.00	44.48	49.86	28.33

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2021

2.3.1.1.6.3. Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Perkembangan persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.130 berikut ini.

Tabel II.130
Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	103	200	125	175	217
2.	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043
3.	(1/2 x 100)	3.38	6.57	4.11	5.75	7.13

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2021

2.3.1.1.6.4. Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Perkembangan persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.131 berikut ini.



Tabel II.131
Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	420	390	550	500	0
2.	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	125,615	125,615	125,615	125,615	125,615
3.	(1/2 x 100)	0.33	0.31	0.44	0.40	0.00

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2021

2.3.1.1.6.5. Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Perkembangan persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.132 berikut ini.

Tabel II.132
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	0	0	0	0	0
2.	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	8	8	8	6	6
3.	(1/2 x 100)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2021

2.3.1.1.6.6. Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana). Masyarakat korban bencana dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, korban bencana yang mengalami psikososial dapat didampingi aktifitasnya, wilayah bencana alam/sosial dapat diidentifikasi, sehingga dapat dilakukan mitigasi bencana.



Tabel II.133
Persentase Korban Bencana Yang Menerima
Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	1,163	62	207	166	776
2.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	1,163	62	207	166	776
3.	(1/2 x 100)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2021

2.3.1.1.6.7. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Perkembangan persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.134 berikut ini.

Tabel II.134
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia
Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	103	200	125	175	167
2.	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	2,768	3,168	281	308	193
3.	(1/2 x 100)	3.72	6.31	44.48	56.82	86.53

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2021

2.3.1.1.6.8. Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. PKH juga sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Program serupa ini di negara lain dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* atau Bantuan Tunai Bersyarat. PKH diperuntukan bagi rumah tangga/keluarga miskin, namun diutamakan bagi rumah tangga/keluarga sangat miskin yang memiliki ibu hamil/ menyusui, dan anak umur 0-15 tahun, atau anak umur 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya, lansia dan penyandang disabilitas.



Mulai tahun 2016, target yang menjadi penerima bantuan tunai bersyarat adalah keluarga miskin. PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga/keluarga miskin dan rumah tangga/keluarga sangat miskin. Sebagai bantuan tunai bersyarat imbalannya rumah tangga/keluarga miskin dan rumah tangga/keluarga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan dan kesehatan.

Tabel II.135
Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan
Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	7,731 KPM	7,581 KPM	15,110 KPM	14,536 KPM	18,383 KPM

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2021

Adapun manfaat program PKH adalah memantau upaya Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kelompok masyarakat miskin. Secara jangka panjang, untuk memutus mata rantai kemiskinan rumah tangga/keluarga miskin dan rumah tangga/keluarga sangat miskin melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak (*price effect*) serta memberikan kepastian akan masa depan anak (*insurance effect*) dan mengubah perilaku (*behaviour effect*) keluarga miskin.

2.3.1.1.6.9. Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Perkembangan jumlah sarana sosial di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.136 berikut ini.

Tabel II.136
Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan,
Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah panti asuhan	8	8	8	6	6
2.	Jumlah panti jompo	0	0	0	0	0
3.	Panti rehabilitasi	0	0	0	0	0
	Jumlah	8	8	8	6	6

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2021



2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.2.1. Tenaga Kerja

Angkatan kerja yang berkualitas akan menentukan kualitas pekerjaan yang didapatkan. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana lapangan usaha mampu menyerap angkatan kerja sebanyak-banyaknya sehingga terkadang kompetensi individu di”nomor dua”kan. Terlihat baik angka partisipasi angkatan kerja maupun tingkat partisipasi angkatan kerja cukup banyak. Dari total angkatan kerja sebanyak 192.155 jiwa tersebut, sebanyak 3,28% menjadi pengangguran. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 (2,99%).,

Tabel II.137
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angkatan kerja 15 tahun Ke atas	292,070	200,292	196,769	200,358	192,155
2.	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	305,142	251,583	255,465	258,377	300,316
3.	(1/2 x 100)	95.72	79.61	77.02	77.54	63.98

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Tabel II.138
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	N.A	79.41	76.83	76.92	71.47
	▪ Laki-laki	N.A	88.77	88.11	90.42	80.67
	▪ Perempuan	N.A	68.83	64.09	61.75	61.11

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Tabel II.139
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	N.A	3.54	4.11	2.99	3.28
	▪ Laki-laki	N.A	3.04	3.18	2.26	3.58
	▪ Perempuan	N.A	4.26	5.56	4.19	2.83

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan dari sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja). Perlu digaris bawahi bahwa secara tingkat kesempatan kerja masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



mengalami penurunan sehingga perlu adanya *treatment* dalam meningkatkan penyerapan angkatan kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Tabel II.140
Rasio Penduduk Yang Bekerja
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penduduk yang bekerja	186,725	193,210	188,684	194,367	185,850
2.	Angkatan kerja	292,070	200,292	196,769	200,358	192,155
3.	(1/2 x 100)	63.93	96.46	95.89	97.01	96.72

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Terlihat pula rasio kesempatan kerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan hingga mencapai 74,97% pada tahun 2019, dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 60,28%.

Tabel II.141
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kesempatan kerja	186,725	193,210	188,684	194,367	185,850
2.	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	305,142	251,583	255,465	259,257	308,316
3.	(1/2 x 100)	61.19	76.80	73.86	74.97	60.28

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga merupakan status pekerjaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil di mana omsetnya tidak terlalu besar dan tidak membutuhkan tenaga kerja. Terlihat bahwa proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas mengalami kenaikan yang mengindikasikan bahwa usaha kecil semakin banyak terutama wirausaha baru.

Tabel II.142
Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga	113,605	113,399	105,332	107,508	99,990
	▪ Berusaha sendiri	26,440	32,990	31,791	30,595	25,682
	▪ Pekerja bebas	10,835	8,777	12,723	12,378	10,478
	▪ Pekerja keluarga/tidak dibayar	76,330	71,632	60,818	64,535	63,830
2.	Total kesempatan kerja	186,725	193,210	188,684	194,367	185,850
3.	(1/2 x 100)	60.84	58.69	55.82	55.31	53.80

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Keselamatan dan perlindungan kerja pada tenaga kerja merupakan prioritas utama bagi perusahaan untuk meningkatkan keamanan kerja bagi seluruh buruh/karyawan yang bekerja baik pekerja tetap maupun tidak tetap. Capaian positif dalam upaya peningkatan keselamatan dan



perlindungan kerja terlihat dari meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan K3 secara menyeluruh pada perusahaannya. Terlihat sebesar 589 perusahaan atau 39,93% perusahaan yang telah menerapkan K3 pada tahun 2020.

Tabel II.143
Keselamatan dan Perlindungan Kerja
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun n	367	421	531	589	589
2.	Jumlah perusahaan di wilayah Kabupaten pada tahun n	1,051	1,329	1,329	1,452	1,475
3.	(1/2 x 100)	34,92	31,68	39,95	40,56	39.93

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2021

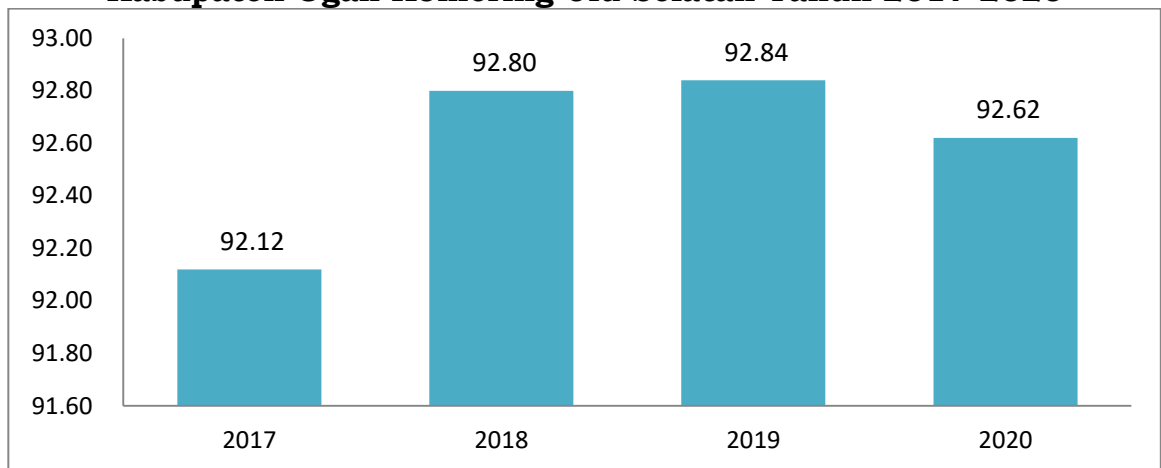
2.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, Pemerintah berupaya untuk terus melakukan pembangunan kualitas hidup manusia melalui kegiatan pembangunan. Upaya tersebut pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu, akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok-kelompok yang mengalami ketertinggalan dalam proses pembangunan tersebut; baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Salah satu hal yang menyebabkan ketertinggalan dari beberapa kelompok tersebut adalah masih belum terciptanya kondisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pembangunan dewasa ini seringkali mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kondisi ini diperburuk oleh persoalan lain seperti budaya, atau agama yang terkadang dapat menjadi faktor penghambat untuk mencapai kesetaraan gender.

2.3.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pembangunan gender di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan di mana pada tahun 2020 mencapai 92,62. Angka ini menunjukkan upaya pembangunan gender dilaksanakan cukup baik. Beberapa aspek, perempuan memiliki kecenderungan indikasi lebih baik dibanding laki-laki seperti aspek kesehatan maupun harapan lama sekolah. Sedangkan beberapa aspek pembangunan manusia, laki-laki lebih baik dibanding perempuan seperti aspek perekonomian dan rata-rata lama sekolah.

Gambar II.13
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017-2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Tabel II.144
Perkembangan Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018-2020

Tahun	Komponen IPG								IPG
	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-Rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita		
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
2018	64.49	68.38	11.48	12.11	7.89	7.74	11,929	7,306	92.80
2019	64.75	68.66	11.49	12.12	7.90	7.75	12,544	7,583	92.84
2020	64.98	68.97	11.50	12.13	7.98	7.76	12,180	7,360	92.62

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

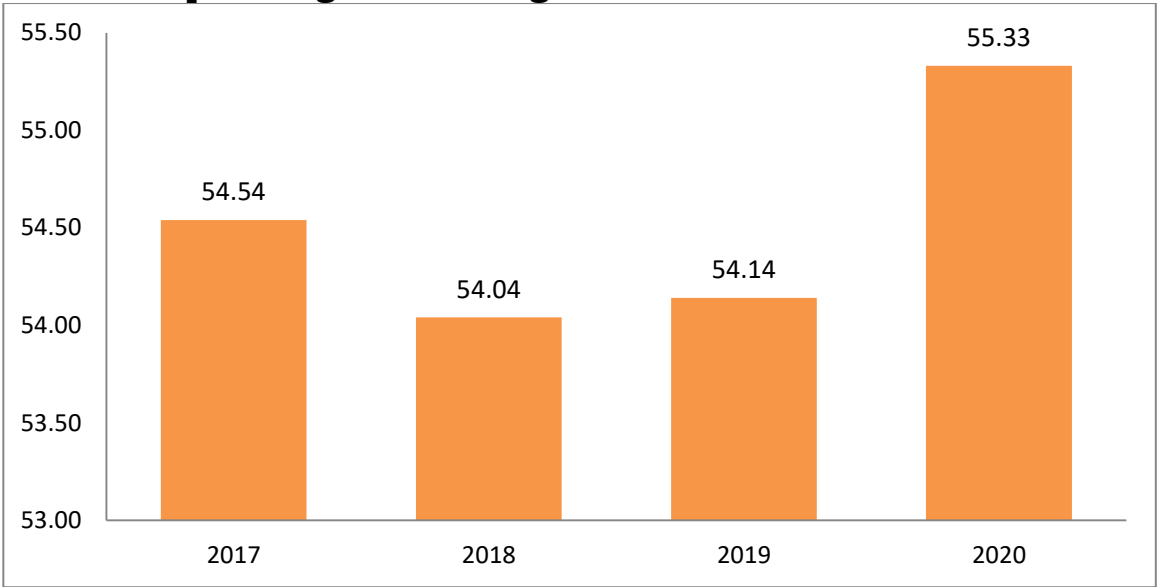
Dilihat dari komponen pembentuk IPG di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, komponen angka harapan hidup dan harapan lama sekolah menunjukkan tren meningkat dan angka perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Untuk rata-rata lama sekolah menunjukkan tren meningkat dan angka laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan artinya agar terjadi kesetaraan, yang perlu diprioritaskan untuk diintervensi pada rata-rata lama sekolah adalah perempuan. Sementara untuk pengeluaran per kapita nilainya berfluktuasi dan angka laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dari keempat komponen tersebut hanya pada komponen angka harapan hidup dan harapan lama sekolah nilai perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender pada kedua komponen IPG tersebut maka perempuanlah yang diprioritaskan untuk diintervensi karena keduanya menunjukkan angka perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kesenjangan yang paling besar dari ketiga komponen tersebut adalah pada komponen pengeluaran per kapita.



2.3.1.2.2.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sampai dengan tahun 2020 indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan baru mencapai 55,33 meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 54,14 padahal pada tahun 2017 mencapai 54,54. Hal ini cukup memperlihatkan minimnya pemberdayaan perempuan di mana capaian skornya yang kurang maksimal.

Gambar II.14
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017-2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk dari beberapa indikator yaitu persentase perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional, dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan data-data dari indikator tersebut.

Tabel II.145
Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017-2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase perempuan di parlemen	10.00	10.00	12.50	12.50
2.	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	55.31	58.32	61.76	65.20
3.	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	23.26	23.49	23.52	23.68

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Kondisi ketimpangan gender utamanya dapat dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan ekonomi. Perempuan yang berdaya salah satunya dapat dilihat dari kondisi finansial. Tak dapat dipungkiri lagi, keterbatasan kontribusi perempuan dalam perekonomian terjadi karena adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja. Jika hal ini masih terus terjadi, kesetaraan gender dalam penciptaan pendapatan tampaknya tidak akan mudah dicapai.



Meski menunjukkan capaian yang jauh lebih rendah diberbagai indikator ekonomi dan tenaga kerja, namun peran perempuan dalam penciptaan pendapatan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

2.3.1.2.2.3. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan Pemerintah Daerah adalah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat (anggota DPR RI, DPD RI), keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan perempuan di Pemerintah Daerah yang menduduki posisi Gubernur, Bupati, Walikota, eselon I dan II.

Tabel II.146
Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	4	4	4	5	5
2.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	40	40	40	40	40
3.	(1/2 x 100)	10.00	10.00	10.00	12.50	12,50

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021

2.3.1.2.2.4. Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Perkembangan persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.147 berikut ini.

Tabel II.147
Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pekerja perempuan di lembaga swasta (buruh/karyawan/pegawai)	7834	8577	7626	8982	9031
2.	Jumlah pekerja perempuan	71.895	77996	72779	72565	72565
3.	(1/2 x 100)	10,90	11.00	10.48	12.38	12.45

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021

2.3.1.2.2.5. Rasio KDRT

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU. No. 35 Tahun 2014).



Tabel II.148
Rasio KDRT
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kekerasan pada perempuan	7	15	14	17	32
2.	Jumlah kekerasan pada anak	9	14	14	9	21
3.	Jumlah rumah tangga	93,345	93,398	94,504	95,557	97,202
4.	$(1+2)/3 \times 100$	0.017	0.031	0.030	0.027	0.055

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021

2.3.1.2.2.6. Jumlah Kebijakan Yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan

Hukum nasional responsif gender adalah sistem atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang berpihak pada kesetaraan gender tidak membedakan laki-laki dan perempuan terhadap akses, partisipasi, manfaat, kontrol terhadap sumber daya dan pembangunan.

Tabel II.149
Jumlah Kebijakan Yang Responsif Gender
Mendukung Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	0	0	0	0	1 Perda

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021

2.3.1.2.2.7. Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Managerial

Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II. Untuk mengetahui perkembangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif.

Tabel II.150
Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Managerial
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II)	4	4	4	5	5
2.	Jumlah seluruh pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II)	31	31	31	31	31
3.	$(1/2 \times 100)$	12.90	12.90	12.90	16.13	16.13

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Tahun 2021



2.3.1.2.2.8. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, upaya pelaksanaan Kabupaten Layak Anak secara resmi dimulai dan ditandai dengan peluncuran Deklarasi Kabupaten dan Kecamatan Layak Anak pada tanggal 9 Agustus 2018. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Para FKPD, Para Kepala OPD, Para Camat se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, TP PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Persit, Bhayangkari, Dharmawanita Persatuan, dan Organisasi Wanita se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang digunakan untuk mengukur pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dibagi dalam 5 (lima) kluster, adalah:

Klaster I, Hak Sipil dan Kebebasan, mencakup pemenuhan hak anak, yaitu:

- 1) Hak atas identitas;
- 2) Hak perlindungan identitas;
- 3) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- 4) Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
- 5) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- 6) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- 7) Hak akses informasi yang layak; serta
- 8) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Klaster II, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi beberapa aspek, yaitu:

- 1) Bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
- 2) Anak yang terpisah dari orang tua;
- 3) Reunifikasi (pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan);
- 4) Pemindahan anak secara ilegal;
- 5) Dukungan kesejahteraan bagi anak;
- 6) Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- 7) Pengangkatan/adopsi anak;
- 8) Tinjauan penempatan secara berkala; serta
- 9) Kekerasan dan penelantaran.

Klaster III, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi beberapa aspek, yaitu:

- 1) Anak penyandang disabilitas;
- 2) Kesehatan dan layanan kesehatan;
- 3) Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; serta
- 4) Standar hidup.



Klaster IV, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, meliputi beberapa aspek, yaitu:

- 1) Pendidikan;
- 2) Tujuan pendidikan; serta
- 3) Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya.

Klaster V, Perlindungan Khusus, meliputi beberapa aspek, yaitu:

- 1) Anak dalam situasi darurat;
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
- 3) Anak dalam situasi eksploitasi; serta
- 4) Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat.

Adapun kategori penghargaan KLA adalah: 1) Kabupaten/Kota Layak Anak, 2) Utama (801-900), 3) Nindya (701-800), 4) Madya (601-700), dan 5) Pratama (500-600). Hasil evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 pada tahap penilaian mandiri sebesar 577,42 (sudah di *approve*).

2.3.1.2.3. Pangan

Pangan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena merupakan kebutuhan primer/dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan capaian kinerja positif pada urusan pangan.

2.3.1.2.3.1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya.

Tabel II.151
Ketersediaan Pangan Utama
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (ton)	245,509.60	307,727.30	403,191.50	406,253.76	414,790.00
2.	Jumlah penduduk	407851	410303	414252	415107	416797
3.	(1/2 x 100)	60.20	75.00	97.33	97.87	99.52

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2021

Ketersediaan pangan utama pada tahun 2016 sebesar 60,20%, meningkat pada tahun 2017 menjadi 75,00%, dan meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 97,33% dan tahun 2019 meningkat sebesar 97,87%, terakhir pada tahun 2020 menjadi sebesar 99,52%.

2.3.1.2.3.2. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Perkembangan ketersediaan energi dan protein tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.152 berikut ini.



Tabel II.152
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan energi perkapita (Kkal)	3,179	3,180	3,180	3,180	3,186
2.	Ketersediaan protein perkapita (gr)	41.27	51.41	61.55	71.69	78.96

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2021

2.3.1.2.3.3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Perkembangan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.153 berikut ini.

Tabel II.153
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku	0	0	8	8	0
2.	Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan	0	0	8	10	0
3.	(1/2 x 100)	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2021

2.3.1.2.3.4. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Perkembangan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.154 berikut ini.

Tabel II.154
Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2021

2.3.1.2.4. Lingkungan Hidup

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai bagian dari wilayah Sumatera, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki ekosistem yang sangat beranekaragam dan membentuk lingkungan hidup yang mampu memberikan manfaat terhadap kehidupan. Sedangkan aktivitas ekonomi yang berlangsung memiliki potensi menyebabkan degradasi kualitas lingkungan hidup seperti sektor pertambangan dan penggalian.



Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum sepenuhnya mendokumentasikan berbagai rencana untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup wilayah. Meskipun begitu, upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengantisipasi degradasi lingkungan hidup sangat terasa. Berikut capaian indikator urusan lingkungan.

2.3.1.2.4.1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Dari Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Perkembangan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.155 berikut ini.

Tabel II.155

Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Dari Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang ditangani	0	0	0	106	101
2.	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	0	0	0	106	101
3.	(1/2 x 100)	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.2. Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota

Perkembangan peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.156 berikut ini.



Tabel II.156

Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	0	0	0	0	0
2.	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.3. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA

Perkembangan terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.157 berikut ini.

Tabel II.157

Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah MHA yang diakui	0	0	0	1 (Desa Pagar Dewa Kec WRS)	1 (Desa Pagar Dewa Kec WRS)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.4. Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional

Perkembangan terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.158 berikut ini.

Tabel II.158

Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi	0	0	0	1 (Desa Pagar Dewa Kec WRS)	1 (Desa Pagar Dewa Kec WRS)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.5. Terverifikasi Hak Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan Tradisional

Perkembangan terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.159 berikut ini.

Tabel II.159

Terverifikasi Hak Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan Tradisional Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi	0	0	0	1 (Desa Pagar Dewa Kec WRS)	1 (Desa Pagar Dewa Kec WRS)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021



2.3.1.2.4.6. **Penetapan hak MHA**

Perkembangan penetapan hak MHA tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.160 berikut ini.

Tabel II.160

Penetapan Hak MHA

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penetapan hak MHA	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.7. **Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan**

Perkembangan terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.161 berikut ini.

Tabel II.161

Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah MHA yang difasilitasi	0	0	0	0	0
2.	Jumlah total MHA	0	0	0	1	1
3.	(1/2 x 100)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.8. **Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana**

Perkembangan terfasilitasi kegiatan penyediaan sarana/prasarana tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.162 berikut ini.

Tabel II.162

Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah MHA yang diberikan sarana/prasarana	0	0	0	0	0
2.	Jumlah total MHA	0	0	0	1	1
3.	(1/2 x 100)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.9. **Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat**

Perkembangan terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.163 berikut ini.

Tabel II.163

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.10. **Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**

Perkembangan terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.164 berikut ini.



Tabel II.164
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.11. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota

Perkembangan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.165 berikut ini.

Tabel II.165
Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengaduan masyarakat yang ditangani	0	0	0	2	2
2.	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	0	0	0	2	2
3.	(1/2 x 100)	0	0	0	100.00	100.00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.12. Timbulan Sampah Yang Ditangani

Perkembangan timbulan sampah yang ditangani tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.166 berikut ini.

Tabel II.166
Timbulan Sampah Yang Ditangani
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Volume timbulan sampah yang ditangani	30,486	31,629	32,693	33,696	34,821
2.	Total timbulan sampah	40,477	41,678	42,879	44,880	45,289
3.	(1/2 x 100)	75.32	75.89	76.24	75.08	76.89

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.13. Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R

Perkembangan persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.167 berikut ini.



Tabel II.167
Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.14. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Perkembangan persentase cakupan area pelayanan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.168 berikut ini.

Tabel II.168
Persentase Cakupan Area Pelayanan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km ² /ha)	30	30	32	37	38
2.	Luas area kabupaten/kota	549,394	549,394	549,394	549,394	549,394
3.	(1/2 x 100)	0.0055	0.0055	0.0058	0.0067	0.0069

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.15. Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani

Saat ini penanganan sampah bukan masalah yang mudah. Pertumbuhan penduduk yang meningkat drastis dan semakin banyaknya masyarakat yang konsumtif menjadi salah satu faktor pendukung semakin meningkatnya volume sampah. Di kota-kota besar sampah menjadi masalah besar dan mengakibatkan bencana.

Tabel II.169
Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	17,152	38,754	111,677	33,696	34,821
2.	Total jumlah timbunan sampah di Kabupaten/Kota (ton)	285,866	291,386	297,012	377,775	379,235
3.	(1/2 x 100)	6.00	13.30	37.60	8.92	9.18

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.16. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA Di Kabupaten/Kota

Perkembangan operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.170 berikut ini.

Tabel II.170
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA Di Kabupaten/Kota
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021



2.3.1.2.4.17. Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan

Perkembangan persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.171 berikut ini.

Tabel II.171

Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit	0	0	0	0	0
2.	Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun	0	0	0	0	0
3.	(1/2 x 100)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.18. Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Perkembangan persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan 2016-2020 disajikan pada Tabel II.172 berikut ini.

Tabel II.172

Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan	0	0	0	0	0
2.	Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta	0	0	0	0	0
3.	(1/2 x 100)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.19. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Perkembangan tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.173 berikut ini.

Tabel II.173

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah daya tampung TPS (m3)	13,323	13,323	13,323	13,323	13,323
2.	Jumlah penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 100)	3.27	3.25	3.22	3.21	3.20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021



2.3.1.2.4.20. Kualitas Air Danau

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya (PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). Air permukaan termasuk air sungai dan danau dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti: sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan pembangkit listrik, transportasi, dan sebagai tempat rekreasi.

Tabel II.174

Kualitas Air Danau

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kualitas air danau	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.21. Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. (PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum (PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air. Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air sungai dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarnya, sekaligus menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA).

Tabel II.175

Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.4.22. Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (sektor industri)

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (PP Nomor 101 Tahun 2014). Jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola sesuai peraturan perundangan adalah jumlah seluruh timbulan limbah B3 dari berbagai kegiatan industri yang dikelola selama tahun berjalan. Jumlah limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan adalah jumlah timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.



Tabel II.176
Jumlah limbah B3 Yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 Yang
Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Banyaknya timbunan limbah B3 dari sektor industri manufaktur yang dikelola	0	0	0	0	0
2.	Banyaknya timbunan limbah B3 dari sektor agroindustri yang dikelola	0	0	0	0	0
3.	Banyaknya timbunan limbah B3 dari sektor pertambangan, energi dan migas yang dikelola	0	0	0	0	0
4.	Banyaknya timbunan limbah B3 dari sektor prasarana jasa yang dikelola	0	0	0	0	0
5..	(1+2+3+4+5)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.3.1.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.1.2.5.1. Rasio Penduduk berKTP Per Satuan Penduduk

Perkembangan rasio penduduk berKTP per satuan penduduk tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.177 berikut ini.

Tabel II.177
Rasio Penduduk berKTP Per Satuan Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	170,224	178,030	199,954	208,751	266,584
2.	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	292,303	295,949	298,323	299,881	302,723
3.	(1/2)	0.58	0.60	0.67	0.70	0.88

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

2.3.1.2.5.2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Perkembangan rasio bayi berakte kelahiran tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.178 berikut ini.

Tabel II.178
Rasio Bayi Berakte Kelahiran
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah bayi berakte kelahiran	7,509	7,467	7,556	6,792	4,081
2.	Jumlah bayi lahir	7,822	7,698	7,790	7,003	6,700
3.	(1/2)	0.96	0.97	0.97	0.97	0.61

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

2.3.1.2.5.3. Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran

Perkembangan persentase anak yang memiliki akta kelahiran tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.179 berikut ini.



Tabel II.179
Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran	159,976	131,714	168,782	169,005	133,127
2.	Jumlah anak umur 0-17 tahun	186,822	185,434	185,679	182,936	138,084
3.	1/2 x 100	85.63	71.03	90.90	92.38	96.41

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

2.3.1.2.5.4. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Perkembangan rasio pasangan berakte nikah tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.180 berikut ini.

Tabel II.180
Rasio Pasangan Berakte Nikah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	2,256	2,717	6,494	12,697	42,198
2.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	97,456	97,910	97,151	99,922	129,745
3.	(1/2)	0.02	0.03	0.07	0.13	0.33

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

2.3.1.2.5.5. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Perkembangan ketersediaan database kependudukan skala Provinsi tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel III.181 berikut ini.

Tabel II.181
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

2.3.1.2.5.6. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Perkembangan penerapan KTP Nasional Berbasis NIK tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel III.182 berikut ini.

Tabel II.182
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

2.3.1.2.5.7. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk merupakan kartu identitas di Indonesia. Saat ini di Indonesia mulai diganti KTP yang lama dengan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik).



Tabel II.183
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	9,786	16,042	39,593	123,077	157,782
2.	Jumlah penduduk wajib KTP	292,303	295,949	298,323	299,881	302,723
3.	(1/2 x 100)	3.35	5.42	13.27	41.04	52.12

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel II.183 di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk ber-KTP tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Semakin tinggi persentase penduduk yang memiliki KTP, maka semakin tinggi capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Persentase penduduk ber-KTP yang terus meningkat akan memudahkan Pemerintah dalam melakukan pencatatan penduduk, serta memudahkan Pemerintah dalam merencanakan perencanaan yang akan dibuat.

2.3.1.2.5.8. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/Kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

Tabel II.184
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	7,509	7,467	7,556	6,792	4,081
2.	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	7,822	7,698	7,790	7,003	4,214
3.	(1/2 x 100)	96.00	97.00	97.00	96.99	96.84

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

2.3.1.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Di sini subyek merupakan motor penggerak dan bukan penerima manfaat atau obyek saja.



2.3.1.2.6.1. Jumlah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal

Perkembangan jumlah Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.185 berikut ini.

Tabel II.185

**Jumlah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Desa tertinggal	112	112	180	139	139
2.	Jumlah Desa sangat tertinggal	49	47	33	15	15

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tahun 2021

2.3.1.2.6.2. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Perkembangan cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Desa yang baik tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.186 berikut ini.

Tabel II.186

**Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran
Pemerintahan Desa Yang Baik**

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	126	163	177	177	230
2.	Jumlah seluruh pemerintahan desa	252	252	252	252	252
3.	(1/2 x 100)	50,00	64,68	70,24	70,24	91,27

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tahun 2021

2.3.1.2.6.3. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Program pembangunan yang mengarah ke pedesaan perlu ditingkatkan, mengingat pedesaan memiliki nilai-nilai tradisional, sehingga sesuai dengan hakekatnya bahwa pembangunan tersebut bertujuan untuk membimbing nilai-nilai tradisional tersebut ke arah yang lebih maju. Mengingat begitu pentingnya pembangunan pedesaan maka untuk tercapainya sasaran tersebut dibentuklah organisasi yang disebut dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai wadah partisipasi aktif masyarakat Desa yang memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan dan melakukan pembangunan Desa.

Tabel II.187

**Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelompok binaan LPM	19	19	22	22	22
2.	Jumlah LPM	259	259	259	259	259
3.	(1/2)	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tahun 2021



Berdasarkan Tabel II.187 di atas menunjukkan bahwa, sampai dengan tahun 2020 jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebanyak 22 kelompok, adapun jumlah LPM sebanyak 259 LPM, dengan demikian rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah sebanyak 1 kelompok per LPM.

2.3.1.2.6.4. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Perkembangan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.188 berikut ini.

Tabel II.188

**Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelompok binaan PKK	27	31	97	116	135
2.	Jumlah PKK	279	279	279	259	259
3.	(1/2)	0,097	0,111	0,348	0,448	0,520

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tahun 2021

2.3.1.2.6.5. Persentase LPM Berprestasi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berprestasi belum ada.

Tabel II.189

**Persentase LPM Berprestasi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah LPM berprestasi	0	0	0	0	0
2.	Jumlah LPM	259	259	259	259	259
3.	(1/2 x 100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tahun 2021

2.3.1.2.6.6. Persentase PKK Aktif

Perkembangan persentase PKK aktif tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.190 berikut ini.

Tabel II.190

**Persentase PKK Aktif
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PKK aktif	259	259	259	259	259
2.	Jumlah PKK	259	259	259	259	259
3.	(1/2 x 100)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tahun 2021

2.3.1.2.6.7. Persentase Posyandu Aktif

Perkembangan persentase posyandu aktif tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.191 berikut ini.



Tabel II.191
Persentase Posyandu Aktif
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah posyandu aktif	316	316	324	324	326
2.	Jumlah posyandu	324	324	324	325	326
3.	(1/2 x 100)	97,53	97,53	100,00	99,69	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tahun 2021

2.3.1.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana. Sebagaimana diketahui bahwa kependudukan merupakan isu sentral dalam pembangunan. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, sehingga berbagai upaya pembangunan tentu saja dilakukan dalam upaya pencapaian kesejahteraan penduduk.

Dalam rangka upaya pengendalian jumlah penduduk, maka Pemerintah menerapkan Program Keluarga Berencana (KB). Program KB dan kesehatan reproduksi saat ini tidak hanya ditujukan untuk penurunan angka kelahiran, namun dikaitkan pula dengan tujuan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi, promosi, pencegahan, dan penanganan masalah-masalah kesehatan reproduksi dan seksual, serta kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, dan anak.

2.3.1.2.7.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Perkembangan persentase laju pertumbuhan penduduk tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.192 berikut ini.

Tabel II.192
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase laju pertumbuhan penduduk	0.23	0.60	0.96	0.21	0.37

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021

2.3.1.2.7.2. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibandingkan dengan jumlah keluarga.

Tabel II.193
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak	228,695	217,617	220,194	220,656	218,806
2.	Jumlah rumah tangga	93,345	93,398	94,504	95,557	97,202
3.	(1/2)	2.45	2.33	2.33	2.31	2.25

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021



2.3.1.2.7.3. **Ratio Akseptor KB**

Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.

Tabel II.194

Ratio Akseptor KB

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah akseptor KB	50,802	65,362	61,277	54,041	50,277
2.	Jumlah pasangan usia subur	71,552	76,897	77,567	77,202	76,946
3.	(1/2)	0.71	0.85	0.79	0.70	0.65

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021

2.3.1.2.7.4. **Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49**

Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin adalah perbandingan antara pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Tabel II.195

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR

Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah peserta KB aktif	50,522	52,761	54,452	54,118	53,112
2.	Jumlah pasangan usia subur	71,552	76,897	77,567	77,202	76,946
3.	(1/2 x 100)	70.61	68.61	70.20	70.10	69.03

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021

2.3.1.2.7.5. **Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19)**

Angka ini diperlukan untuk memantau besarnya masalah kelahiran remaja. Semakin tinggi angka kelahiran remaja maka akan semakin tinggi risiko kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.

Tabel II.196

Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19)

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada periode tertentu	156	154	156	140	167
2.	Jumlah penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode waktu yang sama	12,151	12,251	12,344	12,433	12,406
3.	(1/2 x 100)	1.29	1.26	1.26	1.13	1.35

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021



2.3.1.2.7.6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Perkembangan cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.197 berikut ini.

Tabel II.197

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	0	0	0	693	714
2.	Jumlah pasangan usia subur	0	0	0	77,202	76,946
3.	(1/2 x 100)	0	0	0	0.89	0.93

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021

2.3.1.2.7.7. Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*unmet need*)

Proporsi pasangan usia subur (PUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak. Untuk mengetahui sejauh mana program KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin rendah angka *unmet need*, menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel II.198

Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*unmet need*) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	21,030	24,136	23,115	23,084	23,134
2.	Jumlah pasangan usia subur	71,552	76,897	77,567	77,202	76,946
3.	(1/2 x 100)	29.39	31.39	29.80	29.90	30.07

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021

2.3.1.2.7.8. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern adalah perbandingan antara pasangan usia subur (PUS) umur 15-49 tahun yang menjadi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama dinyatakan dalam persentase. Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) terdiri dari sterilisasi perempuan, sterilisasi pria, spiral/ IUD, dan susuk KB.



Tabel II.199
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah akseptor kb yang menggunakan MKJP	13,163	17,125	14,320	12,267	12,350
2.	Jumlah akseptor KB	50,802	65,362	61,277	54,041	59,277
3.	(1/2 x 100)	25.91	26.20	23.37	22.70	20.83

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021

2.3.1.2.7.9. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Perkembangan cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.200 berikut ini.

Tabel II.200
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	23,341	24,346	25,350	26,355	27,568
2.	Jumlah anggota kelompok BKB	48,259	48,259	48,259	48,259	48,259
3.	(1/2 x 100)	48.37	50.45	52.53	54.61	57.13

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021

2.3.1.2.7.10. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Perkembangan cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.201 berikut ini.

Tabel II.201
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	0	0	0	490	350
2.	Jumlah anggota kelompok BKR	0	0	0	10,801	11,021
3.	(1/2 x 100)	0	0	0	4.54	3.18

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021

2.3.1.2.7.11. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Perkembangan cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) Ber-KB tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.202 berikut ini.

Tabel II.202
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	0	0	0	1,035	1,175
2.	Jumlah anggota kelompok BKL	0	0	0	2,975	2,875
3.	(1/2 x 100)	0	0	0	34.79	40.87

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021



2.3.1.2.7.12. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri

Perkembangan cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.203 berikut ini.

Tabel II.203

**Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	0	0	0	693	508
2.	Jumlah anggota kelompok UPPKS	0	0	0	7,634	7,377
3.	(1/2 x 100)	0	0	0	9.07	6.89

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021

2.3.1.2.7.13. Cakupan Peserta KB aktif

Sasaran pelaksanaan program KB yaitu pasangan usia subur (PUS). PUS adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah PUS yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan.

Tabel II.204

**Cakupan Peserta KB aktif
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah peserta program KB aktif	50,523	52,759	54,452	54,118	53,112
2.	Jumlah pasangan usia subur	71,552	76,897	77,567	77,202	76,946
3.	(1/2 x 100)	70.61	68.61	70.20	70.10	69.03

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Tahun 2021

2.3.1.2.8. Perhubungan

2.3.1.2.8.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Perkembangan jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.205 berikut ini.

Tabel II.205

**Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	111,805	111,860	117,479	129,220	83,996

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021

2.3.1.2.8.2. Rasio Ijin Trayek

Perkembangan rasio ijin trayek tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.206 berikut ini.



Tabel II.206
Rasio Ijin Trayek
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Ijin trayek yang dikeluarkan	18	18	18	18	18
2.	Jumlah penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 10.000)	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021

2.3.1.2.8.3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Perkembangan jumlah uji kir angkutan umum tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.207 berikut ini.

Tabel II.207
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mobil penumpang umum	0	0	0	0	0
2.	Mobil bus	120	130	141	176	93
3.	Mobil barang	445	456	556	611	337
4.	Kereta gandengan	0	0	0	0	0
5.	Kereta tempelan	0	0	0	0	0
6.	Jumlah	565	586	697	787	430

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021

2.3.1.2.8.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Bandara atau bandar udara merupakan kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Dermaga pelabuhan penyeberangan merupakan pelabuhan umum untuk kegiatan penyeberangan. Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Tabel II.208
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah dermaga	1	2	2	2	2
2.	Terminal type B Muaradua	1	1	1	1	1
3.	Lapangan terbang Banding Agung	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021



2.3.1.2.8.5. Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu-rambu lalu lintas dan ketertiban lalu lintas merupakan salah satu tugas dari Dinas Perhubungan. Selain pemasangan rambu-rambu juga diperlukan perawatan secara berkala. Dengan demikian rambu-rambu dapat mengatur lalu lintas dalam jangka waktu yang lama.

Tabel II.209

Pemasangan Rambu-Rambu

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pemasangan rambu-rambu	306	358	496	540	576

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021

2.3.1.2.9. Komunikasi dan Informatika

2.3.1.2.9.1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Perkembangan cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.210 berikut ini.

Tabel II.210

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan

Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah KIM	0	0	0	19	19
2.	Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	19	19	19	19	19
3.	(1/2 x 100)	0	0	0	100,00	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2021

2.3.1.2.9.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana pada tahun 2020 cakupan layanannya menjadi 49,80%.

Tabel II.211

Cakupan Layanan Telekomunikasi

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Wilayah Yang Tercoverage	220,526	220,526	253,490	253,490	273,640
2.	Luas Wilayah Keseluruhan	549,394	549,394	549,394	549,394	549,394
3.	(1/2 x 100)	40,14	40,14	46,14	46,14	49,80

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2021

2.3.1.2.9.3. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Telepon genggam/telepon seluler, termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya. Proporsi individu yang memiliki telepon genggam adalah perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk.



Tabel II.212
Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon	326,280	350,603	356,256	310,681	326,018
2.	Jumlah penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 100)	80.00	85.45	86.00	74.84	78.22

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2021

2.3.1.2.9.4. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Akses internet juga semakin dirasakan masyarakat di mana capaian proporsi rumah tangga dengan akses internet juga meningkat menjadi 0,70 pada tahun 2020.

Tabel II.213
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	58,807	60,708	64,262	67,202	67,802
2.	Jumlah rumah tangga	93,345	93,398	94,504	95,557	97,202
3.	(1/2)	0.63	0.65	0.68	0.70	0.70

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2021

2.3.1.2.9.5. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi

Perkembangan proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.214 berikut ini.

Tabel II.214
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	36,504	38,293	40,636	43,201	43,870
2.	Jumlah rumah tangga	93,345	93,398	94,504	95,557	97,202
3.	(1/2)	0.39	0.41	0.43	0.45	0.45

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2021

2.3.1.2.10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2.3.1.2.10.1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin besar nilai persentase koperasi aktif, maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Saat ini ekonomi daerah sudah banyak yang berazaskan koperasi. Azas koperasi dipilih karena tujuan dari koperasi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Dengan demikian keberadaan koperasi harus didukung oleh Pemerintah, sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara Pemerintah dan koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah.



Tabel II.215
Persentase Koperasi Aktif
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah koperasi aktif	166	118	35	31	33
2.	Jumlah seluruh koperasi	277	165	173	179	180
3.	(1/2 x 100)	59.93	71.52	20.23	17.32	18.33

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel II.215 di atas menunjukkan bahwa persentase koperasi aktif pada tahun 2016 sebesar 59,93% naik menjadi 71,52% pada tahun 2017. Kemudian turun pada tahun 2018 menjadi sebesar 20,23%, dan turun lagi pada tahun 2019 menjadi sebesar 17,32%, terakhir pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 18,33%.

2.3.1.2.10.2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Perkembangan persentase usaha mikro dan kecil tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.216 berikut ini.

Tabel II.216
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah usaha mikro dan kecil	516	576	638	2,429	58,417
2.	Jumlah seluruh UKM	542	594	651	2,979	58,967
3.	(1/2 x 100)	95.20	96.97	98.00	81.54	99.07

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2021

2.3.1.2.10.3. Jumlah BPR/LKM

BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perekonomiannya.

Tabel II.217
Jumlah BPR/LKM
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah BPR	0	0	0	0	0
2.	Jumlah LKM	0	0	0	0	0
3.	Jumlah BPR dan LKM	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2021

2.3.1.2.11. Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu variabel pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat investasi juga menjadi salah satu ukuran tingkat daya saing daerah dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi yang kondusif. Secara umum, pergerakan investasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meningkat cukup pesat yang terlihat dari meningkatnya nilai investasi berskala nasional.



2.3.1.2.11.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Tabel II.218
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	21	23	7	14	11

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel II.218 di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2020 jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 11 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diharapkan dapat terus meningkat dengan demikian pendapatan daerah juga terus meningkat, namun peningkatan investasi diiringi dengan menjaga kelestarian alam terutama investasi penambangan.

2.3.1.2.11.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan nilai investasi tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.219 berikut ini.

Tabel II.219
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	100,3 Milyar	100,3 Milyar	318,4 Milyar	602,5 Milyar	906,9 Milyar

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tahun 2021

2.3.1.2.11.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Perkembangan rasio daya serap tenaga kerja tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.220 berikut ini.



Tabel II.220
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan	306	306	306	757	538
2.	Jumlah seluruh PMA/PMDN	21	23	7	14	11
3.	(1/2)	14.57	13.30	43.71	54.07	48.91

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tahun 2021

2.3.1.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

Baik persentase organisasi pemuda yang aktif, cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersertifikasi, dan cakupan pembinaan atlet muda mengalami kenaikan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan keaktifan pemuda dan aktivitas olahraga di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan. Berikut capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga secara lengkap.

2.3.1.2.12.1. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat sipil semata, akan tetapi organisasi kepemudaan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan.

Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, jumlah organisasi pemuda pada tahun 2016 sebesar 34 organisasi, meningkat menjadi sebanyak 46 organisasi pada tahun 2020.

Tabel II.221
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	34	37	42	46	46
2.	Jumlah seluruh organisasi pemuda	34	37	42	46	46
3.	(1/2 x 100)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2021

2.3.1.2.12.2. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Perkembangan jumlah kegiatan kepemudaan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.222 berikut ini.

Tabel II.222
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kegiatan kepemudaan	12	6	56	13	6

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2021



2.3.1.2.12.3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Perkembangan cakupan pembinaan olahraga tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.223 berikut ini.

Tabel II.223
Cakupan Pembinaan Olahraga
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah cabang olahraga yang dibina	8	9	11	21	21
2.	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	14	15	15	27	27
3.	(1/2 x 100)	57.14	60.00	73.33	77.78	77.78

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2021

2.3.1.2.12.4. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi

Perkembangan cakupan pelatih yang bersertifikasi tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.224 berikut ini.

Tabel II.224
Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pelatih bersertifikat	1	1	1	1	5
2.	Jumlah seluruh pelatih	14	15	15	27	27
3.	(1/2 x 100)	7.14	6.67	6.67	3.70	18.52

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2021

2.3.1.2.12.5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Perkembangan cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih sangat rendah. Sampai dengan tahun 2020 sebanyak 5 atlet pelajar yang dibina dari 205 atlet pelajar atau sebesar 2,44%. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga untuk pelatihan atlet, maka perlu pengadaan sarana prasarana olahraga.

Tabel II.225
Cakupan Pembinaan Atlet Muda
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah atlit pelajar yang dibina	3	4	4	5	5
2.	Jumlah seluruh atlit pelajar	205	205	205	205	205
3.	(1/2 x 100)	1.46	1.95	1.95	2.44	2.44

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2021

2.3.1.2.13. Statistik

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan Urusan Statistik berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan, khususnya publikasi dari instansi Badan Pusat Statistik. Beberapa publikasi yang menjadi landasan dalam melihat indikator pembangunan daerah seperti:

1. Buku “Kabupaten Dalam Angka”
2. Buku “PDRB Kabupaten”



Kedua dokumen di atas tersedia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yakni “Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Angka” dan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Menurut Lapangan Usaha”. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan dan penyusunan program kegiatan.

Tabel II.226
Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2021

2.3.1.2.14. Persandian

Urusan Persandian memang belum terlalu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah yang terlihat dari minimnya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah.

Tabel II.227
Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan
Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	0	0	3	1	1
2.	Jumlah total perangkat daerah	53	53	53	61	61
3.	$(1/2 \times 100)$	0	0	5,66	1,64	1,64

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2021

2.3.1.2.15. Kebudayaan

2.3.1.2.15.1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Festival dan seni budaya yang diselenggarakan Pemerintah merupakan salah satu cara mempromosikan atau memperkenalkan destinasi pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berujung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi sebuah festival dan event akan membangkitkan kepariwisataan sehingga para wisatawan akan lebih banyak berkunjung.

Tabel II.228
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	4	1

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2021



2.3.1.2.15.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Perkembangan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.229 berikut ini.

Tabel II.229

**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	1	1	1	2	2
2.	Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah	41	41	41	41	41
3.	(1/2 x 100)	2,44	2,44	2,44	4,88	4,88

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2021

2.3.1.2.15.3. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Perkembangan jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.230 berikut ini.

Tabel II.230

**Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2021

2.3.1.2.15.4. Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu

Perkembangan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.231 berikut ini.

Tabel II.231

**Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2021

2.3.1.2.16. Perpustakaan

2.3.1.2.16.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Meskipun secara total tidak terlalu besar jumlahnya, namun kenaikan kunjungan perpustakaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya membaca. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan ke perpustakaan mencapai 1.690 pengunjung. Selain itu, koleksi judul buku juga meningkat yang mencapai 5.081 koleksi judul buku.



Tabel II.232
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	1,120	1,168	1,220	1,562	1,690

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2021

2.3.1.2.16.2. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Perkembangan rasio perpustakaan per satuan penduduk periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.233 berikut ini.

Tabel II.233
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1
2.	Jumlah penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 1000)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2021

2.3.1.2.16.3. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Perkembangan jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.234 berikut ini.

Tabel II.234
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	185 orang	245 orang	1,000 orang	1,690 orang	1,200 orang

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2021

2.3.1.2.16.4. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Perkembangan jumlah koleksi judul buku perpustakaan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.235 berikut ini.

Tabel II.235
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	550	670	1,255	5,081	5,081

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2021

2.3.1.2.16.5. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Perkembangan jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.236 berikut ini.



Tabel II.236
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis,
dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2021

2.3.1.2.17. Kearsipan

2.3.1.2.17.1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Arsip berfungsi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta dipergunakan pula dalam penyelenggaraan administrasi negara, sehingga sistem kearsipan harus dapat berjalan dengan baik di setiap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu ukuran yang dilakukan adalah penerapan kearsipan secara baku di setiap perangkat daerah, di mana Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum sepenuhnya menerapkan arsip secara baku tersebut.

Tabel II.237

Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baku	0	0	0	0	4
2.	Jumlah Perangkat Daerah	53	53	53	53	53
3.	(1/2 x 100)	0	0	0	0	7.55

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2021

2.3.1.2.17.2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Perkembangan persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.238 berikut ini.

Tabel II.238

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	0	1	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2021

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Urusan pilihan merupakan Urusan Pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Berikut adalah urusan pilihan



yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

2.3.2.1. **Pariwisata**

Untuk menunjang perkembangannya suatu daerah tentunya diperlukan adanya tempat wisata yang dapat menarik wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, yang akhirnya dapat menambah pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, objek wisata perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang baik. Objek wisata yang sudah populer di masyarakat (objek wisata utama) yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu Danau Ranau.

Danau Ranau merupakan danau terbesar dan terindah di Sumatera Selatan yang terletak di Kecamatan Banding Agung, BPR Ranau Tengah, dan Warkuk Ranau Selatan. Berjarak sekitar 342 km dari kota Palembang, 130 km dari Kota Baturaja dan 50 km dari Kota Muaradua. Sementara dari Bandar Lampung, danau ini dapat ditempuh melalui Bukit Kemuning dan Liwa. Danau Ranau ini mempunyai luas sekitar 8 x 16 km dengan latar belakang Gunung Seminung, dikelilingi oleh bukit dan lembah dengan udara yang sejuk.

Tabel II.239
Potensi dan Objek Wisata
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Nama Objek Wisata	Tempat/ (Kecamatan)	Jarak Dari Ibukota Kabupaten (km)
1.	Danau Ranau	Banding Agung	50
2.	Air Panas Gunung Seminung	Banding Agung	55
3.	Air Terjun Subik Tuha	Banding Agung	65
4.	Air Terjun La'ai	Banding Agung	65
5.	Gunung Seminung	Banding Agung	65
6.	Makam Pahit Lidah	Banding Agung	50
7.	Pantai Senangkalan	Banding Agung	55
8.	Pulau Marisa	Banding Agung	50
9.	Goa Kubu Manuk	Banding Agung	55
10.	Goa Kubu Rawong	Banding Agung	55
11.	Batu Bersusun	Banding Agung	50
12.	Batu Kursi	Banding Agung	50
13.	Danau Rakihan	Sindang Danau	75
14.	Air Panas Jelijih	Sindang Danau	75
15.	Air Terjun Chuhup Tinggi	Pulau Beringin	75
16.	Danau Halim	Muaradua	17
17.	Air Terjun Manduriang	BPR Ranau Tengah	27
18.	Air Terjun Lumai	Buay Rawan	17
19.	Air Terjun Mehanggin	Muaradua	10
20.	Air Terjun Kabayan	Buay Sandang Aji	10
21.	Air Terjun Selundong	Buay Sandang Aji	10
22.	Makam Suka Banjar	Buay Sandang Aji	10
23.	Air Terjun Papan	Buay Runjung	35
24.	Goa Burung Walet	Buay Runjung	35
25.	Air Terjun Tanjung Besar	Mekakau Ilir	71

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2021



2.3.2.1.1. Kunjungan Wisata

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara adalah jumlah perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk bekerja atau sekolah.

Tabel II.240

Kunjungan Wisata
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah seluruh kunjungan wisata	13,534	30,000	35,010	45,796	11,959

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2021

Kunjungan wisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan cukup signifikan dalam waktu beberapa tahun ini di mana pada tahun 2019 meningkat mencapai 45.796 kunjungan, kemudian turun menjadi 11.691 kunjungan pada tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19*. Meskipun begitu, PAD dari sektor pariwisata belum optimal sehingga perlu adanya pembenahan dalam mendapatkan pemasukan dari sektor pariwisata tersebut.

2.3.2.1.2. Lama Kunjungan Wisata

Perkembangan lama kunjungan wisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.241 berikut ini.

Tabel II.241

Lama Kunjungan Wisata
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun (orang)	1,128	2,500	2,917	3,816	974

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2021

2.3.2.1.3. PAD Sektor Pariwisata

Perkembangan PAD sektor pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.242 berikut ini.

Tabel II.242

PAD Sektor Pariwisata
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	PAD sektor pariwisata	107	140	205	415	125
2.	Total PAD	35,696	89,506	42,993	57,669	46,947
3.	(1/2 x 100)	0.30	0.16	0.48	0.72	0.27

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2021

2.3.2.2. Pertanian

2.3.2.2.1. Kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB

Perkembangan kontribusi lapangan usaha sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.243 berikut ini.



Tabel II.243

**Kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018*	2019*	2020**
1.	Pertanian, kehutanan, perikanan	2,354.13	2,477.69	2,580.39	2,733.33	2,790.48
2.	Jumlah PDRB	7,014.61	7,592.14	8,136.43	8,795.70	8,975.76
3.	(1/2 x 100)	33.56	32.63	31.71	31.08	31.09

*angka sementara

**angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.3.2.2.2. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Perkembangan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.244 berikut ini.

Tabel II.244

**Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan
Utama Lokal Lainnya Per Hektar**

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Provitas padi (ton/ha)	4.90	4.93	5.30	5.03	4.54
2.	Provitas jagung (ton/ha)	6.00	6.30	7.08	6.37	7.15
3.	Provitas kedelai (ton/ha)	1.20	0.00	0.99	1.20	1.35

Sumber: Dinas Pertanian, Tahun 2021

2.3.2.2.3. Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami penurunan di mana pada tahun 2020 mencapai 47,10%. Hal ini juga berdampak pada produktivitas beberapa komoditas pertanian yang secara umum juga mengalami peningkatan.

Tabel II.245

Cakupan Bina Kelompok Petani

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

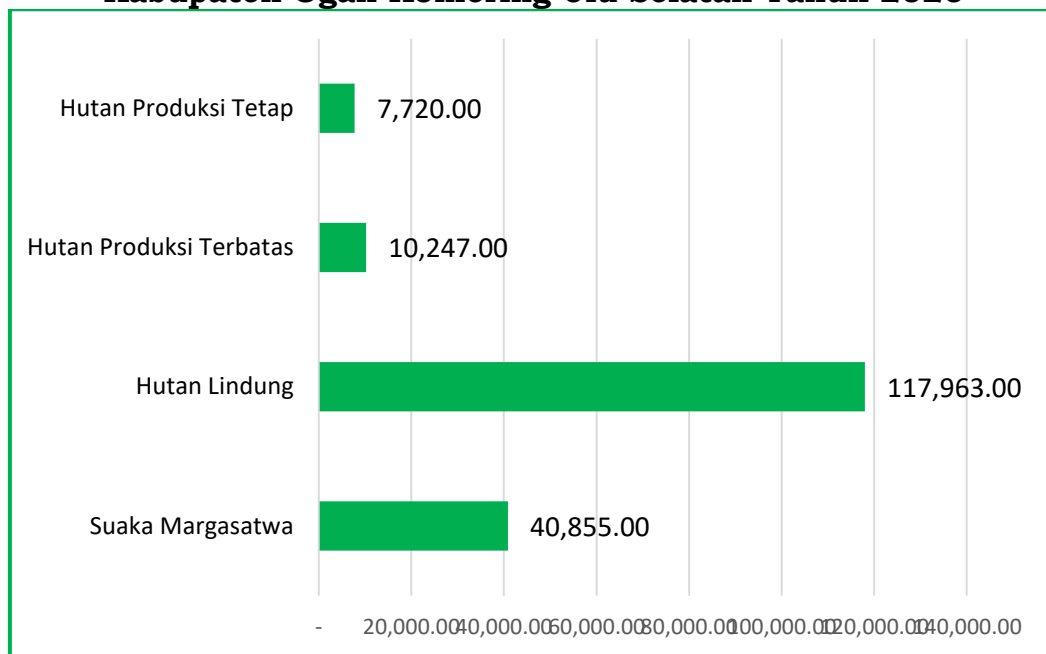
No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan	646	761	816	1138	1089
2.	Jumlah kelompok tani	1,737	1,737	1,737	1,819	2,312
3.	(1/2 x 100)	37.19	43.83	47.00	62.56	47.10

Sumber: Dinas Pertanian, Tahun 2021

2.3.2.3. Kehutanan

Luas kawasan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah 176.785 ha. Komposisi luas kawasan hutan ini terdiri dari Suaka Margasatwa sebanyak 23,11%, Hutan Lindung sebanyak 66,73%, Hutan Produksi Terbatas sebanyak 5,80%, dan Hutan Produksi Tetap sebanyak 4,37%.

Gambar II.15
Luas Kawasan Hutan (ha)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020



Sumber: Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2024

2.3.2.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari *accu* (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN). Kapasitas energi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara umum mengalami peningkatan. Rasio elektrifikasi juga meningkat hingga mencapai 67,62% pada tahun 2020.

Tabel II.246
Rasio Elektrifikasi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN	51,050	63,305	69,999	78,892	80,412
2.	Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non PLN	24,279	24,536	18,372	16,200	14,680
3.	Jumlah rumah tangga	93,345	93,398	94,504	95,557	97,202
4.	$(1-2:3) \times 100$	28.68	41.51	54.63	65.61	67.62

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2021



2.3.2.5. Perdagangan

Perdagangan merupakan sektor yang memiliki kontribusi positif dalam perekonomian daerah. Hal ini terlihat dari kontribusi dominan kepada perekonomian makro hingga mencapai 22,50%. Dari sisi mikro, cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal juga mengalami peningkatan menjadi 15,85% pada tahun 2020 dengan jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dibantu sebanyak 13 unit usaha.

2.3.2.5.1. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Perkembangan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.247 berikut ini.

Tabel II.247

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	0	12	13	13	13
2.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	82	82	82	82	82
3.	(1/2 x 100)	0.00	14.63	15.85	15.85	15.85

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2021

2.3.2.5.2. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Terhadap PDRB

Perkembangan kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.248 berikut ini.

Tabel II.248

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Terhadap PDRB
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
1.	Jumlah PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda	1,474.84	1,627.25	1,777.04	2,002.74	2,019.14
2.	Jumlah PDRB	7,014.61	7,592.14	8,136.43	8,795.70	8,975.76
3.	(1/2 x 100)	21.03	21.43	21.84	22.77	22.50

*angka sementara

**angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.3.2.6. Perindustrian

Salah satu sektor yang juga dominan mempengaruhi perekonomian makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sektor industri di mana pada tahun 2020 mencapai 7,94% kontribusinya terhadap perekonomian daerah.



Tabel II.249

**Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
1.	Industri pengolahan	493.00	570.52	624.74	699.05	712.98
2.	Jumlah PDRB	7,014.61	7,592.14	8,136.43	8,795.70	8,975.76
3.	(1/2 x 100)	7.03	7.51	7.68	7.95	7.94

*angka sementara

**angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.3.2.7. Transmigrasi

Transmigrasi cukup digalakkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di mana pada tahun 2020 terdapat 300 transmigran dan diantaranya terdapat 195 transmigran swakarsa.

Tabel II.250

**Persentase Transmigran Swakarsa
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah transmigran swakarsa	75	90	195	195	195
2.	Jumlah transmigrasi	300	300	300	300	300
3.	(1/2 x 100)	25,00	30,00	65,00	65,00	65,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2021

2.3.2.8. Kelautan dan Perikanan

2.3.2.8.1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan selama tahun 2016-2020 belum pernah memenuhi target daerah, hanya 29,50% dari target daerah pada tahun 2020, menurun bila dibanding tahun 2019 sebesar 57,00%.

Tabel II.251

**Produksi Perikanan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah produksi ikan (ton)	4,302	3,682	2,160	2,279.8	1,180.1
2.	Target daerah (ton)	10,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3.	(1/2 x 100)	43.02	92.05	54.00	57.00	29.50

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan, Tahun 2021

2.3.2.8.2. Konsumsi Ikan

Perkembangan konsumsi ikan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.252 berikut ini.

Tabel II.252

**Konsumsi Ikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah konsumsi ikan (kg)	24.86	10.15	11.29	11.50	11.55
2.	Target daerah (kg)	27.67	11.76	11.76	12.00	12.00
3.	(1/2 x 100)	89.84	86.31	96.00	95.83	96.25

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan, Tahun 2021



2.3.2.8.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Perkembangan cakupan bina kelompok nelayan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.253 berikut ini.

Tabel II.253
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan	0	0	0	0	0
2.	Jumlah kelompok nelayan	8	8	8	8	8
3.	(1/2 x 100)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan, Tahun 2021

2.3.2.8.4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Perkembangan produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.254 berikut ini.

Tabel II.254
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah produksi ikan kelompok nelayan (ton)	815.8	1,557.8	525.32	212.355	76.96
2.	Jumlah produksi ikan di daerah	4,302	3,682	2,160	577.745	577.745
3.	(1/2 x 100)	18.96	42.31	24.32	36.76	13.32

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan, Tahun 2021

2.3.3. Penunjang Urusan

Penunjang Urusan Pemerintah terdiri dari perencanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan. Penunjang Urusan Pemerintah ini memberikan peluang kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan besar untuk mendorong proses kebijakan menjadi lebih partisipatif, responsif, dan akuntabel karena kendali dari proses kebijakan dan alokasi anggaran sepenuhnya ada di tangan Pemerintah Daerah. Untuk itu salah satu isu kebijakan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang mengimplementasikan reformasi birokrasi demi pencapaian *good governance*.

2.3.3.1. Perencanaan Pembangunan

Dalam fungsi perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan salah satu kinerja yang harus dilaksanakan. Dalam perjalanan pembangunan selama ini, dokumen perencanaan secara lengkap dan terintegrasi telah dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan seperti yang terlihat dari Tabel II.255 berikut.



Tabel II.255
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Litbang, Tahun 2021

2.3.3.2. Keuangan

Capaian kinerja urusan keuangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan cukup baik di mana penetapan APBD tepat waktu dan anggaran prioritas pendidikan maupun kesehatan juga dialokasikan sesuai dengan perencanaan Pemerintah Pusat sehingga memiliki perencanaan yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat.

2.3.3.2.1. Persentase SiLPA

Perkembangan persentase SiLPA tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.256 berikut ini.

Tabel II.256
Persentase SiLPA
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total SiLPA	64,053	6,975	25,480	54,603	2,614
2.	Total APBD	1,135,991	1,222,264	1,268,126	1,394,328	1,362,341
3.	(1/2 x 100)	5.64	0.57	2.01	3.92	0.19

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2021

2.3.3.2.2. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Pengeluaran Pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja Pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan (amandemen UUD 1945). Di daerah alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (amandemen UUD 1945).



Tabel II.257
Persentase Belanja Pendidikan (20%)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	227,733	204,086	287,162	303,677	307,898
2.	Total APBD	1,135,991	1,222,264	1,268,126	1,394,328	1,362,341
3.	(1/2 x 100)	20.05	16.70	22.64	21.78	22.60

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2021

2.3.3.2.3. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Pengeluaran Pemerintah untuk kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja Pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009).

Tabel II.258
Persentase Belanja Kesehatan (10%)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	68,463	97,107	102,802	120,587	139,195
2.	Total APBD	1,135,991	1,222,264	1,268,126	1,394,328	1,362,341
3.	(1/2 x 100)	6,03	7,94	8,11	8,65	10,22

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2021

2.3.3.2.4. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Perkembangan perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung disajikan pada Tabel II.259 berikut ini.

Tabel II.259
Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Belanja Langsung	604,842	611,418	605,036	731,460	598,370
2.	Total APBD	1,135,991	1,222,264	1,268,126	1,394,328	1,362,341
3.	(1/2 x 100)	53.24	50.02	47.71	52.46	43.92
1.	Jumlah Belanja Tidak Langsung	585,237	602,409	623,056	705,707	758,175
2.	Total APBD	1,135,991	1,222,264	1,268,126	1,394,328	1,362,341
3.	(1/2 x 100)	51.52	49.29	49.13	50.61	55.65

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2021

2.3.3.2.5. Penetapan APBD

Perkembangan penetapan APBD tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.260 berikut ini.



Tabel II.260
Penetapan APBD
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2021

2.3.3.3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Sebanyak 395 ASN di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural untuk menjabat menjadi pejabat struktural. Angka ini masih belum mencukupi untuk menduduki kursi jabatan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memiliki total 732 jabatan.

2.3.3.3.1. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Perkembangan pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.261 berikut ini.

Tabel II.261
Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	151	251	352	395	331
2.	Jumlah total jabatan	732	732	732	732	889
3.	(1/2 x 100)	20.63	34.29	48.09	53.96	37.23

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Tahun 2021

2.3.3.3.2. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Perkembangan persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.262 berikut ini.

Tabel II.262
Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0	0	30	207	297
2.	Jumlah total ASN	5,476	5,414	5,232	5,181	5,184
3.	(1/2 x 100)	0	0	0.57	4.00	5.73

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Tahun 2021

2.3.3.4. Penelitian dan pengembangan

Tujuan yang akan dicapai Pemerintah dalam fungsinya sebagai fungsi penelitian dan pengembangan yaitu untuk mencapai kualitas



perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring/*network* dengan stakeholder lain yang terkait (Pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah.

Tabel II.263
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi
Dalam Penerapan Inovasi Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jml perangkat daerah yang difasilitasi	1	1	53	53	53
2.	Jml total perangkat daerah	53	53	53	53	53
3.	(1/2 x 100)	1.87	1.87	100.00	100.00	100.00

Sumber: Bappeda Litbang, Tahun 2021

Tabel II.264
Skor Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019-2020

Tahun	Skor Indeks	Peringkat	Predikat
2019	90	219	Kurang Inovatif
2020	358	175	Kurang Inovatif

Sumber: Bappeda Litbang, Tahun 2021

2.3.3.5. Pengawasan

Capaian kinerja urusan pengawasan dalam hal teknis maupun administrasi cukup baik di tubuh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hal ini terlihat dari persentase tindak lanjut temuan BPK sebesar 91,04% di tahun 2020 dan menurunnya pelanggaran pegawai dalam kedisiplinan atau administrasi kerja.

2.3.3.5.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Perkembangan persentase tindak lanjut temuan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.265 berikut ini.

Tabel II.265
Persentase Tindak Lanjut Temuan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	9	9	10	10	122
2.	Jumlah total temuan	12	12	12	12	134
3.	(1/2 x 100)	75.00	75.00	83.33	83.33	91.04

Sumber: Inspektorat Kabupaten, Tahun 2021

2.3.3.5.2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Perkembangan persentase pelanggaran pegawai tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.266 berikut ini.



Tabel II.266
Persentase Pelanggaran Pegawai
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	1	1	9	5	4
2.	Jumlah total ASN	5,440	5,402	5,232	5,181	5,184
3.	(1/2 x 100)	0.0184	0.0185	0.1720	0.0965	0.0772

Sumber: Inspektorat Kabupaten, Tahun 2021

2.3.3.5.3. Jumlah Temuan BPK

Perkembangan jumlah temuan BPK tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.267 berikut ini.

Tabel II.267
Jumlah Temuan BPK
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah temuan BPK	20	20	14	18	48

Sumber: Inspektorat Kabupaten, Tahun 2021

2.3.3.6. Sekretariat Dewan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan tidak memiliki rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Tabel II.268
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan
Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Guna melihat kemampuan daya saing daerah maka dapat dilihat dari berbagai aspek. Adapun aspek yang dimaksud dapat berkenaan dengan kemampuan ekonomi daerah, daya saing SDM, daya saing infrastruktur dan daya saing investasi. Berikut beberapa informasi yang berkenaan dengan kemampuan daya saing daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tinjauan terhadap kemampuan ekonomi daerah bertujuan untuk mengetahui kualitas ekonomi suatu daerah yang dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan nilai tukar petani. Semakin tinggi pengeluaran per kapita maka semakin tinggi pula daya saing daerah tersebut.



2.4.1.1. **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**

Konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk keperluan makanan dan bukan makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu rumah tangga. Terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga di setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 mencapai 5,95 milyar rupiah.

Tabel II.269
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
1.	ADHB (milyar rupiah)	4,727.72	5,124.65	5,496.54	5,931.95	5,958.01
2.	ADHK (milyar rupiah)	3,150.60	3,259.23	3,387.64	3,528.60	3,490.09

*angka sementara

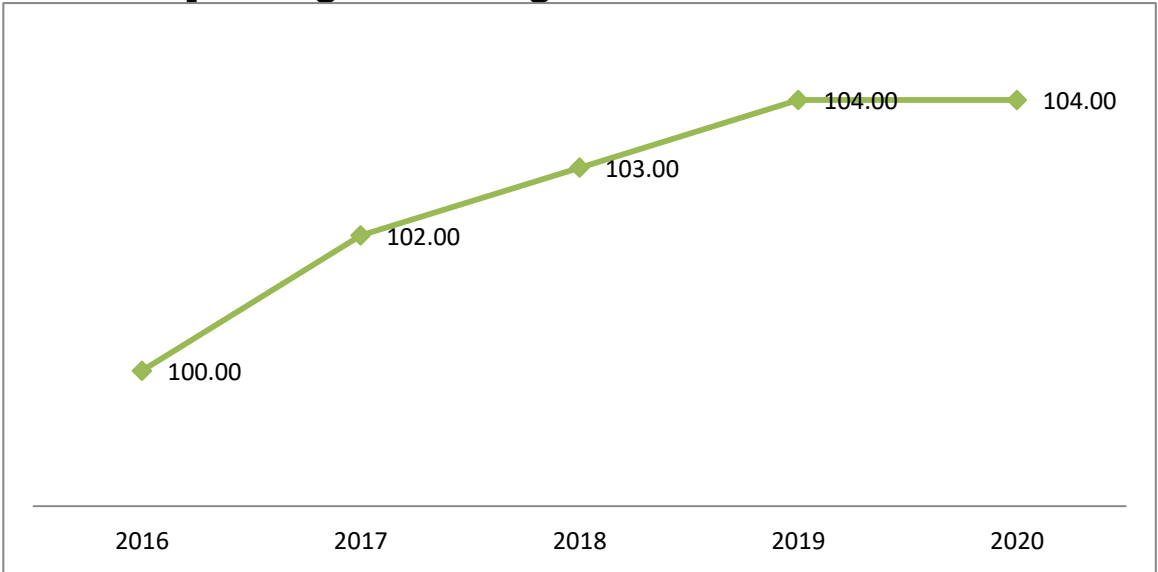
**angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.4.1.2. **Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan kesejahteraan petani di suatu wilayah. Dari NTP yang terlihat, kesejahteraan petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan di mana NTP pada tahun 2020 menjadi 104.

Gambar II.16
Nilai Tukar Petani
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pertanian, Tahun 2021

Peningkatan NTP diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan petani. Melalui hasil penghitungan yang telah dilakukan, di mana NTP tahun 2020 adalah 104 berarti nilai NTP > 100. Nilai NTP > 100 memiliki arti bahwa petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami surplus, di mana pendapatan yang diterima oleh petani lebih besar dari pada pengeluarannya.



Selain itu juga, nilai NTP Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini terlihat dari Gambar II.13 di atas, di mana pada tahun 2016 nilai NTP = 100 memiliki artian bahwa kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan. Sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 nilai NTP > 100 yang berarti petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dikategorikan sebagai petani yang sejahtera.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor daya tarik suatu daerah meningkatkan daya saing daerah. Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.4.2.1. Perhubungan

2.4.2.1.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel II.270

**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan	162.04	297.31	323.55	554.66	626.87
2.	Jumlah Kendaraan	675	646	618	641	430
	- Bis	124	100	153	176	93
	- Truk	143	58	47	47	47
	- Truk Ringan	99	95	101	101	60
	- Pick Up	309	393	317	317	230
3.	(1/2)	0.24	0.46	0.52	0.87	1.46

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021

2.4.2.1.2. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Perkembangan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.271 berikut ini.

Tabel II.271

**Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	126,408	135,708	145,008	129,226	83,996

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021

2.4.2.1.3. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Perkembangan jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.272 berikut ini.



Tabel II.272
**Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/
Bandara/Terminal Per Tahun**

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	121,450	125,350	129,250	128,400	79,761

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021

2.4.2.2. Penataan Ruang

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Luas wilayah produktif diasumsikan bahwa wilayah produktif yang dimaksud adalah wilayah pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan perkebunan. Sehingga dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui luas wilayah produktif. Luas wilayah produktif pada wilayah budidaya juga mengalami peningkatan hingga mencapai 97,74% pada tahun 2020.

Tabel II.273

Luas Wilayah Produktif

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah luas wilayah produktif (ha)	326,386	326,386	326,386	333,205	333,205
2.	Jumlah luas seluruh wilayah budidaya (ha)	340,910	340,910	340,910	340,910	340,910
3.	(1/2 x 100)	95.74	95.74	95.74	97.74	97.74

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan sertamerta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, situasi politik, keamanan hingga kemudahan perijinan dalam mendirikan maupun pengembangan usaha.

Suatu investor akan tertarik berinvestasi pada suatu daerah jika didukung dengan regulasi yang baik, regulasi tersebut diantaranya adalah adanya kemudahan perijinan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan tingkat biaya yang kompetitif. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi. Selain itu situasi yang kondusif bagi investasi juga perlu diperhatikan agar stabil.



2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas berkaitan dengan jumlah tindak kejahatan yang terdiri dari penganiayaan, pencurian/perampokan, pembunuhan, penipuan, kesusilaan dan pelanggaran lainnya. Angka kriminalitas menunjukkan kondusivitas keamanan di suatu wilayah. Angka kriminalitas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami penurunan hingga angka kriminalitas yang ditangani mencapai 0,48 pada tahun 2020.

Tabel II.274
Angka Kriminalitas

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah tindak kriminal yang ditangani	174	137	163	166	20
2.	Jumlah penduduk	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 10.000)	4.27	3.34	3.93	4.00	0.48

Sumber: Polisi Resort Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

2.4.3.2. Lama Proses Perizinan

Proses perijinan usaha di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga semakin efektif dengan menurunnya lama proses perijinan dari 4 (empat) hari di tahun 2016-2017 menjadi 2 (dua) hari saja di tahun 2018-2019, terakhir pada tahun 2020 menjadi 1 (satu) hari.

Tabel II.275
Lama Proses Perizinan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Lama proses perizinan	4 hari	4 hari	2 hari	2 hari	1 hari

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PPTSP, Tahun 2021

2.4.3.3. Perbankan

Jumlah bank di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada dasarnya tidak ada perubahan di mana jumlah bank umum konvensional sebanyak 6 unit pada tahun 2020.

Tabel II.276
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bank umum					
	Konvensional	6	6	6	6	6
	Syariah	0	0	0	0	0
2.	BPR					
	Konvensional	0	0	0	0	0
	Syariah	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, Tahun 2021

2.4.3.4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Dalam meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah terkait pajak dan retribusi dengan jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah sebanyak 33 pajak.



Tabel II.277
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	33	33	33	33	33

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, Tahun 2021

2.4.3.5. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Selain itu, terdapat 1 (satu) Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha untuk memberi jaminan kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan iklim investasi usaha di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Tabel II.278
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	0	1	1	1	1

Sumber: Sekretariat Daerah, Tahun 2021

Periode tahun 2016-2020 terdapat 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Angkutan Umum.

2.4.3.6. Persentase Desa Berstatus Swasembada

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan Desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah Desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.

Tabel II.279
Persentase Desa Berstatus Swasembada
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah desa atau kelurahan berswasembada	0	0	0	0	0
2.	Jumlah desa atau kelurahan	259	259	259	259	259
3.	(1/2 x 100)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tahun 2021



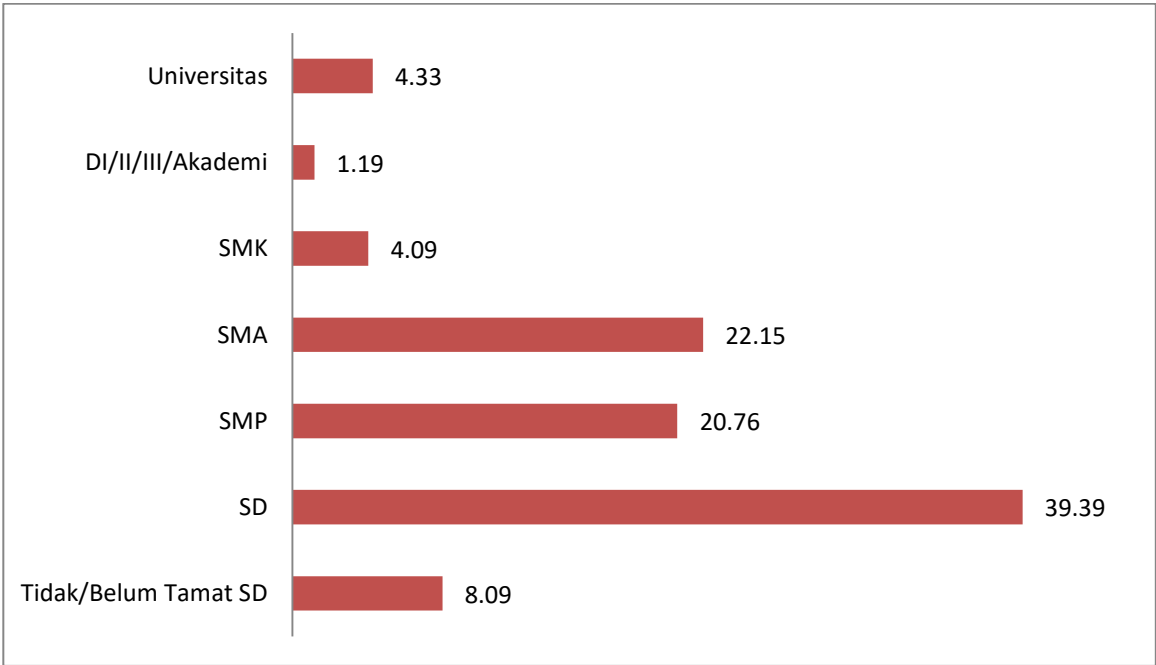
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Oleh karenanya, pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Penduduk yang memiliki pekerjaan sebagian besar hanya memiliki jenjang pendidikan sekolah dasar yakni sebesar 32,39% dan pendidikan sekolah menengah atas sebesar 22,15%. Bahkan terdapat 8,09% penduduk bekerja yang tidak/belum tamat sekolah dasar. Angka ini memperlihatkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang belum memiliki daya saing dan masih perlu adanya peningkatan keterampilan dalam memasuki dunia usaha/pekerjaan.

Gambar II.17
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020

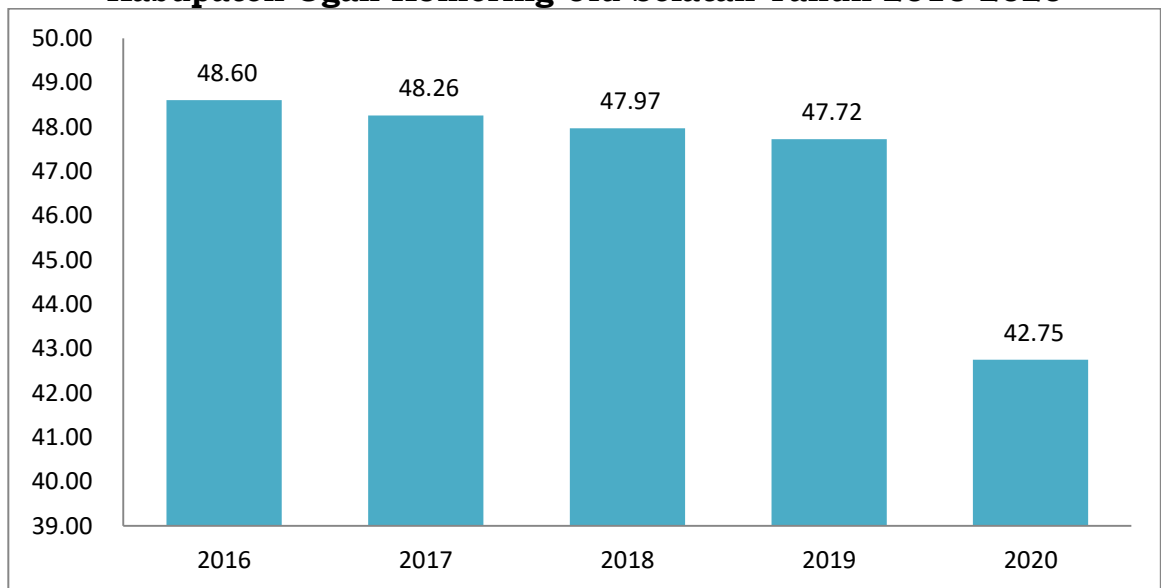


Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.4.4.2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir hingga mencapai 42,75 pada tahun 2020. Angka ini mengindikasikan bahwa dari setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 42-45 penduduk usia tidak produktif baik itu usia 0-14 tahun dan usia 65 ke atas.

Gambar II.18
Rasio Ketergantungan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.5. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

2.5.1. SPM Pendidikan

2.5.1.1. Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD

Perkembangan pencapaian pemenuhan SPM PAUD tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.280 berikut ini.



Tabel II.280
Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun	15,632	13,436	18,643	30,541	18,227
2.	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	5,040	7,500	6,042	6,790	8,679
3.	(2/1 x 100)	32.24	55.82	32.41	22.23	47.62

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021

2.5.1.2. Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SD

Perkembangan pencapaian pemenuhan SPM pendidikan SD tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.281 berikut ini.

Tabel II.281
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SD
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun	74,326	72,156	73,123	72,372	47,457
2.	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	41,618	42,640	42,845	43,276	40,314
3.	(2/1 x 100)	55.99	59.09	58.59	59.80	84.95

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021

2.5.1.3. Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SMP

Perkembangan pencapaian pemenuhan SPM pendidikan SMP tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.282 berikut ini.

Tabel II.282
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SMP
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun	33,577	34,430	34,785	33,570	30,317
2.	Jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	13,975	16,052	17,931	15,581	17,002
3.	(2/1 x 100)	41.62	46.62	51.55	46.41	56.08

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021

2.5.1.4. Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan

Perkembangan pencapaian pemenuhan SPM pendidikan kesetaraan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.283 berikut ini.



Tabel II.283
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun	58,333	58,705	59,136	59,594	77,574
2.	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	9,378	10,131	10,252	10,078	1,548
3.	(2/1 x 100)	16.08	17.26	17.34	16.91	2.00

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2021

2.5.2. SPM Kesehatan

2.5.2.1. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Perkembangan persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.284 berikut ini.

Tabel II.284
Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	7,892	8,032	8,259	7,876	7,747
2.	Jumlah sasaran ibu hamil	8,289	8,363	8,798	9,207	7,977
3.	(1/2 x 100)	95.21	96.04	93.87	85.54	97.12

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.5.2.2. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan

Perkembangan persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.285 berikut ini.

Tabel II.285
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	5,952	6,109	5,857	7,409	7,061
2.	Jumlah sasaran ibu bersalin	8,289	8,363	8,798	9,207	7,439
3.	(1/2 x 100)	71.81	73.05	66.57	80.47	94.92

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021



2.5.2.3. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Perkembangan persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.286 berikut ini.

Tabel II.286
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	7,810	6,993	7,254	6,611	6,674
2.	Jumlah sasaran bayi baru lahir	7,822	7,698	7,790	7,003	7,915
3.	(1/2 x 100)	99.85	90.84	93.12	94.40	84.32

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.5.2.4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.287 berikut ini.

Tabel II.287
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	35,024	35,530	35,294	35,018	26,448
2.	Jumlah Balita usia 12-59 bulan	35,183	35,883	36,693	49,053	28,723
3.	(1/2 x 100)	99.55	99.02	96.19	71.39	92.07

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.5.2.5. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Perkembangan persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.288 berikut ini.



Tabel II.288
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3,081	3,502	3,979	5,561	4,284
2.	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar	58,333	58,705	59,136	59,594	38,961
3.	(1/2 x 100)	5.28	5.97	6.73	9.33	11.00

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.5.2.6. Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Perkembangan persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.289 berikut ini.

Tabel II.289
Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	24,563	8,109	35,261	8,602	8,795
2.	Jumlah orang usia 15-59 tahun	255,794	258,807	262,665	264,393	272,574
3.	(1/2 x 100)	9.60	3.13	13.42	3.25	3.23

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.5.2.7. Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard

Perkembangan persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.290 berikut ini.

Tabel II.290
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	3,972	2,790	2,158	2,661	3,406
2.	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten	23,568	24,767	26,044	27,369	17,311
3.	(1/2 x 100)	16.85	11.26	8.29	9.72	19.68

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021



2.5.2.8. Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Perkembangan persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.291 berikut ini.

Tabel II.291
Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	246	2,302	3,118	3,262	10,640
2.	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota	221,029	224,869	228,573	232,171	105,089
3.	(1/2 x 100)	0.11	1.02	1.36	1.40	10.12

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.5.2.9. Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Perkembangan persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.292 berikut ini.

Tabel II.292
Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6,322	5,867	5,468	5,230	10,640
2.	Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota	221,029	224,869	228,573	232,171	105,089
3.	(1/2 x 100)	2.86	2.61	2.39	2.25	10.12

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.5.2.10. Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar

Perkembangan persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.293 berikut ini.



Tabel II.293
Persentase ODGJ Berat Yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	0	185	312	511	511
2.	Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota	0	708	820	828	828
3.	(1/2 x 100)	0	26.13	38.05	61.71	61.71

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.5.2.11. Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar

Perkembangan persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.294 berikut ini.

Tabel II.294
Persentase Orang Terduga TBC
Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	110	145	463	519	412
2.	Jumlah orang yang terduga TBC	518	518	1,102	1,102	1,256
3.	(1/2 x 100)	21.24	27.99	42.01	47.01	32.80

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

2.5.2.12. Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar

Perkembangan persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.295 berikut ini.

Tabel II.295
Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	0	0	260	949	748
2.	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV	221,029	224,869	228,573	232,171	18,542
3.	(1/2 x 100)	0.00	0.00	0.113	0.408	4.03

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021



2.5.3. SPM Pekerjaan Umum

2.5.3.1. Capaian Pelayanan SPALD-S Akses Dasar Air Limbah Domestik

Perkembangan capaian pelayanan SPALD-S akses dasar air limbah domestik tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.296 berikut ini.

Tabel II.296

**Capaian Pelayanan SPALD-S Akses Dasar Air Limbah Domestik
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk/tangki septic Individual	53,986	57,482	61,308	65,474	68,282
2.	Rumah diwilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha	81,389	84,269	88,754	92,853	95,557
3.	(1:2 x 100)	66.33	68.21	69.07	70.51	71.46

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

2.5.3.2. Capaian Pelayanan SPALD- S Akses Aman Air Limbah Domestik

Perkembangan capaian pelayanan SPALD- S akses aman air limbah domestik tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.297 berikut ini.

Tabel II.297

**Capaian Pelayanan SPALD- S Akses Aman Air Limbah Domestik
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	37,986	41,987	46,760	52,781	58,653
2.	Rumah diwilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha	78,904	81,087	85,897	89,659	92,540
3.	(1/2 x 100)	48.14	51.78	54.44	58.86	63.38

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

2.5.3.3. Capaian Pelayanan SPALD-T Akses Aman Air Limbah Domestik

Perkembangan capaian pelayanan SPALD-T akses aman air limbah domestic tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.298 berikut ini.



Tabel II.298

**Capaian Pelayanan SPALD-T Akses Aman Air Limbah Domestik
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	38,980	42,809	48,874	54,994	58,967
2.	Rumah di wilayah pengembangan SPALD-T	72,986	77,560	81,098	85,908	88,764
3.	(1/2 x 100)	53.40	55.19	60.26	64.01	66.43

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

2.5.3.4. Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Perkembangan capaian pelayanan pengolahan air limbah domestik tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.299 berikut ini.

Tabel II.299

**Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk	53,986	57,482	61,308	65,474	68,282
2.	Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	37,986	41,987	46,760	52,781	58,653
3.	Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	38,980	42,809	48,874	54,994	58,967
4.	Rumah di kabupaten	93,345	93,398	94,504	95,557	97,202
5.	1+2+3/4	46.76	50.78	55.36	60.43	63.75

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

2.5.4. SPM Perumahan Rakyat

2.5.4.1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Perkembangan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.300 berikut ini.

Tabel II.300

**Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	0	10	12	22	15
2.	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	0	12	15	25	20
3.	(1/2x 100)	0	83.33	80.00	88.00	75.00

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2021



2.5.4.2. Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perkembangan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.301 berikut ini.

Tabel II.301
Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	0	0	0	25	0
2.	Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan	0	341	619	250	365
3.	(1/2x 100)	0	0	0	10.00	0.00

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2021

2.5.5. SPM Bencana

2.5.5.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

2.5.5.1.1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana

Perkembangan penyusunan kajian resiko bencana tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.302 berikut ini.

Tabel II.302
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah dokumen Kajian Resiko Bencana	1	1	1	1	1

Sumber: BPBD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.5.5.1.2. Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

Perkembangan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.303 berikut ini.



Tabel II.303
Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
2.	Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2x 100)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPBD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.5.5.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

2.5.5.2.1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Perkembangan penyusunan rencana penanggulangan bencana tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.304 berikut ini.

Tabel II.304
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	0	0	0	0	0

Sumber: BPBD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.5.5.2.2. Pembuatan Rencana Kontinjensi

Perkembangan pembuatan rencana kontinjensi tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.305 berikut ini.

Tabel II.305
Pembuatan Rencana Kontinjensi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon)	0	1	1	1	1

Sumber: BPBD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.5.5.2.3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

Perkembangan pelatihan pencegahan dan mitigasi tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.306 berikut ini.



Tabel II.306
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	82	82	84	84	84
2.	Jumlah apatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2x 100)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

Sumber: BPBD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.5.5.2.4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Perkembangan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.307 berikut ini.

Tabel II.307
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	0	50	50	50	50
2.	Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 100)	0	0.01	0.01	0.01	0.01

Sumber: BPBD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.5.5.2.5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Perkembangan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.308 berikut ini.

Tabel II.308
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	203,925	205,151	156,626	207,553	207,553
2.	Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 100)	50.00	50.00	37.81	50.00	49.80

Sumber: BPBD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.5.5.2.6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Perkembangan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.309 berikut ini.



Tabel II.309
Penyediaan Peralatan Perlindungan
dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah warga negara mendapat peralatan perlindungan	25	18	0	0	0
2.	Jumlah warga negara di Kawasan rawan bencana	407,851	410,303	414,252	415,107	416,797
3.	(1/2 x 100)	0.006	0.004	0	0	0

Sumber: BPBD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.5.5.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

2.5.5.3.1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Perkembangan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.310 berikut ini.

Tabel II.310
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa
Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	0	1	0	0	0
2.	Jumlah seluruh penetapan status KLB	0	1	0	0	0
3.	(1/2 x 100)	0	100.00	0	0	0

Sumber: BPBD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.5.5.3.2. Respon Cepat Darurat Bencana

Perkembangan respon cepat darurat bencana tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.311 berikut ini.

Tabel II.311
Respon Cepat Darurat Bencana
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	41	14	13	29	13
2.	Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	48	40	40	59	36
3.	(1/2 x 100)	85.42	35.00	32.50	49.15	36.11

Sumber: BPBD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021



2.5.5.3.3. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Perkembangan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.312 berikut ini.

Tabel II.312

**Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	32	32	34	34	34
2.	Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	100	100	100	100	100
3.	(1/2 x 100)	32.00	32.00	34.00	34.00	34.00

Sumber: BPBD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.5.5.3.4. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Perkembangan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.313 berikut ini.

Tabel II.313

**Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	37	5	0	2	6
2.	Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	192	80	80	118	503
3.	(1/2 x 100)	19.27	6.25	0	1.69	1.19

Sumber: BPBD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2.5.6. SPM Sosial

2.5.6.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Sosial;

Perkembangan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.314 berikut ini.

Tabel II.314

**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Telantar Di Luar Panti Sosial
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80	80	80	80	80
2.	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	120	120	120	120	120
3.	(1/2 x 100)	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2021



2.5.6.2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial

Perkembangan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.315 berikut ini.

Tabel II.315

**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Sosial
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	10	10	10	10	10
2.	Populasi anak terlantar di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	35	35	35	35	35
3.	$(1/2 \times 100)$	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2021

2.5.6.3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Sosial

Perkembangan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.316 berikut ini.

Tabel II.316

**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Sosial
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80	80	80	80	80
2.	Populasi lanjut usia terlantar di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	125	125	125	125	125
3.	$(1/2 \times 100)$	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2021

2.5.6.4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial

Perkembangan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan pengemis di luar panti sosial tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.317 berikut ini.



Tabel II.317
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial
Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	50	50	50	50	50
2.	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100	100	100	100	100
3.	(1/2 x 100)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2021

2.5.6.5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota

Perkembangan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel II.318 berikut ini.

Tabel II.318
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1,163	62	207	166	776
2.	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1,163	62	207	166	776
3.	(1/2 x 100)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2021

2.6. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Ogan Komering Ulu Selatan

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Indonesia maka capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari 4 (empat) pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar tata kelola pelaksanaan.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan saat ini telah menyusun Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sedang diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam rangka penyempurnaan RPJMD Tahun 2021-2026, maka Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu melihat gambaran umum capaian Tujuan



Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hal tersebut dapat kita lihat bagaimana capaian per pilar, sebagai berikut:

2.6.1. Pilar 1 (Pembangunan Sosial)

Pilar ini terdiri dari 5 (lima) tujuan (*goal*), yaitu: Tujuan 1, Tanpa Kemiskinan; Tujuan 2, Tanpa Kelaparan; Tujuan 3, Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Tujuan 4, Pendidikan Berkualitas; dan Tujuan 5, Kesetaraan Gender.



Tabel II.319
Pencapaian Pilar 1 (Pembangunan Sosial)

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN								
1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1*. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1.2.1*. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	10.95%	10.98%	10.64%	10.53%	10.85%
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	1.3.1.(a). Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	1.3.1.(a). Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	5.37	5.91	6.77	8.31	11.43
	1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	7.66	7.66	7.88	7.66	7.98
	1.3.1 (c) Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	1.3.1 (c) Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	1.3.1.(c) Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	3.72	6.31	44.48	56.82	86.53
	1.3.1.(d). Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	1.3.1 (d) Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	1.3.1.(d). Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	7,731	7,581	15,110	14,536	18,383
1.4.1.(a). Persentase perempuan pernah	1.4.1.(a). Persentase perempuan pernah kawin	1.4.1.(a). Persentase Perempuan Pernah Kawin	1.4.1.(a). Persentase perempuan pernah kawin	5.82%	37.04%	40.28%	43.01%	47.07%



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan					
	1.4.1.(b) Persentase anak berusia 0-11 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	1.4.1.(b) Persentase anak berusia 0-11 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	1.4.1.(b) Persentase anak berusia 0-11 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	10.73%	12.10%	14.84%	32.10%	39.19%
	1.4.1.(d). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	1.4.1.(d). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	26.98	33.28	39.78	46.04	54.82
	1.4.1.(e). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1.4.1.(e). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	39.85	54.84	69.62	68.91	71.46
	1.4.1.(g). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	1.4.1.(g) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat	1.4.1.(g). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	99.33%	99.72%	99.70%	99.21%	99.00%
	1.4.1.(h). Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	1.4.1.(h) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	1.4.1.(h). Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	85.12%	83.48%	79.75%	78.67%	78.68%
	1.4.1.(i). Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	1.4.1.(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat	1.4.1.(i). Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	63.33%	61.04%	61.07%	60.96%	61.83%
	1.4.1.(j). Persentase	1.4.1.(j) Persentase	1.4.1.(j). Persentase	96.00	97.00	97.00	96.99	60.91



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
	penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran	penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran					
	1.4.1.(k). Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	1.4.1.(k). Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	24.60	26.27	39.48	49.41	49.41
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	-	-	1	2	2
	1.5.1 (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	1.5.1 (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.					
			Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD),	-	-	-	-	-
			Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB),	-	-	-	-	-
			Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).	-	-	-	-	-
			Rencana kontigensi Menghadapi Bencana Banjir Kabupaten OKU	-	1	1	1	1



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
			Selatan					
			Kajian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Kabupaten OKU Selatan	1	1	1	1	1
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi	1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	1.a.1(*) Proporsi pendanaan yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan (*) modifikasi indikator yang dimaksud adalah proporsi anggaran daerah untuk program kemiskinan	1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.					
	1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	1.a.2(*) Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah (*) modifikasi indikator yang dimaksud adalah pengeluaran dari APBD.	1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	20.05	16.70	22.64	21.78	22.60
			1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (kesehatan) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	6.03	7.94	8.11	8.65	10.22
			1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	1.26	1.63	1.86	2.15	2.62
TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN								
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin	2.1.1.(a). Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak	2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak	2.1.1.(a). Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak	0.037	0.047	0.027	0.075	0.420



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	balita 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	balita 2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/hari.	balita 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	2.79	2.77	2.74	2.74	2.73
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	2.10	2.12	2.10	1.68	2.79
	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	2.2.2 Prevalensi Malnutrisi (wasting/ obesitas) pada anak balita	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	11.86	11.88	11.87	10.41	0.24
	2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil	2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil	2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil	0.13	0.17	4.35	3.87	3.73
	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	85.90	96.26	96.25	96.88	90.33
	2.2.2.(c). Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan		2.2.2.(c). Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	72.80%	82.40%	82.50%	82.60%	83.60%
2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang	2.4.1. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan		2.4.1. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	-	-	-	1	1



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.								
TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA								
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).	3.1.1 Jumlah Kematian Ibu yang terdata (terlaporkan)	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).	5	1	8	4	5
	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	3.1.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	71.83%	73.05%	75.92%	77.97%	81.33%
	3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	3.1.2 (a) Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	5.82%	37.04%	40.28%	43.01%	47.07%
	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000	3.2.1 Jumlah Kematian Balita (AKBa) per 1000	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000	11.12	10.26	9.24	9.14	8.81



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	kelahiran hidup	kelahiran hidup	kelahiran hidup					
	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	3.2.2 Jumlah Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	3.84	2.99	6.29	7.14	6.87
	3.2.2.(a). Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	3.2.2.(a). Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	3.2.2.(a). Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	30	23	49	50	46
	3.2.2 (b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	3.2.2 (b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	3.2.2 (b) Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi					
			BCG	89.79%	94.20%		92.31%	86.41%
			Campak	80.84%	79.43%		67.36%	74.66%
			DPT	86.15%	88.43%		87.32%	83.86%
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa	3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa	3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa	0.0007	0.0005	0.0010	0.0010	0.0005
	3.3.2.(a). Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	3.3.2 (a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	3.3.2.(a). Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	26.97	35.34	111.77	125.03	98.85
	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang	3.3.3 Kejadian Malaria per 1000 orang	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang	2.31	2.07	0.63	0.95	0.03
	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	3.4.1 (a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	82.80	75.49	74.12	72.81	69.15
	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi	3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi	1.11	10.24	13.64	14.05	9.74
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan	3.4.2.(a) Jumlah	3.4.2 (a) Jumlah	3.4.2.(a) Jumlah	-	19	19	19	19



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.					
3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	3.7.1 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	71.00	85.00	79.00	70.00	65.34
	3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	3.7.1 (a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	70.61	68.61	70.20	70.10	69.03
	3.7.1.(b). Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	3.7.1 (b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	3.7.1.(b). Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	25.91	26.20	23.37	22.70	20.83
	3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	1.29	1.26	1.26	1.13	1.35
	3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).	3.7.2 (a) Total Fertility Rate (TFR).	3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).	8.73	8.50	8.53	7.61	6.00
3.8. Mencapai cakupan	3.8.1.(a) Unmet need	3.8.1 (a) Unmet need	3.8.1.(a) Unmet need	1.55	1.43	1.32	1.26	1.20



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	pelayanan kesehatan	pelayanan kesehatan	pelayanan kesehatan					
	3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	3.8.2 Persentase penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	384.94	382.64	544.49	543.37	613.33
	3.8.2.(a). Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	3.8.2.(a). Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	38.49	38.26	54.45	54.34	61.33
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah	3.9.2 Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis	3.9.2 Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis	3.9.2 Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis	-	-	-	-	-
	3.9.3 Angka kematian akibat keracunan	3.9.3 Angka kematian akibat keracunan	3.9.3 Angka kematian akibat keracunan	-	-	-	-	-
3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	3.a.1 Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	31.49	29.09	30.41	36.10	39.63
3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak	3.b.1 Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	3.b.1 Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	3.b.1.(a). Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua								
3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	2.23	2.59	2.60	2.38	2.65



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								
TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS								
4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1.(a). Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	4.1.1 (a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	4.1.1.(a). Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	15.44	23.16	23.51	29.47	51.93
	4.1.1.(b). Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	4.1.1 (b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	4.1.1.(b). Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	32.18	36.36	44.32	43.01	43.01
	4.1.1.(c) Persentase SMA/MA beerakredirasi minimal B	4.1.1 (c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakredirasi minimal B	-	-	-	-	68.18
	4.1.1.(d). Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	4.1.1.(d). Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	119.27%	112.28%	111.45%	112.19%	110.60%
	4.1.1.(e). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat	4.1.1.(e). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	93.74%	92.17%	86.44%	86.65%	87.88%
	4.1.1.(f). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/sederajat	4.1.1 (f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/sederajat	4.1.1.(f). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/sederajat	74.31%	75.09%	84.94%	75.21%	76.53%
	4.1.1.(g). Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	4.1.1 (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	4.1.1.(g). Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	7.47	7.66	7.82	7.83	7.84
4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses	4.2.2.(a). Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	4.2.2.(a). Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	25.78	33.41	33.47	36.68	47.62



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar								
4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.(a). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ sederajat	4.3.1(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/ SMK/ sederajat	4.3.1.(a). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ sederajat	74.31%	75.09%	84.94%	75.21%	76.53%
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	4.4.1 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	6.31	11.92	20.29	24.13	26.52
4.6. Pada tahun 2030,	4.6.1.(a). Persentase	4.6.1 (a) Persentase angka	4.6.1.(a). Persentase	99.02	99.66	98.82	98.83	99.33



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi	angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun					
4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	4.c.1 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	70.02	69.75	70.61	84.55	75.11
TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER								
5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. (Matriks bidang pembangunan Hal. II.2.M-163)	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	-	-	-	-	1
5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh	5.2.1 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh	0.0064	0.1692	0.2497	0.0000	0.0072



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terkahir					
5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	5.3.1 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	9.20	10.18	9.41	9.40	6.19
	5.3.1.(b). Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		5.3.1.(b). Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	1.29	1.26	1.26	1.13	1.35
	5.3.1.(c). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA//SMK/MA/ sederajat	5.3.1 (c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	5.3.1.(c). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA//SMK/MA/ sederajat	74.31%	75.09%	84.94%	75.21%	76.53%
5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50
	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	5.5.2 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	0.55	0.55	0.55	0.68	0.68
5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan	5.6.1*Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan		5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat	79.86	84.93	84.95	83.94	68.94



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut	sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi		keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi					
	5.6.1.(a). Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	5.6.1 (a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	5.6.1.(a). Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	29.39	31.39	29.80	29.90	30.07
	5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	70.61	68.61	70.20	70.10	69.03
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	5.b.1 Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	80.00	85.45	86.00	74.84	78.22



2.6.2. Pilar 2 (Pembangunan Ekonomi)

Pilar 2 terdiri dari 5 (lima) tujuan (*goal*), yaitu: Tujuan 7, Energi Bersih dan Terjangkau; Tujuan 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Tujuan 9, Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10, Berkurangnya Kesenjangan; dan Tujuan 17, Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.



Tabel II.320
Pencapaian Pilar 2 (Pembangunan Ekonomi)

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU								
7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	7.1.1* Rasio elektrifikasi	7.1.1 Rasio elektrifikasi	7.1.1* Rasio elektrifikasi	28.68	41.51	54.63	65.61	67.62
	7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita	7.1.1 (a) Konsumsi listrik per kapita	7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita	113.06	117.63	131.43	152.68	174.02
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat	7.3.1* Intensitas energi primer	7.3.1 Intensitas Energi Primer (SBM)	7.3.1* Intensitas energi primer	6,000.16	6,216.90	6,438.04	6,682.65	7,227.71
TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI								
8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita	8.1.1 Laju pertumbuhan PDRB per kapita	8.1.1 Laju pertumbuhan PDRB per kapita	3.83	3.22	3.93	3.91	
	8.1.1.(a). PDB per kapita	8.1.1 (a) PDRB per kapita. (ribu rupiah)	8.1.1.(a). PDB per kapita	20.12	21.51	22.86	24.42	24.59
8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi,	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	8.3.1 Pekerja informal sektor non-pertanian	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	24.37	32.84	34.87	31.22	34.25
	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal	8.3.1 (a) Persentase tenaga kerja formal	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal	8.73	10.21	10.39	10.70	12.40
	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal	8.3.1 (b) Persentase tenaga kerja informal sektor	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal	80.20	75.28	74.14	76.21	74.49



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	sektor pertanian	pertanian.	sektor pertanian					
8.5: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	8.5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	N.A	3.54	4.11	2.99	3.28
	8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran	8.5.2 (a) Persentase setengah pengangguran	8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran	0.56	1.89	1.48	2.11	1.51
8.8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya	8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	8.8.1 (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	367	421	531	589	589
8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara	8.9.1 (a) Jumlah wisatawan mancanegara	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara	35	30	10	23	2



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.9.1.(b). Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	8.9.1 (b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	8.9.1.(b). Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	13,534	30,000	35,010	45,796	11,959
TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR								
9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	9.1.1.(a). Kondisi mantap jalan nasional	9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional	9.1.1.(a). Kondisi mantap jalan nasional	37.11	46.70	50.70	52.02	53.37
	9.1.2.(a) Jumlah bandara	9.1.2.(a) Jumlah bandara	9.1.2.(a) Jumlah bandara	1	1	1	1	1
	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	9.1.2.(b) Jumlah dermaga Penyeberangan	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	1	2	2	2	2
9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan	9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	9.2.1 (a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	7.03	7.51	7.68	7.95	7.94
	9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	9.2.2 Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	0.25	1.18	4.28	3.31	3.89



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								
9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	9.c.1 (a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	80.00	85.45	86.00	74.84	78.22
	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet	9.c.1 (b) Proporsi individu yang menggunakan Internet	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet	6.31	11.92	20.29	24.14	26.52
TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN								
10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1* Koefisien Gini	10.1.1 Koefisien Gini	10.1.1* Koefisien Gini	0.320	0.395	0.317	0.323	0.271
	10.1.1.(a). Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	10.1.1 (a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	10.1.1.(a). Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	10.95	10.98	10.64	10.53	10.85
	10.1.1.(c). Jumlah desa tertinggal	10.1.1 (c) Jumlah desa tertinggal	10.1.1.(c). Jumlah desa tertinggal	112	112	180	139	139
	10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri	10.1.1 (d) Jumlah Desa Mandiri	10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri	-	-	-	-	-
TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN								
17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk	17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB	17.1.1 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB	17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB	123.02	448.87	753.50	747.76	934.95



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	menurut sumbernya 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	menurut sumbernya. 17.1.1 (a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 17.1.2 Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	menurut sumbernya 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	114.27	159.57	160.04	198.79	161.64
17.3. Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber	17.3.1 Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik	17.3.1 Rata-rata pertumbuhan investasi PMA dan PMDN	17.3.1 Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik	100.3 milyar	100.3 milyar	318.4 milyar	602.5 milyar	906.9 milyar
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi	17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet	17.8.1 Proporsi individu yang menggunakan internet	17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet	6.31	11.92	20.29	24.14	26.52
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan	17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilih	17.18.1 (d) Persentase indikator SDGs terpilih	17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilih	-	-	-	-	-



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	yang relevan dengan target	yang relevan dengan target	yang relevan dengan target					



2.6.3. Pilar 3 (Pembangunan Lingkungan)

Pilar 3 terdiri dari 6 (enam) tujuan (*goal*), yaitu: Tujuan 6, Air Bersih dan Sanitasi Layak; Tujuan 11, Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan; Tujuan 12, Pola Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab; Tujuan 13, Perubahan Iklim; Tujuan 14, Ekosistem Laut; dan Tujuan 15, Ekosistem Daratan.



Tabel II.321
Pencapaian Pilar 3 (Pembangunan Lingkungan)

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK								
6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1.(a). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	6.1.1.(a). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	26.98	33.28	39.78	46.04	54.82
	6.1.1. (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	6.1.1. (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	6.1.1. (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	6.17	7.58	9.08	10.60	11.23
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	6.2.1.(b). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	6.2.1. (b) Proporsi populasi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	6.2.1.(b). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	26.02	36.50	46.56	45.67	70.25
	6.2.1.(c). Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	6.2.1. (c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi 279 (2017)a 279 (2017)a 25000a 30000 Total Berbasis Masyarakat (STBM).	6.2.1.(c). Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	28	45	132	193	221
	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	6.2.1. (d) Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	-	46	87	128	171



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2 (a) Kualitas air danau	6.3.2 (a) Kualitas air danau	6.3.2 (a) Kualitas air danau	-	-	-	-	-
	6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	6.3.2 (b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	-	-	-	-	-
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	6.6.1 (a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	1	1	1	1	1
	6.6.1.(c) Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya	6.6.1 (c) Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya	6.6.1.(c) Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya	1	1	1	1	1
TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN								
11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	11.1.1.(a) Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau				77.34	77.13



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
akses terhadap pelayanan dasar perkotaan								
11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	11.2.1 (a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	249.43	242.76	234.54	254.77	164.71
11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).		11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).					
			Tanah longsor	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
			Gempa bumi	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
			Kebakaran hutan	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
			Angin putting beliung	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
			Kekeringan	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
			Banjir	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
	11.5.1.(b) Jumlah kota	11.5.1 (b) Jumlah desa	11.5.1.(b) Jumlah kota	-	-	1	2	2



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	tangguh bencana yang terbentuk	tangguh bencana yang terbentuk	tangguh bencana yang terbentuk					
11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani	11.6.1 (a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani	11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani	6.00	13.30	37.60	8.92	9.18
TUJUAN 12. POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB								
12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap	12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU		12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU	-	-	-	-	-



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
kesehatan manusia dan lingkungan								
12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	-	-	-	-	-
12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka	12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001		12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	-	-	-	-	-
12.7. Meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister		12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	-	-	-	-	-
12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan	12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.		12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	-	-	-	-	-



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam								
TUJUAN 13. PERUBAHAN IKLIM								
13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	13.1.1 Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah					
			Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD),	-	-	-	-	-
			Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB),	-	-	-	-	-
			Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).	-	-	-	-	-
			Rencana kontigensi Menghadapi Bencana Banjir Kabupaten OKU Selatan	-	1	1	1	1
			Kajian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Kabupaten OKU Selatan	1	1	1	1	1
			13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0.98	1.46	1.21	1.20	0.48
13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan,	13.2.1* Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia	13.2.1 Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia	13.2.1* Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia	-	-	-	-	-
	13.2.1.(a) Dokumen	13.2.1 (a) Dokumen	13.2.1.(a) Dokumen	-	-	-	-	-



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
strategi dan perencanaan nasional.	pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).					
TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUT								
14.6. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha	14.6.1 (a) Persentase kepatuhan pelaku usaha	14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
14.b. Menyediakan akses untuk nelayan	14.b.1*Ketersediaan kerangka		14.b.1*Ketersediaan kerangka	-	-	-	-	-



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.		hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.					
	14.b.1.(b). Jumlah nelayan yang terlindungi	14.b.1 (b) Jumlah nelayan yang terlindungi	14.b.1.(b). Jumlah nelayan yang terlindungi	8	8	8	8	8
TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN								
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	15.1.1.(a) Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	-	-	-	-	-
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan	15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	15.2.1 (a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	-	-	-	-	-
	15.2.1.(b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem		15.2.1.(b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	-	-	-	-	-
	15.2.1.(c) Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks	15.2.1 (c) Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks	15.2.1.(c) Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks	-	-	-	-	-



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
forestasi dan reforestasi secara global	METT minimal 70%. 15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	METT minimal 70%. 15.2.1 (d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	METT minimal 70%. 15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-	-	-	-
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi	15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	15.3.1 (a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	-	-	-	-	-
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional	15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	15.6.1 Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	-	-	-	-	-
15.7. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan	15.7.1.(a). Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi 15.7.1.(b) Jumlah penambahan spesies	15.7.1 (a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi 15.7.1 (b) Jumlah penambahan spesies satwa	15.7.1.(a). Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi 15.7.1.(b) Jumlah penambahan spesies	-	-	-	-	-



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi	satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.					
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	15.8.1.(a) Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati	15.8.1 (a) Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati	15.8.1.(a) Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati	-	-	-	-	-
15.c. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan	15.c.1.(a). Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	15.c.1 (a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	15.c.1.(a). Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	-	-	-	-	-



2.6.4. Pilar 4 (Tata Kelola Pelaksanaan)

Pilar ini terdiri dari 1 (satu) tujuan (*goal*), yaitu: Tujuan 16, Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh.



Tabel II.322
Pencapaian Pilar 4 (Tata Kelola Pelaksanaan)

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH								
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	16.1.1 (a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	16.1.1 (a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	NA	NA	NA	9	1
	16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	16.1.2 (a) Persentase desa/kelurahan yang ada kejadian konflik massal selama setahun terakhir	16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	-	-	-	-	-
	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	16.1.3 (a) Jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	0.0427	0.0334	0.0393	0.0400	0.0048
16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).		16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	-	-	-	-	-
16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparansi di semua tingkat	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	23.95	23.93	30.56	28.56	31.56
	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
	16.6.1.(b). Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	16.6.1(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	16.6.1.(b). Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	C	CC	B	B	B
	16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	-	-	75.39	87.72	
	16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).		16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	-	-	-	-	-
	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	16.6.2 (a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	-	-	-	-	-
16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap	16.7.1.(a). Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.7.1 (a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.7.1.(a). Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
tingkatan.	(DPRD).	(DPRD).	(DPRD)					
	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	16.7.1 (b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	12.90	12.90	12.90	16.13	16.13
	16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi	16.7.2 (a) Indeks Lembaga Demokrasi	16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi	-	-	-	-	-
	16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil	16.7.2 (b) Indeks Kebebasan Sipil.	16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil	-	-	-	-	-
	16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik	16.7.2 (c) Indeks Hak-hak Politik	16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik	-	-	-	-	-
16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	16.9.1 (a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	67.23	75.87	87.76	88.78	94.84
	16.9.1.(b). Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	16.9.1 (b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	16.9.1.(b). Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	85.63	71.03	90.90	92.38	96.41
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	16.10.2 (a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik					
			Peningkatan kewajiban mengumumkan informasi publik					
			Peningkatan kewajiban menyediakan informasi					



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
			publik Peningkatan kewajiban mengelola dan kewajiban; mendokumentasikan informasi publik Peningkatan kewajiban layanan informasi publik					
	16.10.2.(b) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	16.10.2 (b) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi non litigasi.	16.10.2.(b) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi					
	16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	16.10.2 (c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang,	16.a.1* Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles	16.a.1 Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	16.a.1* Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles	-	-	-	-	-



Target TPB	Indikator TPB	Indikator Provinsi	Indikator Kabupaten	Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan								



2.7. Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Dalam merumuskan perencanaan, sasaran, arah kebijakan, hingga program prioritas setiap tahapan pembangunan, khususnya rencana pembangunan jangka menengah, Pemerintah Daerah perlu melihat kembali capaian pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui evaluasi dan analisis terhadap pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah sebagaimana yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Selain itu, evaluasi setiap tahapan pembangunan akan menyelaraskan setiap program kegiatan ke arah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta menunjang pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah nasional.

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui indikator-indikator mana saja yang telah tercapai, mana yang belum tercapai, apa saja kendala dan hambatannya, dan apa yang harus disempurnakan, dihapus/diganti agar pencapaian target pembangunan lebih optimal. Selain itu, evaluasi ini juga akan menghasilkan identifikasi permasalahan baru yang timbul dalam pembangunan, faktor-faktor efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat diantisipasi sejak dini dan dirumuskan respon yang sesuai dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan. Berikut capaian indikator pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya dapat di lihat pada Tabel II.323 berikut ini.



Tabel II.323
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2016-2020

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
2.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
2.2.1.1.	Pertumbuhan PDRB							
	▪ PDRB ADHB	Milyar Rp	7,014.61	7,592.14	8,136.43	8,795.70	8,975.76	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ PDRB ADHK	Milyar Rp	4,951.56	5,175.05	5,436.56	5,710.53	5,731.91	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ Laju Perubuhan Ekonomi	Persen	5.19	4.51	5.05	5.04	0.37	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.2.1.2.	PDRB Perkapita							
	▪ ADHB	Juta Rp	20.12	21.51	22.78	24.36	24.59	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ ADHK	Juta Rp	14.21	14.66	15.22	15.81	15.70	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.2.1.3.	Indeks Gini	Indeks	0.320	0.395	0.317	0.323	0.271	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial							
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	63.42	63.96	64.84	65.43	65.30	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.2.2.1.1.	Pendidikan							
	▪ Angka melek huruf	Persen	99.02	99.66	98.82	98.83	99.33	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
	▪ Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.47	7.66	7.82	7.83	7.84	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ Angka harapan lama sekolah	Tahun	11.58	11.72	11.73	11.74	11.75	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.2.2.1.2.	Kesehatan							
	▪ Angka usia harapan hidup	Tahun	66.16	66.24	66.49	66.76	67.04	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
	▪ Persentase balita gizi buruk	Persen	0.037	0.047	0.027	0.075	0.420	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ Prevalensi balita gizi kurang	Persen	11.86	11.88	11.87	10.41	0.24	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ Cakupan desa siaga aktif	Persen	83.01	84.55	86.87	88.41	88.41	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.2.2.2.	Sosial							
2.2.2.2.1.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	89.05	89.02	89.36	89.47	89.15	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.2.2.2.2.	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	Persen	51.15	42.46	41.96	41.50	40.80	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.2.2.3.	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	3.14	7.32	3.39	4.14	3.45	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.2.2.4.	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.2.2.5.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	72.80	82.40	82.50	82.60	83.60	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.2.2.6.	Penguatan cadangan pangan	Persen	N.A	N.A	N.A	16.77	31.17	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.2.2.7.	Produksi sektor pertanian							
2.2.2.7.1.	Produksi tanaman pangan							
	▪ Padi	Ton	201,654.22	242,846.00	203,126.88	180,221.76	194,779.62	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Jagung	Ton	72,820	249,228.67	353,646.00	352,133.60	365,193.40	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Ketela Pohon	Ton	2,540	1,878	1,168.18	1,013.76	1,238.04	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Ketela Rambat	Ton	822	129	150.57	56.96	139.68	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Kedelai	Ton	810	0	232,534	1,100	194.40	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Kacang Hijau	Ton	8.45	1.27	1.30	0	1.25	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.2.7.2.	Produksi Sayur-Sayuran							
	▪ Bawang daun	Ton	110	94,070	738	289.8	1,844	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Kentang	Ton	180	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Kubis	Ton	1,100	40,270	1,295	760	1,954	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Petsai/Sawi	Ton	280	42,798	123	198	1,611	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Kacang Merah	Ton	280	0	106	38	563	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Kacang Panjang	Ton	840	41,128	198	265.3	1,352	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Cabe Besar	Ton	1,234	75,369	8,096	3,164.7	12,924	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Cabe Rawit	Ton	7,100	86,496	7,314	4,432.4	15,443	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.2.2.7.3.	Provitas Sayur-Sayuran							
	▪ Provitas cabe	Ton/ha	9.00	10.00	12.00	9.60	10.29	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
	▪ Provitas bawang merah	Ton/ha	21.00	0.00	0.00	0.00	3.00	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.2.2.7.4.	Produksi Buah-Buahan							
	▪ Alpukat	Ton	800	524,104	364,898	342,261.60	6,014	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Duku	Ton	3,100	37,636	173,335	2,111.90	9,190	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Durian	Ton	125	609,997	441,899	100,164.30	1,979	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Jeruk	Ton	955	308	344	5.80	15,111	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Mangga	Ton	325	1,360.06	3,845	1,727.70	15,630	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Nangka	Ton	665	197.85	15,352	946.10	164	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
								tersedia target
	▪ Pepaya	Ton	310	23,778	3,383	205.20	7,464	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Pisang	Ton	912	2,787.42	105,618	91,257.00	632.63	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.2.2.7.5.	Provitas Buah-Buahan							
	▪ Provitas Pisang	Ton/ha	58.00	58.00	28.00	32.67	63.26	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
	▪ Provitas Alpukat	Ton/ha	3.00	3.00	15.00	23.00	23.18	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
	▪ Provitas Durian	Ton/ha	30.00	2.50	32.00	35.00	35.19	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
	▪ Provitas Duku	Ton/ha	15.00	17.00	20.00	17.00	17.00	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.2.2.7.6.	Populasi Ternak							
	▪ Sapi	Ekor	15945	12719	16975	14061	13840	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ Kerbau	Ekor	521	440	533	450	370	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ Domba	Ekor	2582	60	2880	45	67	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ Kambing	Ekor	38455	27300	41557	30000	31857	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.2.2.7.	Produksi sektor perkebunan							
	▪ Kopi robusta	Ton	47,000	48,522.75	49,173.52	49,453.20	50,854.44	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ Karet	Ton	5,188	4,232.80	3,907.20	3,860.40	3,481.50	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ Kakao	Ton	1,078.78	631.20	64.20	588.00	554.40	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ Lada	Ton	3,071.80	2,869.20	2,231.60	2,761.65	2,749.75	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
	▪ Tembakau	Ton	236.00	140.00	41.50	46.80	26.40	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
2.2.3.1.	Jumlah grup kesenian	Grup	42	48	48	49	52	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.2.3.2.	Jumlah gedung kesenian	Gedung	1	1	1	1	1	Sesuai (=) dengan target RPJMD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.3.3.	Jumlah gedung olahraga	Gedung	1	1	1	6	6	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.2.3.4.	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	14	15	15	27	27	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.2.3.5.	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	14	16	16	1	0	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.	Aspek Pelayanan Umum							
2.3.1.	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib							
2.3.1.1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
2.3.1.1.1.	Pendidikan							
2.3.1.1.1.1.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	25.78	33.41	33.47	36.68	47.62	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.1.2.	Angka Partisipasi Kasar							
	▪ SD/MI	Persen	119.27	112.28	111.45	112.19	110.60	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ SLTP/MTS	Persen	93.74	92.17	86.44	86.65	87.88	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ SLTA/SMK/MA	Persen	74.31	75.09	84.94	75.21	76.53	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.1.3.	Angka Partisipasi Murni							
	▪ SD/MI	Persen	99.33	99.72	99.70	99.21	99.00	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ SMP/MTs	Persen	85.12	83.48	79.75	78.67	78.68	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ SMA/SMK/MA	Persen	63.33	61.04	61.07	60.96	61.83	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.1.3.	Angka Partisipasi Sekolah							
	▪ 7-12	Persen	100.00	100.00	99.70	99.74	99.60	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ 13-15	Persen	90.21	91.76	92.00	91.39	91.61	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD



*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026*

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
	▪ 16-18	Persen	70.85	69.34	70.65	69.41	71.03	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.1.4.	Angka Kelulusan							
	▪ Angka kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai (=) dengan target RPJMD
	▪ Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai (=) dengan target RPJMD
	▪ Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/ MA	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.3.1.1.1.5.	Angka Melanjutkan (AM)							
	▪ Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	N.A	N.A	64.86	90.80	88.28	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	N.A	N.A	N.A	70.93	69.91	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.1.6.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	69.47	70.18	83.86	86.67	93.33	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.1.7.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	50.00	50.75	51.11	58.09	87.59	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.1.8.	Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	Persen	15.44	23.16	23.51	29.47	51.93	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.1.9.	Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	Persen	32.18	36.36	43.32	43.01	43.01	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.1.10.	Persentase SMA/MA Berakredirasi Minimal B	Persen	0	0	0	0	68.18	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.1.11.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar							
	▪ SD/MI	Rasio	1 : 141	1 : 143	1 : 144	1 : 145	1 : 167	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ SMP/MTs	Rasio	1 : 271	1 : 278	1 : 282	1 : 253	1 : 326	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar							
	▪ SD/MI	Rasio	1 : 12.63	1 : 12.90	1 : 12.91	1 : 13.07	1 : 12.45	Belum tercapai (<) dibandingkan target



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
								RPJMD
	▪ SMP/MTs	Rasio	1 : 13.39	1 : 14.65	1 : 15.78	1 : 12.95	1 : 13.49	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.1.13.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio	1 : 12.23	1 : 12.24	1 : 12.38	1 : 12.66	1 : 13.37	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.1.14.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	70.02	69.75	70.61	84.55	75.11	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.1.15.	Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD	Persen	32.24	55.82	32.41	22.23	47.62	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.1.16.	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SD	Persen	55.99	59.09	58.59	59.80	84.95	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.1.17.	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SMP	Persen	41.62	46.62	51.55	46.41	56.08	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.1.18.	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesenjangan	Persen	16.08	17.26	17.34	16.91	2.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.	Kesehatan							
2.3.1.1.2.1.	Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan	Persen	17.32	19.07	31.27	26.01	17.46	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.2.	Jumlah Kematian Bayi		30	23	49	50	46	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.2.3.	Jumlah Kematian Ibu		5	1	8	4	5	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.2.4.	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	9.21	9.03	8.83	6.63	8.63	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	1 : 6,275	1 : 6,312	1 : 6,373	1 : 6,486	1 : 5,954	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.2.6.	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0.00245	0.00244	0.00241	0.00241	0.00240	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.3.1.1.2.7.	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0.061	0.080	0.118	0.060	0.074	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.2.8.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	2.23	2.59	2.60	2.38	2.65	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.9.	Cakupan pertolongan persalinan	Persen	71.80	73.05	66.57	80.47	94.92	Belum tercapai (<) dibandingkan target



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan							RPJMD
2.3.1.1.2.10.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	54.05	93.82	93.44	84.56	83.01	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.2.11.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.3.1.1.2.12.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	90.31	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.13.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	5.41	3.47	2.12	0.18	0.36	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	21.24	27.99	42.01	47.10	32.80	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.2.15.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		26.97	35.34	111.77	125.03	98.85	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.16.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		0	0	0	0.72	0.48	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.17.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	21.24	27.99	42.01	47.10	32.80	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.18.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	100.00	100.00	100.00	99.42	99.51	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.20.	Penderita diare yang ditangani	Persen	63.50	75.53	75.53	68.84	46.41	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.21.	Angka kejadian malaria		2.31	2.07	0.63	0.95	0.03	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.22.	Tingkat kematian akibat malaria		0.000	0.000	0.003	0.003	0.000	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target



*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026*

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.1.1.2.23.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.24.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0.0007	0.0005	0.0010	0.0010	0.0005	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.25.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	10.34	7.22	5.70	7.02	77.68	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.26.	Cakupan kunjungan bayi	Persen	99.85	90.84	93.12	94.40	99.61	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.2.27.	Cakupan puskesmas		0.0047	0.0046	0.0046	0.0046	0.0046	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.2.28.	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	15.48	15.48	15.48	15.48	15.48	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.2.29.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	95.21	96.04	93.87	85.54	97.12	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.30.	Cakupan pelayanan nifas	Persen	0.00	100.00	100.00	100.00	94.92	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.31.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	0.00	97.13	99.72	99.33	98.31	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.32.	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	12.37	12.66	13.22	13.48	70.26	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.33.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.34.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	7.40	8.21	9.29	12.85	10.63	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.35.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	63.93	20.99	93.11	22.68	77.68	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.2.36.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	0	0	0	100.00	100.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.37.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan	Persen	0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
	penyelidikan epidemiologi < 24 jam							
2.3.1.1.2.38.	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	PKM	0	19	19	19	19	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.39.	Persentase Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita	Persen	2.10	2.12	2.10	1.68	2.79	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.40.	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa/Kel	28	45	132	193	221	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.2.41.	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Desa/Kel	0	46	87	128	171	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.42.	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.43.	Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persen	2.23	2.59	2.60	2.38	2.65	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.44.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	38.49	38.26	54.45	54.34	61.33	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.45.	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	95.21	96.04	93.87	85.54	97.12	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.46.	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	71.81	73.05	66.57	80.47	94.92	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.47.	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	99.85	90.84	93.12	94.40	84.32	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.48.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	99.55	99.02	96.19	71.39	92.07	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.49.	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan	Persen	5.28	5.97	6.73	9.33	11.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							
2.3.1.1.2.50.	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	9.60	3.13	13.42	3.25	3.23	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.51.	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	16.85	11.26	8.29	9.72	19.68	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.52.	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	0.11	1.02	1.36	1.40	10.12	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.53.	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	2.86	2.61	2.39	2.25	10.12	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.54.	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Persen	0	26.13	38.05	61.71	61.71	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.55.	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	Persen	21.24	27.99	42.01	47.01	32.80	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.2.56.	Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Persen	0.00	0.00	0.113	0.408	4.03	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2.3.1.1.3.1.	Pekerjaan Umum							
2.3.1.1.3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	37.11	46.70	50.70	52.02	53.37	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0.0397	0.0725	0.0781	0.1336	0.1504	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.1.1.3.1.3.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	1.03	1.03	1.30	1.42	2.07	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.3.1.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	28.78	39.98	51.09	50.17	77.71	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.3.1.5.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	18.00	30.03	32.20	35.40	40.71	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.3.1.6.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	6.96	7.66	9.47	15.20	15.58	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.3.1.7.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	80.46	80.65	61.63	65.73	67.25	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.3.1.8.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	70.00	72.04	79.29	80.18	83.26	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.3.1.9.	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	Persen	26.98	33.28	39.78	46.04	54.82	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.3.1.10.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Persen	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.3.1.11.	Capaian Pelayanan SPALD-S Akses Dasar Air Limbah Domestik	Persen	66.33	68.21	69.07	70.51	71.46	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.3.1.12.	Capaian Pelayanan SPALD- S Akses Aman Air Limbah Domestik	Persen	48.14	51.78	54.44	58.86	63.38	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.3.1.13.	Capaian Pelayanan SPALD-T Akses Aman Air Limbah Domestik	Persen	53.40	55.19	60.26	64.01	66.43	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.3.1.14.	Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	46.76	50.78	55.36	60.43	63.75	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.3.2.	Penataan Ruang							
2.3.1.1.3.2.1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Rasio	0	0	9.83	50.72	50.72	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.3.2.2.	Jumlah bangunan ber-IMB	Unit	355	404	506	648	687	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.1.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
2.3.1.1.4.1.	Persentase rumah layak huni	Persen	77.93	77.73	76.96	77.34	77.13	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.4.2.	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0.30	0.36	0.61	0.96	0.96	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.4.3.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	9.00	5.60	3.97	3.94	3.68	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.4.4.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	0	83.33	80.00	88.00	75.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.4.5.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0	0	0	10.00	0.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
2.3.1.1.5.1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	0.1716	0.1706	0.1690	0.1686	0.1679	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.5.2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	N.A	N.A	N.A	73.68	75.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.5.3.	Persentase Penegakan PERDA	Persen	55.00	65.00	70.00	80.00	100.00	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.5.4.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	Rasio	6.72	6.65	6.76	6.67	6.65	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.5.5.	Jumlah Linmas Pemilu Per Jumlah 10.000 Penduduk	Rasio	90.69	90.15	92.99	94.00	93.62	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.5.6.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP	Kegiatan	1	1	1	1	1	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.3.1.1.5.7.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	1	1	1	1	1	Sesuai (=) dengan target RPJMD



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.1.1.5.8.	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	Ormas	17	17	17	24	25	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.5.9.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Desa	0	0	1	2	2	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.5.10.	Banyaknya sistem peringatan dini	Sistem	0	0	0	0	1	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.5.11.	Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah							
	▪ Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD),	Dokumen	0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB),	Dokumen	0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).	Dokumen	0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Rencana kontigensi Menghadapi Bencana Banjir Kabupaten OKU Selatan	Dokumen	0	1	1	1	1	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Kajian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Kabupaten OKU Selatan	Dokumen	1	1	1	1	1	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.5.12.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.5.13.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	50.00	50.00	37.81	50.00	49.80	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.5.14.	Respon Cepat Darurat Bencana	Persen	85.42	35.00	32.50	49.15	36.11	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.5.15.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persen	32.00	32.00	34.00	34.00	34.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.6.	Sosial							



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.1.1.6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	2.13	2.25	39.05	49.52	28.33	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	80.60	85.00	44.48	49.86	28.33	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	3.38	6.57	4.11	5.75	7.13	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	0.33	0.31	0.44	0.40	0.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.6.6.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.6.7.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	3.72	6.31	44.48	56.82	86.53	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.6.8.	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan	KPM	7,731	7,581	15,110	14,536	18,383	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.6.9.	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi							
	▪ Jumlah panti asuhan	Panti	8	8	8	6	6	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ Jumlah panti jompo	Panti	0	0	0	0	0	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
	▪ Panti rehabilitasi	Panti	0	0	0	0	0	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.1.6.10.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.6.11.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.6.12.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.6.13.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persen	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.1.6.14.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
2.3.1.2.1.	Tenaga Kerja							
2.3.1.2.1.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	Persen	95.72	79.61	77.02	77.54	63.98	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.1.2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	N.A	79.41	76.83	76.92	71.47	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.1.3.	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	N.A	3.54	4.11	2.99	3.28	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.1.4.	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio	63.93	96.46	95.89	97.01	96.72	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.1.5.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Rasio	61.19	76.80	73.86	74.97	60.28	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.1.6.	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja	Persen	60.84	58.69	55.82	55.31	53.80	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
	bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja							
2.3.1.2.1.7.	Keselamatan dan perlindungan kerja	Persen	34.92	31.68	39.95	40.56	39.93	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.3.1.2.2.1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	0	92.12	92.80	92.84	92.62	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.2.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	0	54.54	54.04	54.14	55.33	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.2.3.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	10.00	10.00	10.00	12.50	12,50	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.2.4.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	10,90	11.00	10.48	12.38	12.45	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.2.5.	Rasio KDRT	Rasio	0.017	0.031	0.030	0.027	0.055	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.2.6.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Perda	0	0	0	0	1	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.2.7.	Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Manajerial	Persen	12.90	12.90	12.90	16.13	16.13	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.3.	Pangan							
2.3.1.2.3.1.	Ketersediaan pangan utama	Persen	60.20	75.00	97.33	97.87	99.52	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita							
	▪ Ketersediaan energi perkapita (Kkal)	Kkal	3,179	3,180	3,180	3,180	3,186	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Ketersediaan protein perkapita (gr)	Gr	41.27	51.41	61.55	71.69	78.96	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.1.2.3.4.	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari	Kawasan	1	1	1	1	1	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.	Lingkungan Hidup							
2.3.1.2.4.1.	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	0	0	0	100.00	100.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.2.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di kabupaten/kota							
	▪ Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina		0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum		0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.3.	Jumlah MHA yang diakui		0	0	0	1	1	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.4.	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang di verifikasi		0	0	0	1	1	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.5.	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi		0	0	0	1	1	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.6.	Penetapan hak MHA		0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.7.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Persen	0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.8.	Terfasilitasi penyediaan	Persen	0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
	sarana/prasarana							tersedia target
2.3.1.2.4.9.	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Pelatihan	0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.10.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.11.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	Persen	0	0	0	100.00	100.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.12.	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	75.32	75.89	76.24	75.08	76.89	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.13.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.14.	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	0.0055	0.0055	0.0058	0.0067	0.0069	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.15.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	6.00	13.30	37.60	8.92	9.18	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.4.16.	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71		0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.17.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.18.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.19.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	3.27	3.25	3.22	3.21	3.20	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.4.20.	Kualitas air danau		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.4.21.	Kualitas air sungai sebagai sumber		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
	air baku							tersedia target
2.3.1.2.4.22.	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (sektor industri)		0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
2.3.1.2.5.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Rasio	0.58	0.60	0.67	0.70	0.88	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.5.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0.96	0.97	0.97	0.97	0.61	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.5.3.	Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran	Persen	85.63	71.03	90.90	92.38	96.41	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.5.4.	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0.02	0.03	0.07	0.13	0.33	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.5.5.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.3.1.2.5.6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.3.1.2.5.7.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	3.35	5.42	13.27	41.04	52.12	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.5.8.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	96.00	97.00	97.00	96.99	96.84	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.3.1.2.6.1.	Jumlah Desa tertinggal	Desa	112	112	180	139	139	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.6.2.	Jumlah Desa sangat tertinggal	Desa	49	47	33	15	15	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.6.3.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa	Persen	50.00	64.68	70.24	70.24	91.27	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
	yang baik							
2.3.1.2.6.4.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Rata-rata	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.6.5.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Rata-rata	0.097	0.111	0.348	0.448	0.520	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.6.6.	Persentase LPM berprestasi	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.6.7.	Persentase PKK aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.6.8.	Persentase Posyandu aktif	Persen	97,53	97,53	100,00	99,69	100,00	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2.3.1.2.7.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0.23	0.60	0.96	0.21	0.37	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.7.2.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rata-rata	2.45	2.33	2.33	2.31	2.25	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.7.3.	Ratio akseptor KB	Rasio	0.71	0.85	0.79	0.70	0.65	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.7.4.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	70.61	68.61	70.20	70.10	69.03	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.7.5.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)	Persen	1.29	1.26	1.26	1.13	1.35	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.7.6.	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0	0	0	0.89	0.93	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.7.7.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	29.39	31.39	29.80	29.90	30.07	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.7.8.	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	25.91	26.20	23.37	22.70	20.83	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.7.9.	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	Persen	48.37	50.45	52.53	54.61	57.13	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.1.2.7.10.	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	Persen	0	0	0	4.54	3.18	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.7.11.	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	Persen	0	0	0	34.79	40.87	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.7.12.	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	0	0	0	9.07	6.89	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.7.13.	Cakupan peserta KB aktif	Persen	70.61	68.61	70.20	70.10	69.03	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.8.	Perhubungan							
2.3.1.2.8.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	111,805	111,860	117,479	129,220	83,996	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.8.2.	Rasio ijin trayek per 10.000 penduduk	Rasio	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.8.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	565	586	697	787	430	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ Mobil penumpang umum		0	0	0	0	0	
	▪ Mobil bus		120	130	141	176	93	
	▪ Mobil barang		445	456	556	611	337	
	▪ Kereta gandengan		0	0	0	0	0	
	▪ Kereta tempelan		0	0	0	0	0	
2.3.1.2.8.4.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis							
	▪ Jumlah dermaga	Buah	1	2	2	2	2	Sesuai (=) dengan target RPJMD
	▪ Terminal type B Muaradua	Buah	1	1	1	1	1	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Lapangan terbang Banding Agung	Buah	1	1	1	1	1	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.8.5.	Pemasangan Rambu-rambu	Buah	306	358	496	540	576	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.1.2.9.	Komunikasi dan Informatika							
2.3.1.2.9.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	0	0	0	100,00	100,00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.9.2.	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	40.14	40.14	46.14	46.14	49.80	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.9.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	80.00	85.45	86.00	74.84	78.22	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.9.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	0.63	0.65	0.68	0.70	0.70	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.9.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	0.39	0.41	0.43	0.45	0.45	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.10.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
2.3.1.2.10.1.	Persentase koperasi aktif	Persen	59.93	71.52	20.23	17.32	18.33	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.10.2.	Persentase usaha mikro dan kecil	Persen	95.20	96.97	98.00	81.54	99.07	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.10.3.	Jumlah BPR/LKM		0	0	0	0	0	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.11.	Penanaman Modal							
2.3.1.2.11.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	21	23	7	14	11	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.11.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	100,3 Milyar	100,3 Milyar	318,4 Milyar	602,5 Milyar	906.9 Milyar	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.11.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	14.57	13.30	43.71	54.07	48.91	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.12.	Kepemudaan dan Olahraga							
2.3.1.2.12.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.1.2.12.2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	12	6	56	13	6	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.12.3.	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	57.14	60.00	73.33	77.78	77.78	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.12.4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Persen	7.14	6.67	6.67	3.70	18.52	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.12.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	1.46	1.95	1.95	2.44	2.44	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.13.	Statistik							
2.3.1.2.13.1.	Buku "kabupaten dalam angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.3.1.2.13.2.	Buku "PDRB"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.3.1.2.13.3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.14.	Persandian							
2.3.1.2.14.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	0	0	5.66	1.64	1.64	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.15.	Kebudayaan							
2.3.1.2.15.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	2	2	2	4	1	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.15.2.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	2.44	2.44	2.44	4.88	4.88	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.15.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.15.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.16.	Perpustakaan							
2.3.1.2.16.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	1,120	1,168	1,220	1,562	1,690	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.1.2.16.2.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.3.1.2.16.3.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	Orang	185	245	1000	1690	1200	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.16.4.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	550	670	1255	5081	5081	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.16.5.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Persen	0	0	0	0	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.1.2.17.	Kearsipan							
2.3.1.2.17.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	0	0	0	0	7.55	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.1.2.17.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan							
	▪ Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	1	0	1	0	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan							
2.3.2.1.	Pariwisata							
2.3.2.1.1.	Kunjungan wisata	Orang	13,534	30,000	35,010	45,796	11,959	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.2.1.2.	Lama kunjungan Wisata							
	▪ Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	Orang	1128	2500	2917	3816	974	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.2.1.3.	PAD sektor pariwisata	Persen	0.30	0.16	0.48	0.72	0.27	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.2.2.	Pertanian							
2.3.2.2.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap	Persen	33.56	32.63	31.71	31.08	31.09	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
	PDRB							
2.3.2.2.2.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
	▪ Provitas padi	Ton/ha	4.90	4.93	5.30	5.03	4.54	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
	▪ Provitas jagung	Ton/ha	6.00	6.30	7.08	6.37	7.15	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
	▪ Provitas kedelai	Ton/ha	1.20	0.00	0.99	1.20	1.35	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.2.2.3.	Cakupan bina kelompok petani	Persen	37.19	43.83	47.00	62.56	47.10	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.2.3.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
2.3.2.3.1.	Rasio Elektrifikasi	Persen	28,68	41,51	54,63	65,61	67.62	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.2.4.	Perdagangan							
2.3.2.4.1.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	0.00	14.63	15.85	15.85	15.85	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.2.4.2.	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	Persen	21.03	21.43	21.84	22.77	22.50	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.2.5.	Perindustrian							
2.3.2.5.1.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	7.03	7.51	7.68	7.95	7.94	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.2.6.	Transmigrasi							
2.3.2.6.1.	Persentase transmigran swakarsa	Persen	25,00	30,00	65,00	65,00	65,00	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.2.7.	Kelautan dan Perikanan							
2.3.2.7.1.	Produksi perikanan	Persen	43.02	92.05	54.00	57.00	29.50	Belum tercapai (<) dibandingkan target



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
								RPJMD
2.3.2.7.2.	Konsumsi ikan	Persen	89.84	86.31	96.00	95.83	96.25	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.2.7.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	0	0	0	0	0	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.2.7.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	18.96	42.31	24.32	36.76	13.32	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.3.	Penunjang Urusan							
2.3.3.1.	Perencanaan Pembangunan							
2.3.3.1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.3.3.1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.3.3.1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.3.3.2.	Keuangan							
2.3.3.2.1.	Persentase SILPA	Persen	5.64	0.57	2.01	3.92	0.19	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.3.2.2.	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	20.05	16.70	22.64	21.78	22.60	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.3.2.3	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	6,03	7,94	8,11	8,65	10,22	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.3.2.4.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung							
	▪ Belanja Langsung	Persen	53.24	50.02	47.71	52.46	43.92	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Belanja Tidak Langsung	Persen	51.52	49.29	49.13	50.61	55.65	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
								tersedia target
2.3.3.2.5.	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.3.3.3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
2.3.3.3.1.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	20.63	34.29	48.09	53.96	37.23	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.3.3.3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	0	0	0.57	4.00	5.73	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.3.4.	Penelitian dan pengembangan							
2.3.3.4.1.	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	1.87	1.87	100.00	100.00	100.00	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.3.4.2.	Skor Indeks Inovasi Daerah	Skor	0	0	0	90	358	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.3.5.	Pengawasan							
2.3.3.5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	75.00	75.00	83.33	83.33	91.04	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.3.3.5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0.0184	0.0185	0.1720	0.0965	0.0772	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.3.5.3.	Jumlah temuan BPK	Kasus	20	20	14	18	48	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.3.3.6.	Sekretariat Dewan							
2.3.3.6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah							
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi							



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
	Daerah							
2.4.1.1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga							
	▪ ADHB (milyar rupiah)	Rupiah	4,727.72	5,124.65	5,496.54	5,931.95	5,958.01	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ ADHK (milyar rupiah)	Rupiah	3,150.60	3,259.23	3,387.64	3,528.60	3,490.09	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.4.1.2.	Nilai Tukar Petani		100.00	102.00	103.00	104.00	104.00	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
2.4.2.1.	Perhubungan							
2.4.2.1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0.24	0.46	0.52	0.87	1.46	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.4.2.1.2.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	126,408	135,708	145,008	129,226	83,996	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.4.2.1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	121,450	125,350	129,250	128,400	79,761	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.4.2.2.	Penataan ruang							
2.4.2.2.1.	Luas wilayah produktif	Persen	95.74	95.74	95.74	97.74	97.74	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi							
2.4.3.1.	Angka kriminalitas		4.27	3.34	3.93	4.00	0.48	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD
2.4.3.2.	Lama proses perizinan	Hari	4	4	2	2	1	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.4.3.3.	Jenis dan jumlah bank dan cabang		6	6	6	6	6	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.4.3.4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah		33	33	33	33	33	Sesuai (=) dengan target RPJMD
2.4.3.5.	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Perda	0	1	1	1	1	Belum tercapai (<) dibandingkan target RPJMD
2.4.3.6.	Persentase Desa berstatus	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Belum tercapai (<) dibandingkan target



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
	swasembada							RPJMD
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia							
2.4.4.1.	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi							
	▪ Tidak/Belum Pernah Sekolah	Persen	-	-	-	0.50	0.00	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Tidak/Belum Tamat SD	Persen	-	-	-	14.71	8.09	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ SD	Persen	-	-	-	32.89	39.39	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ SMP	Persen	-	-	-	24.22	20.76	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ SMA	Persen	-	-	-	18.48	22.15	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ SMK	Persen	-	-	-	4.03	4.09	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ DI/II/III/Akademi	Persen	-	-	-	1.81	1.19	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
	▪ Universitas	Persen	-	-	-	3.36	4.33	Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tidak tersedia target
2.4.4.2.	Rasio ketergantungan	Rasio	48.60	48.26	47.97	47.72	42.75	Melampaui (>) dibandingkan target RPJMD



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah perlu dikuatkan untuk memacu perekonomian nasional. Perekonomian daerah yang kuat akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Pembangunan perekonomian di daerah dapat menumbuhkan kegiatan-kegiatan sektor lapangan usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah yang melemah dapat mempengaruhi keuangan daerah juga sehingga proses pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini lebih difokuskan kepada pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Keuangan daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri Keuangan dan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Keuangan daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selain itu tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi di mana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.



3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Dalam melakukan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, haruslah memperhatikan kinerja keuangan masa lalu. Kinerja keuangan masa lalu dianalisis sekurang kurangnya 5 (lima) tahun ke belakang, akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan ke depan. Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauhmana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada Tabel III.1 berikut ini:

Tabel III.1
Skala interval Otonomi Fiskal

No.	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1.	0,00-10,00	Sangat Kurang
2.	10,01-20,00	Kurang
3.	20,01-30,00	Sedang
4.	30,01-40,00	Cukup
5.	40,01-50,00	Baik
6.	>50	Sangat Baik

Sumber: Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) mengalami naik turun yang tidak signifikan. Di tahun 2016, DOFD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 3,14%, kemudian di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4,18% menjadi 7,32%. Setelah mengalami peningkatan, di tahun 2018 terjadi penurunan kembali menjadi 3,39%, kemudian meningkat menjadi 4,14% pada tahun 2019, dan terakhir pada tahun 2020 turun kembali menjadi 3,45%. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang sebesar 4,27% masih masuk kategori sangat kurang bahkan jauh di bawah 10%.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus semakin lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sehingga penerimaannya tidak tergantung kepada Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Perkembangan DOFD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode tahun 2016-2020, dapat dilihat pada Tabel III.2 berikut ini.



Tabel III.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah

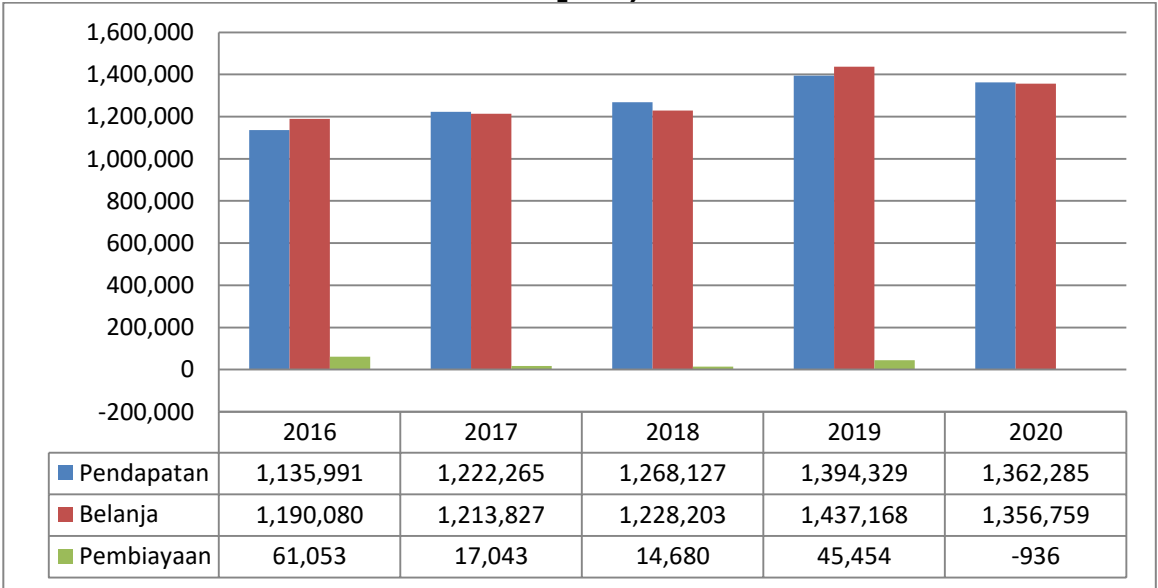
Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
2016	35,696,934,794.31	1,135,991,127,943.53	3.14
2017	89,506,598,777.46	1,222,264,959,242.97	7.32
2018	42,993,134,751.66	1,268,126,824,333.83	3.39
2019	57,669,139,990.39	1,394,328,846,084.93	4.14
2020	46,947,369,117.43	1,362,285,274,507.00	3.45
Rata-Rata	272,813,177,431.25	6,382,997,032,112.26	4.27

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021 (diolah)

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat pada Gambar III.1 berikut ini.

Gambar III.1
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020 (juta
rupiah)



Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021 (diolah)



Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami tren naik di mana pendapatan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp.1,14 triliun menjadi Rp.1,36 triliun pada tahun 2020. Kenaikan pendapatan ini juga berdampak pada peningkatan kemampuan belanja daerah dari Rp.1,19 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp.1,36 triliun pada tahun 2020. Begitu juga dengan pembiayaan (netto) daerah yang juga mengalami tren naik turun akibat penurunan SiLPA yang sangat signifikan.

Selanjutnya akan diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja daerah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode tahun 2016-2020.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan struktur pendapatan daerah, terdiri dari:

- (1) Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pendapatan transfer yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat (dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana Desa); dan transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan);
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) mengalami kenaikan dengan rata-rata naik sebesar 4,75% per tahun. Jika dilihat dari komponen pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terlihat bahwa semua sumber pendapatan mengalami kenaikan di mana rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 28,58%, rata-rata kenaikan pendapatan transfer sebesar 7,97% dan rata-rata kenaikan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,55%.

Jika dilihat dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun, PAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melonjak pada tahun 2017 sebesar Rp.89,51 milyar dan kembali turun di tahun 2018 menjadi Rp.42,99 milyar dan naik lagi di tahun 2019 sebesar Rp.57,67 milyar, terakhir tahun 2020 turun kembali menjadi sebesar Rp.46,95 milyar. Jika dibandingkan dengan komponen pendapatan daerah lainnya, PAD



merupakan komponen yang mengalami rata-rata kenaikan yang tertinggi. Meskipun terbilang tingkat kenaikan tertinggi dibanding yang lain, namun tetap saja masih kategori kecil, jadi ke depan harus masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, tantangan pengelolaan pendapatan daerah periode tahun 2021-2026 adalah perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan PAD, antara lain membentuk tim optimalisasi pendapatan daerah yang melibatkan OPD di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, melakukan kerjasama dengan institusi lain dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, pemantapan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak, peningkatan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak, intensifikasi pemungutan pajak daerah, penggalan sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, serta pemanfaatan teknologi dalam sosialisasi pajak, penerapan sistem pelayanan dan pelaporan secara *online*.

Langkah lain yang telah dilakukan adalah optimalisasi peningkatan koordinasi dan evaluasi dengan OPD pemungut retribusi, penggalan objek pemungutan retribusi baru dan memperbaiki sistem tarif retribusi, dan peningkatan bagian laba atas penyertaan modal. Berbagai langkah tersebut secara bertahap telah meningkatkan PAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Untuk dana perimbangan secara agregat dari tahun 2016-2020 mengalami rata-rata kenaikan sebesar 7,55%. Untuk komponen dana perimbangan semuanya mengalami peningkatan kecuali dana bagi hasil pajak turun sebesar 9,57% per tahun, dan dana alokasi khusus turun sebesar 4,07% per tahun, sedangkan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) naik sebesar 20,03% per tahun dan dana alokasi umum naik sebesar 0,03% per tahun.

Komponen pendapatan bagi hasil selama 5 (lima) tahun mengalami kenaikan, Untuk pendapatan bagi hasil pajak mengalami kenaikan sebesar 17,83% per tahun. Untuk pendapatan bagi hasil lainnya secara agregat dari tahun 2016-2020 juga mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 201,26% per tahun. Adapun komponen dari lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,55% per tahun di mana pendapatan hibah mengalami rata-rata kenaikan sebesar 911,50% per tahun.



Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut ini.



Tabel III.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN	1,135,991,127,943.53	1,222,264,959,242.97	1,268,126,824,333.83	1,394,328,846,084.93	1,362,285,274,507.00	4.75
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35,696,934,794.31	89,506,598,777.46	42,993,134,751.66	57,669,139,990.39	46,947,369,117.43	28.58
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8,015,920,952.00	12,114,840,273.00	13,021,942,319.00	17,485,020,515.00	14,508,273,116.00	18.97
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2,894,609,350.00	3,792,382,050.00	5,260,553,922.00	9,344,953,304.00	12,151,029,559.00	44.35
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,357,026,472.31	3,429,985,483.12	3,405,078,314.07	4,235,018,601.82	4,914,972,178.21	10.47
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21,429,378,020.00	70,169,390,971.34	21,305,560,196.59	26,604,147,569.57	15,373,094,264.22	35.12
1.2	PENDAPATAN TRANSPER	943,687,950,749.22	910,865,180,528.51	1,176,282,763,565.17	1,288,373,729,337.54	1,245,983,420,214.57	7.97
1.2.1	TRANSPER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	866,483,544,547.00	871,408,759,446.00	1,119,814,040,804.00	1,173,724,466,007.00	1,130,384,450,199.00	7.55
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	21,244,495,396.00	14,298,872,959.00	14,540,705,631.00	12,683,467,820.00	13,382,629,948.00	(9.57)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	74,805,158,151.00	103,300,445,026.00	121,051,436,229.00	136,396,784,933.00	152,964,617,561.00	20.03
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	588,216,178,000.00	585,269,591,000.00	598,063,061,000.00	622,584,708,000.00	587,250,613,000.00	0.03
1.2.1.3	Dana Alokasi	182,217,713,000.00	168,539,850,461.00	176,993,703,944.00	175,314,509,254.00	152,831,932,690.00	(4.07)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Khusus						
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.6	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	209,165,134,000.00	226,744,996,000.00	223,954,657,000.00	0.00
1.2.1.7	Dana Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	TRANSPER ANTAR DAERAH	77,204,406,202.22	39,456,421,082.51	56,468,722,761.17	114,649,263,330.54	115,598,970,015.57	24.52
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34,890,249,650.22	37,321,323,782.35	52,549,018,921.17	82,061,953,262.27	55,302,526,969.00	17.83
1.2.2.2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	42,314,156,552.00	2,135,097,300.16	3,919,703,840.00	32,587,310,068.27	60,296,443,046.57	201.26
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	156,606,242,400.00	221,893,179,937.00	48,850,926,017.00	48,285,976,757.00	69,354,485,175.00	1.55
1.3.1	Pendapatan Hibah	613,332,400.00	21,964,193,701.00	48,850,926,017.00	48,285,976,757.00	69,354,485,175.00	911.50
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	155,992,910,000.00	199,928,986,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021 (diolah)



2. Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2016-2020 realisasi belanja daerah terus mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 3,65% per tahun dari Rp.1,19 triliun di tahun 2016 naik menjadi Rp.1,36 triliun di tahun 2020. Kenaikan belanja tersebut seirama dengan kenaikan pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jika dilihat lebih rinci, belanja operasi pada kurun waktu tersebut juga mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4,76% per tahun dari Rp.640,26 milyar di tahun 2016 menjadi Rp.763,95 milyar di tahun 2020. Semua komponen belanja operasi mengalami peningkatan kecuali belanja pegawai yang mengalami penurunan sebesar 0,32% per tahun.

Keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel III.4 berikut.



Tabel III.4
Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2	BELANJA	1,190,079,829,794.30	1,213,827,297,222.44	1,228,203,115,853.97	1,437,168,439,082.82	1,356,759,375,073.22	3.65
2.1	BELANJA OPERASI	640,259,987,375.30	695,665,642,509.64	683,527,952,861.09	784,287,231,522.76	763,951,590,222.60	4.76
2.1.1	Belanja Pegawai	428,273,144,412.30	395,090,710,610.00	403,087,988,885.00	429,338,167,544.00	420,535,939,637.00	(0.32)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	191,985,451,301.00	255,812,720,719.64	268,811,543,976.09	318,567,131,769.76	286,528,635,585.60	11.69
2.1.2	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	19,482,001,662.00	43,963,846,180.00	11,046,000,000.00	35,542,450,000.00	56,087,150,000.00	82.59
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	519,390,000.00	798,365,000.00	582,420,000.00	839,482,209.00	799,865,000.00	16.52
2.2	BELANJA MODAL	373,153,188,095.00	292,933,440,939.80	311,605,526,135.88	381,552,391,906.06	283,802,863,525.62	(4.57)
2.2.1	Belanja Tanah	957,958,640.00	276,682,450.00	1,265,000,000.00	49,773,629.00	0.00	22.51
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	27,266,785,303.00	31,937,395,190.80	29,969,420,432.00	35,310,581,642.75	50,581,527,756.00	18.01
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	47,955,834,162.00	36,313,802,943.00	69,117,272,485.00	92,303,847,961.95	62,648,862,355.16	16.87
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	295,616,341,490.00	214,616,229,670.00	199,844,564,115.88	241,295,595,173.36	163,258,854,909.96	(11.47)
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,356,268,500.00	9,789,330,686.00	11,409,269,103.00	12,592,593,499.00	7,313,618,504.50	151.70
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	996,144,000.00	412,436,000.00	181,252,500.00	206,292,000.00	11,991,969,357.00	1,403.07
2.3.1	Belanja Tak Terduga	996,144,000.00	412,436,000.00	181,252,500.00	206,292,000.00	11,991,969,357.00	1,403.07
2.4	BELANJA TRANSFER	175,670,510,324.00	224,815,777,773.00	232,888,384,357.00	271,122,523,654.00	297,012,951,968.00	14.38
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	175,670,510,324.00	224,815,777,773.00	232,888,384,357.00	271,122,523,654.00	297,012,951,968.00	14.38
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa dari	174,691,560,000.00	223,836,827,450.00	231,809,434,000.00	270,124,196,400.00	295,725,870,560.00	14.43



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Lainnya dari Kab/Kota ke Desa)						
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	978,950,324.00	978,950,323.00	978,950,357.00	998,327,254.00	1,037,081,408.00	1.47
SURPLUS/(DEFISIT)		(54,088,701,850.77)	8,437,662,020.53	39,923,708,479.86	(42,839,592,997.89)	5,525,899,433.78	(15.66)

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021 (diolah)



3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan trennya relatif menurun. Meskipun menurun namun nilainya relatif masih mengalami surplus. Dengan kata lain, penerimaan pembiayaan nilai lebih besar ketimbang pengeluaran pembiayaan. Nilai pembiayaan (netto) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2016 sebesar Rp.61,05 milyar, pada tahun 2017 sebesar Rp.17,04 milyar, pada tahun 2018 sebesar Rp.14,68 milyar, dan tahun 2019 sebesar Rp.45,45 milyar terakhir pada tahun 2020 sebesar -Rp.935,63 juta.

Seluruh penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya kecuali di tahun 2017 mendapatkan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.22,07 milyar, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah yang terus naik dari tahun 2016 sebesar Rp.3 milyar sampai dengan Rp.9,15 milyar di tahun 2019, dan terakhir pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.3,55 milyar.

Secara lebih rinci, perkembangan pembiayaan daerah dan rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel III.5 berikut ini.



Tabel III.5
Rata-Rata Pertumbuhan APBD
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN	1,135,991,127,943.53	1,222,264,959,242.97	1,268,126,824,333.83	1,394,328,846,084.93	1,362,285,274,507.00	4.75
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35,696,934,794.31	89,506,598,777.46	42,993,134,751.66	57,669,139,990.39	46,947,369,117.43	28.58
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8,015,920,952.00	12,114,840,273.00	13,021,942,319.00	17,485,020,515.00	14,508,273,116.00	18.97
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2,894,609,350.00	3,792,382,050.00	5,260,553,922.00	9,344,953,304.00	12,151,029,559.00	44.35
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,357,026,472.31	3,429,985,483.12	3,405,078,314.07	4,235,018,601.82	4,914,972,178.21	10.47
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21,429,378,020.00	70,169,390,971.34	21,305,560,196.59	26,604,147,569.57	15,373,094,264.22	35.12
1.2	PENDAPATAN TRANSPER	943,687,950,749.22	910,865,180,528.51	1,176,282,763,565.17	1,288,373,729,337.54	1,245,983,420,214.57	7.97
1.2.1	TRANSPER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	866,483,544,547.00	871,408,759,446.00	1,119,814,040,804.00	1,173,724,466,007.00	1,130,384,450,199.00	7.55
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	21,244,495,396.00	14,298,872,959.00	14,540,705,631.00	12,683,467,820.00	13,382,629,948.00	(9.57)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	74,805,158,151.00	103,300,445,026.00	121,051,436,229.00	136,396,784,933.00	152,964,617,561.00	20.03
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	588,216,178,000.00	585,269,591,000.00	598,063,061,000.00	622,584,708,000.00	587,250,613,000.00	0.03
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	182,217,713,000.00	168,539,850,461.00	176,993,703,944.00	175,314,509,254.00	152,831,932,690.00	(4.07)
1.2.1.4	Dana Insentif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026*

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Daerah						
1.2.1.5	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.6	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	209,165,134,000.00	226,744,996,000.00	223,954,657,000.00	0.00
1.2.1.7	Dana Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	TRANSPER ANTAR DAERAH	77,204,406,202.22	39,456,421,082.51	56,468,722,761.17	114,649,263,330.54	115,598,970,015.57	24.52
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34,890,249,650.22	37,321,323,782.35	52,549,018,921.17	82,061,953,262.27	55,302,526,969.00	17.83
1.2.2.2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	42,314,156,552.00	2,135,097,300.16	3,919,703,840.00	32,587,310,068.27	60,296,443,046.57	201.26
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	156,606,242,400.00	221,893,179,937.00	48,850,926,017.00	48,285,976,757.00	69,354,485,175.00	1.55
1.3.1	Pendapatan Hibah	613,332,400.00	21,964,193,701.00	48,850,926,017.00	48,285,976,757.00	69,354,485,175.00	911.50
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	155,992,910,000.00	199,928,986,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA	1,190,079,829,794.30	1,213,827,297,222.44	1,228,203,115,853.97	1,437,168,439,082.82	1,356,759,375,073.22	3.65
2.1	BELANJA OPERASI	640,259,987,375.30	695,665,642,509.64	683,527,952,861.09	784,287,231,522.76	763,951,590,222.60	4.76
2.1.1	Belanja Pegawai	428,273,144,412.30	395,090,710,610.00	403,087,988,885.00	429,338,167,544.00	420,535,939,637.00	(0.32)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	191,985,451,301.00	255,812,720,719.64	268,811,543,976.09	318,567,131,769.76	286,528,635,585.60	11.69
2.1.2	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	19,482,001,662.00	43,963,846,180.00	11,046,000,000.00	35,542,450,000.00	56,087,150,000.00	82.59
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	519,390,000.00	798,365,000.00	582,420,000.00	839,482,209.00	799,865,000.00	16.52
2.2	BELANJA MODAL	373,153,188,095.00	292,933,440,939.80	311,605,526,135.88	381,552,391,906.06	283,802,863,525.62	(4.57)
2.2.1	Belanja Tanah	957,958,640.00	276,682,450.00	1,265,000,000.00	49,773,629.00	0.00	22.51



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	27,266,785,303.00	31,937,395,190.80	29,969,420,432.00	35,310,581,642.75	50,581,527,756.00	18.01
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	47,955,834,162.00	36,313,802,943.00	69,117,272,485.00	92,303,847,961.95	62,648,862,355.16	16.87
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	295,616,341,490.00	214,616,229,670.00	199,844,564,115.88	241,295,595,173.36	163,258,854,909.96	(11.47)
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,356,268,500.00	9,789,330,686.00	11,409,269,103.00	12,592,593,499.00	7,313,618,504.50	151.70
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	996,144,000.00	412,436,000.00	181,252,500.00	206,292,000.00	11,991,969,357.00	1,403.07
2.3.1	Belanja Tak Terduga	996,144,000.00	412,436,000.00	181,252,500.00	206,292,000.00	11,991,969,357.00	1,403.07
2.4	BELANJA TRANSFER	175,670,510,324.00	224,815,777,773.00	232,888,384,357.00	271,122,523,654.00	297,012,951,968.00	14.38
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	175,670,510,324.00	224,815,777,773.00	232,888,384,357.00	271,122,523,654.00	297,012,951,968.00	14.38
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Bantuan	174,691,560,000.00	223,836,827,450.00	231,809,434,000.00	270,124,196,400.00	295,725,870,560.00	14.43



*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026*

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Keuangan Lainnya dari Kab/Kota ke Desa)						
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	978,950,324.00	978,950,323.00	978,950,357.00	998,327,254.00	1,037,081,408.00	1.47
	SURPLUS/(DEFISIT)	(54,088,701,850.77)	8,437,662,020.53	39,923,708,479.86	(42,839,592,997.89)	5,525,899,433.78	(15.66)
3	PEMBIAYAAN	61,053,318,663.93	17,042,590,873.35	14,680,252,893.88	45,453,961,373.74	-935,631,624.15	5.41
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	64,053,318,663.93	29,042,590,873.35	25,480,252,893.88	54,603,961,373.74	2,614,368,375.85	(11.96)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	64,053,318,663.93	6,975,399,498.16	25,480,252,893.88	54,603,961,373.74	2,614,368,375.85	48.82
3.1.1.1	Pelampauan Penerimaan PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0.00	6,975,399,498.16	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.3	Pelampauan Penerimaan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.4	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	64,053,318,663.93	0.00	25,480,252,893.88	54,603,961,373.74	2,614,368,375.85	0.00
3.1.1.5	Sisa Belanja DAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.6	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.7	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
3.1.2	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	22,067,191,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.1	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah	0.00	22,067,191,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,000,000,000.00	12,000,000,000.00	10,800,000,000.00	9,150,000,000.00	3,550,000,000.00	53.38
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	12,000,000,000.00	10,800,000,000.00	9,150,000,000.00	3,550,000,000.00	53.38
3.2.1.1	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3,000,000,000.00	12,000,000,000.00	10,800,000,000.00	9,150,000,000.00	3,550,000,000.00	53.38
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.1	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	61,053,318,663.93	17,042,590,873.35	14,680,252,893.88	45,453,961,373.74	-935,631,624.15	5.41

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021 (diolah)



3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah) yang meliputi: aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti kepala daerah dan kepala bagian keuangan serta kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama Neraca Pemerintah Daerah meliputi: aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar; (ii) investasi jangka panjang; (iii) aset tetap; (iv) dana cadangan; dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari tahun 2016-2020 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 6,48% per tahun. Tercatat aset Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2016 senilai Rp.2,28 triliun naik menjadi Rp.2,91 triliun di tahun 2020.

Jika dilihat lebih rinci, maka terlihat bahwa jenis aset yang mengalami peningkatan nilai secara drastis ialah jenis aset lainnya yang rata-rata tumbuh 118,66% di mana sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aset lain-lain yang di tahun terakhir yaitu tahun 2020 nilainya telah mencapai Rp.42,53 milyar. Adapun jenis aset yang mengalami peningkatan sedikit demi sedikit ialah investasi jangka panjang sebesar 13,93% per tahun dan aset tetap sebesar 6,09% per tahun. Selain itu, komponen aset yang mengalami penurunan ialah investasi non permanen yang rata-rata tumbuhnya sebesar -19,97% per tahun.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jenis kewajiban yang



harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya berupa kewajiban jangka pendek.

Nilai kewajiban jangka pendek tersebut relatif terus meningkat dari Rp.8,11 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp.14,64 milyar pada tahun 2020 atau mengalami rata-rata peningkatan sebesar 2,473% per tahun. Jika dilihat lebih detil maka utang jangka pendek yang terbesar dan puncaknya terjadi di tahun 2016 dan tahun 2020. Hutang jangka pendek di tahun 2016 sebesar Rp.8,11 milyar, tahun 2017 sebesar Rp.119,27 juta, tahun 2018 mencapai Rp.11,66 milyar, tahun 2019 sebesar Rp.2,995 milyar, dan tahun 2020 sebesar Rp.14,64 milyar.

Adapun struktur utang jangka pendek yang paling dominan nilainya ialah utang jangka pendek lainnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 10.997% per tahun dan pendapatan diterima dimuka dengan rata-rata kontribusi sebesar 6,65% per tahun. Selain itu, juga terdapat utang bunga yang nilainya cukup besar di tahun 2018 sebesar Rp.11,54 milyar, kemudian menurun menjadi sebesar Rp.8,22 milyar pada tahun 2020.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mempunyai tren yang meningkat dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,45% per tahun. Tercatat nilai ekuitas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di tahun 2016 sebesar Rp.2,27 triliun dan menjadi Rp.2,90 triliun di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selisih antara nilai aset yang ada terhadap kewajiban yang harus dibayarkan terus meningkat. Hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terutama berkaitan dengan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Secara keseluruhan neraca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan disajikan pada Tabel III.6. berikut ini.



Tabel III.6
Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	6,937,911,580.16	25,295,075,852.88	54,581,413,384.74	2,613,473,209.85	1,498,535,891.62	60.62
Kas di Bendahara Pengeluaran	26,434,102.00	145,722,145.00	22,819,120.00	895,166.00	25,050,838.00	742.33
Kas di Bendahara Penerimaan	11,053,816.00	52,184,500.00	6,015,600.00	0.00	0.00	0.00
Kas Lainnya - Sisa Dana BOS dan PSG	619,060,584.00	0.00	2,006,094.00	0.00	0.00	0.00
Kas di Bendahara BOS	0.00	0.00	0.00	0.00	138,792,788.00	0.00
Kas di Bendahara FKTP	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927,888,292.00	0.00
Kas Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	37,097,152.00	0.00
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piutang Pajak	7,109,234,184.00	7,898,763,072.00	8,024,191,597.00	6,457,951,795.00	7,160,027,383.00	1.01
Piutang Retribusi	0.00	0.00	66,260,700.00	23,218,200.00	34,547,300.00	0.00
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	22,067,191,375.19	22,592,866,232.28	32,916,511,756.27	0.00	3,109,813,406.00	0.00
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	10,544,103,096.00	0.00
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	101,600,000.00	101,600,000.00	101,600,000.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Tuntutan Perbendaharaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Tuntutan Ganti rugi	0.00	48,722,202.65	48,722,202.65	48,722,202.65	48,722,202.65	0.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Piutang Lainnya	3,191,760,954.11	1,694,695,651.68	9,913,905,987.41	9,913,905,987.41	9,913,905,987.41	109.52
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-2,302,632,566.50	-3,873,637,850.46	-4,592,786,007.08	-5,448,559,005.01		1.36
Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,601,250,013.10)	0.00
Beban Dibayar Dimuka	22,500,000.00	282,953,052.33	349,471,673.78	425,730,134.58	95,833,333.33	281.35
Persediaan	2,493,316,546.00	3,173,566,701.00	7,944,834,498.53	5,158,460,307.00	6,153,843,292.86	40.46
Jumlah Aset Lancar	40,277,430,574.96	57,412,511,559.36	109,384,966,607.30	19,193,797,997.48	38,067,816,684.76	37.24
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi dalam Surat Utang Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lain	190,000,000.00	240,500,000.00	219,500,000.00	224,500,000.00	0.00	(19.97)
Jumlah Investasi Non Permanen	190,000,000.00	240,500,000.00	219,500,000.00	224,500,000.00	0.00	(19.97)
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	40,553,866,828.04	52,553,866,828.04	57,684,934,553.83	66,834,934,553.83	67,490,431,849.33	14.05
Investasi Permanen Lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Investasi Permanen	40,553,866,828.04	52,553,866,828.04	57,684,934,553.83	66,834,934,553.83	67,490,431,849.33	14.05
Jumlah Investasi Jangka Panjang	40,743,866,828.04	52,794,366,828.04	57,904,434,553.83	67,059,434,553.83	67,490,431,849.33	13.93
ASET TETAP						
Tanah	96,509,527,792.00	208,283,824,552.00	209,492,622,676.38	209,778,522,676.38	209,533,409,026.38	29.10
Peralatan dan Mesin	221,621,903,039.73	237,702,647,059.14	262,412,834,546.14	297,083,048,392.89	344,483,416,988.80	11.70
Gedung dan Bangunan	602,742,627,526.54	638,361,473,494.10	691,018,806,798.58	825,597,851,603.93	869,397,540,551.91	9.73
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2,214,104,897,757.13	2,407,102,180,857.68	2,622,627,668,245.50	2,819,039,110,064.33	2,992,717,991,021.24	7.83



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Aset Tetap Lainnya	31,954,483,571.62	41,615,284,180.62	52,908,301,084.60	64,553,319,393.60	68,800,392,367.09	21.49
Konstruksi dalam Pengerjaan	57,337,746,605.00	79,268,498,356.47	50,337,226,296.36	61,263,453,673.71	73,152,471,650.70	10.72
Akumulasi Penyusutan	-1,033,106,374,763.00	-1,128,603,115,601.00	-1,322,134,745,656.65	-1,541,790,897,808.33	(1,792,768,456,638.40)	14.82
Jumlah Aset Tetap	2,191,164,811,529.02	2,483,730,792,899.01	2,566,662,713,990.91	2,735,524,407,996.51	2,765,316,764,967.72	6.09
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tuntutan Perbendaharaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tuntutan Ganti rugi	48,722,202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud	2,250,352,500.00	2,663,702,500.00	2,663,702,500.00	3,274,825,830.00	3,938,897,330.00	15.40
Amortisasi	-1,864,527,500.00	-2,156,852,500.00	-2,206,402,500.00	-2,255,952,500.00	(2,938,468,832.50)	12.62
Aset Lain-lain	3,873,357,590.90	9,394,137,528.88	43,705,822,247.90	40,873,822,247.90	42,527,280,829.86	126.34
Jumlah Aset Lainnya	4,307,904,793.55	9,900,987,528.88	44,163,122,247.90	41,892,695,577.90	43,527,709,327.36	118.66
JUMLAH ASET	2,276,494,013,725.57	2,603,838,658,815.29	2,778,115,237,399.94	2,863,670,336,125.72	2,914,402,722,829.17	6.48
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	12,729,604.00	1,983,631.00	0.00	7,059,603.00	0.00
Utang Bunga	0.00	0.00	11,537,628,366.98	0.3	8,217,975,309.89	0.00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026*

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	114,597,852.50	102,041,495.00	114,548,445.00	111,953,461.25	142,816,006.00	6.65
Utang Jangka Pendek Lainnya	7,991,026,266.02	4,498,370.00	6,560,775.00	2,883,169,615.22	6,275,510,461.14	10,977.28
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	8,105,624,118.52	119,269,469.00	11,660,721,217.98	2,995,123,076.77	14,643,361,380.03	2,473.21
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utang Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	8,105,624,118.52	119,269,469.00	11,660,721,217.98	2,995,123,076.77	14,643,361,380.03	2,473.21
EKUITAS						
EKUITAS						
Ekuitas	2,268,388,389,607.05	2,603,719,389,346.29	2,766,454,516,181.96	2,860,675,213,048.95	2,899,759,361,449.14	6.45
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH EKUITAS	2,268,388,389,607.05	2,603,719,389,346.29	2,766,454,516,181.96	2,860,675,213,048.95	2,899,759,361,449.14	6.45
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	2,276,494,013,725.57	2,603,838,658,815.29	2,778,115,237,399.94	2,863,670,336,125.72	2,914,402,722,829.17	6.48

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021 (diolah)



Untuk menganalisis neraca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode tahun 2016-2020 digunakanlah beberapa analisis rasio, antara lain:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika Pemerintah Daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti Pemerintah Daerah tersebut likuid, sedangkan jika Pemerintah Daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti Pemerintah Daerah tersebut ilikuid.

Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka artinya semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah Daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Tingginya rasio lancar dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih yang bisa berarti dua hal, yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan Pemerintah Daerah secara efektif untuk berinvestasi.

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 rasio lancar Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sangat berfluktuasi namun mempunyai tren yang menurun. Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di tahun 2016 sebesar 496,91%. Artinya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di tahun 2016 mempunyai kemampuan menutup hutang jangka pendeknya sebesar 496,91% dari total kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan di tahun 2020 kemampuan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam menutup kewajiban jangka pendek sebesar 259,97% dari total kewajiban jangka pendek yang ada. Kondisi ini merupakan kondisi rasio lancar terendah. Meskipun rasio tersebut terendah dibandingkan tahun-tahun yang lain, namun masih masuk dalam kategori sangat baik.

Dengan melihat nilai rasio lancar ini yang relatif sangat berfluktuasi khususnya di tahun 2016 dan tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus membenahi dan mengatur nilai kewajiban khususnya kewajiban jangka pendeknya agar tidak melebihi kondisi nilai kas daerah yang ada, sehingga kas daerah dapat dimanfaatkan untuk investasi yang produktif.

Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020.



Tabel III.7
Rasio Lancar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Aset Lancar	40,277,430,574.96	57,412,511,559.36	109,384,966,607.30	19,193,797,997.48	38,067,816,684.76
Kewajiban Lancar	8,105,624,118.52	119,269,469.00	11,660,721,217.98	2,995,123,076.77	14,643,361,380.03
Rasio Lancar	496.91%	48,136.80%	938.06%	640.84%	259.97%

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021 (diolah)



2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Pemerintah Daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas Pemerintah Daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan Pemerintah dalam membayar seluruh kewajibannya apabila Pemerintah dilikuidasi.

a) Rasio Hutang terhadap Ekuitas (*total debt to equity ratio*)

Merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari tahun 2016-2020 meningkat walaupun secara keseluruhan masih relatif kecil. Adapun rasio yang terbesar terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0,42%. Artinya total jumlah kewajiban yang ada tidak pernah lebih dari 0,42% dari total kekayaan sendiri yang telah dikurangi dengan kewajiban yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai modal/kekayaan bersih daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih sangat cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada.



Tabel III.8
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kewajiban	8,105,624,118.52	119,269,469.00	11,660,721,217.98	2,995,123,076.77	14,643,361,380.03
Ekuitas	2,268,388,389,607.05	2,603,719,389,346.29	2,766,454,516,181.96	2,860,675,213,048.95	2,899,759,361,449.14
Total Debt To Equity Ratio	0.36%	0.00%	0.42%	0.10%	0.50%

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021 (diolah)



b) Rasio Hutang terhadap Total Aktiva (*total debt to total asset ratio*)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (rasio hutang terhadap ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (*total aset*) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari tahun 2016-2020 tidak pernah lebih dari 0,50%. Artinya total jumlah kewajiban yang ada tidak pernah lebih dari 0,50% dari nilai total aset yang ada. Adapun nilai rasio tertinggi terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 0,50%. Secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya masih sangat cukup untuk menjamin pembayaran hutang (kewajiban) yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.



Tabel III.9
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kewajiban	8,105,624,118.52	119,269,469.00	11,660,721,217.98	2,995,123,076.77	14,643,361,380.03
Aktiva	2,276,494,013,725.57	2,603,838,658,815.29	2,778,115,237,399.94	2,863,670,336,125.72	2,914,402,722,829.17
Total Debt To Asset Ratio	0.36%	0.00%	0.42%	0.10%	0.50%

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021 (diolah)



3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran Aktiva Tetap (*fixed assets turn over*)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dan lain-lain untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup Pemerintah Daerah keuntungan tersebut berbentuk penerimaan asli daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumber daya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam kurun waktu 2016-2020 trennya relatif berfluktuasi. Adapun rasio di tahun 2016 mencapai 1,63% dan menjadi 1,70% di tahun 2020. Rasio tersebut sempat naik dua kali lipat sebesar 3,60% di tahun 2017 setelah itu nilainya turun menjadi 1,68% di tahun 2018. Jika dilihat nominalnya maka, dari total pendayagunaan sumber daya aset tetap di tahun 2016 yang senilai Rp.2,191 triliun Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.35.697 milyar. Sedangkan di tahun 2020 dengan mendayagunakan sumberdaya aset tetap senilai Rp.2,765 triliun Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.46.947 milyar. Dengan kata lain, dalam kurun waktu tahun 2016-2020 rata-rata keuntungan yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga berdampak fluktuatif. Secara keseluruhan pendayagunaan aset tetap yang nilainya cukup besar belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perolehan PAD daerah.



Tabel III.10
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	35,696,934,794.31	89,506,598,777.46	42,993,134,751.66	57,669,139,990.39	46,947,369,117.43
Aktiva Tetap (Aset Tetap)	2,191,164,811,529.02	2,483,730,792,899.01	2,566,662,713,990.91	2,735,524,407,996.51	2,765,316,764,967.72
Rasio Perputaran Aktiva Tetap	1.63%	3.60%	1.68%	2.11%	1.70%

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021 (diolah)



b) Perputaran Total Aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup Pemerintah Daerah keuntungan tersebut berbentuk pendapatan asli daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien Pemerintah Daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya rasio perputaran aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam kurun waktu 2016-2020 relatif berfluktuasi. Rasio di tahun 2016 mencapai 1,57% dan menjadi 1,61% di tahun 2020. Dan sempat melonjak di tahun 2017 dengan rasio sebesar 3,44%.

Secara keseluruhan dari tahun 2016-2020 rata-rata nilai total aset daerah terbilang sangat rendah dan bisa dikatakan bawah tingkat efisiensi Pemerintah Daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD masih sangat rendah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mempunyai kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah, dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial PAD. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan PAD daerah.



Tabel III.11
Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	35,696,934,794.31	89,506,598,777.46	42,993,134,751.66	57,669,139,990.39	46,947,369,117.43
Aktiva Tetap (Jumlah Aset)	2,276,494,013,725.57	2,603,838,658,815.29	2,778,115,237,399.94	2,863,670,336,125.72	2,914,402,722,829.17
Rasio Perputaran Total Aktiva	1.57%	3.44%	1.55%	2.01%	1.61%

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021 (diolah)



3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai, meliputi: gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Rasio belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren menurun setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 32,12% per tahun. Rasio belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di tahun 2016 sebesar 35,90% dari total pengeluaran daerah dan rasionya menurun hingga mencapai 30,91% di tahun 2020.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat pada tabel III.12 berikut ini.

Tabel III.12
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	(%)
1.	2016	428,273,144,412.30	1,193,079,829,794.30	35.90
2.	2017	395,090,710,610.00	1,225,827,297,222.44	32.23
3.	2018	403,087,988,885.00	1,239,003,115,853.97	32.53
4.	2019	429,338,167,544.00	1,446,318,439,082.82	29.68
5.	2020	420,535,939,637.00	1,360,309,375,073.22	30.91
Rata-Rata		415,265,190,217.66	1,292,907,611,405.35	32.12

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada dasarnya analisis



terhadap realisasi pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran Pemerintah Daerah, seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata turun sebesar 0.32% per tahun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya belanja pegawai dari Rp.428,27 milyar di tahun 2016 menjadi Rp.420,53 milyar di tahun 2020.



Tabel III.13
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	BELANJA OPERASI	428,273,144,412.30	395,090,710,610.00	403,087,988,885.00	429,338,167,544.00	420,535,939,637.00	(0.32)
1.1	Belanja Pegawai	428,273,144,412.30	395,090,710,610.00	403,087,988,885.00	429,338,167,544.00	420,535,939,637.00	(0.32)
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,000,000,000.00	12,000,000,000.00	10,800,000,000.00	9,150,000,000.00	3,550,000,000.00	53.38
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	12,000,000,000.00	10,800,000,000.00	9,150,000,000.00	3,550,000,000.00	53.38
2.2	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas	431,273,144,412.30	407,090,710,610.00	413,887,988,885.00	438,488,167,544.00	424,085,939,637.00	(0.32)

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021 (diolah)



3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada dasarnya pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menutup defisit belanja daerah. Oleh karena itu besaran defisit belanja daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sumber penutup defisit riil anggaran dalam beberapa tahun terakhir berasal dari besaran SiLPA dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Nilai SiLPA terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu mencapai Rp.64,05 milyar dan yang terendah terjadi pada tahun 2020 hanya sebesar Rp.2,61 milyar. Besaran SiLPA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada dua tahun terakhir bisa dikatakan jumlahnya tidak terlalu besar. Meskipun begitu, besaran SiLPA tahun kedepannya masih perlu ditekan sebagai upaya efektifitas penggunaan anggaran. Adapun sumber penutup defisit riil dari sumber penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah terjadi di tahun 2017 yang sebesar Rp.22,07 milyar.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, perlu dipahami bahwa tidak selalu SiLPA sifatnya negatif, jika SiLPA terjadi karena penghematan belanja maka justru berdampak positif bagi pembangunan. Untuk itu yang perlu ditekankan ialah seberapa besar target kinerja pembangunan itu tercapai terutama pada tataran *level outcome* dan *impact*. Jika SiLPA muncul namun target kinerja dalam tataran *level outcome* dan *impact* telah tercapai, maka SiLPA tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk efisiensi. Adapun efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran tetap harus terus ditingkatkan meskipun kemudian dapat meningkatkan besaran SiLPA.

Secara rinci komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Tabel III.14 sebagai berikut.



Tabel III.14
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	64,053,318,663.93	6,975,399,498.16	25,480,252,893.88	54,603,961,373.74	2,614,368,375.85
Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	22,067,191,375.19	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Komposisi Penutup Defisit	64,053,318,663.93	29,042,590,873.35	25,480,252,893.88	54,603,961,373.74	2,614,368,375.85

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021 (diolah)



Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari tahun 2016-2020 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, di tahun 2017 sumber SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan dana perimbangan senilai Rp.6,98 milyar. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit rill anggaran yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.



Tabel III.15
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata SiLPA
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	64,053,318,663.93	6,975,399,498.16	25,480,252,893.88	54,603,961,373.74	2,614,368,375.85	48.82
Pelampauan Penerimaan PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0.00	6,975,399,498.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Pelampauan Penerimaan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	64,053,318,663.93	0.00	25,480,252,893.88	54,603,961,373.74	2,614,368,375.85	0.00
Sisa Belanja DAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sisa Belanja Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021 (diolah)



3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, proyeksi sisa lebih riil perhitungan anggaran (SiLPA), dan proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2022 hingga tahun 2026.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Wajib Mengikat

Proyeksi pendapatan dan belanja mengikat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan di bidang keuangan negara.

Proyeksi pendapatan dan belanja wajib mengikat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 hingga tahun 2020 (APBD) yang disesuaikan dengan menstandarkan data-data outlier yang sifatnya dapat membiaskan proyeksi. Hal ini dilakukan agar hasil proyeksinya mendekati proyeksi yang logis dengan melihat target-target pendapatan yang mampu dicapai.

a. Proyeksi Pendapatan

Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD). Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar baik itu dari pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah cenderung ditarget relatif tetap (*flat*). Seluruh proyeksi menggunakan tahun dasar APBD tahun 2020.

Penerimaan PAD ditargetkan naik 10,18% per tahun dari tahun dasar tahun 2020. Adapun pendapatan pajak daerah ditargetkan naik 15% per tahun. Target ini ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dipungut. Dengan mendasarkan hal tersebut maka pendapatan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp.16,68 milyar di tahun 2021 meningkat menjadi Rp.33,56 milyar di tahun 2026. Untuk pendapatan retribusi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan naik 5% per tahun, di mana proyeksi pendapatan retribusi daerah di tahun 2021 sebesar Rp.12,76 milyar dan meningkatkan Rp.16,28 milyar di tahun 2026. Sedangkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan pada tahun 2021 sebesar Rp.5,16 milyar menjadi Rp.6,59 milyar di tahun 2026. Untuk lain-lain pendapatan asli



daerah yang sah ditargetkan meningkat dengan rata-rata peningkatan 10% per tahun. Adapun proyeksi nilai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di tahun 2021 sebesar Rp.16,91 milyar dan meningkat menjadi Rp.27,23 milyar di tahun 2026.

Pendapatan transfer diproyeksikan meningkat 1% per tahun dari tahun dasar 2020 di mana pada tahun 2021 sebesar Rp.1,26 triliun menjadi Rp.1,32 triliun di tahun 2026. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa proyeksi pendapatan transfer Pemerintah Pusat hanya meningkat 0,83% per tahun dari Rp.1,14 triliun di tahun 2021 menjadi Rp.1,19 triliun di tahun 2026. Untuk pendapatan transfer antar daerah hanya tumbuh 2,57% per tahun dari Rp.118,36 milyar di tahun 2021 menjadi Rp.134,41 milyar di tahun 2026. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan tetap sebagaimana nilai realisasi tahun 2020 yaitu sebesar Rp.69,35 milyar per tahun dari tahun 2021-2026.

Proyeksi pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang diproyeksikan hanya tumbuh 0,83% per tahun didasarkan asumsi dana penyesuaian pertumbuhannya 0% per tahun (sama dengan realisasi 2020). Selain itu, komponen dana perimbangan dari pos DAU dan DAK pertumbuhannya juga 0% per tahun. Atau dengan kata lain setiap tahun (2021-2026) nilainya tetap sebagaimana realisasi DAK dan DAU tahun 2020. Adapun komponen dana perimbangan yaitu dana bagi hasil pajak dan bukan pajak (SDA) masing-masing pertumbuhannya diproyeksinya meningkat 5% per tahun.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa proyeksi pendapatan transfer antar daerah tumbuh 2,57% per tahun didasarkan asumsi bahwa pendapatan bagi hasil pajak tumbuh 5% per tahun dari Rp.58,07 milyar di tahun 2021 menjadi Rp.74,11 milyar di tahun 2026. Sedangkan sumber dari transfer bantuan keuangan Provinsi pertumbuhannya 0% per tahun atau dari tahun 2021 sampai tahun 2026 nilainya tetap sebagaimana realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp.60,30 milyar.

Sumber pendapatan lain-lain yang sah diproyeksikan pertumbuhannya 0% per tahun di mana proyeksi dari tahun 2021-2026 nilainya sama dengan realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp.69,35 milyar. Kehati-hatian dalam penetapan target pendapatan hibah perlu dilakukan mengingat target penerimaan hibah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak pernah tercapai 100% dan akan mengganggu pembiayaan pembangunan yang akan dilakukan.

Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel III.16 berikut ini.



Tabel III.16
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	1.36	1,377,934,613,711.58	1,394,660,909,444.46	1,412,558,339,693.68	1,431,731,456,543.59	1,452,296,516,226.47	1,474,382,993,535.39
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.18	51,514,219,598.11	56,603,902,170.89	62,282,888,602.01	68,626,639,442.93	75,720,864,816.34	83,662,966,100.34
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	15.00	16,684,514,083.40	19,187,191,195.91	22,065,269,875.30	25,375,060,356.59	29,181,319,410.08	33,558,517,321.59
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.00	12,758,581,036.95	13,396,510,088.80	14,066,335,593.24	14,769,652,372.90	15,508,134,991.54	16,283,541,741.12
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.00	5,160,720,787.12	5,418,756,826.48	5,689,694,667.80	5,974,179,401.19	6,272,888,371.25	6,586,532,789.81
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.00	16,910,403,690.64	18,601,444,059.71	20,461,588,465.68	22,507,747,312.24	24,758,522,043.47	27,234,374,247.82
1.2	PENDAPATAN TRANSPER	1.00	1,257,065,908,938.47	1,268,702,522,098.56	1,280,920,965,916.66	1,293,750,331,925.67	1,307,221,166,235.12	1,321,365,542,260.05
1.2.1	TRANSPER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	0.83	1,138,701,812,574.45	1,147,435,043,068.67	1,156,604,935,087.61	1,166,233,321,707.49	1,176,343,127,658.36	1,186,958,423,906.78
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	5.00	14,051,761,445.40	14,754,349,517.67	15,492,066,993.55	16,266,670,343.23	17,080,003,860.39	17,934,004,053.41
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.00	160,612,848,439.05	168,643,490,861.00	177,075,665,404.05	185,929,448,674.26	195,225,921,107.97	204,987,217,163.37
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	0.00	587,250,613,000.00	587,250,613,000.00	587,250,613,000.00	587,250,613,000.00	587,250,613,000.00	587,250,613,000.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	0.00	152,831,932,690.00	152,831,932,690.00	152,831,932,690.00	152,831,932,690.00	152,831,932,690.00	152,831,932,690.00
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.6	Dana Penyesuaian	0.00	223,954,657,000.00	223,954,657,000.00	223,954,657,000.00	223,954,657,000.00	223,954,657,000.00	223,954,657,000.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2.1.7	Dana Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	TRANSPER ANTAR DAERAH	2.57	118,364,096,364.02	121,267,479,029.89	124,316,030,829.06	127,517,010,218.18	130,878,038,576.76	134,407,118,353.27
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.00	58,067,653,317.45	60,971,035,983.32	64,019,587,782.49	67,220,567,171.61	70,581,595,530.19	74,110,675,306.70
1.2.2.2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	0.00	60,296,443,046.57	60,296,443,046.57	60,296,443,046.57	60,296,443,046.57	60,296,443,046.57	60,296,443,046.57
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021



b. Proyeksi SiLPA

Sebagaimana diketahui tingkat pertumbuhan SiLPA periode tahun 2016-2020 sebesar 48,82% per tahun. Namun demikian, dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik, sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal sebesar 6% dari total APBD, maka diperoleh proyeksi SiLPA sebagaimana disajikan pada Tabel III.17 berikut ini.



Tabel III.17
Proyeksi SiLPA
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021-2026

No.	Uraian	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	(10.00)	2,352,931,538.27	2,117,638,384.44	1,905,874,545.99	1,715,287,091.40	1,543,758,382.26	1,389,382,544.03

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021



Selanjutnya, belanja daerah pada tahun 2021-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,48%, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel III.18 berikut ini.



Tabel III.18
Struktur Proyeksi RPJMD
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021-2026

No.	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan						
1.1	Pendapatan Asli Daerah	51,514,219,598.11	56,603,902,170.89	62,282,888,602.01	68,626,639,442.93	75,720,864,816.34	83,662,966,100.34
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16,684,514,083.40	19,187,191,195.91	22,065,269,875.30	25,375,060,356.59	29,181,319,410.08	33,558,517,321.59
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12,758,581,036.95	13,396,510,088.80	14,066,335,593.24	14,769,652,372.90	15,508,134,991.54	16,283,541,741.12
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,160,720,787.12	5,418,756,826.48	5,689,694,667.80	5,974,179,401.19	6,272,888,371.25	6,586,532,789.81
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16,910,403,690.64	18,601,444,059.71	20,461,588,465.68	22,507,747,312.24	24,758,522,043.47	27,234,374,247.82
1.2	Pendapatan Transper	1,257,065,908,938.47	1,268,702,522,098.56	1,280,920,965,916.66	1,293,750,331,925.67	1,307,221,166,235.12	1,321,365,542,260.05
1.2.1	Transper Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1,138,701,812,574.45	1,147,435,043,068.67	1,156,604,935,087.61	1,166,233,321,707.49	1,176,343,127,658.36	1,186,958,423,906.78
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	14,051,761,445.40	14,754,349,517.67	15,492,066,993.55	16,266,670,343.23	17,080,003,860.39	17,934,004,053.41
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	160,612,848,439.05	168,643,490,861.00	177,075,665,404.05	185,929,448,674.26	195,225,921,107.97	204,987,217,163.37
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	587,250,613,000.00	587,250,613,000.00	587,250,613,000.00	587,250,613,000.00	587,250,613,000.00	587,250,613,000.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	152,831,932,690.00	152,831,932,690.00	152,831,932,690.00	152,831,932,690.00	152,831,932,690.00	152,831,932,690.00
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.6	Dana Penyesuaian	223,954,657,000.00	223,954,657,000.00	223,954,657,000.00	223,954,657,000.00	223,954,657,000.00	223,954,657,000.00
1.2.1.7	Dana Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Transper Antar Daerah	118,364,096,364.02	121,267,479,029.89	124,316,030,829.06	127,517,010,218.18	130,878,038,576.76	134,407,118,353.27
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58,067,653,317.45	60,971,035,983.32	64,019,587,782.49	67,220,567,171.61	70,581,595,530.19	74,110,675,306.70
1.2.2.2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	60,296,443,046.57	60,296,443,046.57	60,296,443,046.57	60,296,443,046.57	60,296,443,046.57	60,296,443,046.57
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00	69,354,485,175.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Pendapatan		1,377,934,613,711.58	1,394,660,909,444.46	1,412,558,339,693.68	1,431,731,456,543.59	1,452,296,516,226.47	1,474,382,993,535.39
2	Belanja						
2.1	Belanja Operasi	766,917,798,684.31	770,140,836,137.76	773,616,083,901.40	777,339,324,682.12	781,306,726,214.84	785,514,825,809.35
2.1.1	Belanja Pegawai	420,535,939,637.00	420,535,939,637.00	420,535,939,637.00	420,535,939,637.00	420,535,939,637.00	420,535,939,637.00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	292,259,208,297.31	298,104,392,463.26	304,066,480,312.52	310,147,809,918.77	316,350,766,117.15	322,677,781,439.49
2.1.2	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	53,282,792,500.00	50,618,652,875.00	48,087,720,231.25	45,683,334,219.69	43,399,167,508.70	41,229,209,133.27
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	839,858,250.00	881,851,162.50	925,943,720.63	972,240,906.66	1,020,852,951.99	1,071,895,599.59
2.2	Belanja Modal	301,414,423,708.39	315,252,007,378.44	330,003,563,642.82	345,776,932,993.79	362,691,439,134.35	380,879,398,875.13
2.2.1	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	51,593,158,311.12	52,625,021,477.34	53,677,521,906.89	54,751,072,345.03	55,846,093,791.93	56,963,015,667.77
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	63,901,839,602.26	65,179,876,394.31	66,483,473,922.19	67,813,143,400.64	69,169,406,268.65	70,552,794,394.02
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	178,532,671,105.46	189,986,487,270.35	202,307,339,354.93	215,602,136,504.73	229,989,252,522.94	245,600,035,397.00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7,386,754,689.55	7,460,622,236.44	7,535,228,458.80	7,610,580,743.39	7,686,686,550.83	7,763,553,416.34
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Belanja Tak Terduga	11,392,370,889.15	10,822,752,344.69	10,281,614,727.46	9,767,533,991.08	9,279,157,291.53	8,815,199,426.95
2.3.1	Belanja Tak Terduga	11,392,370,889.15	10,822,752,344.69	10,281,614,727.46	9,767,533,991.08	9,279,157,291.53	8,815,199,426.95
2.4	Belanja Transfer	297,012,951,968.00	297,012,951,968.00	297,012,951,968.00	297,012,951,968.00	297,012,951,968.00	297,012,951,968.00
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	297,012,951,968.00	297,012,951,968.00	297,012,951,968.00	297,012,951,968.00	297,012,951,968.00	297,012,951,968.00
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Lainnya dari Kab/Kota ke Desa)	295,725,870,560.00	295,725,870,560.00	295,725,870,560.00	295,725,870,560.00	295,725,870,560.00	295,725,870,560.00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,037,081,408.00	1,037,081,408.00	1,037,081,408.00	1,037,081,408.00	1,037,081,408.00	1,037,081,408.00
Jumlah Belanja		1,376,737,545,249.85	1,393,228,547,828.89	1,410,914,214,239.67	1,429,896,743,634.99	1,450,290,274,608.72	1,472,222,376,079.43
Surplus/(Defisit)		1,197,068,461.73	1,432,361,615.56	1,644,125,454.00	1,834,712,908.60	2,006,241,617.75	2,160,617,455.97
3	Pembiayaan						
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2,352,931,538.27	2,117,638,384.44	1,905,874,545.99	1,715,287,091.40	1,543,758,382.26	1,389,382,544.03
3.1.1.1	Pelampauan Penerimaan PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.4	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	2,352,931,538.27	2,117,638,384.44	1,905,874,545.99	1,715,287,091.40	1,543,758,382.26	1,389,382,544.03
3.1.1.5	Sisa Belanja DAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.6	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.7	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.1	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		2,352,931,538.27	2,117,638,384.44	1,905,874,545.99	1,715,287,091.40	1,543,758,382.26	1,389,382,544.03
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00
3.2.1.1	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.1	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00
	Pembiayaan Netto	-1,197,068,461.74	-1,432,361,615.56	-1,644,125,454.01	-1,834,712,908.60	-2,006,241,617.74	-2,160,617,455.97
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021



c. Proyeksi Belanja Wajib Mengikat

Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang harus dikeluarkan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal ialah proyeksi besaran belanja operasi. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi belanja operasi khususnya belanja pegawai ditargetkan pertumbuhannya 0% per tahun atau dari tahun 2021 sampai tahun 2026 nilainya tetap sebagaimana realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp.420,53 milyar. Adapun pengeluaran pembiayaan proyeksinya juga tetap tiap tahunnya yang digunakan untuk penyertaan modal daerah yang sebesar Rp.3,55 milyar per tahun (2021-2026).



Tabel III.19
Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	BELANJA OPERASI	0.00	420,535,939,637.00	420,535,939,637.00	420,535,939,637.00	420,535,939,637.00	420,535,939,637.00	420,535,939,637.00
1.1	Belanja Pegawai	0.00	420,535,939,637.00	420,535,939,637.00	420,535,939,637.00	420,535,939,637.00	420,535,939,637.00	420,535,939,637.00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00
2.2	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas			424,085,939,637.00	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021



3.3.1.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama periode tahun 2021-2026 diarahkan pada:

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
 - a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
 - d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penerimaan PAD guna peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan melalui pembenahan tata kelola administrasi dan pengawasan di lapangan secara berkala;
 - e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - f. Memperkuat proses pemungutan pajak daerah melalui penyusunan produk hukum, penyesuaian tarif pajak serta peningkatan sumberdaya aparatur;
 - g. Pemanfaatan teknologi dalam sosialisasi pajak, penerapan sistem pelayanan dan pelaporan secara online dan pengembangan/*upgrade* aplikasi samsat dan non samsat;
 - h. Terus melanjutkan dan mengembangkan kerjasama dengan institusi lain dalam upaya mengoptimalkan pendapatan seperti :
 - i. Pengembangan sistem pelayanan baru yang memudahkan dan menjangkau proses pembayaran pajak secara lebih luas;
 - j. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah seperti gedung, asrama, aula dan asset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut;
 - k. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi dengan OPD pemungut retribusi daerah;



- l. Sosialisasi terhadap peraturan yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi;
 - m. Menggali objek pemungutan retribusi baru dan memperbaiki sistem tarif retribusi;
 - n. Mengevaluasi besaran penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada perusahaan-perusahaan milik daerah, perusahaan milik negara, perusahaan milik swasta, dengan mempertimbangkan realisasi PAD dari kontribusi serta mengevaluasi *business plan* dari masing-masing perusahaan-perusahaan tersebut ;
 - o. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah
2. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
 - a. Melakukan rekonsiliasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai dasar penyaluran dana perimbangan termasuk juga melakukan upaya untuk mengusulkan revisi regulasi dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar wilayah eksplorasi sumber daya alam (SDA).;
 - b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
 - d. Mengupayakan peningkatan dana alokasi khusus.
 3. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam pengelolaan berbagai asset daerah;
 4. Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah terutama dari infrastruktur strategis yang baru dibangun.

3.3.1.2. Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akan melakukan redefinisi dan reposisi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan berbagai langkah.



1. Alokasi belanja dalam dokumen anggaran setiap unit satuan kerja harus dapat menjamin keselarasan dan kesesuaian dengan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus mampu menghasilkan keluaran dan dampak positif yang menjadi target daerah untuk dicapai dalam lima tahun;
2. Alokasi anggaran dalam dokumen anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus secara jelas menunjukkan keselarasan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi setiap unit satuan kerja dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Hal ini harus dilakukan untuk menjamin setiap alokasi dana publik untuk membiayai proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD), dilaksanakan oleh Institusi Pemerintah yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam proses pencapaiannya. Langkah ini harus dilakukan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh proses kerja yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi serta tidak secara substansial memberikan kontribusi kepada pencapaian sasaran kebijakan daerah.
3. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melakukan penilaian kembali dan penghematan pada kegiatan yang bersifat tidak substansif dalam mendukung pencapaian keluaran dan hasil. Sebaliknya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengidentifikasi keluaran atau hasil yang sangat krusial untuk mencapai sasaran kebijakan daerah yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga alokasi anggaran menghasilkan secara nyata peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama tahun 2021-2026 mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kegiatan melalui belanja langsung dengan arah sebagai berikut.

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penanganan pandemi *Covid-19* dan pemulihan ekonomi, meliputi aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta dukungan untuk dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disinergikan dengan langkah realokasi dan *refocusing* APBD.



3. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun melalui sekolah gratis bagi masyarakat miskin dan alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan prioritas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
4. Meningkatkan alokasi anggaran fungsi kesehatan minimal 10% dari total belanja daerah di luar gaji.
5. Mengoptimalkan belanja langsung untuk membiayai belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya.
6. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Meningkatkan pengawasan penuh terhadap belanja hibah yang merupakan belanja Pemerintah Daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus-menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Di mana proyeksi belanja hibah diberikan untuk badan/lembaga/organisasi seperti hibah sekolah gratis, hibah kuliah gratis, hibah untuk program pelaksanaan pilkada, hibah organisasi keagamaan, dan hibah organisasi kemasyarakatan, serta hibah lain yang mendukung pencapaian target pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Meningkatkan sinergi anggaran melalui dana sharing antara APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.
9. Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien terutama kegiatan yang lebih dari 1 tahun (*multiyears*) yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

3.3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.



1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2021-2026 adalah, sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja.
- b. Mengembangkan skema pengelolaan pinjaman daerah baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program dan kegiatan strategis lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD. Penyerataan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.
- b. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.
- c. Mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadi *surplus* anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



3. Pengelolaan Dana Masyarakat dan Mitra Pihak Ketiga

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akan terus mengoptimalkan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kebijakan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 diarahkan untuk membangun kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

- a. Mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menyederhanakan proses perijinan dengan teknologi informasi;
- b. Melakukan harmonisasi peraturan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. Mengelola kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan pihak swasta atau dengan pihak Pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati bersama terutama melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha baik di sektor Infrastruktur, konektivitas dan energi, infrastruktur fasilitas perkotaan dan infrastruktur fasilitas sosial;
- d. Mendorong percepatan berdirinya BUMD baru yang berkaitan dengan sektor pertanian (BUMD Agro) dan Energi (BUMD Energi) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- e. Mendorong kerjasama investasi regional, nasional dan internasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kegiatan yang melibatkan peran masyarakat luas seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; serta industri pengolahan hasil tambang;
- f. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan, dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat;
- g. Mengembangkan promosi secara aktif melalui penguatan jaringan kerjasama regional, nasional dan internasional dan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendapatan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya proyeksi kapasitas riil keuangan daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.



Kapasitas riil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari tahun 2022 hingga tahun 2026 diproyeksi dengan tren meningkat di mana kapasitas riil tahun 2022-2026 secara berturut-turut sebesar Rp.956,20 milyar, Rp.972,69 milyar, Rp.990,38 milyar, Rp.1,01 triliun, dan Rp.1,03 triliun. Secara rinci kapasitas riil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari tahun 2022 hingga tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel III.20 sebagai berikut



Tabel III.20
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pendapatan	1,377,934,613,711.58	1,394,660,909,444.46	1,412,558,339,693.68	1,431,731,456,543.59	1,452,296,516,226.47	1,474,382,993,535.39
2.	Penerimaan Pembiayaan	2,352,931,538.27	2,117,638,384.44	1,905,874,545.99	1,715,287,091.40	1,543,758,382.26	1,389,382,544.03
TOTAL PENERIMAAN		1,380,287,545,249.85	1,396,778,547,828.90	1,414,464,214,239.67	1,433,446,743,634.99	1,453,840,274,608.73	1,475,772,376,079.42
dikurangi:							
3.	Belanja dan Pengeluaran Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00
4.	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	956,201,605,612.85	972,692,608,191.90	990,378,274,602.67	1,009,360,803,997.99	1,029,754,334,971.73	1,051,686,436,442.42

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021



Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam prioritas program/kegiatan/sub kegiatan. Prioritas program/kegiatan/sub kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I dan prioritas II, di mana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II.

Prioritas I

Dialokasikan untuk mendanai belanja dan pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II

Dialokasikan untuk pendanaan:

- a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana.
- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka alokasi kapasitas riil keuangan daerah berdasarkan prioritas disajikan pada Tabel III.21 sebagai berikut.



Tabel III.21
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	956,201,605,612.85	972,692,608,191.90	990,378,274,602.67	1,009,360,803,997.99	1,029,754,334,971.73	1,051,686,436,442.42
1.	Prioritas I	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00
2.	Prioritas II	532,115,665,975.85	548,606,668,554.90	566,292,334,965.67	585,274,864,360.99	605,668,395,334.73	627,600,496,805.42

Sumber: Hasil analisis, Tahun 2021





BAB IV

PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan karena urgensinya terhadap dinamika kehidupan masyarakat masa kini dan mendatang. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

Dalam penerapannya, isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan lima tahun mendatang. Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran rencana pembangunan sehingga mampu mengakselerasi perwujudan visi pembangunan. Namun sebaliknya, jika permasalahan dan isu strategis tidak diindahkan maka dapat memicu beberapa kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Isu strategis juga melihat berbagai fenomena maupun berbagai kebijakan baik level internasional, nasional, maupun regional untuk menyempurnakan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pembangunan lima tahun mendatang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama periode pembangunan lima tahun ke depan.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan



dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari Kebijakan Nasional/Provinsi yang bersifat mandatori.

4.1.1. Telaah RPJPD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2005-2025

RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025. Seperti termaktub dalam RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa, visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2025 adalah: “Kabupaten OKU Selatan Yang Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025, adalah: (1) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas; (2) mewujudkan pengembangan perekonomian dan daya saing daerah; (3) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, professional dan akuntabel; (4) mewujudkan pengembangan infrastruktur; dan (5) mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Tahap keempat RPJMD ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Selatan yang Mandiri dan Sejahtera melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pengembangan teknologi melalui upaya-upaya: pemantapan lumbung pangan dan lumbung energi nasional; pemantapan teknologi informasi dan komunikasi; pemantapan pusat agribisnis; pemantapan pusat industri; dan pemantapan pariwisata sebagai ekonomi kreatif.

Tabel IV.1
Hasil Telaahan RPJPD Periode Perencanaan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan RPJPD
1.	Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan yang mantap dan memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas	Peningkatan usaha-usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi lahan pertanian secara terpadu, serasi dan merata sesuai kondisi tanah, air dan iklim dengan tetap memperhatikan kelestarian dan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2.	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam tak terbarukan secara bijaksana.	Peningkatan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan hidup dan pertimbangan kepentingan penduduk sosial, kestabilan daya dukung alam.
3.	Terwujudnya pemerataan dan pemenuhan distribusi energi yang berkelanjutan.	Diversifikasi atas energi utama dengan energi terbarukan.
4.	Terwujudnya pemanfaatan bahan tambang yang optimal.	Pengelolaan pertambangan ramah lingkungan, Peningkatan nilai tambah hasil tambang



No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan RPJPD
5.	Meningkatnya dan menguatnya SDM dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penguasaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan dalam rangka percepatan proses difusi dan pemanfaatan iptek bagi peningkatan produktivitas dunia usaha dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna, unggulan dan strategis Menumbuh kembangkan mekanisme intermediasi peningkatan kemudahan akses terhadap fasilitas penyediaan iptek. Perbaikan kualitas pelayanan dasar dalam bentuk pengembangan dan penerapan teknologi yang lebih fokus di bidang pangan, energi, manufaktur dan pariwisata. Penciptaan iklim inovasi dalam bentuk skema intensif dalam usaha membangun penguatan kapasitas lembaga penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah.
6.	Terwujudnya agrobisnis yang maju dan berkembang.	Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas Pariwisata dan pertambangan ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan regional secara berkelanjutan Peningkatan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir Peningkatan nilai tambah produk pertanian yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar.
6.	Terwujudnya struktur industri yang kuat.	Pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal (pertanian, perikanan, pertambangan, perkebunan dan kehutanan), Pengembangan kluster kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai leading sektor dalam perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7.	Terwujudnya perdagangan yang optimal.	Peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau.
8.	Terwujudnya koperasi dan UMKM yang mandiri.	Penumbuhan wirausaha baru Peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan Peningkatan produktivitas, Pemanfaatan hasil informasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat
9.	Terwujudnya akses lembaga keuangan dan perbankan.	Peningkatan peran dalam pengembangan agrobisnis Penyediaan pemodal bagi koperasi dan UMKM



No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan RPJPD
10	Terwujudnya daya tarik kepariwisataan.	Pelestarian peninggalan budaya, tradisi, kesenian, Pengembangan objek wisata, Peningkatan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestik serta lama tinggalnya

4.1.2. Telaah RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan Visi RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara kesatuan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *omnibus law*, terutama menerbitkan dua undang-undang. Pertama,



Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
 - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM, yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui:
 - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;



- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Moderasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:
 - a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
 - c. Pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan.

Pada perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber



daya lokal. Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera Tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

4.1.3. Telaah RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Provinsi Sumatera Selatan berupaya mengoptimalkan kinerja pembangunan daerah dengan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 pada periode Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa bakti 2018-2023. Dalam rumusan perencanaan pembangunan tersebut, dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2018-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah **“Sumsel Maju Untuk Semua”**.

Adapun dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka dirumuskan pula upaya untuk merealisasikannya berupa 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah, sebagai berikut.

1. Membangun Sumsel Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Didukung Sektor Pertanian, Industri, dan UMKM Yang Tangguh Untuk Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan Baik Di Perkotaan Maupun Di Perdesaan.
2. Meningkatkan Kualitas SDM, Baik Laki-Laki Maupun Perempuan, Yang Sehat, Berpendidikan, Profesional, dan Menjunjung Tinggi Nilai Keimanan, Ketaqwaan, Kejujuran, dan Integritas.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bebas KKN Dengan Mengedepankan Transparansi dan Akuntabilitas Yang Didukung Aparatur Pemerintahan Yang Jujur, Berintegritas, Profesional, dan Responsif.
4. Membangun dan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur, Termasuk Infrastruktur Dasar Guna Percepatan Pembangunan Wilayah Pedalaman dan Perbatasan, Memperlancar Arus Barang dan Mobilitas Penduduk, Serta Mewujudkan Daya Saing Daerah Dengan Mempertimbangkan Pemerataan dan Keseimbangan Daerah.
5. Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya Untuk Membangun Karakter Kehidupan Sosial Yang Agamis dan Berbudaya, Ditopang Fisik Yang Sehat Melalui Kegiatan Olahraga, dan Pengembangan Pariwisata Berorientasi Pariwisata Religius.



Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 tersebut, dan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mendukung Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah, sebagai berikut:

Tabel IV.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1	1. Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah	1. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan (Maju Ekonomi Kerakyatan)
		2. Meningkatkan Investasi, Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan)
		3. Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan)
		4. Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan (Maju Kesejahteraan Masyarakat)
		5. Meningkatkan Akses Energi (Maju Akses Energi)
Misi 2	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat)
		2. Meningkatkan Akses Pendidikan Berkualitas (Maju Akses Pendidikan Berkualitas)
Misi 3	3. Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender	1. Meningkatkan Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak (Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak)
	4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatkan Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas)
		2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)
Misi 4	5. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan	3. Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas)
		1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup)
Misi 5	6. Terwujudnya Masyarakat Madani	2. Meningkatkan Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas (Maju Infrastruktur dan Konektivitas)
		1. Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)
	7. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah melalui Seni, Budaya, dan	1. Meningkatkan Seni, Budaya, dan Pariwisata (Maju Seni, Budaya, dan Pariwisata)



Misi	Tujuan	Sasaran
	Religi	
	8. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga	1. Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga (Maju Pemuda dan Olahraga)

4.1.4. Telaah RTRW

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040, indikasi program utama dapat dilihat pada Tabel IV.3 berikut ini.



Tabel IV.3
Indikasi Program Utama

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
A.	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG											
1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan								
2.	Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan								
3.	Peningkatan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan								
4.	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan								
5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan								
6.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. OKU Selatan - DPUBMTR Prov. Sumsel - Kementerian ATR/BPN								
B.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
1.	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan											
1.1.	Perwujudan Sistem Perkotaan											
	1) Program pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Muaradua										
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi		APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan								
	b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		APBD Kab	- Dinas LH Kab. OKU Selatan								
	c. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten		APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan								
	2) Program pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)											



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	1. Kawasan Perkotaan Banding Agung 2. Kawasan Perkotaan Simpangan	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - DPUBMTR Prov. Sumsel - Kementerian ATR/BPN								
	b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	3. Kawasan Perkotaan Kota Way	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	c. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten	4. Kawasan Perkotaan Gunung Terang 5. Kawasan Perkotaan Pagar Dewa 6. Kawasan Perkotaan Pulau Beringin	APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan								
	3) Program pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)											
	a. Penataan dan Pengembangan Fungsi Perkotaan	Kawasan yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Bappeda Litbang Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan								
	b. Pengembangan Infrastruk		APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perhubungan Kabupaten OKU Selatan								
1.2.	Perwujudan Sistem Perdesaan											
	a. Penataan dan pengembangan pusat pelayanan perdesaan	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Bappeda Litbang Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan								
	b. Pengembangan Infrastruktur Perdesaan		APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perhubungan Kab. OKU Selatan								
1.3.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang			Selatan - Dinas PMPTSP Kab. OKU Selatan - Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. OKU Selatan								
2.	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi											
2.1.	Sistem Jaringan Transportasi Jalan											
	1) Program Penyelenggaraan Jalan											
	a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - DPUBMTR Prov. Sumsel								
	b. Pembangunan Jalan	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - DPUBMTR Prov. Sumsel - Kementerian PUPR								
	c. Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - DPUBMTR Prov. Sumsel - Kementerian PUPR								
	d. Rehabilitasi Jalan	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - DPUBMTR Prov. Sumsel - Kementerian PUPR								
	e. Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - DPUBMTR Prov. Sumsel - Kementerian PUPR								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	f. Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - DPUBMTR Prov. Sumsel - Kementerian PUPR								
	g. Pembangunan Jembatan	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - DPUBMTR Prov. Sumsel - Kementerian PUPR								
	h. Rehabilitasi Jembatan	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - DPUBMTR Prov. Sumsel - Kementerian PUPR								
	i. Pengelolaan Leger Jalan	Kabupaten OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - DPUBMTR Prov. Sumsel - Kementerian PUPR								
	2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)											
	a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas Perhubungan Kab. OKU Selatan								
	b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas Perhubungan Kab. OKU Selatan								
	c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Kab. OKU Selatan	APBD Prov	- Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Selatan								
	d. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1. Kec. Banding Agung 2. Kec. Simpang 3. Kec. Buay Sandang Aji 4. Kec. Pulau Beringin	APBD Kab	- Dinas Perhubungan Kab. OKU Selatan								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
		5. Kec. Warkuk Ranau Selatan										
	e. Pembangunan Jembatan Timbang	1. Kec. Warkuk Ranau Selatan 2. Kec. Simpang 3. Kec. Pulau Beringin	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Perhubungan Kab. OKU Selatan - Dinas Perhubungan Prov. Sumsel								
2.2.	Program Pengelolaan Pelayaran											
	a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau											
	1) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1. Kec. Banding Agung 2. Kec. BPR Ranau Tengah 3. Kec. Warkuk Ranau Selatan	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas Perhubungan Kab. OKU Selatan - Dinas Perhubungan Prov. Sumsel - Kementerian Perhubungan - Badan Usaha Pelabuhan (BUP)								
	2) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas Perhubungan Kab. OKU Selatan - Dinas Perhubungan Prov. Sumsel - Kementerian Perhubungan - Badan Usaha Pelabuhan (BUP)								
	b. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam dan Luar Daerah Kabupaten											
	1) Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam dan Luar Daerah Kabupaten		APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas Perhubungan Kab. OKU Selatan - Dinas Perhubungan Prov. Sumsel - Kementerian Perhubungan - Badan Usaha Pelabuhan (BUP)								
	2) Pengendalian dan Pengawasan		APBD/APBD	- Dinas Perhubungan Kab.								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam dan Luar Daerah Kabupaten		Prov/APBN/Swasta	OKU Selatan - Dinas Perhubungan Prov. Sumsel - Kementerian Perhubungan - Badan Usaha Pelabuhan (BUP)								
	c. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau											
	1) Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Dana		APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas Perhubungan Kab. OKU Selatan - Dinas Perhubungan Prov. Sumsel - Kementerian Perhubungan								
	2) Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau		APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas Perhubungan Kab. OKU Selatan - Dinas Perhubungan Prov. Sumsel - Kementerian Perhubungan								
2.3.	Program Pengelolaan Penerbangan	Kec. Banding Agung										
	1) Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Perhubungan Kab. OKU Selatan - Dinas Perhubungan Prov. Sumsel - Kementerian Perhubungan								
	2) Penetapan Kebijakan Besaran Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Perhubungan Kab. OKU Selatan - Dinas Perhubungan Prov. Sumsel - Kementerian Perhubungan								
	3) Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Perhubungan Kab. OKU Selatan - Dinas Perhubungan Prov. Sumsel - Kementerian Perhubungan								
	4) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam		APBD/APBD	- Dinas Perhubungan Kab.								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas untuk Menunjang Kegiatan Bandar Udara		Prov/APBN	OKU Selatan - Dinas Perhubungan Prov. Sumsel - Kementerian Perhubungan								
	5) Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan kebandarudaraan		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Perhubungan Kab. OKU Selatan - Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. OKU Selatan - Dinas Perhubungan Prov. Sumsel - Kementerian Perhubunga								
3.	Perwujudan Sistem Energi											
	1) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan											
	a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	1. Kec. Tiga Dihaji 2. Kec. Buay Runjung	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Kementerian ESDM - Dinas ESDM Prov. Sumsel - PT. PLN - Swasta								
	b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	1. Kec. Buay Rawan 2. Kec. BPR Ranau Tengah	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Kementerian ESDM - Dinas ESDM Prov. Sumsel - PT. PLN - Swasta								
	c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	1. Kec. Muaradua Kisam 2. Kec. Banding Agung 3. Kec. BPR Ranau Tengah 4. Kec. Sindang Danau 5. Kec. Mekakau Ilir	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Kementerian ESDM - Dinas ESDM Prov. Sumsel - PT. PLN - Swasta								
	d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Kementerian ESDM - Dinas ESDM Prov. Sumsel - PT. PLN - Swasta								
	e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Kementerian ESDM - Dinas ESDM Prov. Sumsel - PT. PLN - Swasta								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	f. Pengembangan Gardu Induk	1. Kec. Buay Rawan 2. Kec. BPR Ranau Tengah 3. Kec. Warkuk Ranau Selatan	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Kementerian ESDM - Dinas ESDM Prov. Sumsel - PT. PLN - Swasta								
	g. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	1. Kec. Simpang 2. Kec. Buana Pemaca 3. Kec. Buay Pemaca 4. Kec. Muaradu 5. Kec. Buay Rawan 6. Kec. Tiga Dihaji 7. Kec. Banding Agung 8. Kec. BPR Ranau Tengah 9. Kec. Warkuk Ranau Selatan	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Kementerian ESDM - Dinas ESDM Prov. Sumsel - PT. PLN - Swasta								
	2) Pengembangan Sumber Energi Tak Terbarukan	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Kementerian ESDM - Dinas ESDM Prov. Sumsel - PT. PLN - Swasta								
	3) Pengembangan Sumber Energi Terbarukan	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Kementerian ESDM - Dinas ESDM Prov. Sumsel - PT. PLN - Swasta								
	4) Pengaturan pembangunan SPBU dan SPBE	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Kementerian ESDM - Dinas ESDM Prov. Sumsel - Swasta								
4.	Perwujudan Sistem Telekomunikasi											
	1) Pengembangan jaringan tetap yang menggunakan sistem kabel	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas Kominfo Kab. OKU Selatan - Swasta - K/L/I Urusan Telekomunikasi dan Informatika								
	2) Pengembangan jaringan bergerak terrestrial	1. Kec. Buay Rawan 2. Kec. Muaradua	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas Kominfo Kab. OKU Selatan								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
			Swasta	- Swasta - K/L/I Urusan Telekomunikasi dan Informatika								
	3) Pengembangan jaringan bergerak seluler	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas Kominfo Kab. OKU Selatan - Swasta - K/L/I Urusan Telekomunikasi dan Informatika								
5.	Perwujudan Sistem Prasarana Sumber Daya Air											
5.1.	Sumber Air											
	a. Air Permukaan											
	1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Kementerian PUPERA - Dinas PSDA Prov. Sumsel								
	2) Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS		APBD/APBD Prov/APBN	- Kementerian PUPERA - Dinas PSDA Prov. Sumsel								
	3) Pembangunan Waduk/Bendungan	1. Kec. Tiga Dihaji 2. Kec. Buay Runjung	APBD/APBD Prov/APBN	- Kementerian PUPERA - Dinas PSDA Prov. Sumsel								
	4) Rehabilitasi Waduk/Bendungan		APBD/APBD Prov/APBN	- Kementerian PUPERA - Dinas PSDA Prov. Sumsel								
	5) Operasi dan Pemeliharaan Waduk/Bendungan		APBD/APBD Prov/APBN	- Kementerian PUPERA - Dinas PSDA Prov. Sumsel								
	6) Pembangunan Check Dam	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov	- Dinas PUPR Kab.OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel								
	7) Peningkatan Check Dam	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov	- Dinas PUPR Kab.OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel								
	8) Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov	- Dinas PUPR Kab.OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel								
	9) Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
				- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel								
	10) Normalisasi, Restorasi, dan Pemeliharaan Sungai	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel								
	11) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	12) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	13) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	b. Sumber Air Tanah											
	1) Pembangunan Unit Air Baku Rehabilitasi Unit Air Baku Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Swasta								
	2) Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku		APBD/APBD Prov	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Swasta								
	3) Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air		APBD/APBD	- Dinas PUPR Kab. OKU								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	Baku		Prov	Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Swasta								
	4) Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku		APBD/APBD Prov	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Swasta								
	5) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupate		APBD/APBD Prov	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Swasta								
5.2.	Prasarana Sumber Daya Air											
	a. Sistem Jaringan Irigasi											
	1) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	41 Daerah Irigasi	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	2) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	4) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
				- Kementerian PUPERA								
	5) Pembangunan Bendung Irigasi		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	6) Peningkatan Bendung Irigasi		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	7) Rehabilitasi Bendung Irigasi		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	8) Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	b. Sistem Pengendalian Banjir											
	1) Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1. Kec. Muaradua 2. Kec. Buay Sandang Aji 3. Kec. Buay Runjung 4. Kec. Buay Rawan 5. Kec. Tiga Dihaji	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	2) Pembangunan Kanal Banjir	6. Kec. Banding Agung 7. Kec. Warkuk Ranau Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
				- Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	3) Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	4) Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	5) Rehabilitasi Kanal Banjir		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	6) Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	7) Peningkatan Kanal Banjir		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	8) Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
				- Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
	9) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian PUPERA								
6.	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya											
6.1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum											
	1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan								
	2) Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - PDAM Kab. OKU Selatan - Swasta								
	3) Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - PDAM Kab. OKU Selatan - Swasta								
	4) Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - PDAM Kab. OKU Selatan								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
				- Swasta								
	5) Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - PDAM Kab. OKU Selatan - Swasta								
	6) Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - PDAM Kab. OKU Selatan - Swasta								
	7) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - PDAM Kab. OKU Selatan - Swasta								
	8) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - PDAM Kab. OKU Selatan - Swasta								
6.2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah											
	1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	1. Kec. Buay Rawan	APBD Kab/	- Dinas PUPR Kab. OKU								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	2. Kec. Muaradua	Swasta	Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selata								
	2) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Bappeda Litbang Kab. OKU Selatan								
	3) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		APBD Kab/ Swasta	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	4) Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		APBD Kab/ Swasta	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	5) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		APBD Kab/ Swasta	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	6) Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
				Kab. OKU Selatan - Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan								
	7) Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik		APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan								
	8) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
6.3.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)											
	a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. OKU Selatan	APBD Kab/ Swasta	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas Kesehatan Kab. OKU Selata								
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		APBD Kab/ Swasta	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas Kesehatan Kab. OKU Selata								
6.4.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional											
	a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	b. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten		APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	c. Pembangunan TPA	Kec. Buay Rawan	APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	d. Pembangunan TPST	1. Kec. Pulau Beringin 2. Kec. Simpang 3. Kec. Muaradua Kisam	APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	e. Pembangunan TPS-3R/4R	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	f. Pembangunan TPS	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	g. Rehabilitasi TPA	Kec. Buay Rawan	APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	h. Rehabilitasi TPST	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	i. Rehabilitasi TPS-3R/4R	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	j. Rehabilitasi TPS	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	k. Penyediaan Sarana Persampahan	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	l. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS- 3R- 4R/TPS	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
6.5.	Program Penanggulangan Bencana											
	a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- BPBD Kab. OKU Selatan								
	b. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten		APBD Kab	- BPBD Kab. OKU Selatan								
	c. Pembangunan dan Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana		APBD Kab	- BPBD Kab. OKU Selatan								
	d. Pembangunan dan Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana		APBD Kab	- BPBD Kab. OKU Selatan								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		APBD Kab	- BPBD Kab. OKU Selatan - Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. OKU Selatan								
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG											
1.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung											
1.1.	Program Pengelolaan Hutan Lindung											
	1) Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)											
	a. Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	1. Kec. Mekakau Ilir 2. Kec. Banding Agung 3. Kec. Simpang 4. Kec. Buana Pemaca 5. Kec. Muaradua 6. Kec. Buay Sandang Aji 7. Kec. Tiga Dihaji 8. Kec. Runjung Agung	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas Kehutanan Prov. Sumsel - Kementerian LH								
	b. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	9. Kec. Kisam Tinggi 10. Kec. Muaradua Kisam 11. Kec. Pulau Beringin 12. Kec. Sindang Danau 13. Kec. Warkuk Ranau Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas Kehutanan Prov. Sumsel - Kementerian LH								
	2) Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	14. Kec. Buay Pemaca 15. Kec. BPR Ranau Tengah 16. Kec. Kisam Ilir 17. Kec. Sungai Are	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas Kehutanan Prov. Sumsel - Kementerian LH								
	3) Pemanfaatan Hutan Lindung											
	a. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung											
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung											



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
				Selatan - Kementerian LHK								
	4) Pelaksanaan Perlindungan Hutan Lindung		APBD/APBD Prov/APBN									
	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. OKU Selatan - Dinas Kehutanan Prov. Sumsel - Kementerian LHK								
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. OKU Selatan - Dinas Kehutanan Prov. Sumsel - Kementerian LHK								
1.2.	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat											
	1) Perlindungan Sempadan Sungai	Kab. OKU Selatan										
	a. Penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian LHK - Kementerian PUPERA								
	b. Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian LHK								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
				- Kementerian PUPERA								
	c. Penertiban bangunan diatas sempadan sungai; dan		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian LHK								
	d. Penghijauan		APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	2) Perlindungan Sempadan Danau dan Waduk											
	a. Penetapan sempadan danau dan waduk di kawasan perkotaan dan perdesaan;	1. Kec. Banding Agung 2. Kec. Warkuk Ranau Selatan 3. Kec. Sindang Danau 4. Kec. Kisam Tinggi 5. Kec. Buana Pemaca	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian LHK - Kementerian PUPERA								
	b. Penetapan pemanfaatan ruang sempadan danau dan waduk	6. Kec. Buay Rawan 7. Kec. Buay Pemaca 8. Kec. Pulau Beringin 9. Kec. BPR Ranau Tengah 10. Kec. Buay Sandang Aji 11. Kec. Muaradua	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian LHK - Kementerian PUPERA								
	c. Penertiban bangunan diatas sempadan danau dan waduk; dan	12. Kec. Simpang 13. Kec. Runjung Agung 14. Kec. Muaradua Kisam 15. Kec. Kisam Ilir 16. Kec. Buay Runjung 17. Kec. Tiga Dihaji	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	d. Penghijauan		APBD/APBD Prov/APBN	- Kementerian LHK - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
1.3.	Perwujudan Kawasan Konservasi											
	1) Rehabilitasi dan pengamanan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	1. Kec. BPR Ranau Tengah 2. Kec. Warkuk Ranau Selatan 3. Kec. Buay Pemaca 4. Kec. Buay Rawan 5. Kec. Sungai Are 6. Kec. Pulau Beringin 7. Kec. Mekakau Ilir 8. Kec. Banding Agung	APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian LHK								
	2) Peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian LHK								
	3) Penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian LHK								
	4) Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian LHK								
	5) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Asli pada Kawasan Konservasi		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian LHK								
2.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya											
2.1.	Program Pengelolaan Hutan Produksi											
	1) Pemanfaatan Hutan Produksi											
	a. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1. Kec. Buay Pemaca 2. Kec. Buana Pemaca 3. Kec. Sungai Are	APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. OKU								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
				Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian LH								
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas Lingkungan Hidup Kab.OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - DPMPTSP Kab.OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian LHK								
	2) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Produksi											
	a. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan		APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian LHK								
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian LHK								
	c. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian LHK								
	3) Pelaksanaan Perlindungan Hutan Produksi											
	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan		APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		APBD Kab	- Kementerian LHK - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas PSDA Prov. Sumsel - Kementerian LHK								
2.2.	Perwujudan Kawasan Pertanian											
	1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian											
	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		APBD Kab	- Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan								
	b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme		APBD Kab	- Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Selatan								
	c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan		APBD Kab	- Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Selatan								
	d. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	Kab. OKU Selatan	APBD Kab	- Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Selatan								
	e. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		APBD Kab	- Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Selatan								
	2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian											
	a. Pengembangan Prasarana Pertanian											
	- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		APBD Kab	- Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	- Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		APBD Kab	- Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan								
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		APBD Kab	- Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan								
	- Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		APBD Kab	- Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan								
	b. Pembangunan Prasarana Pertanian											
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan								
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan								
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan								
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan								
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan								
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Selatan								
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan								
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan								
2.3.	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi											
	1) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara											
	a. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Kementerian ESDM - Dinas ESDM Prov. Sumsel								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	dan Batuan											
	b. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara		APBD/APBD Prov/APBN	- Kementerian ESDM - Dinas ESDM Prov. Sumsel								
	c. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan		APBD/APBD Prov/APBN	- Kementerian ESDM - Dinas ESDM Prov. Sumsel								
	d. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		APBD/APBD Prov/APBN	- Kementerian ESDM - Dinas ESDM Prov. Sumsel								
	e. Perbaikan Lingkungan Pasca Tambang Melalui Rehabilitasi dan Reklamasi Tambang.		APBD/APBD Prov/APBN/ Swasta	- Kementerian ESDM - Dinas ESDM Prov. Sumsel - Swasta								
2.4.	Perwujudan Kawasan Pariwisata											
	1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kab. OKU Selatan										
	a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten		APBD Kab	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan								
	b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten		APBD Kab	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan								
	c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten		APBD Kab	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan								
	d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten		APBD Kab	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan								
	2) Program Pemasaran Pariwisata											
	- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten		APBD Kab	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kab. OKU Selatan										
	- Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah		APBD Kab	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan								
	4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif											
	- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		APBD Kab	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan								
2.5.	Perwujudan Kawasan Permukiman											
	1) Program Pengembangan Perumahan	Kab. OKU Selatan										
	- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten		APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas Perkim Kab. OKU Selatan								
	- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten		APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas Perkim Kab. OKU Selatan								
	- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi		APBD/APBD Prov/APBN/Swasta	- Dinas Perkim Kab. OKU Selatan								
	2) Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh											
	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)		APBD Kab	- Dinas Perkim Kab. OKU Selatan								
	- Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (RP2KPKP)		APBD Kab	- Dinas Perkim Kab. OKU Selatan								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	3) Program Pengembangan Permukiman											
	- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten		APBD Kab	- Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas PUPR Kab. OKU Selatan								
	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		APBD Kab	- Dinas Perkim Kab. OKU Selatan								
	4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		APBD Kab	- Dinas Perkim Kab. OKU Selatan - Dinas PUPR Kab. OKU Selatan								
2.6.	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan											
	1) Identifikasi kepemilikan aset tanah TNI dan POLRI	Kab. OKU Selatan	APBD/APBD Prov/APBN	- Badan Pertanahan Nasional Kab. OKU Selatan - Kepolisian dan TNI								
	2) Menetapkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya bagi aktivitas masyarakat		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan								
2.7.	Perwujudan Kawasan Badan Air											
	1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kab. OKU Selatan										
	- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat diusahakan		APBD Kab	- Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	2) Program Pengawasan Sumberdaya Perikanan											
	- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten		APBD Kab	- Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	3) Program Pengawasan Pemanfaatan Badan		APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	Air			Kab. OKU Selatan								
3.	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten											
	1) Program Perwujudan Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi											
	- KSK Danau Rakihan											
	▪ Pemberdayaan ekonomi dan sosial kemasyarakatan	1. Kec. Sungai Are 2. Kec. Sindang Danau 3. Kec. Pulau Beringin	APBD Kab	- Bappeda Litbang Kab. OKU Selatan - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan								
	▪ Penataan Kawasan		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Selatan								
	▪ Peningkatan Promosi dan Penunjang Pariwisata		APBD Kab	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.OKU Selatan - Dinas Kominfo Kab.OKU Selatan								
	▪ Peningkatan perlindungan alam		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan								
	▪ Pengembangan Permukiman		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas Perkim Kab. OKU Selatan								
	▪ Pengembangan kawasan agro wisata		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
				Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Bappeda Litbang Kab. OKU Selatan								
	- KSK Agropolitan Buana Pemaca	Kec. Buana Pemaca										
	▪ Pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi		APBD Kab	- Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan								
	▪ Pengembangan kawasan produksi pertanian dan kota tani		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Bappeda Litbang Kab. OKU Selatan								
	▪ Pengembangan kawasan agro industri		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Bappeda Litbang Kab. OKU Selatan								
	▪ Peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian		APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan - Bappeda Litbang Kab. OKU Selatan								
	2) Program Perwujudan Kawasan Strategis Sosial Budaya (Kawasan Situs Sejarah)	Kec. Tiga Dihaji										
	- Register Cagar Budaya		APBD Kab	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan								
	- Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya		APBD Kab	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan								
	- Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta		APBD Kab	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040
	Pemanfaatannya			Selatan - Dinas Kominfo Kab. OKU Selatan								
	- Pendayagunaan Cagar Budaya		APBD Kab	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan								
	3) Program Perwujudan Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	1. Kec. Runjung Agung 2. Kec. Buay Runjung										
	- Penataan Kawasan		APBD/APBD Prov/APBN	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Bappeda Litbang Kab. OKU Selatan								
	- Pengaturan dan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan bendungan		APBD Kab	- Dinas PUPR Kab. OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan - Bappeda Litbang Kab. OKU Selatan								



4.1.5. Telaah SDGs

Analisa permasalahan dan isu strategis capaian SDGs Ogan Komering Ulu Selatan dilakukan dengan melihat gambaran pencapaian Ogan Komering Ulu Selatan (pada Bab II) yang telah *ditagging* dengan beberapa indikator utama yang belum tercapai dan melakukan analisa permasalahan dengan melakukan *cascading* per pilar untuk mengetahui akar permasalahan dan mendapatkan isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Ogan Komering Ulu Selatan yang akan menjadi acuan pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Periode 2021-2026.

Pilar 1 Pembangunan Sosial

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

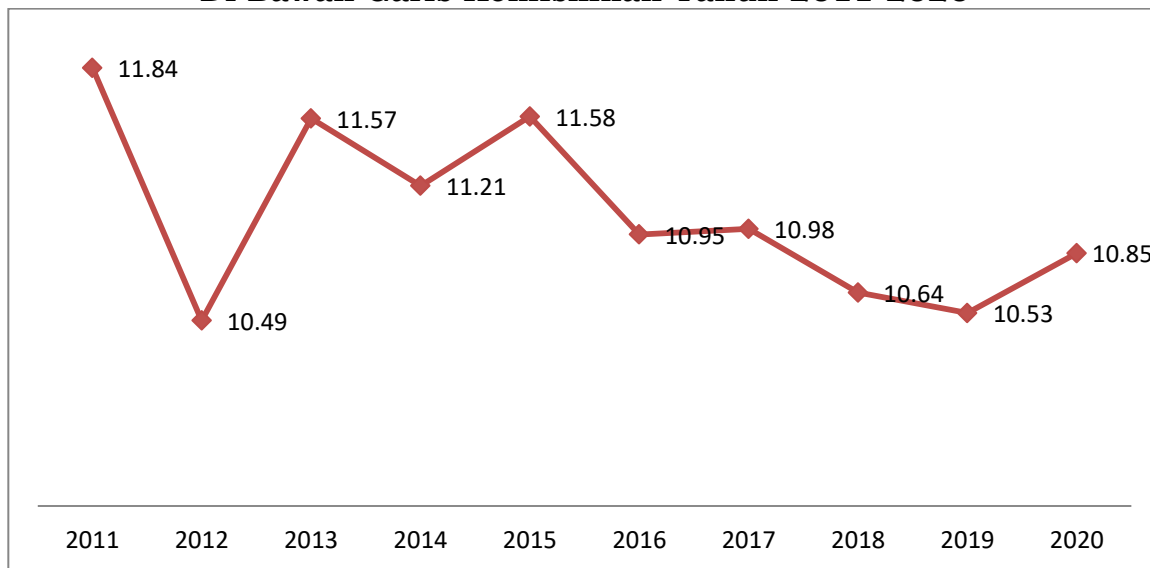
Salah satu tujuan yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam agenda SDGs Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu Pemerintah memiliki komitmen untuk menghapus segala bentuk kemiskinan. Target yang ingin dicapai pada tahun 2030 ini mensyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan dasar dan memiliki hak untuk menikmati suatu standar kehidupan yang layak serta Pemerintah harus dapat menjamin masyarakat yang sangat miskin dengan suatu program jaminan sosial.

Indikator 1.2.1*. Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Kemiskinan agregat menunjukkan proporsi dan jumlah penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan agregat atau yang sering disebut angka kemiskinan makro digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu bangsa. Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam implementasinya dihitunglah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2019 sebesar 10,53% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 10,85%. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang cenderung lambat. selama periode tahun 2017-2020, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan sebesar 0,36%.

Gambar IV.1
Persentase Penduduk Kabupaten OKU Selatan Yang Hidup
Di Bawah Garis Kemiskinan Tahun 2011-2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Isu lain terkait terkait upaya penanggulangan kemiskinan adalah tingginya garis kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Garis kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 319,333 ribu rupiah dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 21.815 ribu rupiah sehingga menjadi 341,148 ribu rupiah. Tingginya garis kemiskinan disebabkan masih tingginya harga komoditas pembentuk garis kemiskinan, yaitu 52 komoditas makanan dan 51 komoditas non makanan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu masih rendahnya pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pada tahun 2019 pendapatan per kapita sebesar 24,36 juta rupiah dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 24,59 juta rupiah.

Program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan belum tepat sasaran, oleh karena itu perlu dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan menggunakan data *by name by address*. Agar penanggulangan kemiskinan tepat sasaran maka data kemiskinan *by name by address* tersebut harus akurat. Oleh karena itu verifikasi dan *updating* data kemiskinan harus dilaksanakan secara berkala sehingga data yang dihasilkan dapat merepresentasikan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, yang memang perlu mendapatkan perhatian adalah rendahnya pertumbuhan konsumsi pada kelompok masyarakat miskin termasuk rentan miskin atau status 40% terendah. Rendahnya pertumbuhan konsumsi tersebut secara tidak langsung menghambat upaya penanggulangan kemiskinan dan menandakan perlunya upaya peningkatan pendapatan agar pengeluaran kelompok masyarakat miskin mengalami peningkatan. Akar



masalah yang menjadi isu strategis yang memerlukan upaya yang serius dalam penanganannya, yaitu:

1. Peningkatan perlindungan social;
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya tidak bias gender;
3. Peningkatan ketahanan masyarakat miskin;
4. Peningkatan mobilisasi sumber daya;
5. Peningkatan asset; dan
6. Peningkatan daya beli masyarakat.

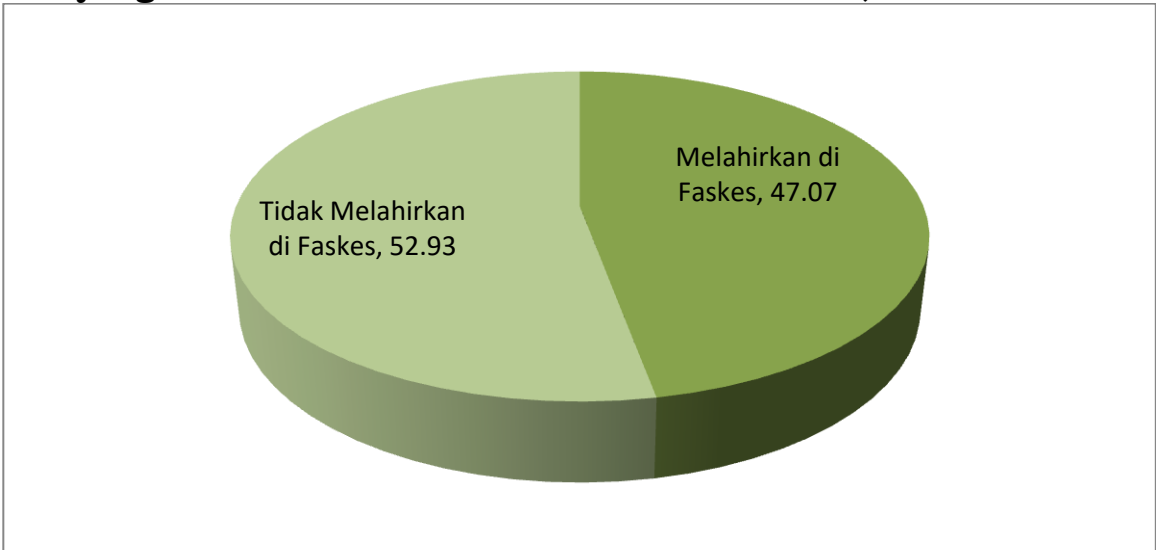
Data kemiskinan agregat hanya menggambarkan persentase dan jumlah penduduk miskin. Walaupun sangat berguna untuk mengetahui kemajuan pembangunan suatu bangsa, namun tidak dapat digunakan sebagai penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bantuan Pendidikan membutuhkan informasi tentang siapa dan di mana penduduk miskin itu berada (*by name dan by address*).

Penyaluran program penanggulangan kemiskinan memerlukan nama dan alamat rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran (RTS) ini sering disebut data kemiskinan mikro. Pengumpulan datanya harus dilakukan secara sensus. Pengumpulan data rumah tangga sasaran didasarkan pada ciri-ciri rumah tangga miskin yang diperoleh dari survei kemiskinan agregat.

Indikator 1.4.1.(a). Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Di Fasilitas Kesehatan

Proses kelahiran atau persalinan di fasilitas kesehatan dapat berdampak langsung pada kesehatan ibu dan anak yang akan dilahirkan. Pada fasilitas kesehatan tersedia perlengkapan dan tenaga kesehatan yang siap menolong sewaktu-waktu bila terjadi komplikasi persalinan. Pada tahun 2020, persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan hanya sebesar 47,07% saja.

Gambar IV.2
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan, Tahun 2020

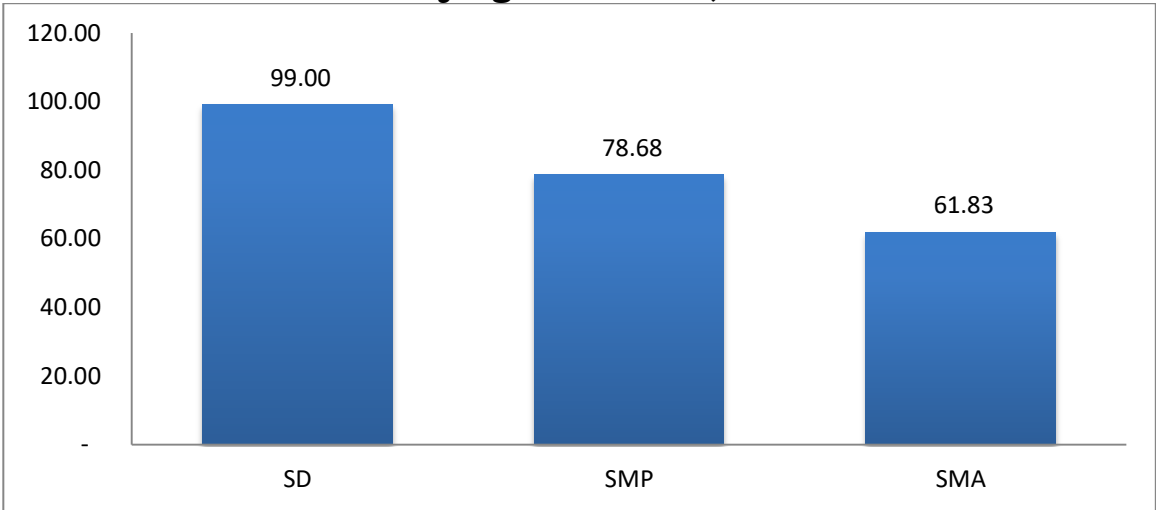


Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Indikator 1.4.1.(g-i). Angka Partisipasi Murni (APM)

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pada tahun 2020, angka partisipasi murni penduduk jenjang pendidikan sekolah dasar telah menembus angka 99,00%, itu artinya hanya ada satu di antara 500 penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah pada level sekolah dasar.

Gambar IV.3
Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2020



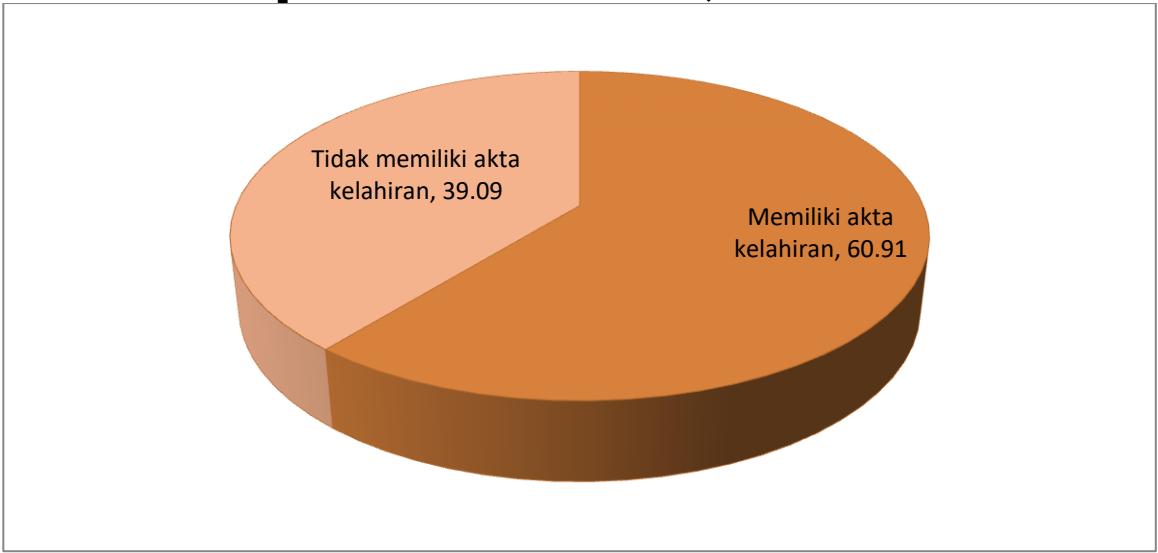
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Indikator 1.4.1.(j). Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Kelahiran

Pada tahun 2020, hanya sebesar 60% anak-anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berusia 0-17 tahun sudah tercatat identitasnya atau sudah memiliki akta kelahiran, dengan dicatat identitasnya dalam akta kelahiran secara *dejure* keberadaannya

dianggap ada oleh negara. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan dan pembangunan sosial bagi anak-anak Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kepemilikan akta kelahiran tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat.

Gambar IV.4
Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun Dengan
Kepemilikan Akta Kelahiran, Tahun 2020

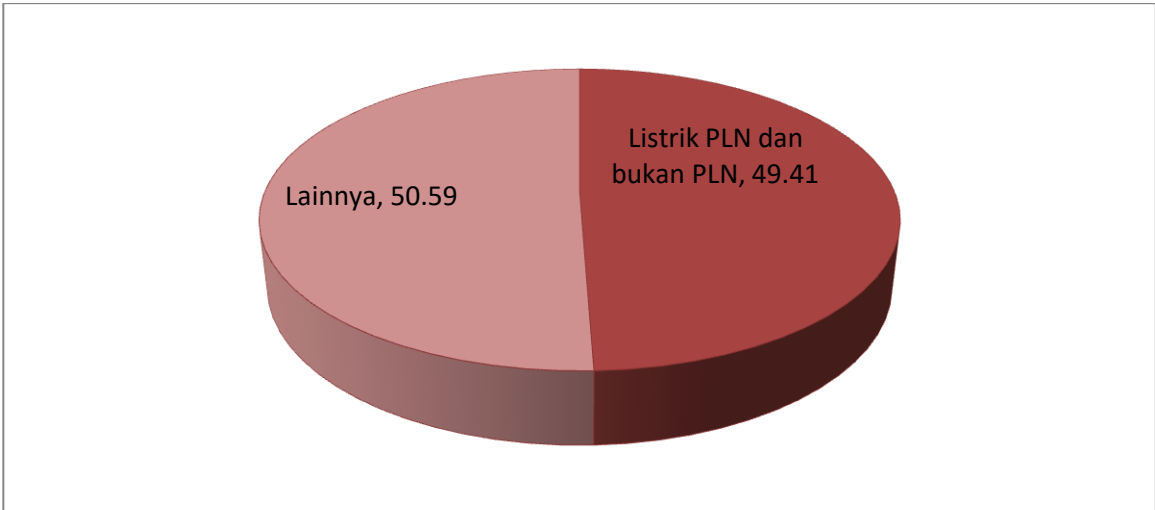


Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Indikator 1.4.1.(k). Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan Yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik Baik Dari PLN dan Bukan PLN

Dalam kehidupan sehari-hari listrik dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan manusia dari mulai sebagai sumber penerangan lampu di rumah-rumah sampai dengan sebagai sumber energi penggerak mesin-mesin industri, sehingga tanpa ada listrik dapat membuat roda perekonomian menjadi macet. Ketersediaan listrik tidak menjamin semua lapisan masyarakat dapat menikmati aliran listrik. Bila dilihat perkembangan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik sebesar 49,41% penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang menikmati listrik.

Gambar IV.5
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan Yang Sumber
Penerangan Utamanya Listrik Baik Dari PLN dan Bukan PLN,
Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

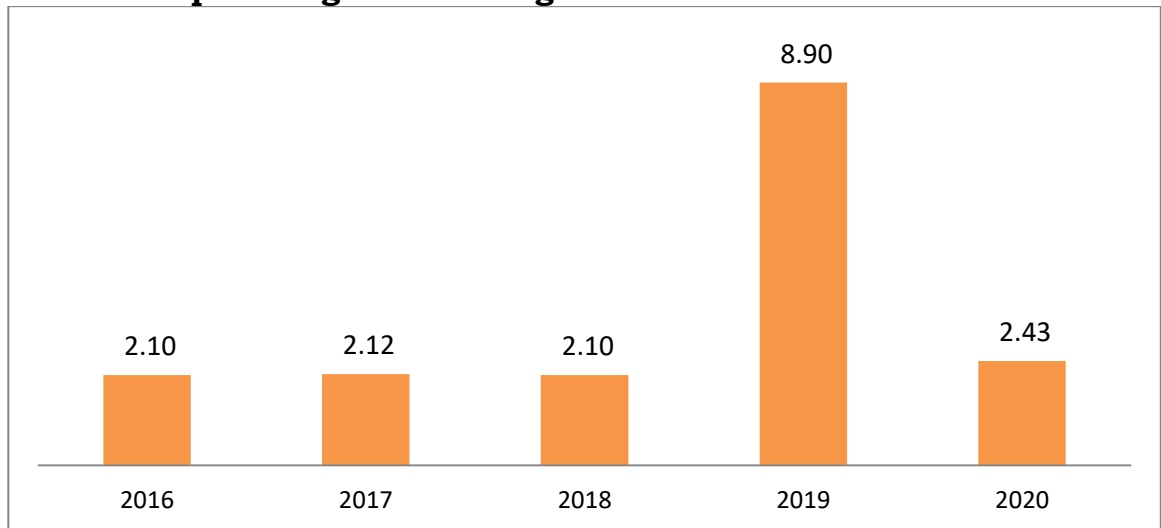
Tujuan 2 mengupayakan penyelesaian berkelanjutan untuk mengakhiri segala jenis kelaparan pada tahun 2030 dan mengupayakan ketahanan pangan. Tujuannya untuk menjamin setiap orang dimanapun ia berada, memiliki ketahanan pangan yang baik untuk menuju kehidupan sehatnya. Pencapaian tujuan ini membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pangan dan ajakan budidaya pertanian secara luas berkelanjutan.

Indikator 2.2.1* Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita

Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu, anak yang mengalami stunting beresikio besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, inidikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.



Gambar IV.6
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)
Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021

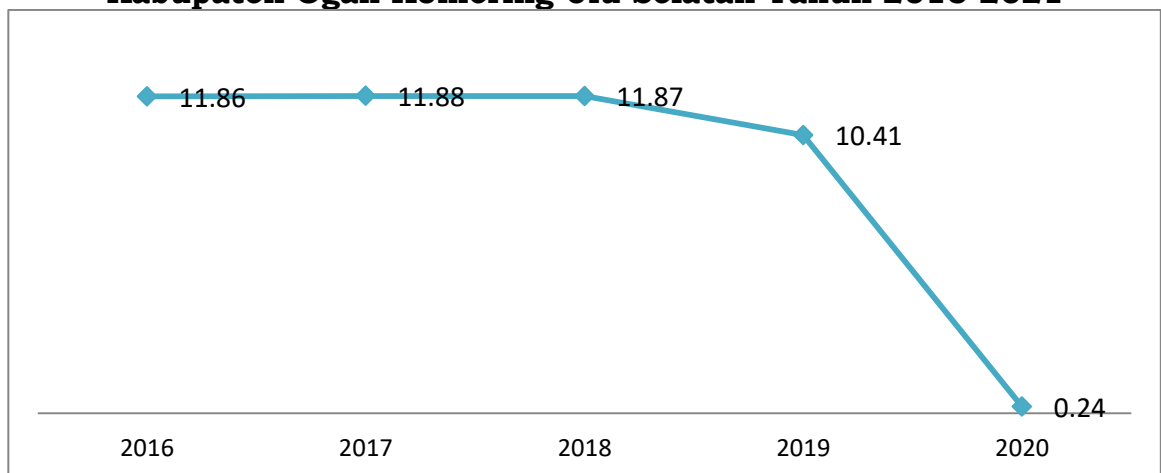


Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

Indikator 2.2.2* Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan)
Anak Pada Usia Kurang Dari 5 Tahun, Berdasarkan
Tipe

Balita yang menderita *wasting* (kurus/sangat kurus) sangat rawan terhadap penyakit infeksi dan memiliki resiko kematian lebih besar. Penyebab langsung dari *wasting* adalah kekurangan asupan gizi akut dan infeksi penyakit. Cara untuk mengatasi itu harus dilakukan tata laksana gizi buruk dan gizi kurang. Secara epidemiologis batas normal prevalensi *wasting* yang menyebabkan masalah kesehatan adalah <5%. Anak balita yang menderita obesitas memiliki resiko penyakit degenerative dan penyakit komplikasi yang lain. Penyebabnya adalah pola makan dengan gizi yang tidak seimbang, dan kurangnya aktivitas fisik.

Gambar IV.7
Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan)
Anak Pada Usia Kurang Dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021



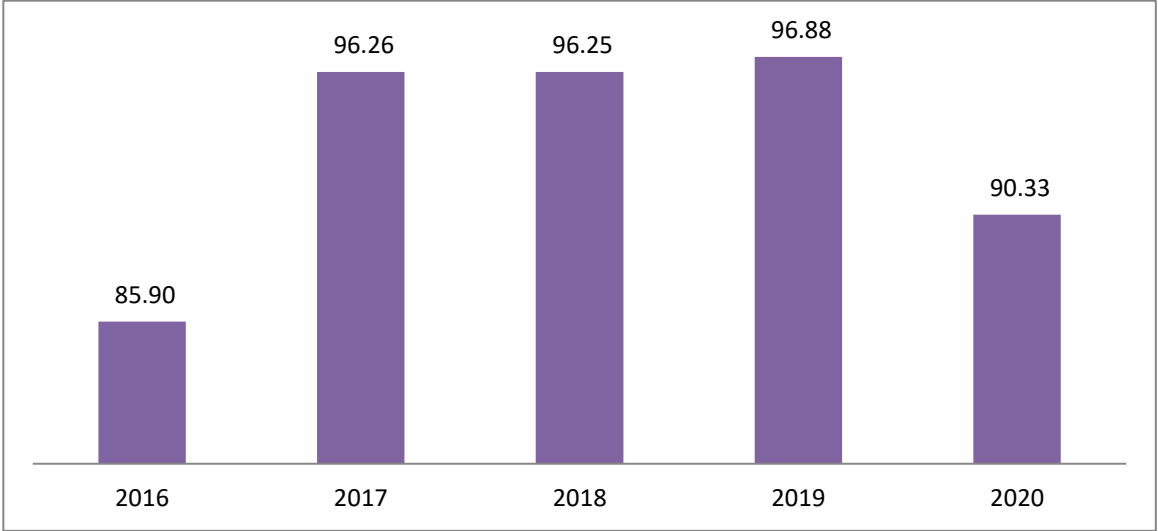
Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021



Indikator 2.2.2.(b). Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif

Pemberian ASI eksklusif kepada bayi usia kurang dari 6 bulan merupakan pemenuhan hak bayi yang sangat terkait dengan komitmen ibu dan dukungan keluarga serta lingkungan sekitar. Pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan berbagai penyakit (diare dan radang paru), meningkatkan kondisi kesehatan jangka pendek dan panjang, selain itu bermanfaat mempercepat pemulihan bila sakit. Pada tahun 2020, dari seluruh penduduk berusia dua tahun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 90,33% diantaranya pernah diberikan ASI dengan rata-rata pemberian ASI selama kurang lebih sepuluh bulan.

Gambar IV.8
Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan ASI eksklusif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 berupaya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua penduduk pada setiap tahap kehidupan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan reproduksi serta kesehatan ibu dan anak; mengakhiri epidemi HIV/AIDS, malaria, TBC dan penyakit tropis; mengurangi penyakit tidak menular dan environmental; mencapai cakupan kesehatan universal; dan menjamin akses universal untuk aman, terjangkau serta obat-obatan dan vaksin yang efektif.

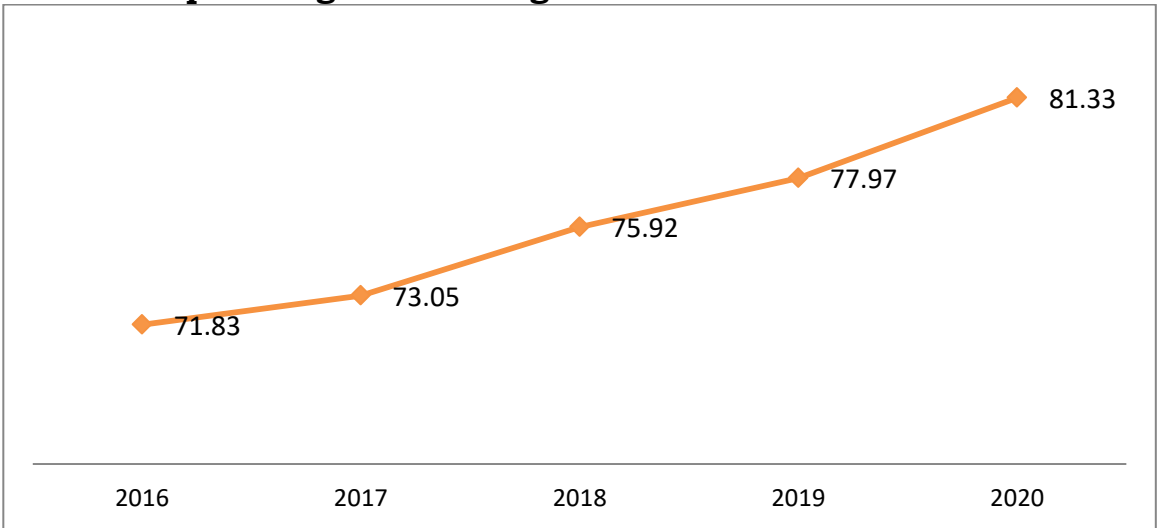


Indikator 3.1.2* Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih

Kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Persentasenya sudah melebihi 80%. Persalinan ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih juga harus memahami cara menolong persalinan secara bersih dan aman, seperti yang tertuang dalam program *safe motherhood*. Program *safe motherhood* merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan persalinannya sehat dan aman.

Gambar IV.9

Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021

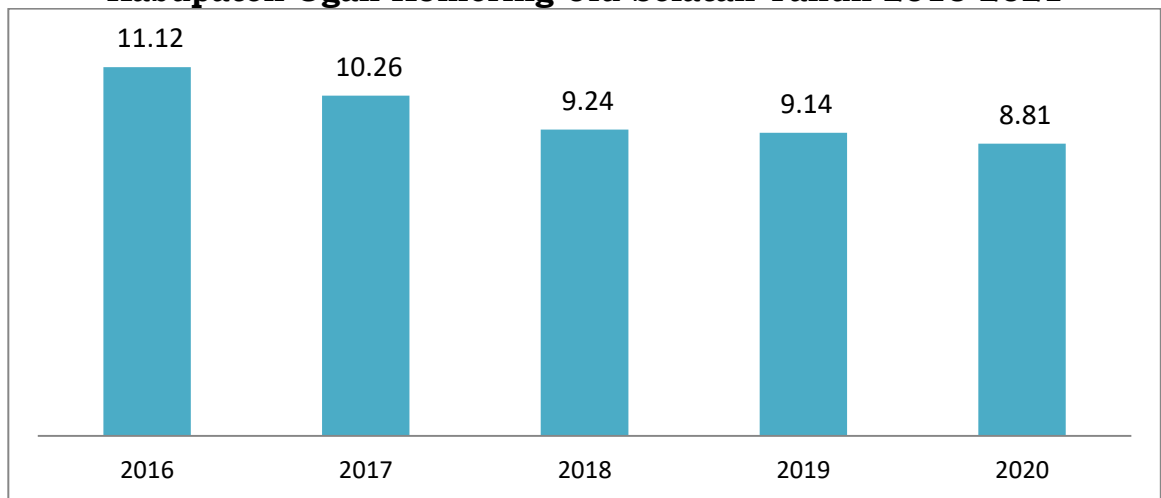


Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Indikator 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian balita adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu yang meninggal sebelum usia 5 tahun. Indikator ini mengukur kesehatan dan kelangsungan hidup anak dan dinyatakan sebagai jumlah kematian per 1000 kelahiran hidup. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatan.

Gambar IV.10
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021

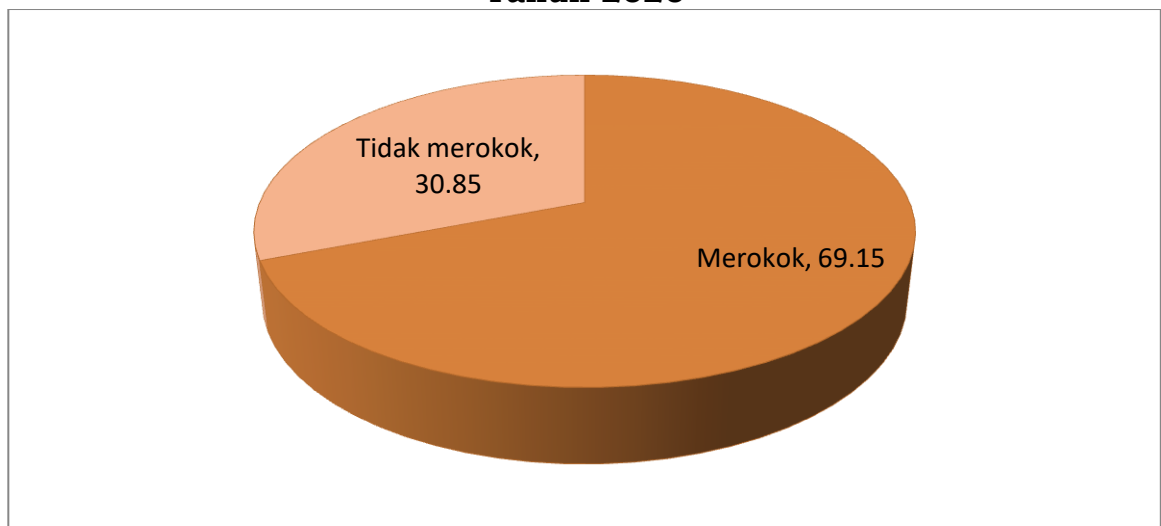


Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

Indikator 3.4.1.(a) Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≤18 Tahun

Pada tahun 2020, ada sebanyak 69,15% penduduk usia ≤18 tahun yang mengonsumsi rokok dengan rata-rata jumlah rokok yang dihisap sebanyak 89 buah per minggu atau sekitar 12-13 batang rokok per hari.

Gambar IV.11
Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≤18 Tahun,
Tahun 2020



Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

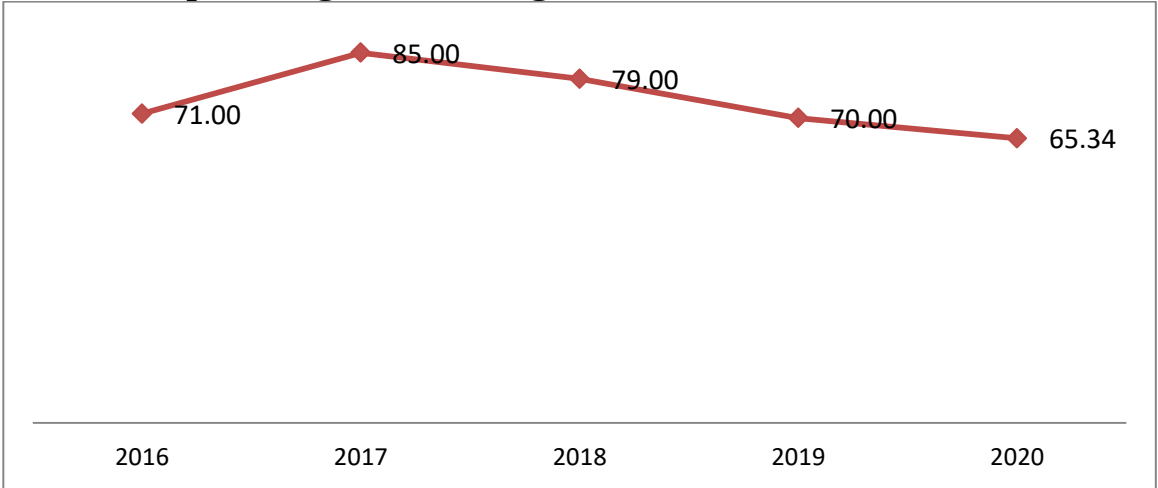
Indikator 3.7.1* Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) Atau Pasangannya Yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern

Alat kontrasepsi metode modern terdiri dari sterilisasi perempuan, sterilisasi pria, pil, spiral/IUD, suntik KB, susuk KB, kondom, metode amenore laktasi (MAL). Menurut data Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan Perlindungan Anak, jumlah peserta KB sejak tahun 2016 di



Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan cenderung mengalami penurunan. Padahal pada tahun 2017 sudah mencapai 85% perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang sudah pernah atau sedang menggunakan alat/cara KB.

Gambar IV.12
Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) Atau
Pasangannya Yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana
dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021



Sumber: Dinas PPKBP3A, Tahun 2021

Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

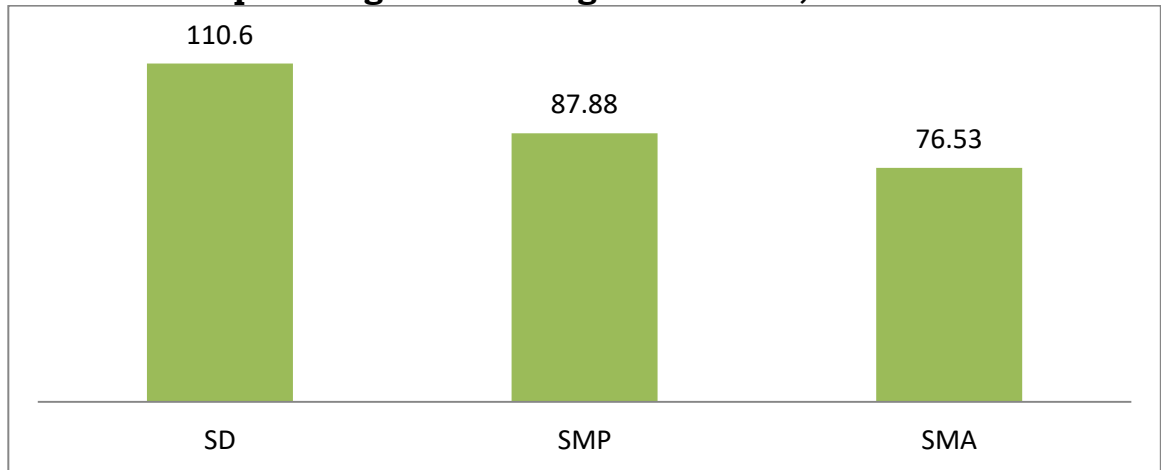
Tujuan 4 bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan belajar yang merata selama hidupnya. Tujuan ini berfokus pada perolehan keterampilan dasar dan tinggi di semua jenjang pendidikan; akses yang lebih besar dan lebih adil terhadap pendidikan berkualitas di semua jenjang, termasuk pendidikan teknis dan kejuruan; dan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk berfungsi dan berkontribusi dengan baik dalam kehidupan sosial.

Indikator 4.1.1.(d-f). Angka Partisipasi Kasar

Selama tahun 2016-2020, APK SD/MI/ sederajat selalu melebihi angka seratus, hal ini menunjukkan bahwa terdapat penduduk yang bukan berusia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD/MI/ sederajat. Dari situ terlihat bahwa kapasitas sistem pendidikan dasar sudah cukup untuk menampung siswanya. Tidak hanya itu, ketimpangan APK SD/MI/ sederajat antar daerah tempat tinggal dan antar jenis kelamin tidak terlihat secara signifikan. Dengan demikian, akses menempuh pendidikan dasar bagi semua penduduk cenderung sama dan merata.



Gambar IV.13
Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2020

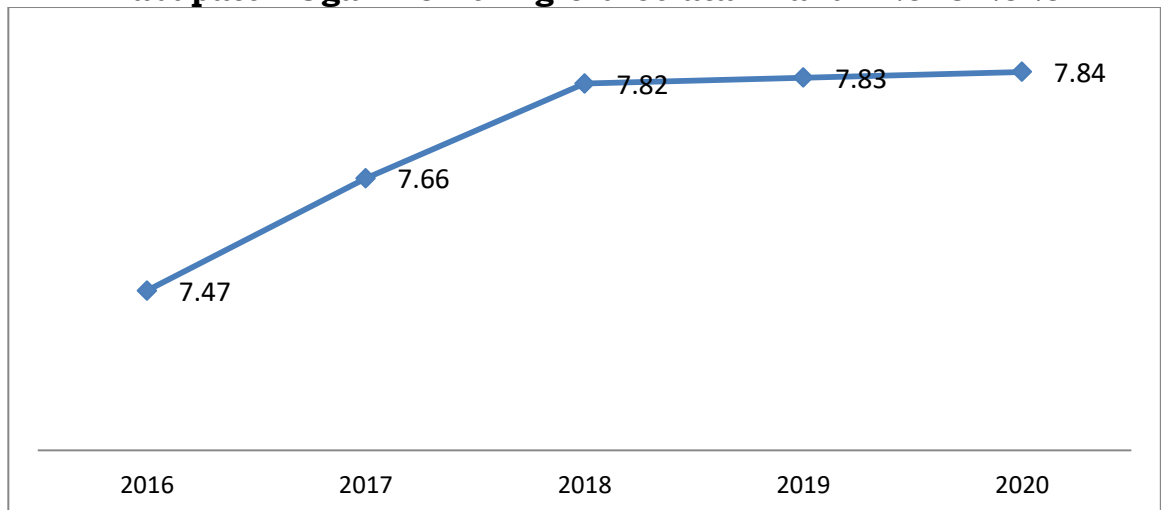


Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Indikator 4.1.1.(g). Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan tren positif selama sepuluh tahun terakhir.

Gambar IV.14
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



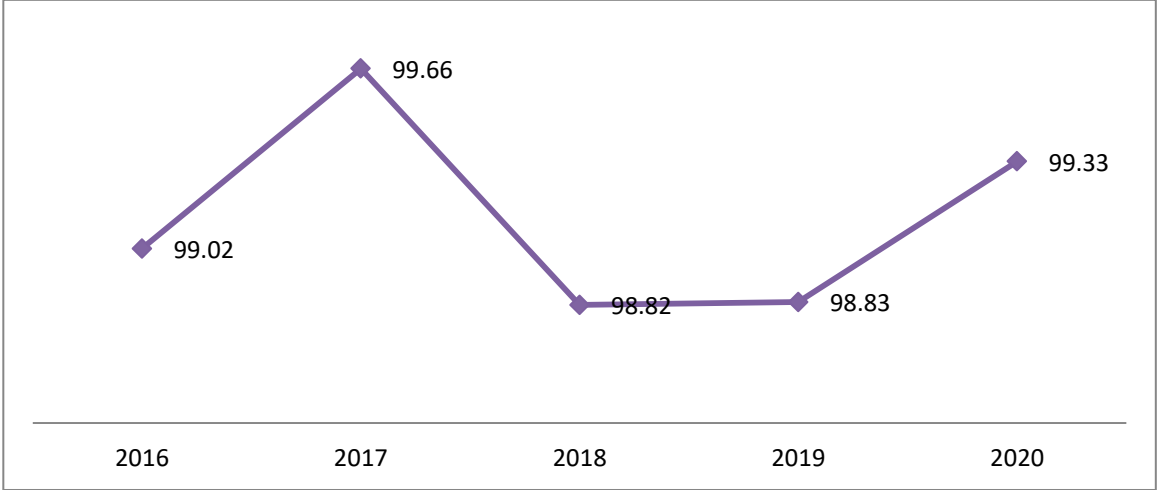
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021



Indikator 4.6.1.(a). Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥15 Tahun

Angka melek aksara di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sudah cukup tinggi. Pada tahun 2020, kurang dari dua persen penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang tidak dapat membaca maupun menulis dengan baik dan benar.

Gambar IV.15
Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥15 Tahun
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

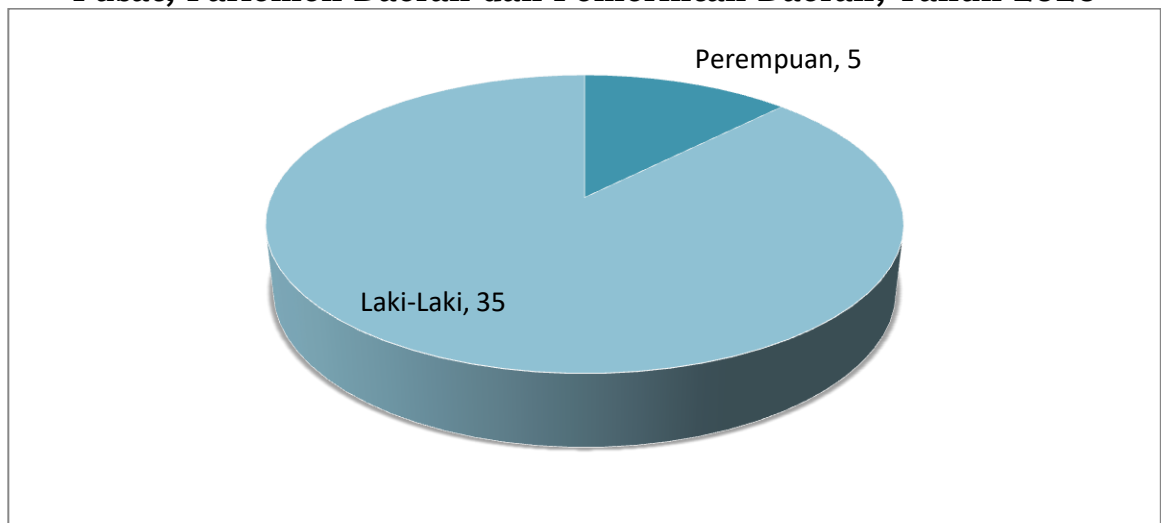
Tujuan 5 Kesenjangan Gender

Tujuan ini memiliki maksud untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan untuk mengembangkan bakat dan potensinya sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini berarti, segala bentuk diskriminasi dan kekerasan kaum perempuan harus dihilangkan, termasuk kekerasan seksual, kekerasan oleh pasangan, perkawinan anak, sunat perempuan, dan yang lainnya.

Indikator 5.5.1* Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah

Peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik harus mulai diperhitungkan, karena dapat menjadi sudut pandang dalam menyejahterakan kaum perempuan. Pada tahun 2020 ada lima orang perempuan yang duduk diantara empat puluh kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Gambar IV.16
Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah, Tahun 2020

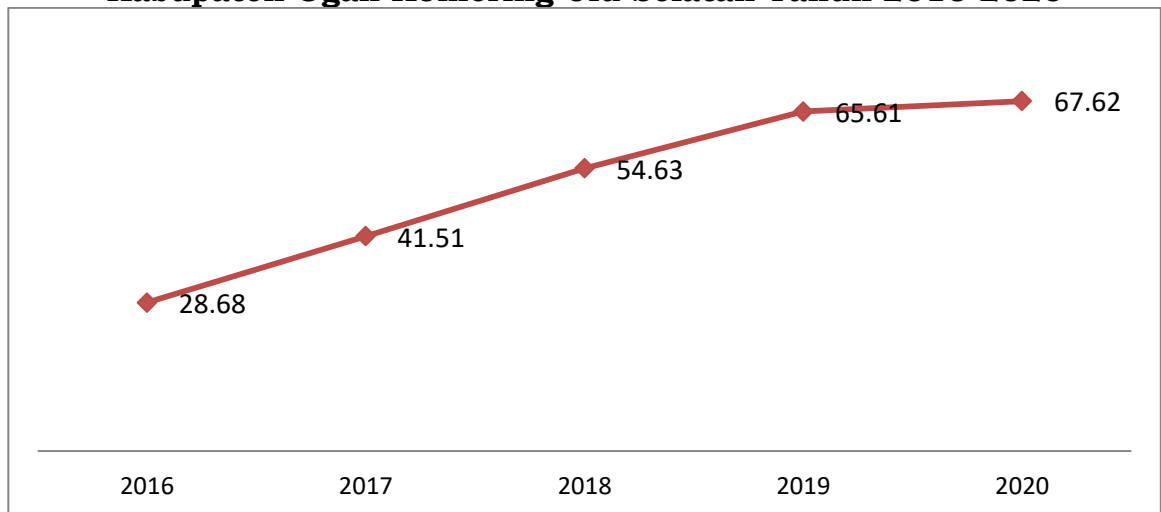


Sumber: Dinas PPKBP3A, Tahun 2021

Pilar 2 Pembangunan Ekonomi
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
Indikator 7.1.1* Rasio Elektrifikasi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik. Akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai banyak pembangunan berkelanjutan dari pengentasan kemiskinan melalui kemajuan dalam kesehatan, pendidikan, pasokan air dan industrialisasi untuk mitigasi perubahan iklim.

Gambar IV.17
Rasio Elektrifikasi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



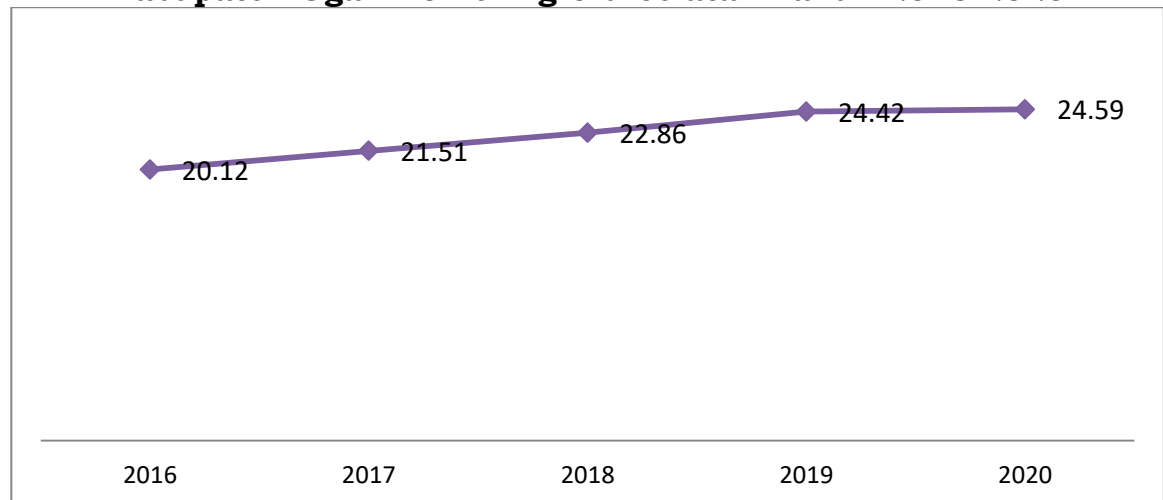
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Indikator 8.1.1.(a). PDB per kapita

Meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif, nilai PDRB per kapita di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selalu

mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mencapai angka 24,59 juta rupiah per tahun.

Gambar IV.18
PDRB Per Kapita ADHB (juta rupiah)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

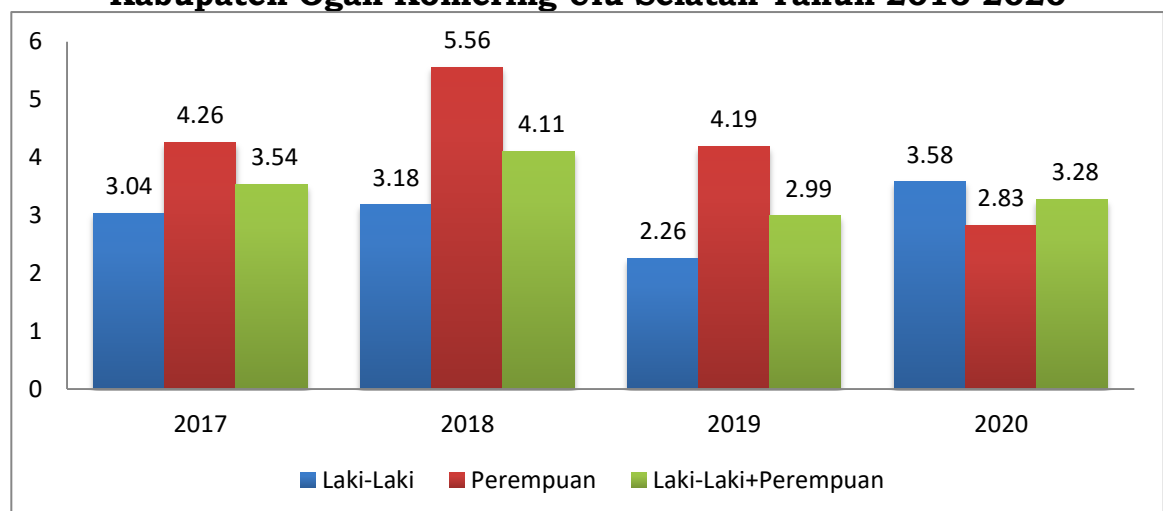


Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Indikator 8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Seperti halnya pertumbuhan ekonomi, selama kurun waktu 2017-2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga mengalami fluktuasi. Secara umum, TPT perempuan selalu lebih tinggi daripada TPT laki-laki hal ini cukup wajar mengingat adanya tuntutan untuk memenuhi kewajiban mengurus rumah tangga bagi perempuan, dan sedikitnya pilihan lapangan pekerjaan bagi perempuan juga menyumbang hal ini.

Gambar IV.19
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



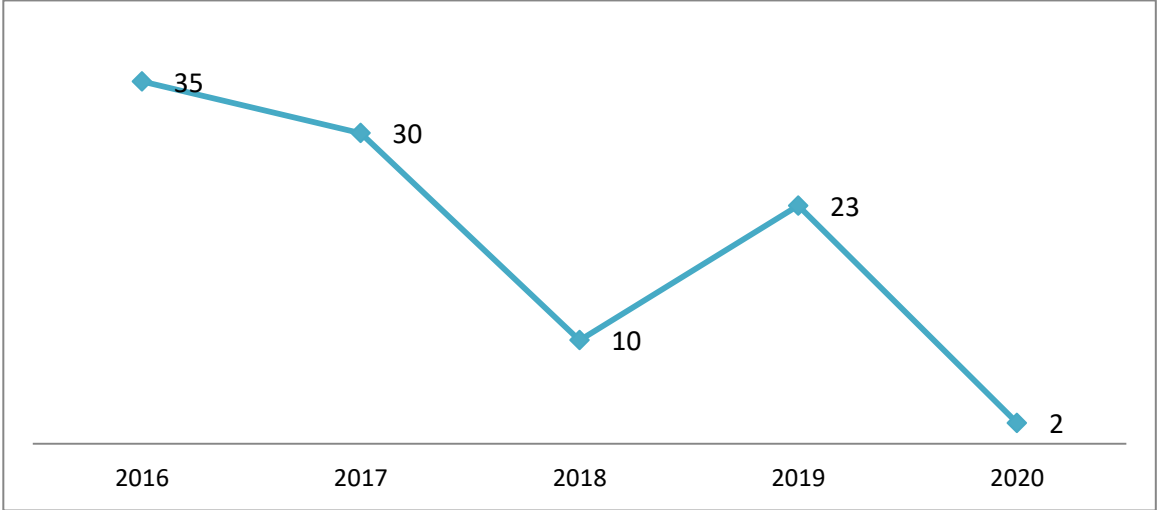
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021



Indikator 8.9.1.(a) Jumlah Wisatawan Mancanegara

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ada sebanyak 2 pengunjung.

Gambar IV.20
Jumlah Wisatawan Mancanegara
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



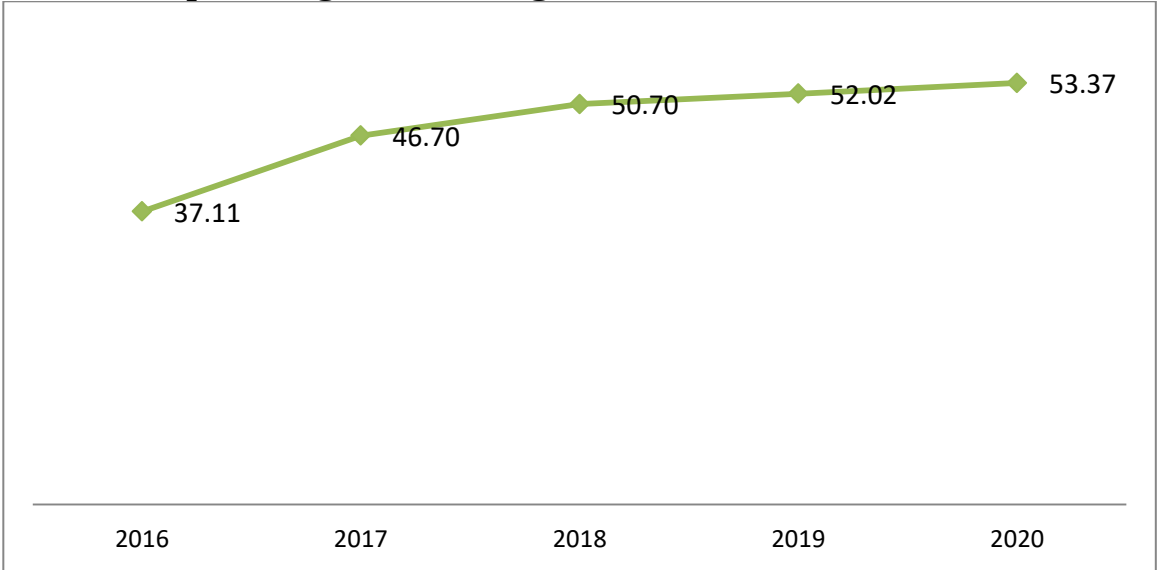
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2021

Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Indikator 9.1.1.(a). Kondisi Mantap Jalan Nasional

Sampai tahun 2020, tidak ada jalan dengan tingkat kewenangan negara/nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Panjang jalan mencapai 626,870 km dan seluruhnya merupakan jalan dengan tingkat kewenangan Kabupaten. Dari total panjang jalan tersebut, 53,37% berstatus baik.

Gambar IV.21
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

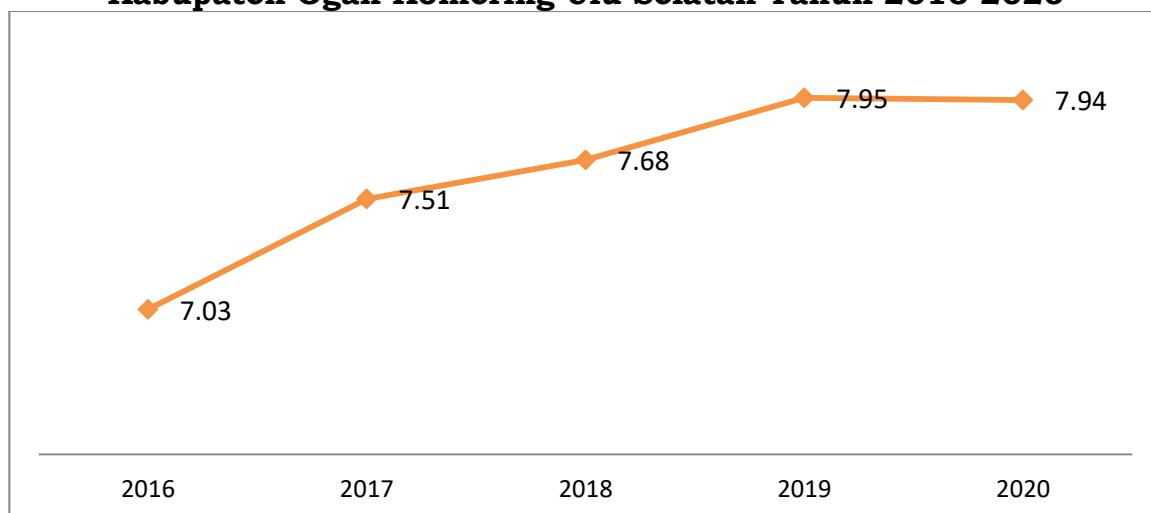


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

9.2.1.(a) Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur

Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur digunakan untuk mengetahui apakah terjadi kenaikan/penurunan dari nilai tambah industri manufaktur pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB sektor industri manufaktur di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyentuh angka 7,94%.

Gambar IV.22
Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



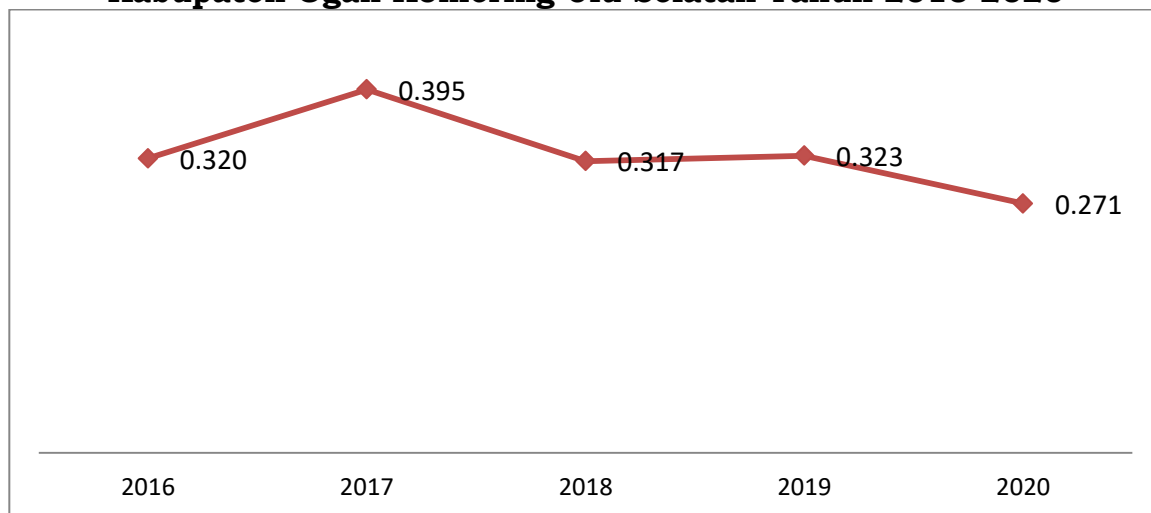
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan

Indikator 10.1.1* Koefisien Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah gini ratio. Nilai gini ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan semakin tinggi ketimpangan yang terjadi.

Gambar IV.23
Koefisien Gini
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

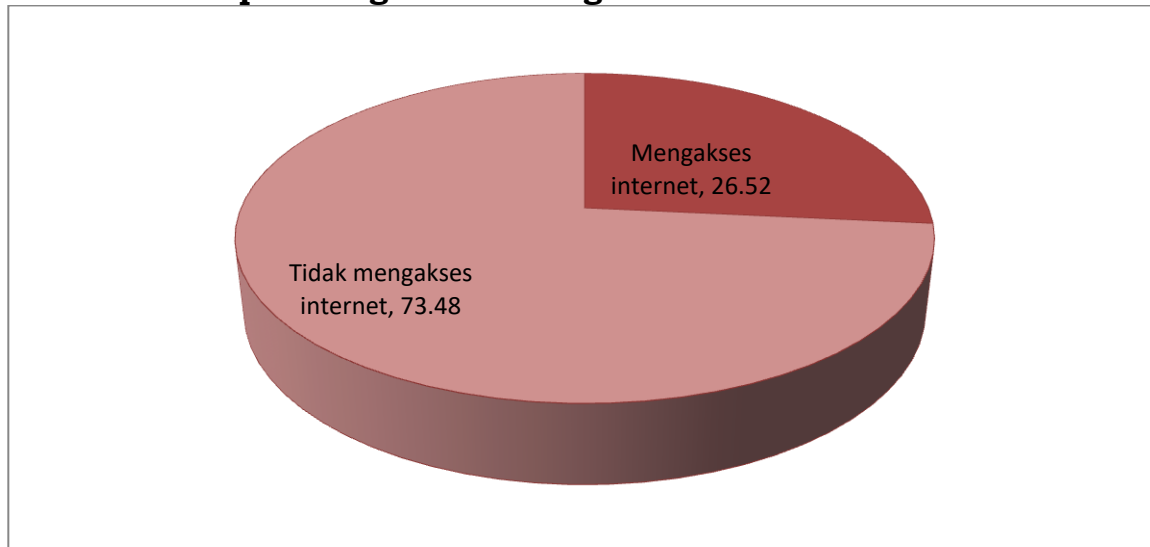
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

17.8.1* Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet

Pada tahun 2020, sebanyak 26,52% penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sudah mengakses internet.

Gambar IV.24

Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2021

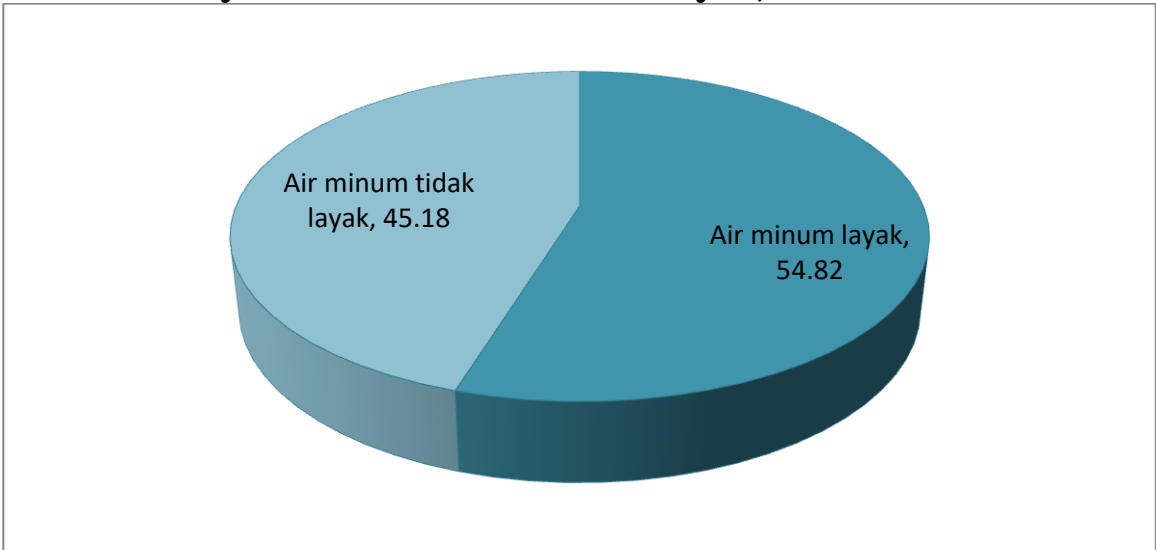
Pilar 3 Pembangunan Lingkungan

Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Indikator 6.1.1.(a). Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak

Ketersediaan sumber air minum yang layak merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap manusia. Sumber air minum yang layak sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat terutama anak-anak, bila sumber air minum yang layak tidak tersedia maka anak-anak akan rentan terkena berbagai macam penyakit khususnya diare. Hal ini akan membuat anak-anak sulit untuk tumbuh dan berkembang serta mencapai potensi terbaik mereka dan dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan implikasi serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kondisi ketersediaan sumber air minum layak dan berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus lebih diperhatikan lagi karena di tahun 2020 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak baru separuh dari seluruh penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Gambar IV.25
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap
Layanan Sumber Air Minum Layak, Tahun 2020

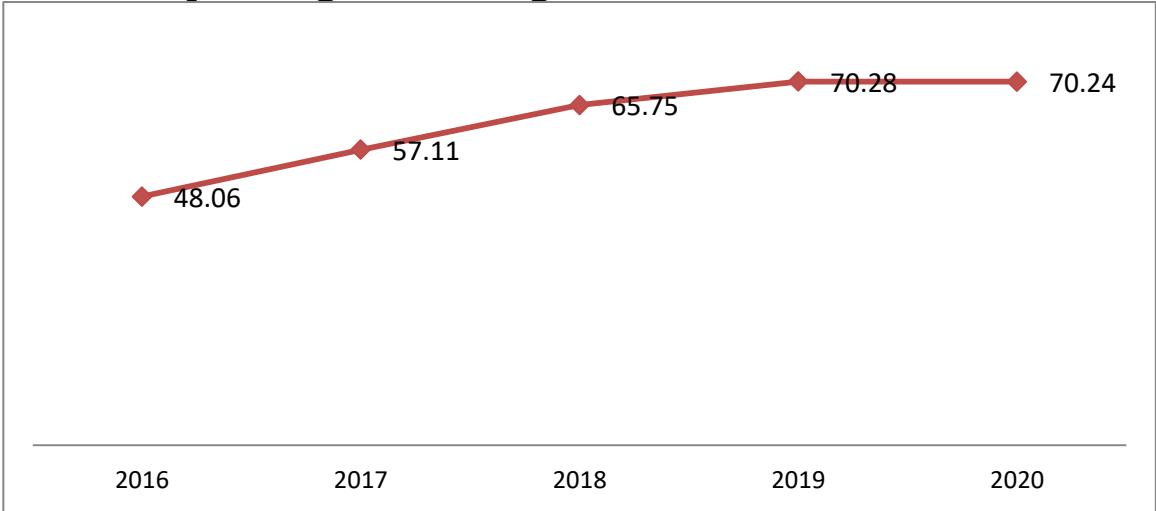


Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan
Indikator 11.1.1.(a) Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses
Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau

Rumah layak huni merupakan indikator komposit dari beberapa indikator yaitu air minum layak, sanitasi layak, kecukupan luas lantai bangunan, dan kualitas perumahan (jenis atap terluas, jenis dinding terluas, jenis lantai terluas, dan sumber penerangan).

Gambar IV.26
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses
Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



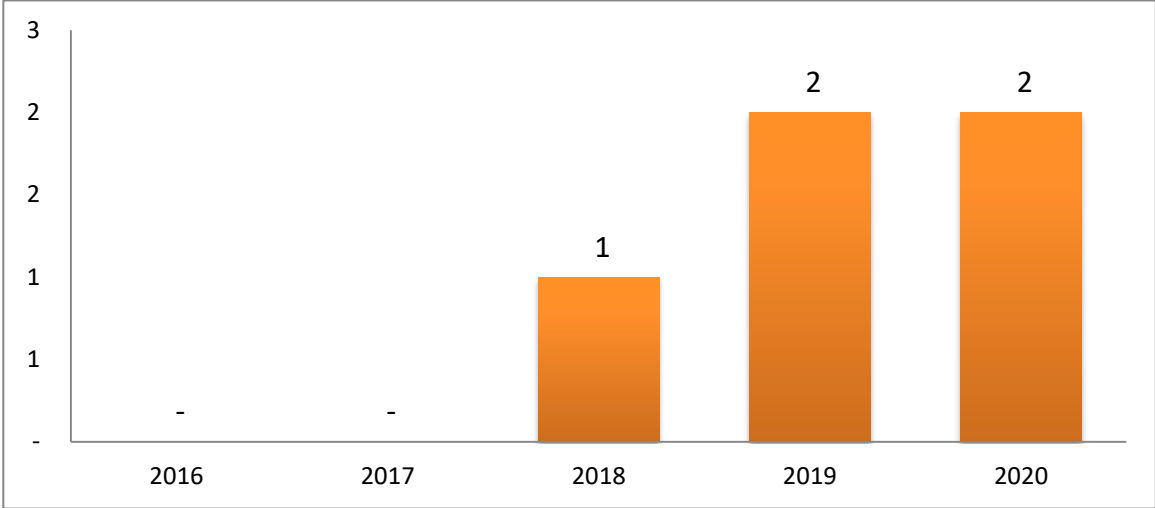
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2021



11.5.1.(b) Jumlah Kota Tangguh Bencana Yang Terbentuk

Pada tahun 2020, hanya ada dua desa tangguh bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dua Desa tersebut adalah Desa Cukoh Nau dan Desa Sadau Jaya Kecamatan Sungai Are.

Gambar IV.27
Jumlah Desa Tangguh Bencana Yang Terbentuk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: BPBD, Tahun 2021

11.5.1.(c) Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Serta Kebencanaan

Hingga tahun 2020, terdapat sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu WFR/Deteksi Gempa BMKG.

Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab

Data untuk indikator ini belum tersedia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Tujuan 13 Perubahan Iklim

13.1.1* Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, setidaknya ada dua dokumen terkait, yaitu: (1) Rencana Kontigensi Menghadapi Bencana Banjir Kabupaten OKU Selatan, dan (2) Kajian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Kabupaten OKU Selatan.

Tujuan 14 Ekosistem Laut

14.b.1.(b). Jumlah Nelayan Yang Terlindungi

Pada tahun 2020 ada delapan pelaku usaha perikanan yang mendapat perlindungan. Pelaku usaha perikanan yang dimaksud mencakup nelayan dan pembudidaya ikan.



Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Data untuk indikator ini belum tersedia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

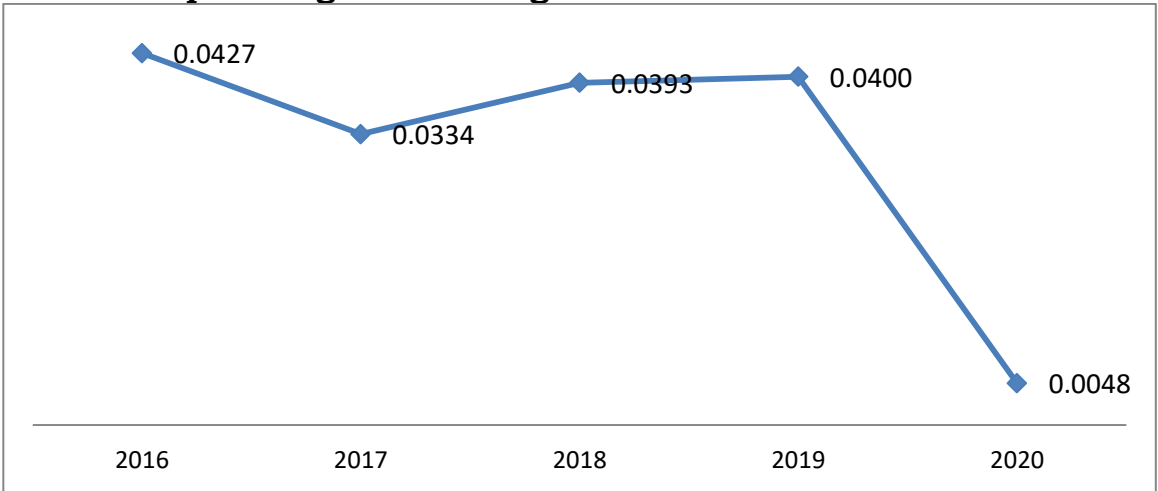
Pilar 4 Pembangunan Hukum dan Tata Negara

Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

16.1.3.(a) Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 bulan Terakhir

Jumlah korban tindak kejahatan kekerasan selama satu tahun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2020 berjumlah 20 korban atau sekitar 0,0048% dari total penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan jumlah korban pada tahun 2019 sebesar 0,04%.

Gambar IV.28
Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban
Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

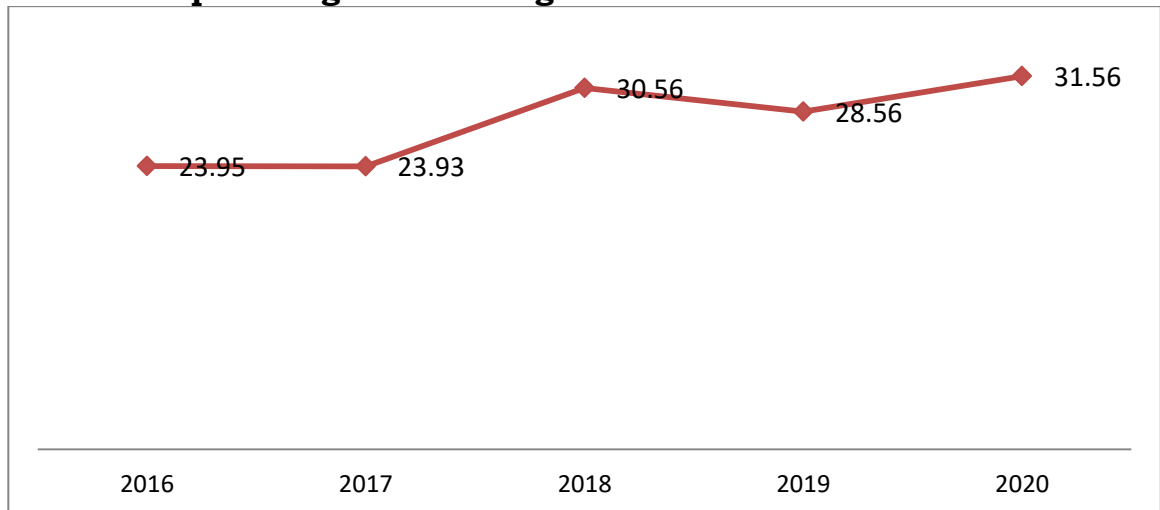


Sumber: Polisi Resort Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2021

16.6.1* Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran Yang Disetujui

Pengeluaran utama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah urusan kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 2020, kedua urusan ini memiliki total pengeluaran sebesar 31,56% anggaran yang disetujui.

Gambar IV.29
Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah
Terhadap Anggaran Yang Disetujui
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2021

4.1.6. Telaahan KLHS

4.1.6.1. Skenario dan Rekomendasi Daya Dukung dan Daya Tampung

Pada program RPJMD yang berbasis KLHS banyak berdampak negatif terhadap lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang dapat mempengaruhi daya dukung dan daya tampung suatu wilayah yang memiliki layanan ekosistem tinggi khususnya terkait sektor yang sangat vital terhadap pembangunan seperti pangan dan air, pengembangan infrastruktur, pemukiman dan kawasan budidaya lainnya, tentunya akan mempengaruhi ketersediaan sektor tersebut jika dikembangkan pada kawasan yang memiliki layanan ekosistem tinggi.

a. Daya Dukung Air Permukaan

Skenario yang dibangun dalam perhitungan daya dukung air, adalah sebagai berikut:

1. Perubahan tutupan lahan sesuai dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang mana terjadi peningkatan luas kawasan lahan basah dan peningkatan pemukiman;
2. Pertambahan penduduk dengan mengikuti pertumbuhan saat ini yang akan meningkatkan kebutuhan air untuk kebutuhan rumah tangga;
3. Peningkatan luasan kawasan peruntukkan industri yang akan meningkatkan kebutuhan air bersih untuk industri dengan pendekatan perhitungan kebutuhan dari jumlah tenaga kerja industri.



Untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hingga tahun-tahun yang akan datang, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencapai ketersediaan air yang ideal antara lain, sebagai berikut:

1. Diperlukan suatu kebijakan didasarkan konsep *social learning* dimana kebijakan akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang perlunya menjaga kelestarian sumber daya air serta penatagunaan sumber daya air
2. Mengendalikan pembangunan lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun, khususnya untuk daerah yang berfungsi sebagai kawasan resapan air dan kawasan lindung dan melakukan pembuatan sumur resapan kolektif maupun sumur resapan individual
3. Perbaikan kualitas air permukaan, yaitu dengan memperketat peraturan dan pengawasan tentang maksimum beban limbah yang boleh dibuang ke sungai, dan melakukan DAS terpadu dengan penghijauan di hulu, mengutamakan kegiatan pertanian tumpang sari dan mengutamakan konsep hutan rakyat serta memperbaiki fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya dan kesesuaian lahan
4. Restorasi sungai dengan peningkatan renaturalisasi atau revitalisasi yang dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan hidrolik dan ekologi serta mempertahankan kualitas embung dengan menjaga kelestariannya guna berkelanjutan pasukan air.
5. Mengoptimalisasi fungsi PDAM untuk memudahkan perhitungan kebutuhan air masyarakat dan proyeksi kebutuhan air yang akan datang

b. Daya Dukung Pangan

Skenario daya dukung pangan tetap dan berkelanjutan menjadi wilayah swasembada pangan di Sumatera Selatan maka beberapa strategi yang perlu dikembangkan, adalah:

1. Menetapkan dan melindungi kawasan peruntukan pertanian lahan basah sesuai arahan RTRW melalui LP2B dan menerapkan indeks penanaman sampai dengan 2 per tahun.
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang ada saat ini agar lebih produktif dan lestari, baik secara kuantitas (luasan) maupun kualitas (kesuburan/produktivitas).
3. Revitalisasi untuk mengoptimalkan jaringan irigasi pada lahan sawah irigasi dan pembukaan jaringan baru pada lahan sawah tadah hujan.
4. Diversifikasi pangan perlu dilakukan agar supaya kecukupan pangan tetap terjadi.



c. Daya Dukung Fungsi Lindung

Berdasarkan rencana yang ditetapkan dalam rencana pola ruang koefisien lindung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan nilainya menurun menjadi 0,17. Kerusakan lingkungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bisa dipahami karena perkembangan kota yang pesat dengan maraknya permukiman, perkantoran dan pemanfaatan lahan untuk perkebunan rakyat baik sawit maupun karet, serta bekas kawasan tambang pasir di sungai tidak sesuai dengan sempadan sungai dan belum direklamasi. Oleh sebab itu agar skenario daya dukung fungsi lindung dapat terwujud sesuai dengan arahan tata ruang pada masa yang akan datang maka beberapa strategi yang perlu dikembangkan, adalah:

1. Mewujudkan peruntukkan kawasan lindung sesuai dengan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk mempertahankan daya dukung fungsi lindung pada masa yang akan datang.
2. Mewujudkan tutupan lahan yang sesuai dengan peruntukkan melalui upaya-upaya penanganan lahan kritis pada kawasan hutan dan kawasan lindung.
3. Bekerjasama dengan Provinsi untuk mendorong peningkatan lahan pada kawasan hutan baik hutan negara maupun hutan rakyat.

d. Daya Dukung Lahan Terbangun

DDLKB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada 2030 diperkirakan akan turun menjadi 2,67 dibanding tahun 2017 yang mencapai 22.031. Jika menggunakan skenario perkembangan yang linier maka pada tahun 2025 daya dukung lindung diperkirakan mencapai 5.07 atau turun sebesar 16.96 dari tahun 2017. Kondisi daya dukung dikatakan baik jika minimal adalah 3, dengan demikian maka perlu beberapa strategi yang harus dikembangkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk mempertahankan daya dukung bangunan pada kondisi baik melalui:

1. Penerapan 30% RTH pada kawasan terbangun terutama permukiman tetap menyediakan ruang terbuka, sebagai lahan resapan air.
2. Pembangunan kawasan perkotaan yang kompak dengan mendorong penggunaan bangunan vertikal sesuai kemampuan lahan untuk efisiensi penggunaan lahan terutama untuk kawasan peruntukkan permukiman perkotaan.



4.1.6.1.1. **Skenario Perubahan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sampai Tahun 2030**

Berdasarkan pada perhitungan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi daya dukung air, pangan, lindung dan lahan terbangun yang telah dilakukan. Maka perubahan pada masing-masing daya dukung lingkungan dapat dilihat pada Tabel IV.4 berikut.

Tabel IV.4
Skenario Perubahan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sampai Tahun 2030

No	Daya Dukung LH	2017	2025	2030	Keterangan
1.	Daya Dukung Air Permukaan	12,54	15,43	18,15	Leluasa dari potensi yang ada, dengan cukupnya mata air, dan melestarikan sumber daya air, memperketat peraturan dan pengawasan beban limbah ke badan air
2.	Daya Dukung Pangan	49,27	100,66	135,13	Mampu untuk melakukan swasembada pangan dan mampu memberikan kecukupan pangan dan kehidupan yang layak, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan lebih produktif dan lestari, baik secara kuantitas maupun kualitas dan sesuai arahan RTRW melalui LP2B
3.	Daya Dukung Fungsi Lindung	0,21	0,19	0,17	Turun, meningkatnya permukiman, industri dan perkantoran serta bekas kawasan tambang pasir di sungai tidak sesuai dengan sempadan sungai dan belum direklamasi.
4.	Daya Dukung Lahan Terbangun	22,031	5,07	2,07	Turun, adanya peningkatan peruntukan pemukiman dan kawasan peruntukan industri

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2020

4.1.6.1.2. **Skenario Sampah**

Perkiraan timbulan sampah sampai dengan tahun 2025 diperkirakan mencapai 106.717 ton per tahun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Asumsi peningkatan timbulan sampah tersebut berdasarkan perkiraan pertumbuhan penduduk yang mencapai 0,99% per tahun. Peningkatan persentase layanan sampah harus ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Dengan pelayanan pengangkutan yang tetap seperti saat ini, maka sampah yang akan dikelola di TPA pada tahun 2023 mencapai 10.671,7 ton per tahun atau naik sekitar 499,2 ton dari tahun 2019.

Untuk mewujudkan peningkatan layanan sampah di atas maka perlu dikembangkan beberapa strategi berikut:



1. Peningkatan layanan untuk perkotaan mencapai 100% sedangkan di perdesaan sekitar 20%.
2. Mereduksi sampah di tingkat sumber dengan menerapkan bank sampah dan TPS 3R.
3. Mengembangkan TPST dalam skala beberapa Kecamatan dengan konsep pengelolaan 3R dengan ditambah landfill.
4. Mengembangkan TPA sebagai penampungan residu dari TPST serta mengembangkan teknologi PLTSa dan teknologi lain yang dapat mereduksi sampah di TPA.

4.1.6.1.3. Kecenderungan Perubahan Lahan Kedepan

Kecendrungan perubahan perubahan lahan pada masa yang akan datang digunakan pendekatan lahan eksiting tahun 2019 dengan rencana pola ruang dalam RTRW Kabupaten sampai dengan tahun 2030. Perubahan lahan hanya didasarkan pada komposisi tutupan lahan tahun 2019 dengan rencana pola ruang tahun 2030. Berikut adalah perbandingan luasan lahannya.

Tabel IV.5
Proyeksi Perubahan Tutupan Lahan 2019 dan 2030

Rencana Pola Ruang	2017	2030	Perubahan	Keterangan
Kawasan Suaka Marga Satwa	44.970,24	44.970,24	0,000	Tetap
Kawasan Hutan Lindung	128.368,54	128.368,54	0,000	Tetap
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	10.238,81	10.238,81	0,000	Tetap
Kawasan Hutan Produksi Tetap	17.845,15	17.845,15	0,000	Tetap
Kawasan Peruntukan industri	21.135.390	28.744.130,4	7.608.740,4	Industri

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2020

4.1.6.2. Skenario dan Rekomendasi dengan Upaya Tambahan

Skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan adalah skenario dan rekomendasi yang muncul berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk indikator yang belum mencapai target RPJMN 2019 serta indikator yang belum memiliki data.

Dari 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ada 83 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target dan 26 indikator belum memiliki data serta 43 indikator yang belum masuk dalam target RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

4.1.6.3. Skenario dan Rekomendasi Tanpa Upaya Tambahan

Alternatif skenario tanpa upaya tambahan adalah bentuk-bentuk skenario pilihan yang dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian indikator yang telah mencapai target nasional. Dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten, 68



diantaranya telah mencapai target nasional. Berikut adalah beberapa alternatif skenario tanpa upaya tambahan yang dapat dirumuskan:

1. Mempertahankan program dan kegiatan untuk pelaksanaan seluruh TPB yang sudah mencapai target nasional (*business as usual*):

Skenario pertama untuk TPB yang telah mencapai target nasional adalah dengan mempertahankan alokasi APBD untuk pelaksanaan TPB. Asumsi yang digunakan untuk skenario ini adalah tersedianya anggaran yang cukup bagi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan indikator TPB, termasuk indikator-indikator yang telah mencapai target nasional. Pertimbangan penerapan skenario ini adalah, belum semua indikator yang telah mencapai target nasional di Ogan Komering Ulu Selatan cukup kuat untuk dibiarkan tanpa intervensi lanjutan. Sehingga masih dibutuhkan penganggaran lanjutan. Dikhawatirkan apabila tidak dianggarkan pada APBD capaian yang selisihnya masih cukup kecil tersebut dengan target masih akan mengalami penurunan pencapaian

2. Mempertahankan program dan kegiatan untuk indikator TPB yang sudah mencapai target nasional, berdasarkan skala prioritas

Skenario kedua untuk TPB yang sudah mencapai target nasional adalah dengan tetap melaksanakan program dan kegiatan yang sudah mencapai target nasional. Kegiatan-kegiatan untuk pelaksanaan indikator yang telah mencapai target nasional akan tetap dialokasikan, namun tidak secara keseluruhan. Namun demikian, tidak seluruh indikator yang telah mencapai target nasional akan dialokasikan. Harus ditentukan skala prioritas untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Asumsi ini dipilih dengan catatan karena adanya keterbatasan anggaran oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan TPB yang sudah mencapai target nasional. Sehingga hanya beberapa kegiatan yang dianggap prioritas yang masih harus dialokasikan ke dalam program dan kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Adapun berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 660/0282/DLHP/B.I/2021 perihal validasi KLHS RPJMD Kabupaten OKU Selatan, dengan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan agar menyusun Daya Dukung dan Daya Tamping Lingkungan Hidup (DDDTLH) dengan skala 1 : 50.000 dan RPPLH sebagaimana amanat pasal 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam waktu 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan agar menyusun dan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam waktu 2 (dua) tahun.



3. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memperketat pemberian izin lingkungan.
4. Pengelolaan air tanah yang meliputi rencana pemanfaatan, *recharging* (pengisian kembali) dan pengendalian pemanfaatannya agar dijadikan kriteria penting dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

4.1.7. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan *Virus Corona (Covid-19/Corona Virus Disease 2019)* sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran *Covid-19* ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh Provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)* sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* baik pada seluruh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan *Covid-19* sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran *Covid-19* khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi *Covid-19* ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemik.

Kebijakan yang sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian adalah adanya kebijakan *Work From Home*, *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah



meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

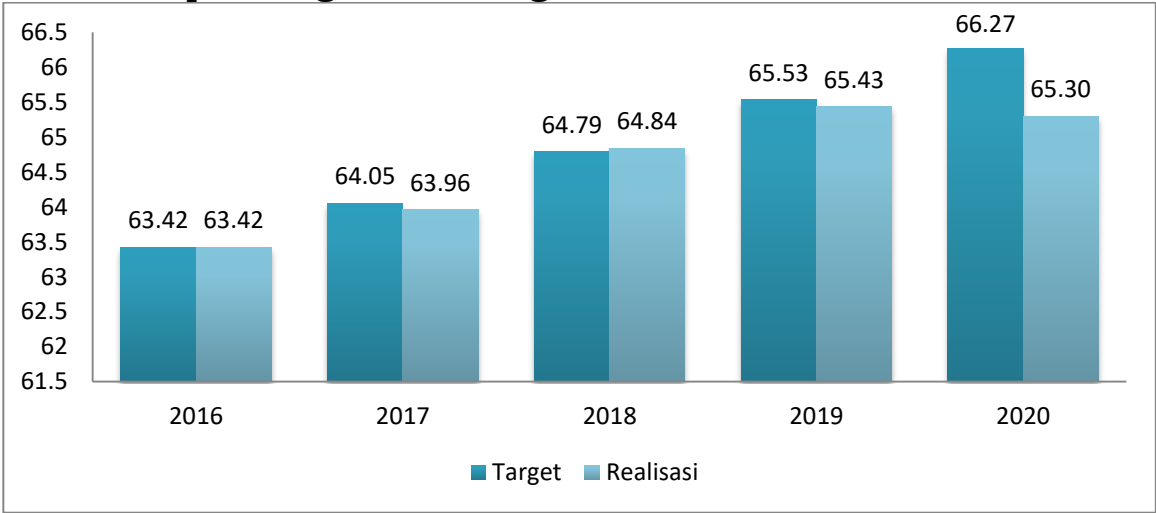
4.1.8. Permasalahan Indikator Makro

Perkembangan capaian indikator makro Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan IPM menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dilihat dari trennya, IPM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami kenaikan. Dalam lima tahun (2016-2020) terjadi kenaikan 1,88 poin. Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pada periode 2019-2020, pembangunan manusia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami kontraksi sebesar 0,13%.

Gambar IV.30
Target dan Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

2. Angka Kemiskinan

Perkembangan indikator persentase masyarakat miskin menunjukkan bahwa trend capaiannya belum begitu baik karena belum mampu mencapai target yang diinginkan. Tahun 2020 target penurunan kemiskinan dengan angka yang optimis yaitu 9,32% tetapi kemiskinan meningkat menjadi 10,85% naik sebesar 0,32% dari tahun 2019.

Gambar IV.31
Target dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

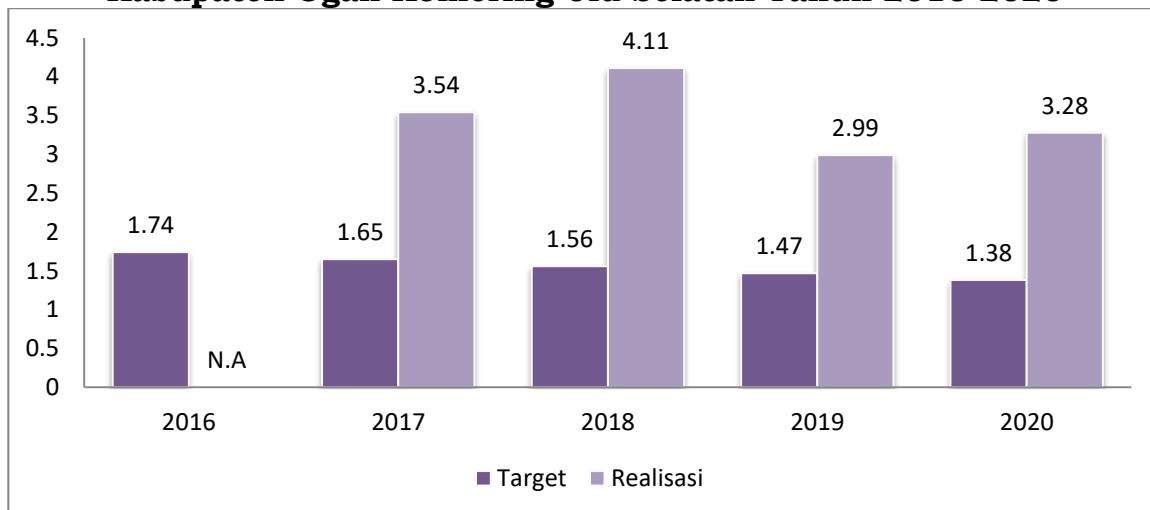


Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

3. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka juga masih menjadi problema di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, angka maksimal yang seharusnya menjadi target yaitu 1,38%, namun pada tahun 2020 hal tersebut tidak bisa tercapai, dengan realisasi sebesar 3,28% akan tetapi masih lebih baik dari angka Provinsi yang mencapai 5,51%.

Gambar IV.32
Target dan Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



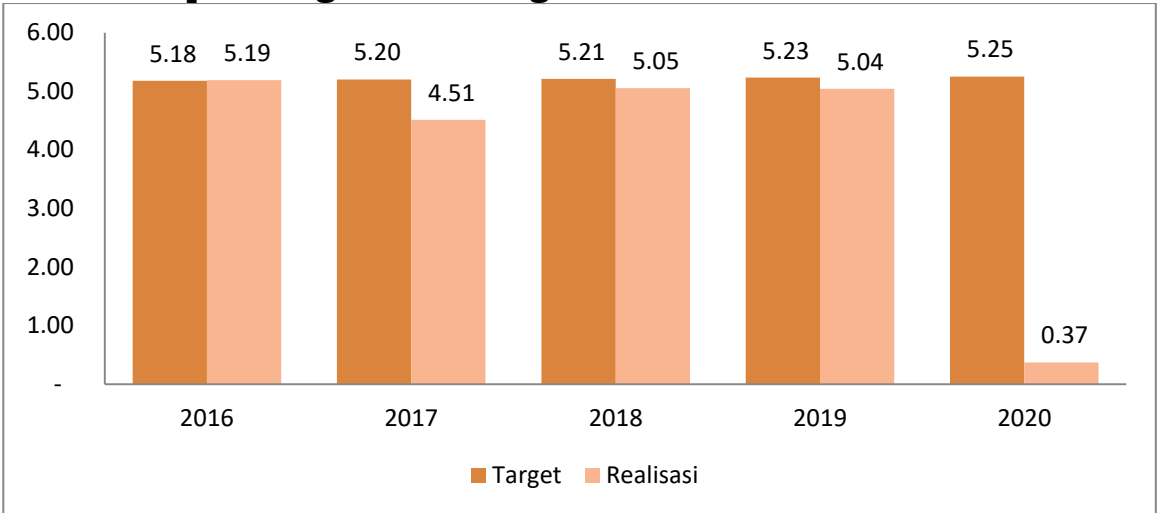
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan trend capaiannya belum begitu baik karena belum mampu mencapai target yang diinginkan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup ekstrim, yaitu dari 5,04% pada tahun 2019 menjadi 0,37% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan terjadinya pandemi

Covid-19 yang menghambat beberapa kegiatan ekonomi pada tahun 2020.

Gambar IV.33
Target dan Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020

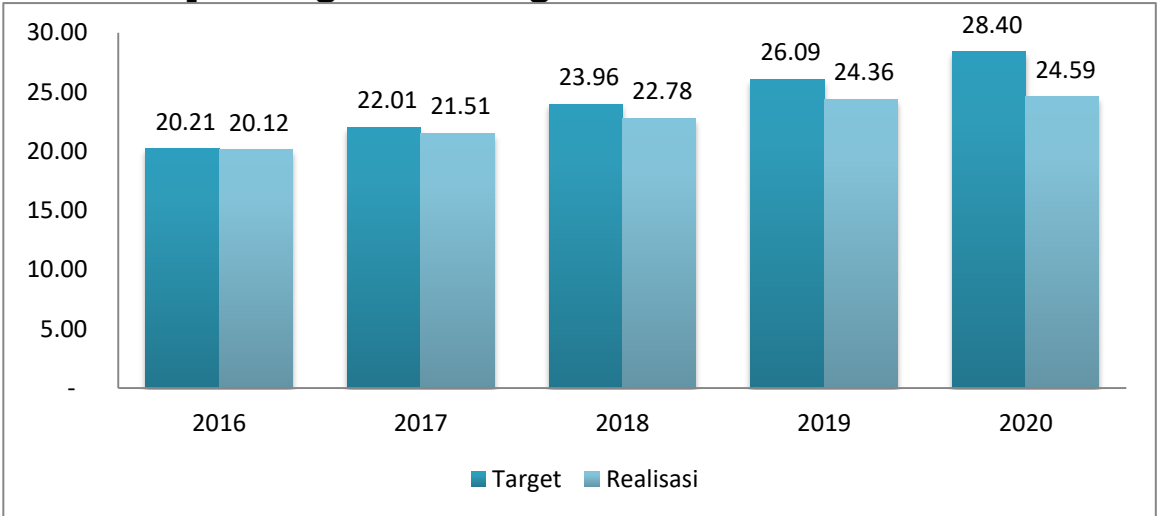


Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

5. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita mengalami peningkatan di setiap tahunnya di mana hal ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mencapai 24,59 juta rupiah per tahun per kapita. Namun demikian belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan.

Gambar IV.34
Target dan Capaian Indikator Pendapatan Per Kapita
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

6. Ketimpangan Pendapatan

Gini rasio atau tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Tahun 2020 sebesar 0,271 indeks, telah mencapai target yaitu 0,290 indeks.

Gambar IV.35
Target dan Capaian Indikator Indeks Gini
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

4.1.9. Permasalahan Per Urusan

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- Belum optimalnya tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilihat dari angka rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah yang mencapai 7,84 tahun masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan (8,24 tahun) maupun angka nasional (8,48 tahun)..
- Belum optimalnya harapan lama sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2020 sebesar 11,75 tahun, masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan (12,45 tahun) maupun angka nasional (12,98 tahun).
- Belum optimalnya angka partisipasi kasar (APK) PAUD pada tahun 2020 baru sebesar 47,62%.
- Belum optimalnya angka partisipasi kasar (APK) tingkat pendidikan SLTP/MTs pada tahun 2020 sebesar 87,88%, sedangkan Provinsi sebesar 88,78%.
- Belum optimalnya angka partisipasi murni (APM) tingkat pendidikan SLTP/MTs pada tahun 2020 sebesar 78,68%, sedangkan Provinsi sebesar 77,97%.
- Belum optimalnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2020 sebesar 51,93%.
- Belum optimalnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2020 sebesar 43,01%.
- Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV belum mencapai 100% pada tahun 2020 dan hanya sebesar 75,11%.



- i. Belum optimalnya pencapaian pemenuhan SPM PAUD pada tahun 2020 sebesar 47,62%.
- j. Belum optimalnya pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan SD pada tahun 2020 sebesar 84.95%.
- k. Belum optimalnya pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan SMP pada tahun 2020 sebesar 56,08%.
- l. Belum optimalnya pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2020 sebesar 2%.

2) Kesehatan

- a. Belum optimalnya angka harapan hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tahun 2020 baru sebesar 67,04 tahun, sedangkan Provinsi 69,88 tahun.
- b. Masih tingginya persentase balita gizi buruk pada tahun 2020 sebesar 0,420% atau sebanyak 158 kasus.
- c. Masih tinggi persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan pada tahun 2020 sebesar 17,46%.
- d. Masih tinggi angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2020 yaitu sebanyak 46 kasus.
- e. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan belum mencapai 100% pada tahun 2020 baru sebesar 94,92%.
- f. Belum optimalnya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA pada tahun 2020 sebesar 32.80%.
- g. Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2020 sebesar 77,68%.
- h. Masih tingginya persentase stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita pada tahun 2020 sebesar 2,79%.
- i. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil belum mencapai 100% pada tahun 2020 baru sebesar 97,12%.
- j. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan belum mencapai 100% pada tahun 2020 baru sebesar 94,92%.
- k. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir belum mencapai 100% pada tahun 2020 baru sebesar 84,32%.
- l. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar belum mencapai 100% pada tahun 2020 baru sebesar 92,07%.
- m. Masih rendahnya persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 hanya sebesar 11%.

- n. Masih rendahnya persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 hanya sebesar 3,23%.
- o. Masih rendahnya persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 hanya sebesar 19,68%.
- p. Masih rendahnya persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 hanya sebesar 10,12%.
- q. Masih rendahnya persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 hanya sebesar 10,12%.
- r. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar belum mencapai 100% pada tahun 2020 baru sebesar 61,71%
- s. Masih rendahnya persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar pada tahun 2020 hanya sebesar 32,80%.
- t. Masih rendahnya persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar pada tahun 2020 hanya sebesar 4,03%

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih cukup tingginya kerusakan jalan pada tahun 2020 (53,37% jalan dalam kondisi baik).
- b. Belum optimalnya akses rumah tinggal bersanitasi sebesar 77,71% pada tahun 2020.
- c. Belum optimalnya persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 67,25%.
- d. Belum optimalnya penduduk berakses air minum sebesar 83,26% pada tahun 2020.
- e. Belum optimalnya persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak pada tahun 2020 sebesar 54,82%.
- f. Belum optimalnya capaian pelayanan SPALD-S akses dasar air limbah domestik pada tahun 2020 sebesar 71,46%.
- g. Belum optimalnya capaian pelayanan SPALD- S akses aman air limbah domestik pada tahun 2020 sebesar 63,38%.
- h. Belum optimalnya capaian pelayanan SPALD-T akses aman air limbah domestik pada tahun 2020 sebesar 66,43%.
- i. Belum optimalnya capaian pelayanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2020 sebesar 63,75%.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang belum tertangani seluas 127,97 ha dari total luas wilayah permukiman seluas 3.474,25 ha.



- b. Belum optimalnya penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota belum mencapai 100% pada tahun 2020 sebesar 75%.
- c. Masih rendahnya fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2019 hanya sebesar 10%.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Masih tingginya kejadian bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- b. Belum optimalnya cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 0.1679% pada tahun 2020.
- c. Belum optimalnya tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) sebesar 75% pada tahun 2020.
- d. Masih sedikitnya Desa Tangguh Bencana, saat ini baru terdapat 2 Desa Tangguh Bencana yang terbentuk
- e. Masih kurangnya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
- f. Masih kurangnya Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
- g. Belum optimalnya pelatihan pencegahan dan mitigasi belum mencapai 100% pada tahun 2020 sebesar 0,02%.
- h. Belum optimalnya pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana belum mencapai 100% pada tahun 2020 sebesar 49,80%.
- i. Belum optimalnya penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- j. Belum optimalnya respon cepat darurat bencana belum mencapai 100% pada tahun 2020 sebesar 36,11%.
- k. Belum optimalnya aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana belum mencapai 100% pada tahun 2020 sebesar 34%.

6) Sosial

- a. Ketersediaan Basis Data Terpadu (BDT) belum terupdate secara berkelanjutan, sehingga jumlah PMKS yang tertangani masih sangat terbatas, hanya sebesar 28,33% pada tahun 2020.
- b. Belum adanya panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial.
- c. Belum optimalnya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial belum mencapai 100% pada tahun 2020 sebesar 66,67%.



- d. Belum optimalnya rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial belum mencapai 100% pada tahun 2020 hanya sebesar 28,57%.
- e. Belum optimalnya rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial belum mencapai 100% pada tahun 2020 sebesar 64%.
- f. Belum optimalnya rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial belum mencapai 100% pada tahun 2020 sebesar 50%.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

- a. Pendidikan tenaga kerja masih sangat rendah, sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya memiliki pendidikan sekolah dasar (SD) sebesar 39,39%, pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 20,76%. Diperparah lagi dengan tingginya persentase pekerja yang tidak/belum tamat SD sebesar 8,09%.
- b. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,28% pada tahun 2020.
- c. Masih rendahnya rasio kesempatan kerja sebesar 60,28% pada tahun 2020.
- d. Masih rendahnya upaya peningkatan keselamatan dan perlindungan kerja sebesar 39,93% pada tahun 2020.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dilihat dari pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 55,33%.
- b. Masih adanya kekerasan terhadap ibu dan anak dalam rumah tangga (KDRT), pada tahun 2020 sebanyak 53 kasus.
- c. Belum optimalnya angka rata-rata lama sekolah perempuan (7,76 tahun) pada tahun 2020 lebih rendah dari laki-laki (7,98 tahun).
- d. Masih rendahnya pengeluaran per kapita penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki.

3) Pangan

- a. Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan sebesar 31,17% pada tahun 2020.
- b. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

4) Lingkungan Hidup

- a. Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD).



- b. Belum optimalnya persentase timbunan sampah yang ditangani sebesar 76,89% pada tahun 2020.
- c. Belum adanya jumlah sampah yang terkurangi melalui 4R (*reuse, reduce, recycle, and replace*).
- d. Belum optimalnya persentase sampah yang tertangani sebesar 9,18% pada tahun 2020.
- e. Belum optimalnya peran swasta dalam pengelolaan sampah.
- f. Belum maksimalnya limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).

5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum optimalnya cakupan penerbitan e-KTP sebesar 52,12% pada tahun 2020

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Masih banyak jumlah Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal.
- b. Belum ada Desa berstatus swasembada.

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Masih tingginya angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) sebanyak 1,35% pada tahun 2020.
- b. Masih rendahnya cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) sebesar 30,07% pada tahun 2020.
- c. Masih rendahnya cakupan peserta KB aktif sebesar 69,03% tahun 2020.

8) Perhubungan

- a. Masih belum operasionalnya lapangan terbang Banding Agung.
- b. Masih sedikitnya pemasangan rambu-rambu.

9) Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya cakupan layanan telekomunikasi sebesar 49,80% pada tahun 2020.

10) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a. Masih rendahnya persentase koperasi aktif, hanya sebesar 18,33% pada tahun 2020.

11) Penanaman Modal

- a. Berkurangnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA).
- b. Belum optimalnya nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA).

12) Kepemudaan dan Olahraga

- a. Minimnya prestasi atlet Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke XII Tahun 2019 di Prabumulih.
- b. Belum optimalnya cakupan pembinaan olahraga.
- c. Belum optimalnya cakupan pelatih yang bersertifikasi.



13) Statistik

- a. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi.

14) Persandian

- a. Minimnya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah.

15) Kebudayaan

- a. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih rendah sebesar 4,88% pada tahun 2020.
- b. Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi belum ada.
- c. Cagar budaya yang dikelola secara terpadu belum ada.

16) Perpustakaan

- a. Gedung perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan belum ada.
- b. Belum ada pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

17) Kearsipan

- a. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku masih rendah.
- b. Gedung tempat penyimpanan arsip yang memenuhi standar nasional belum ada.
- c. Minimnya tenaga SDM kearsipan yang terlatih dalam pengelolaan arsip.

3. Urusan Pemerintah Pilihan

1) Pariwisata

- a. Pemasukan terhadap PAD yang masih minim sebesar 125 juta rupiah pada tahun 2020 dengan kontribusi terhadap keseluruhan PAD sebesar 0,27%.
- b. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur pariwisata serta dukungan amenities pariwisata seperti rumah makan, restoran, toko cinderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain di kawasan wisata Danau Ranau sebagai tuan rumah event internasional Grand Fondo yang menjadi agenda tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2) Pertanian

- a. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB fluktuatif dan cenderung turun.
- b. Belum optimalnya provitas padi di mana sebesar 5,03 ton/ha tahun 2019 turun menjadi sebesar 4,54 ton/ha pada tahun 2020
- c. Masih rendahnya cakupan bina kelompok petani sebesar 47,10% pada tahun 2020.

3) Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Belum optimalnya capaian rasio elektrifikasi hanya 67,62% masyarakat yang merasakan akses listrik pada tahun 2020.



4) Perdagangan

- a. Belum optimalnya cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal hanya sebesar 15,85% pada tahun 2020.
- b. Belum optimalnya kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB sebesar 22,50% pada tahun 2020.

5) Perindustrian

- a. Belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 7,94% pada tahun 2020.

6) Transmigrasi

- a. Belum optimalnya pengelolaan transmigran swakarsa.

7) Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya produksi perikanan sebesar 29,50% pada tahun 2020.
- b. Rendahnya cakupan bina kelompok nelayan.
- c. Belum optimalnya produksi perikanan kelompok nelayan.

4. Penunjang Urusan

1) Perencanaan Pembangunan

- a. Belum optimalnya sinergi sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik Pemerintah (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten) dan Non Pemerintah.

2) Keuangan

- a. Belum optimalnya perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung
- b. Belum optimalnya penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan turun sebesar 18,59% pada tahun 2020.

3) Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

- a. Belum optimalnya Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebanyak 37,23% pada tahun 2020.
- b. Belum optimalnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 5,73% pada tahun 2020.

4) Penelitian dan Pengembangan

- a. Indeks inovasi daerah baru sebesar 358.

5) Pengawasan

- a. Belum adanya survey indeks integritas pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (di level 2), skor maturitas SPIP sebesar 2,45.

6) Sekretariat Dewan

- a. Belum tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD



4.1.10. Permasalahan Utama

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan daerah memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Setelah menelaah kajian data dan informasi di Bab II serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh Gambaran Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yakni: **“Masih Belum Optimalnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan”**.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan, sebagai berikut:

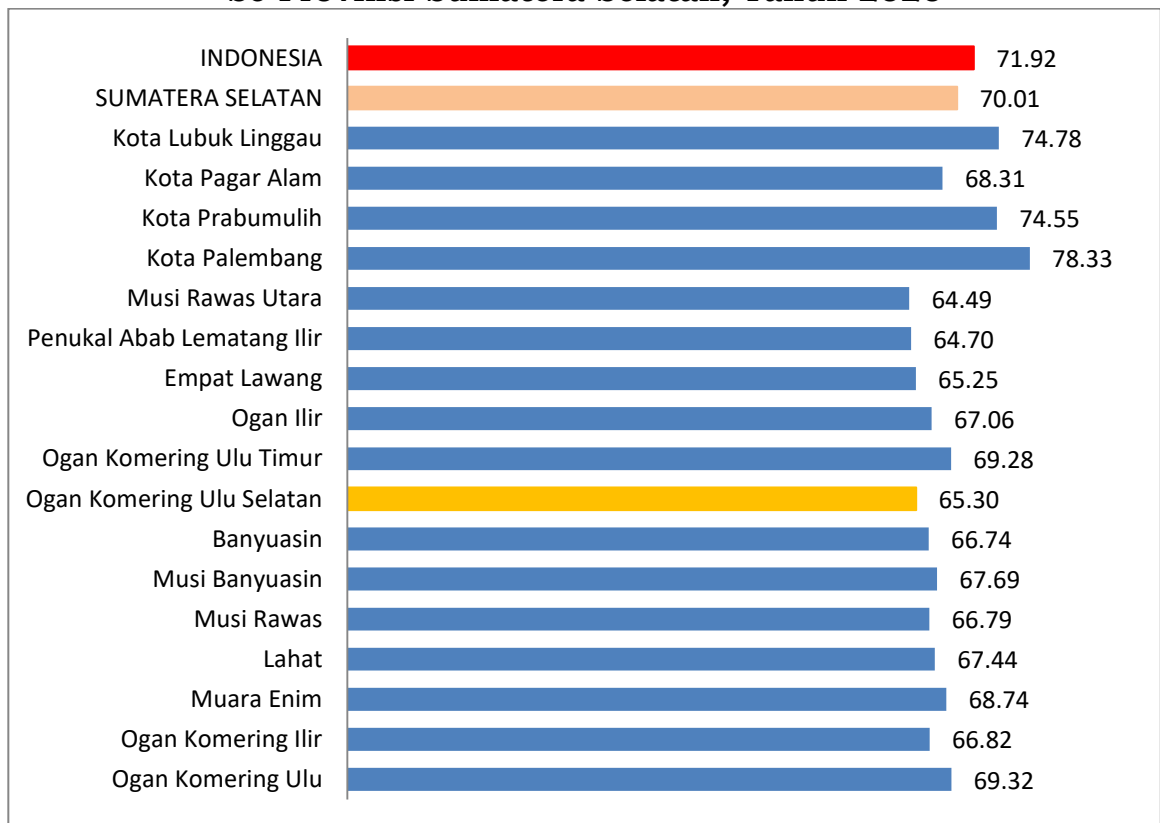
1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia;
2. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar;
3. Belum optimalnya kinerja perekonomian daerah;
4. Belum terwujudnya implementasi *good governance*; dan
5. Tingginya kemiskinan wilayah.

Dari lima permasalahan pokok daerah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam permasalahan dan akar masalah yang lebih spesifik. Penjabaran tersebut dilakukan untuk lebih menggali bagaimana capaian pembangunan daerah yang belum memenuhi harapan. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan sebagaimana diuraikan pada Bab II. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan hasil telaahan gambaran umum kondisi pembangunan daerah.

1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi dibidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Gambar IV.36
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2021

Angka tersebut mengindikasikan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di mana angka IPM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada pada urutan keempat terbawah dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan capaian IPM sebesar 65,30 pada tahun 2020. Angka ini cukup jauh jika dibandingkan dengan IPM Nasional yang mencapai 71,92 maupun angka IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 70,01.

Beberapa perhatian terhadap permasalahan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditengarai oleh belum optimalnya kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat, serta minimnya peran serta perempuan dalam pembangunan, dengan penjabaran sebagai berikut.

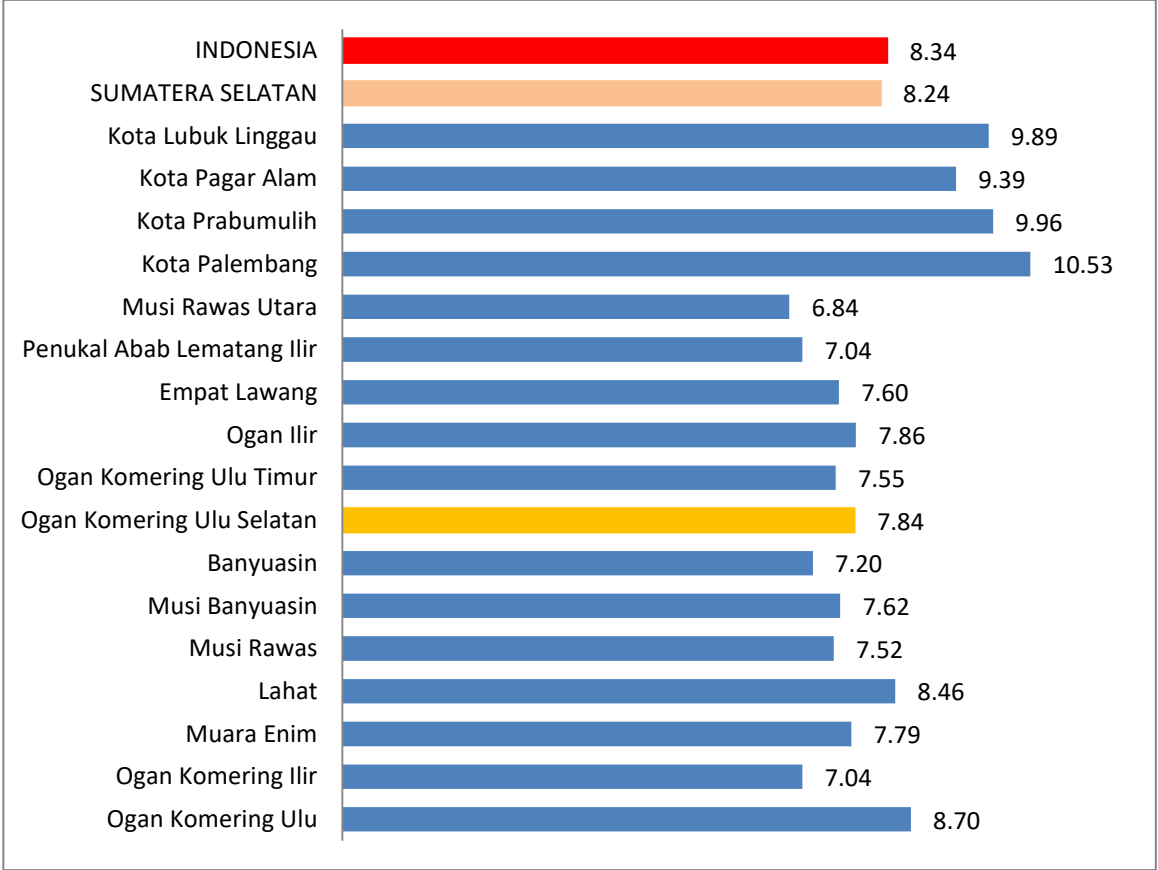
a. Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pengetahuan (pendidikan) diakui secara luas adalah unsur mendasar dari pembangunan manusia. Pembangunan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan pelayanan pendidikan dengan memberdayakan kemampuan lokal, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi keimanan dan ketakwaan.



Masih belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjadi poin utama dalam permasalahan urusan pendidikan. Masih minimnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjadi sorotan berbagai pihak dalam melihat pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk kemajuan masa depan masyarakat.

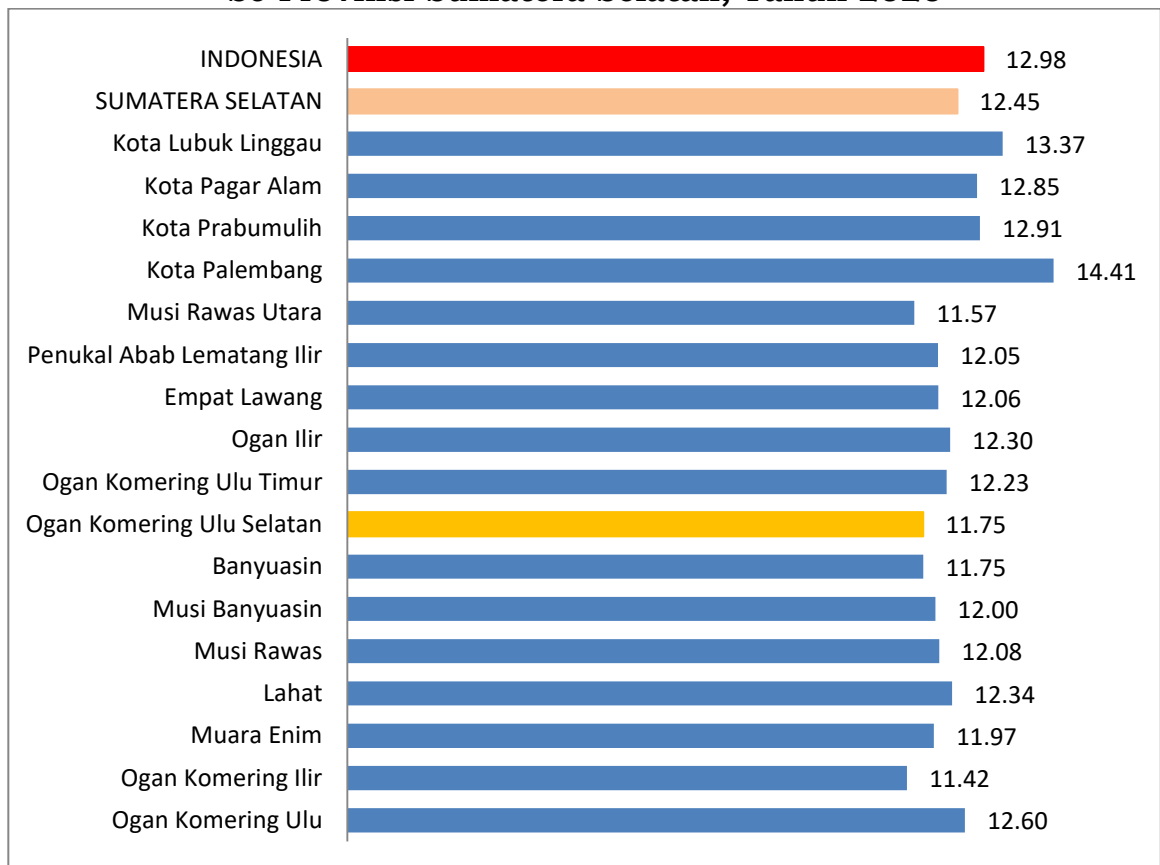
Gambar IV.37
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2021

Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang mencapai 7,84 tahun masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan (8,24 tahun) maupun angka nasional (8,34 tahun). Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya sebatas pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) kelas dua. Tentu saja angka ini masih jauh dari harapan bahkan belum menyentuh penyelesaian pendidikan dasar.

Gambar IV.38
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2021

Terlihat pula rendahnya harapan lama sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berada pada peringkat empat terbawah di Provinsi Sumatera Selatan dengan capaian 11,75 tahun. Kedua angka ini telah merepresentasikan pendidikan secara umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang masih perlu banyak pembenahan.

Masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kualitas, kuantitas dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan belum sepenuhnya terkuualifikasi dengan baik. Terlihat dari indikator persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV belum mencapai 100 persen dan hanya sejumlah 75,11%. Meskipun secara kuantitas sudah cukup, namun persebaran tenaga pendidik juga masih belum merata, terlebih dari sisi kualitasnya. Selain itu, kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan yang belum merata di semua jenjang pendidikan juga menjadi “pekerjaan rumah” bagi instansi yang menangannya.

b. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang utama dalam setiap aktivitas kehidupan manusia, dengan tubuh yang sehat maka manusia dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Pelayanan kesehatan

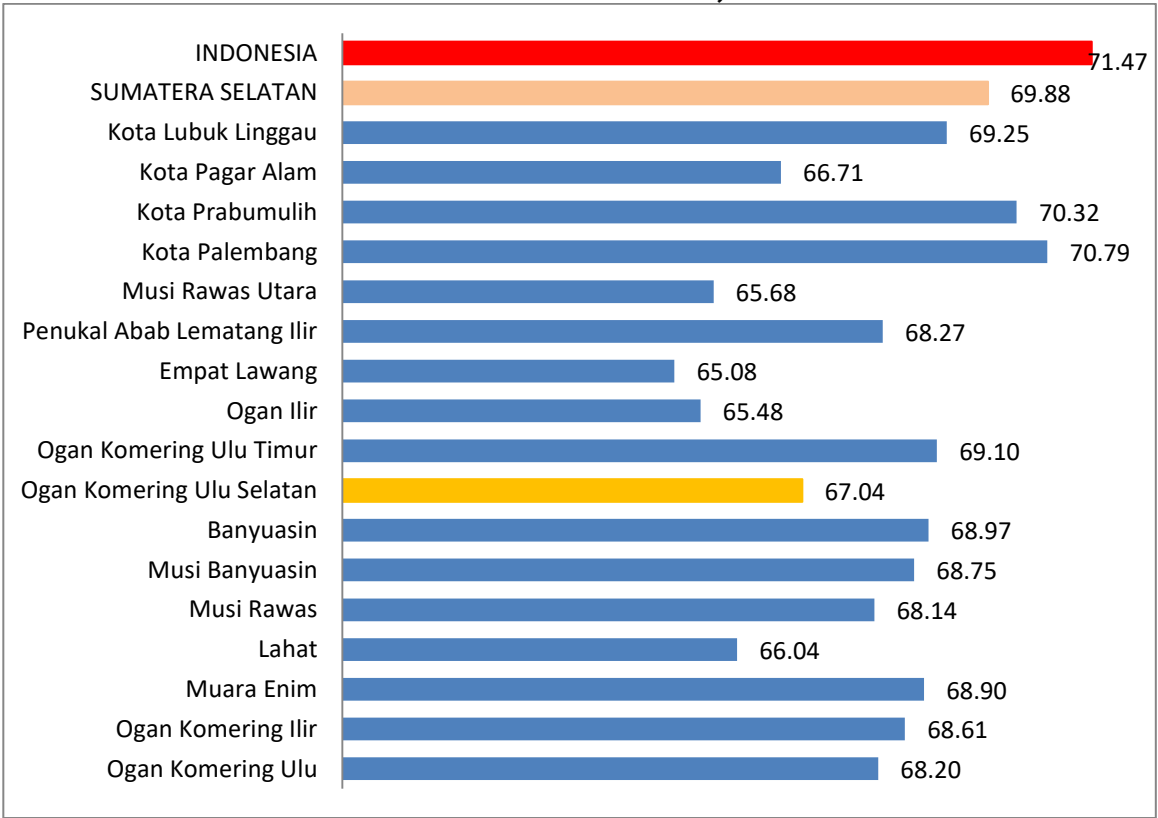


merupakan bagian dari tugas Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan. Melihat kondisi saat ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal, hal ini disebabkan pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Salah satu indikator yang mampu mengukur kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup (AHH) merupakan indikator penyusun indeks pembangunan manusia dalam bidang kesehatan di mana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Sebagai indikator yang dapat melihat derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan, AHH menjadi salah satu *impact* yang harus diperhatikan dalam upaya perumusan kebijakan bidang kesehatan daerah. Angka harapan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih berada di bawah rata-rata angka Provinsi maupun Nasional. Pada tahun 2020, Angka Harapan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama 67,04 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki kesempatan untuk hidup hingga berumur 66-67 tahun.

Gambar IV.39
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2021

Salah satu permasalahan mendasar pada pelayanan kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah belum meratanya tenaga



kesehatan terutama tenaga medis dan para medis hingga ke daerah sulit yang terlihat dari beberapa indikator cakupan layanan kesehatan yang masih berada di bawah 100%, seperti: cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (94,92%), cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) (83,01%), cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (32,80%), cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (77,68%), dan beberapa cakupan pelayanan puskesmas lainnya

c. Minimnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan

Dengan semakin besarnya peran perempuan dalam pembangunan maka pembangunan berbasis gender dengan memberdayakan perempuan secara otomatis akan meningkat. Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta politik.

Masih minimnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan menjadi permasalahan penting untuk dikemukakan dalam hal kesetaraan gender. Pada tahun 2020 hanya sebanyak 12,50% perempuan yang duduk di parlemen, peran perempuan dalam penciptaan pendapatan hanya sebesar 23,68%. Angka rata-rata lama sekolah perempuan (7,76 tahun) pada tahun 2020 lebih rendah dari laki-laki (7,98 tahun). Kesenjangan yang paling besar adalah pada komponen pengeluaran per kapita, penduduk laki-laki sebesar 12.180 juta rupiah sedangkan perempuan sebesar 7.360 juta rupiah. Selain itu, pencapaian skor indeks pemberdayaan gender yang kurang maksimal sebesar 55,33 sudah cukup mengindikasikan ketimpangan gender utamanya dapat dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan ekonomi.

2. Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam mempercepat proses pembangunan yakni sebagai roda penggerak keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini karena gerak laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, energi dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Dibutuhkan jaringan infrastruktur



yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah.

Beberapa perhatian terhadap permasalahan pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditengarai oleh belum terpenuhinya pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur dasar, dan masih belum optimalnya pemerataan aksesibilitas wilayah yang berkualitas, dengan penjabaran sebagai berikut.

a. Belum Terpenuhinya Pemerataan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar Kehidupan

Infrastruktur dasar kehidupan masyarakat merupakan faktor utama daya saing antar daerah karena belum optimalnya pemerataan infrastruktur akan menjadikan rendahnya kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur diupayakan cenderung lebih ke daerah yang pendapatan perkapitanya lebih rendah agar pembiayaan yang dikeluarkan menjadi minim, dan perbaikan infrastruktur juga diharapkan agar mengurangi kesenjangan, karena untuk mewujudkan ekonomi tidak sekedar tumbuh tinggi namun juga tumbuh secara inklusif dan adil.

Daerah perkotaan dan pedesaan merupakan satu kesatuan wilayah yang seharusnya menjadi perhatian khusus pihak yang berkepentingan dalam hal pembangunan ini, khususnya pembangunan perumahan dan permukiman. Seharusnya hal ini menjadi panduan untuk melaksanakan pemerataan dalam pembangunan antar keduanya. Tetapi yang kita temui di lapangan sekarang adalah semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan pada kota, sehingga daerah pedesaan semakin tertinggal. Pesatnya pembangunan perumahan diperkotaan banyak yang tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang kota, inilah yang menyebabkan keadaan perkotaan semakin hari semakin tidak jelas arah pengembangannya.

Belum optimalnya pemerataan berbagai fasilitas penunjang kehidupan masyarakat cukup terlihat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di mana fasilitas listrik kepada masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi dengan capaian hanya 67,62% masyarakat yang merasakan akses listrik. Selain itu, hanya sebanyak 83,26% masyarakat yang memiliki akses terhadap air bersih. Hal ini tentu menjadi fokus dalam penyediaan kebutuhan dasar kepada masyarakat agar merasakan hasil dari pembangunan daerah.



b. Belum Optimalnya Pemerataan Aksesibilitas Wilayah Yang Berkualitas

Peningkatan kualitas jaringan jalan dan penunjang aktivitas perhubungan yang baik, tentunya ditujukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melakukan aktivitas, baik ekonomi, sosial, maupun layanan pemerintahan, dan sekaligus memperkuat daya saing daerah. Namun dalam realitanya, pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih terkendala dengan berbagai sarana dan prasarana aksesibilitas wilayah yang belum optimal, seperti masih cukup tingginya kerusakan jalan (53,73% jalan dalam kondisi baik), belum optimalnya penggunaan sarana transportasi umum, dan sebagainya.

Selain itu, dari sisi komunikasi wilayah juga masih cukup terkendala. Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya sebesar 49,80% dengan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon sebanyak 78,22%.

3. Belum Optimalnya Kinerja Perekonomian Daerah

Perekonomian merupakan tulang punggung bagi terlaksananya pembangunan daerah khususnya dari segi pembiayaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pergerakan perekonomian diupayakan stabil dan memiliki trend meningkat dengan tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup. Seyogyanya, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan, serta didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berdaya saing, perlu adanya pemantapan kondisi perekonomian daerah khususnya ekonomi kerakyatan.

Kapasitas perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator makro laju pertumbuhan perekonomian daerah yang diturunkan dari produk domestik regional bruto wilayah. Perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum menunjukkan perkembangan yang optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai tambah produk (PDRB) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di mana pada tahun 2020 hanya mencapai 8,97 triliun rupiah atau hanya menyumbang 1,96% struktur perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan.

Meskipun belum memiliki daya saing perekonomian yang baik, namun ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terus tumbuh di mana mencapai 0,37% pada tahun 2020 lebih baik dari angka Provinsi.



Tabel IV.6
Perekonomian Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020

Wilayah	PDRB ADHB (Miliar Rp)	Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Wilayah Terhadap PDRB Sumsel
Ogan Komering Ulu	14832.94	(0.01)	3.24
Ogan Komering Ilir	29345.47	0.24	6.40
Muara Enim (Liot)	57756.89	0.03	12.60
Lahat	17364.77	0.36	3.79
Musi Rawas	19303.45	0.24	4.21
Musi Banyuasin	66515.38	(0.04)	14.51
Banyuasin	29193.61	0.13	6.37
Ogan Komering Ulu Selatan	8,975.76	0.37	1.96
Ogan Komering Ulu Timur	15229.54	0.41	3.32
Ogan Ilir	11344.18	0.14	2.47
Empat Lawang	5087.75	0.09	1.11
Penukal Abab Lematang Ilir	7158.13	0.28	1.56
Musi Rawas Utara	7197.60	0.37	1.57
Kota Palembang	155822.33	5.94	33.99
Kota Prabumulih	7878.00	0.18	1.72
Kota Pagar Alam	2787.20	0.01	0.61
Kota Lubuk Linggau	6734.11	(0.13)	1.47
Sumatera Selatan	458430.30	(0.11)	100.00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2021

Beberapa perhatian terhadap permasalahan perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditengarai oleh belum optimalnya penggalan potensi produk unggulan lokal, minimnya pengembangan kepariwisataan daerah, maupun potensi degradasi lingkungan hidup yang kian meningkat, dengan penjabaran sebagai berikut.

a. Belum Optimalnya Penggalan Potensi Produk Unggulan Lokal

Sektor unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sektor pertanian dan perdagangan dengan penyumbang PDRB tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Namun, optimalisasi dalam pengembangan potensi sektor tersebut dirasa masih belum mumpuni. Hal ini dikarenakan masih kurangnya SDM dalam pengelolaan potensi wilayah sebagai optimalisasi sektor agro wisata serta peningkatan ekonomi kreatif.

Selain itu, pengembangan usaha kecil dan menengah juga belum optimal dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Persentase koperasi aktif yang hanya sebesar 18,33%, tentu menjadi progress yang patut untuk diwaspadai

Investasi juga menjadi salah satu masalah dalam pengembangan perekonomian daerah di mana promosi wilayah dalam menarik investor masih belum berjalan dengan baik, bahkan terkesan minim. Oleh karena itu, investor masih belum banyak melirik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk menanamkan modalnya secara massif dalam mengembangkan usaha.



b. Potensi Pariwisata Daerah Belum Dikembangkan Dengan Baik

Sektor pariwisata merupakan salah satu *leading sector* yang diinginkan Presiden Joko Widodo untuk mampu membangkitkan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan dengan dana yang minim, bisa memberikan pemasukan daerah atau negara yang cukup signifikan jika dikelola dengan baik dan optimal. Namun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pariwisata masih menjadi sektor yang belum dikembangkan secara optimal. Hal ini terlihat dari pemasukan terhadap PAD yang masih minim sebesar 125 juta rupiah pada tahun 2020 dengan kontribusi terhadap keseluruhan PAD sebesar 0,27%.

4. Belum Terwujudnya Implementasi Good Governance

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan bentuk ideal perwujudan kinerja yang harus diraih oleh setiap pemerintahan daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dalam rangka merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus memperhatikan dan menindaklanjuti prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan, yakni: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*, dalam realisasinya untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan pada koridor pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.

Namun pada pelaksanaannya, terdapat berbagai permasalahan dalam mewujudkan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik itu sendiri baik dari sisi kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah, pengelolaan keuangan daerah maupun pelayanan publik kepada masyarakat.

Beberapa perhatian terhadap permasalahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditengarai oleh, belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, serta masih rendahnya kualitas pelayanan publik, dengan penjabaran sebagai berikut.

a. Belum Optimalnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Peningkatan kinerja aparatur daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang memiliki kapasitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah merupakan tantangan dan permasalahan utama kurun waktu lima tahun ke depan. Permasalahan lainnya adalah terbentuknya kelembagaan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif, meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD yang profesional, terlaksananya standar pelayanan minimal, serta penetapan



dan pelaksanaan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi, sangat memungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai inovasi dan kreasi sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Walaupun demikian, berdasarkan realitas yang ada, pengelolaan pemerintahan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum berjalan secara optimal. Hal ini antara lain terlihat dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Implikasi yang ditimbulkan antara lain, adalah masih adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun unit pelayanannya. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh kapasitas sumberdaya aparatur daerah yang masih terbatas dan tidak sesuai dengan kompetensinya.

b. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Permasalahan lain yang juga menjadi salah satu perhatian Pemerintah adalah terkait administrasi keuangan yang masih memiliki cukup banyak temuan administrasi dalam pemeriksaan administrasi penggunaan keuangan daerah. Minimnya ASN yang mampu memahami pengelolaan keuangan daerah secara baik dan bertanggungjawab menjadi kunci dari permasalahan ini. Terlebih lagi, pendapatan asli daerah yang belum optimal pencapaiannya juga memiliki andil dalam permasalahan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah ini.

c. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan Aparatur Pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan kepentingan tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang telah diberikan Pemerintah.

Beberapa pelayanan utama terhadap masyarakat yang masih perlu dibenahi seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, maupun pelayanan kependudukan. Selain dikarenakan sarana prasarana (khususnya IT) yang belum tersedia dengan baik, pelayanan minim oleh Pemerintah Daerah juga dikarenakan belum tercukupinya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

5. Tingginya Kemiskinan Wilayah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh wilayah baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Oleh karena



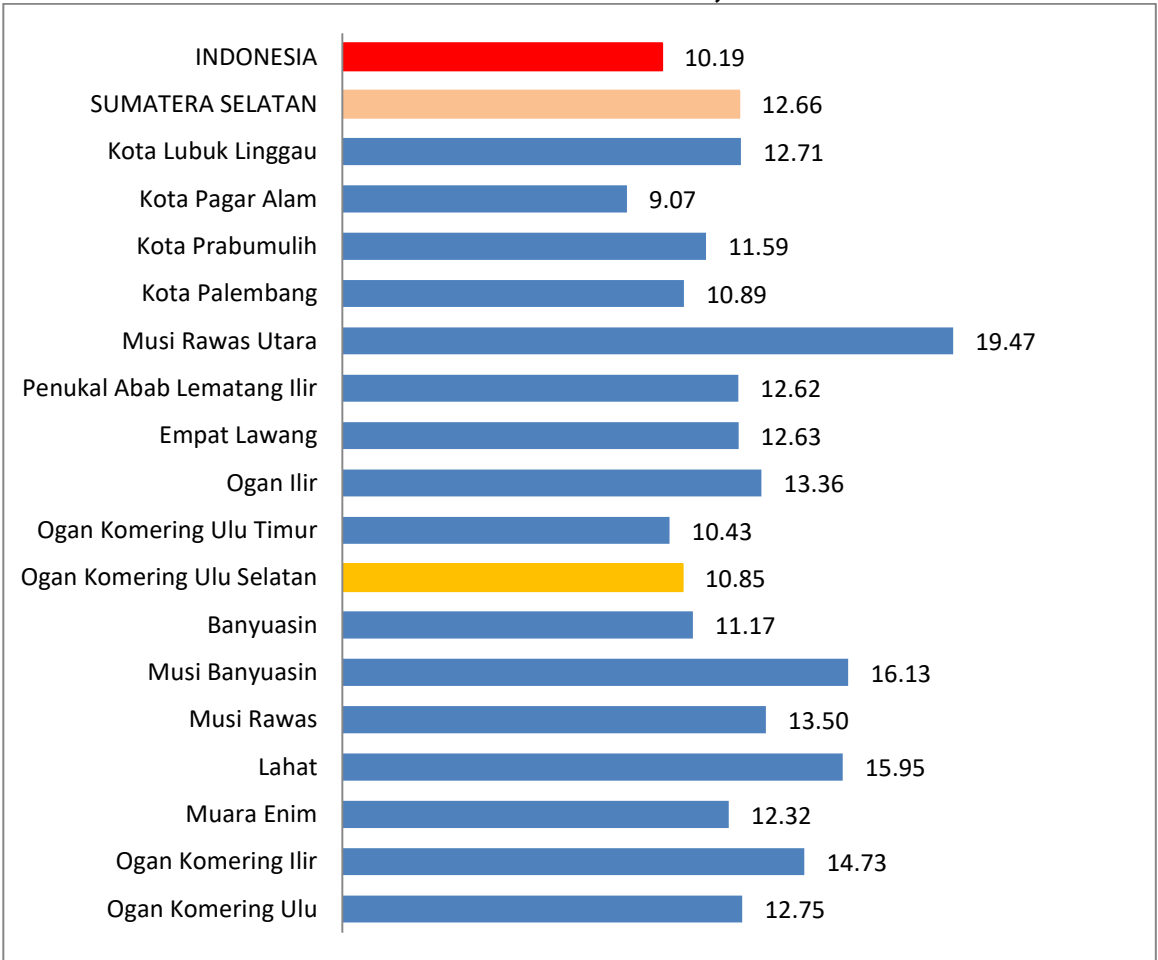
itulah salah satu tujuan dari SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah mengentaskan kemiskinan hingga ke akar-akarnya. Selaras dengan pernyataan tersebut, salah satu indikator berhasilnya Pemerintah yaitu ketika Pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan.

Beberapa perhatian terhadap permasalahan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditengarai oleh, belum optimalnya implementasi penanggulangan kemiskinan, serta masih rendahnya kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja, dengan penjabaran sebagai berikut.

a. Belum Optimalnya Implementasi Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selaras dengan tingginya kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri. Angka 10,85% kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan cukup menjadikan angka tersebut berada di atas kemiskinan nasional (10,19%).

Gambar IV.40
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota
se-Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2021

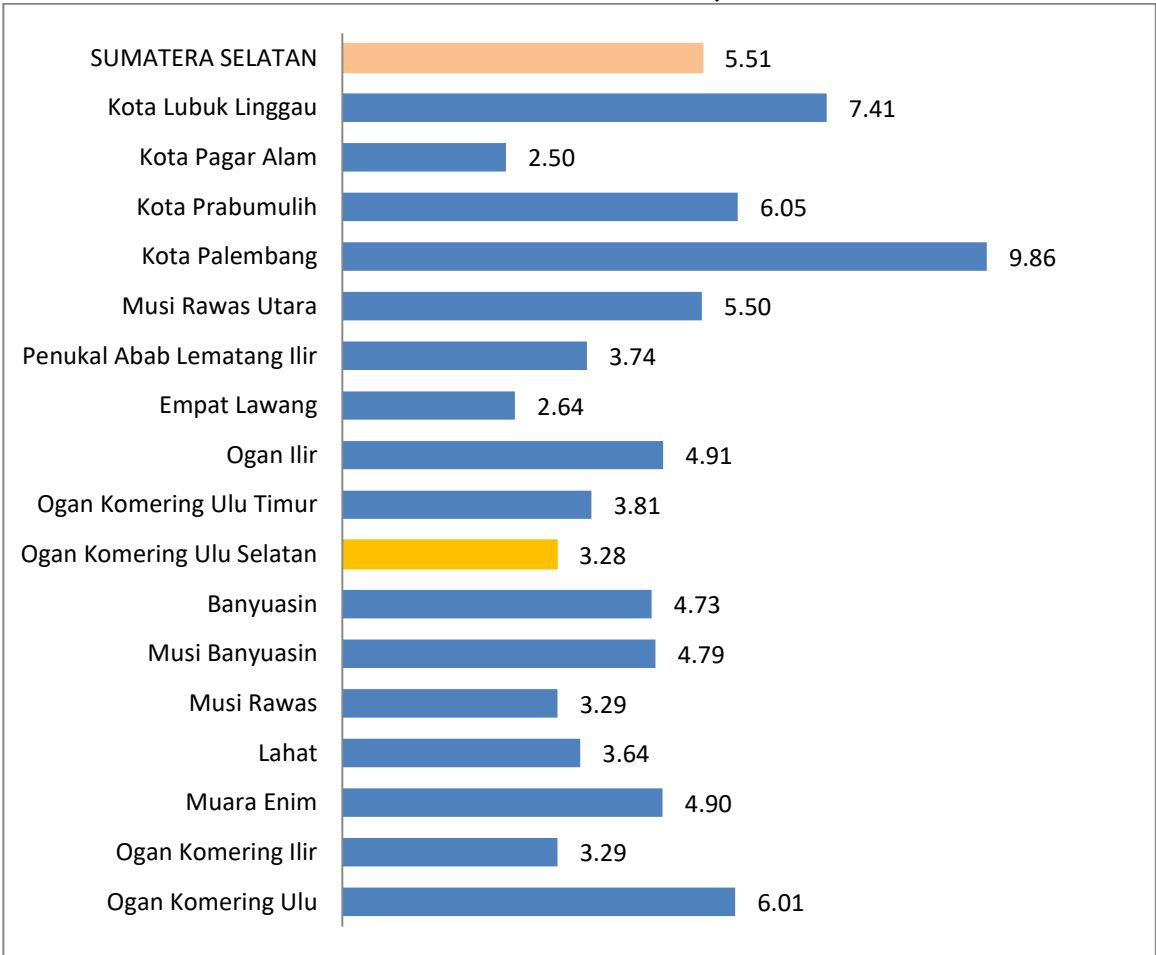


Beberapa rincian permasalahan yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus menjadikan dasar bagi perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam lima tahun ke depan. Beberapa diantaranya permasalahan yang cukup mengemuka seperti belum optimalnya sarana dan prasarana dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan masyarakat miskin beserta kompetensi kerjanya yang minim, maupun belum maksimalnya pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

b. Rendahnya Kualitas Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja

Kualitas sumber daya manusia (utamanya angkatan kerja) menentukan kemampuan tenaga kerja dalam memenuhi tuntutan spesifikasi pekerja dari sektor ekonomi. Dengan basis ekonomi wilayah yang sebagian didominasi sektor pertanian maupun perdagangan, sebenarnya tidak membutuhkan kompetensi tinggi untuk mampu berada di dalam pasar kerja. Namun kondisi positif ini akan menjadi berbeda pandangan ketika melihat kesejahteraan pekerja, khususnya sektor-sektor utama perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Gambar IV.41
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
se-Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020

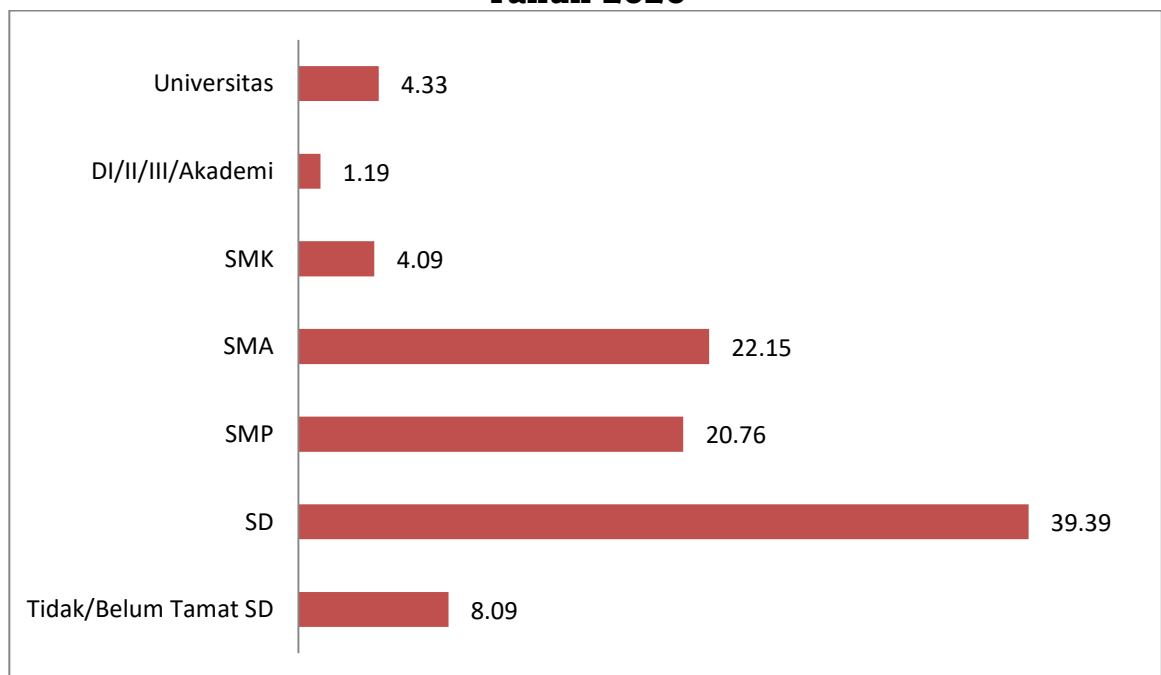


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2021

Fenomena ini terlihat dari cukup rendahnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Angka pengangguran yang mencapai 3,28% pada tahun 2020 ini menempatkan posisi Tingkat Pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini berada di peringkat lima terbawah dari angka pengangguran se-Provinsi Sumatera Selatan. Terlebih jika dibandingkan dengan Angka Pengangguran Provinsi yang mencapai 5,51% maka pengangguran di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan jauh lebih baik

Kualitas tenaga kerja yang tinggi merupakan kebutuhan dasar pembangunan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang mempunyai skill handal dan dapat dipercaya dalam mengelola sumber daya dengan maksimal akan menjadikan daya saing tenaga kerja lebih *powerfull*. Efek dari kondisi tersebut selain meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal, juga secara otomatis akan meningkatkan daya saing SDM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Gambar IV.42
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2021

Terlihat dari Gambar IV.13 di atas bahwa pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih sangat rendah. Sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya memiliki pendidikan hingga bangku sekolah dasar (SD) dengan persentase jumlah tenaga kerja sebesar 39,39%. Angka-angka tersebut diperparah dengan tingginya persentase pekerja yang tidak/belum tamat SD termasuk belum pernah bersekolah yang mencapai 8,09%.



Rendahnya pendidikan pekerja akan berkorelasi terhadap rendahnya pendapatan pekerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

4.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan di mana poin-poin dalam isu strategis dapat dikembangkan dalam rumusan kebijakan pembangunan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat.

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis nasional dan isu-isu strategis regional, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dijabarkan, sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM merupakan penggerak utama dalam pembangunan daerah. SDM yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja sehingga pada akhirnya memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen Pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki *values* dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dihadirkan oleh Pemerintah.

Dari sisi pendidikan, pembangunan sektor pendidikan dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas, kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana sesuai standar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan karakter, pengembangan nasionalisme substansi, dan pendidikan



inklusi. Termasuk di dalamnya pendidikan informal, khususnya dalam peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja agar mampu bersaing dalam pencarian lapangan usaha maupun secara mandiri berwirausaha.

Dari sisi kesehatan, peningkatan kualitas pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola yang meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memerhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Pembangunan penanganan kemiskinan dilakukan melalui gerakan bersama penanggulangan kemiskinan daerah secara komprehensif dan terpadu yang dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan pencari kerja agar memiliki daya saing serta perluasan jaringan kerja.

Sebagai daerah yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai prioritas pembangunan daerah. Penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan saat ini memang memiliki progress positif, namun ke depan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan perlu dipertajam untuk menjaga relevansi penurunan masyarakat miskin sehingga tepat sasaran dan tepat guna.

Selain dari sisi penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus memperhatikan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta meningkatnya kearifan budaya lokal. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, rasa aman dan tenteram serta adil dalam segala bidang; penguatan karakter berbasis kearifan lokal, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti; pelestarian dan pengembangan seni budaya.



3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan daerah yang memiliki infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang belum merepresentasikan keberhasilan pembangunan secara merata dan berkualitas. Keberhasilan pembangunan tersebut dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan wilayah melalui pengadaan sarana dan prasarana pembangunan bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah.

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Semisal keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka akan berdampak pada semakin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar Desa juga semakin tinggi. Selain itu, infrastruktur penunjang kehidupan lain harus diperhatikan ketersediaannya seperti listrik, air minum bersih dan layak, hingga fasilitas perumahan yang memadai.

Secara umum, pembangunan infrastruktur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merujuk pada penyediaan transportasi, kelistrikan dan air bersih, pengairan (irigasi), drainase, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

4. Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam dua dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian



bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Bagi Indonesia, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang luar negeri Pemerintah maupun dari penanaman modal asing.

Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, pada Lampiran II menyebutkan bahwa Danau Ranau dan sekitarnya merupakan Kawasan Pembangunan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berada di Provinsi Lampung. Secara geografis, danau ini terletak di perbatasan Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Danau Ranau merupakan danau terbesar dan terindah di Sumatera Selatan. Danau Ranau memiliki luas sekitar 128 km², di mana 85,33 km² berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan sisanya berada dalam wilayah Propinsi Lampung.

Mengingat letak wilayah Danau Ranau juga berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Untuk itu, pengembangan Danau Ranau dan sekitarnya tidak hanya di wilayah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, tetapi harus juga di wilayah dan melibatkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

5. Perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak akan berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan terlihat jelas antara MDGs dan SDGs, di mana permasalahan isu lingkungan global lebih



ditekankan dan diprioritaskan. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan kurun waktu selama 15 (lima belas) tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deplation* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Kerangka Pembangunan Pasca 2015 menjadi salah satu isu yang dibahas di KTT Rio. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (*human development*), diantaranya pendidikan dan kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*social economic development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*environmental development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs pasca MDGs-2015, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, tetapi ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan, diantaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *environmental sustainability*, *economic sustainability* dan *social sustainability*, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara berkembang atau negara maju.

Dalam perwujudan SDGs di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pemerintah harus mengupayakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian pembangunan berkelanjutan. Modal dasar yang merupakan potensi daerah telah ada, sedangkan pengelolaan yang baik perlu ditingkatkan kualitasnya. Dominasi sektor pertanian menjadi awal yang baik untuk mewujudkan SDGs sehingga dalam implementasinya, pengawasan dalam menjalankan roda perekonomian dibarengi dengan meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup akan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

6. Implementasi Pembangunan Perekonomian Berkelanjutan

Pada dasarnya ekonomi hijau adalah peningkatan kapasitas perekonomian daerah yang tidak merugikan lingkungan hidup. Program Lingkungan PBB (UNEP; United Nations Environment Programme) dalam laporannya berjudul *Towards Green Economy* menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber



daya alam. Dari definisi yang diberikan UNEP, pengertian ekonomi hijau dalam kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan.

UNEP/United Nation Environment Programme (2008) mencetuskan gagasan mengenai “Green Economy” dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Gagasan “green economy” tersebut bertujuan memberikan peluang yang besar bagaimana upaya memanfaatkan konsepsi “green economy” dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem. Terkait dengan gagasan konsepsi tersebut, terdapat dua hal yang ingin dicapai. Pertama, ekonomi hijau mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang bukan hanya sekedar mempertimbangkan masalah makro ekonomi, khususnya investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun produksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan (“green investment/investasi hijau”), namun juga difokuskan pada bagaimana kontribusi investasi hijau tersebut terhadap produksi barang dan jasa serta pertumbuhan lapangan pekerjaan di bidang yang terkait dengan ramah lingkungan (green job). Kedua, green economy mencoba untuk menyiapkan panduan pro-poor green investment, atau investasi hijau yang mampu mendorong pengentasan masalah kemiskinan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong agar para pembuat kebijakan mampu membuat semua jajaran pemerintahan dan sektor swasta ikut serta untuk mendukung peningkatan investasi hijau. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ekonomi hijau secara singkat dicirikan sebagai: (i) peningkatan investasi hijau; (ii) peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau; (iii) peningkatan pangsa sektor hijau; (iv) penurunan energi/sumber daya yang digunakan dalam setiap unit produksi; (v) penurunan CO₂ dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan; serta (vi) penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah (decrease in wasteful consumption). Konsep ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar. Menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam. Tentunya konsep ekonomi hijau baru akan membuahkan hasil jika semua elemen masyarakat mau mengubah perilaku.

Sebagai wilayah yang dominasi perekonomian berada pada sektor pertanian, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki ancaman dalam degradasi lingkungan hidup jika dalam pengelolaan lingkungan



tidak didasari dengan “pembangunan berkelanjutan”. Permasalahan lingkungan hidup inilah yang harus diperhatikan dalam menyeimbangkan antara stabilitas ekonomi daerah dengan kondisi lingkungan di masa mendatang. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus memiliki komitmen khusus untuk keberlangsungan kualitas lingkungan hidup. Setiap perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta program kegiatan pembangunan daerah harus menjamin dan memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup sehingga generasi mendatang dapat merasakan kenyamanan dalam menjalankan aktivitasnya.

7. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Secara Menyeluruh

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, perlu diciptakan Birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), Pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada Pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya sesuai *road map* yang telah ditetapkan.

8. Pembangunan Bendungan Berskala Nasional

Pemerintah Pusat melakukan pembangunan bendungan berskala nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yakni Bendungan Tiga Dihaji dan Bendungan Saka Gilas. Kedua proyek pembangunan bendungan ini merupakan proyek *multiyears* yang sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu mulai dari perencanaan hingga konstruksi bendungan yang dilaksanakan pada periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026.



Bendungan Tiga Dihaji nantinya merupakan bendungan pertama di Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan studi bendungan ini dimulai pada tahun 1982 berupa Pra-Feasibility Study oleh Konsultan Nippon Koei dengan dana pinjaman dari JICA, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan feasibility studi pada tahun 2013 dengan dana APBN. Tindak lanjut pada tahun 2017 oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII dilaksanakan pembuatan detail desain, sertifikasi bendungan, pembebasan lahan, hingga pembangunan sarana air baku IKK Pulau Beringin dan IKK Ranau Tengah.

Bendungan yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 ini memiliki beberapa manfaat bagi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, seperti:

1. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan seluas 8.000 ha yang sebelumnya berupa sawah tadah hujan menjadi pertanian yang beririgasi teknis.;
2. Mendukung ketersediaan energi listrik sebesar 40-76,3 MW untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten OKU;
3. Mendukung ketersediaan sumber air baku untuk PDAM sebesar 0,98 m³/detik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air baku di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan sekitarnya;
4. Mendukung kegiatan wisata air (renang, memancing, dan bersantai), serta wisata alam jika diintegrasikan dengan Danau Ranau;
5. Mendukung usaha bisnis wisma dan penginapan di sekitar bendungan bagi pengunjung yang hendak bermalam dan beristirahat;
6. Sebagai sarana bagi usaha perikanan darat;
7. Pengembangan wilayah karena akan menambah infrastruktur jalan; dan
8. Selama pembangunan wilayah juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Tak jauh beda dengan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, pembangunan Saka Gilas juga merupakan proyek berskala nasional untuk mendukung prioritas nasional dalam program kedaulatan pangan nasional, penyediaan air baku, pengendalian banjir dan PLTA. Perencanaan yang dimulai dengan studi kelayakan pada tahun 2013 ini, dilakukan eksekusi pembangunan konstruksi pada tahun 2021 dan direncanakan akan selesai pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar 1,49 triliun rupiah. Manfaat Bendungan Saka Gilas ini, antara lain:

1. Suplesi air baku ke Bendungan Perjaya pada bulan kering hingga 10m³/det
2. Menyuplai kebutuhan air baku/air bersih 1,21 m³/det untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Pengendalian banjir;
4. PLTA (2 x 4,5) MW yang akan mampu memberikan akses listrik bagi seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Meningkatkan sektor ekonomi perikanan tangkap;



6. Meningkatkan pariwisata daerah dan pembinaan olahraga air; dan
7. Selama pembangunan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

9. Penanganan dan Pemulihan Pandemi Covid-19 Di Seluruh Sektor Pembangunan

Dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius di mana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit *Covid-19* (*Corona Virus Disease-2019*) pada hampir seluruh negara. Hal tersebut menjadikan WHO menetapkan *Covid-19* sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 yang artinya bahwa penyakit *Covid-19* telah menyebar ke seluruh negara atau benua dan menjangkiti banyak penduduknya.

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berbagai penanganan untuk pencegahan *Covid-19* dilakukan demi meminimalisir pasien positif *Covid-19*. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam pencegahan penyebaran *Virus Corona* dengan dibantu oleh masyarakat melalui berbagai program, khususnya *physical distancing* dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat mewabahnya pandemi *Covid-19* ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya program *physical distancing* yang menyebabkan beberapa sektor ekonomi terdampak seperti sektor pariwisata, sektor akomodasi, UMKM hingga sektor jasa. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam pemulihan dampak pandemi *Covid-19* untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sediakala.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pernyataan Visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Ogan Komering Ulu Selatan sampai dengan tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, adalah:

“OKU SELATAN BERSINAR”

(Berkembangnya Ekonomi Rakyat melalui SInergitas pembangunan INfrastruktur yang Aspiratif dan Responsif)

Pernyataan Visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 memiliki makna: Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat menerangi dan memberikan cahaya serta harapan besar bagi masyarakat dalam setiap gerak pembangunan yang aspiratif dan responsif untuk masa depan cerah.

Penjelasan visi pembangunan Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2021-2026 adalah, sebagai berikut:

OKU Selatan Bersinar, adalah suatu kondisi di mana terwujudnya pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan, di mana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh masyarakat Ogan Komering Ulu Selatan.

OKU Selatan Bersinar, adalah suatu kondisi di mana meningkatnya kualitas sumber daya manusia Ogan Komering Ulu Selatan berdaya saing dan mandiri dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal.

OKU Selatan Bersinar, adalah suatu kondisi di mana tercapainya pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

OKU Selatan Bersinar, adalah suatu kondisi di mana terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat, bebas dari rasa takut akan gangguan tindakan kejahatan dan gangguan sosial lainnya, dengan jaminan adanya kepastian hukum.



5.2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, Misi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, yaitu:

- Misi 1 : Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam
- Misi 2 : Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat
- Misi 3 : Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik
- Misi 4 : Menciptakan kondisi investasi yang kondusif

5.3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah, sebagai berikut:

Misi Kesatu: “Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam”

Tujuan 1 : Meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan

Sasaran:

- 1.1. Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
- 1.2. Meningkatnya kesejahteraan petani
- 1.3. Meningkatnya peran industri dan perdagangan
- 1.4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
- 1.5. Meningkatnya ketahanan pangan

Misi Kedua: “Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat”

Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan

Sasaran:

- 2.1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas
- 2.2. Meningkatnya pelayanan publik
- 2.3. Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Pemerintah Daerah

Tujuan 3 : Meningkatkan akses pendidikan berkualitas

Sasaran:

- 3.1. Meningkatnya akses pendidikan berkualitas

Tujuan 4 : Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran:

- 4.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 4.2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga



Tujuan 5 : Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender

Sasaran:

- 5.1. Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak

Misi Ketiga: “Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik”

Tujuan 6 : Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas

Sasaran:

- 6.1. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas
- 6.2. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
- 6.3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 6.4. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
- 6.5. Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW

Misi Keempat: “Menciptakan kondisi investasi yang kondusif”

Tujuan 7 : Meningkatkan investasi yang kondusif

Sasaran:

- 7.1. Meningkatnya investasi
- 7.2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja
- 7.3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban



Tabel V.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026
Visi: OKU Selatan Bersinar

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Misi 1: Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam	1.	Meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0.37	4.42	4.45	5.00	5.33	5.67	6.04	6.04			
			Persentase Penduduk Miskin	Persen	10.85	9.02	9.00	8.97	8.74	8.51	8.29	8.29			
			Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	3.28	2.29	2.24	2.19	2.14	2.09	2.04	2.04			
	1.1.	Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	PAD sektor pariwisata	Persen	0.27	0.46	0.78	1.34	2.28	3.88	6.61	6.61	Dinas Parbud		
	1.2.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	Persen	31.09	31.32	31.56	31.79	32.03	32.27	32.52	32.52	Dinas Pertanian/ Diskanak		
			Nilai tukar petani (NTP)	Persen	104	105	106	107	108	109	110	110	Dinas Pertanian		
			Produksi perikanan	Persen	29.50	32.59	36.01	39.79	43.97	48.58	53.67	53.67	Diskanak		
	1.3.	Meningkatnya peran industri dan perdagangan	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	Persen	22.50	22.81	23.12	23.44	23.77	24.09	24.42	24.42	Dinas Koperasi, UKM, Perindag		
			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	7.94	8.14	8.34	8.55	8.76	8.98	9.21	9.21	Dinas Koperasi, UKM, Perindag		
			Persentase koperasi aktif	Persen	18.33	22.45	25.95	27.91	30.00	32.26	34.69	34.69	Dinas Koperasi,		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran						Kondisi Akhir	PD	PD Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab			
Misi 2: Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan	2.1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	1.4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pendapatan per kapita	Juta Rp	24.59	30.93	32.26	33.65	35.09	36.60	38.18	38.18	UKM, Perindag Dinas Sosial	Seluruh PD
			1.5. Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	Skor	83.60	85.50	86.50	87.00	87.75	88.50	89.50	89.50	Dinas Ketahanan Pangan	Dikes; Dinas PUPR; Dinas Perkim; DLH; Dinas PPKBP3A; Dinas Pertanian.
			Indeks reformasi birokrasi	Indeks	N.A	B	B	B	BB	BB	A	A	Setda/Set DPRD	Seluruh PD	
				Nilai SAKIP	Skor	B	B	B	BB	BB	BB	A			A
		Indeks kualitas perencanaan		N.A	B	B	B	B	B	A	A	Bappeda Litbang	Seluruh PD		
			Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD/ Bapenda	Seluruh PD	
		2.2. Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	N.A	N.A	70.20	70.30	70.40	7.50	70.60	70.60	Setda/Disduk capil/ Bappeda Litbang/ BKPSDM	Seluruh PD	
					Skor indeks inovasi daerah	Skor	358	550	700	1000	1200	1350	1550	1550	Bappeda Litbang/ Setda
		2.3. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah	Skor maturitas SPIP	Skor	2.45	3.00	3.10	3.10	3.20	3.30	3.30	3.30	Inspektorat Kabupaten	Seluruh PD	
		3. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65.30	67.01	67.23	67.67	68.30	68.94	69.58	69.58		
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun			7.84	8.02	8.21	8.40	8.59	8.79	9.00	9.00				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
4. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat	3.1. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	Tahun		11.75	11.79	11.84	11.88	11.92	11.97	12.01	12.01			
		APM SD/MI	Persen		99.00	99.04	99.08	99.12	99.16	99.20	99.24	99.24	Dinas Pendidikan	DPK	
		APM SMP/MTs	Persen		78.68	78.70	78.72	78.74	78.76	78.78	78.80	78.80	Dinas Pendidikan	DPK	
		APM SMA/SMK/MA	Persen		61.83	62.00	62.50	62.80	63.00	63.20	63.50	63.50	Dinas Pendidikan	DPK	
		APK (PAUD)	Persen		47.62	51.10	54.83	58.83	63.12	67.73	72.68	72.68	Dinas Pendidikan	DPK	
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai		N.A	N.A	47.50	49.50	51.50	53.50	56.50	56.50	DPK	Dinas Pendidikan	
	4.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Poin		65.30	67.01	67.23	67.67	68.30	68.94	69.58	69.58			
		Angka usia harapan hidup	Tahun		67.04	67.48	67.93	68.38	68.83	69.29	69.75	69.75			
		Angka Kesakitan	Persen		17.46	16.39	15.39	14.46	13.57	12.75	11.97	11.97	Dinas Kesehatan	RSUD Muaradua	
		Kematian bayi			46	40	35	30	25	20	15	15	Dinas Kesehatan	RSUD Muaradua	
		Kematian ibu			5	4	3	2	1	1	0	0	Dinas Kesehatan	RSUD Muaradua	
		Persentase Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita	Persen		2.79	2.59	2.49	2.39	2.29	2.09	1.89	1.89	Dinas Kesehatan	Seluruh PD	
		Kategori kabupaten/kota sehat (KKS)			-	-	-	Padapa	-	Wistara	-	Wistara	Dinas Kesehatan	Seluruh PD	
		Cakupan peserta KB aktif	Persen		69.03	69.41	69.79	70.18	70.56	70.95	71.34	71.34	Dinas PPKBP3A	Dinas Kesehatan	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Misi 3: Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik	5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	4.2. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peringkat pada porprov	Peringkat	-	3	-	3	-	3	-	3	Diskepora	Seluruh PD	
			Indeks pembangunan gender (IPG)	Indeks	92.62	93.10	93.34	93.59	93.83	94.08	94.33	94.33			
			Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	55.33	55.87	55.96	56.06	56.14	56.15	56.35	56.35			
			5.1. Meningkatkan pembangunan gender dan perlindungan anak	Kategori kabupaten layak anak (KLA)		-	Pratama	Madya	Nindya	Nindya	Utama	KLA	KLA	Dinas PPKBP3A	Seluruh PD
		Anugerah Parahita Ekapraya (APE)			-	-	Pratama	Madya	Madya	Utama	Mentor	Mentor	Dinas PPKBP3A	Seluruh PD	
	6. Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas		Rata-rata waktu tempuh jalan Kabupaten	Km/jam	N.A	28	30	35	40	40	45	45	-		
			Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	Persen	54.82	59.08	63.67	68.62	73.95	79.69	85.88	85.88			
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	67.25	68.22	69.47	70.72	71.97	73.22	74.47	74.47			
			6.1. Meningkatkan akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	53.37	57.59	62.14	67.04	72.34	78.06	84.22	84.22	Dinas PUPR	Dishub
		Persentase rumah layak huni		Persen	77.13	77.32	77.52	77.71	77.91	78.10	78.30	78.30	Dinas Perkim		
		Persentase penduduk berakses air minum	Persen	83.26	85.13	87.04	88.99	90.98	93.02	95.11	95.11	Dinas PUPR			
		Rasio	Persen	67.62	70.98	74.52	78.22	82.11	86.20	90.49	90.49	Dinas Perkim			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Misi 4: Menciptakan kondisi investasi yang kondusif	7. Meningkatkan investasi yang kondusif		Elektrifikasi												
			Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	49,80	52.65	55.66	58.84	62.21	65.77	69.53	69.53	Diskominfo		
		6.2.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Respon Cepat Darurat Bencana	Persen	36.11	42.38	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BPBD	
		6.3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	N.A	52.60	52.70	52.80	52.90	53.00	53.10	53.10	DLH	
				Indeks kualitas udara	Indeks	N.A	92.62	92.72	92.82	92.92	93.02	93.12	93.12	DLH	
				Indeks kualitas lahan	Indeks	N.A	41.85	43.94	46.03	48.12	50.21	52.30	52.30	DLH	
		6.4.	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	Persen	61.11	60.35	59.59	58.85	58.11	57.38	56.67	56.67	Dinas PMPD	
		6.5.	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Rasio	50.72	50.72	54.00	58.00	62.00	66.00	70.00	70.00	Dinas PUPR	
				Nilai investasi	Rupiah	906.9 milyar	1,0 triliun	1,5 triliun	2,5 triliun	3,5 triliun	4,5 triliun	5,5 triliun	5,5 triliun	Dinas PMPTSP	
		7.1.	Meningkatnya investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	11	11	14	16	18	22	26	26	Dinas PMPTSP	
		7.2.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Persen	71.47	72.88	74.29	75.70	77.11	78.52	79.93	79.93	Dinas Nakertrans	Dinas Koperasi, UKM, Perindag; Diskepora; Diskanak; Dinas Parbud; Dinas Pertanian
		7.3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas		0.48	0.37	0.29	0.22	0.17	0.13	0.10	0.10	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
			Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD	Konflik	5	5	4	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	



5.4. Prioritas Pembangunan

Penjabaran visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati, dirumuskan dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah, sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan
- 2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
- 3. Peningkatan akses pendidikan berkualitas
- 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- 5. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
- 6. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas
- 7. Peningkatan investasi

Prioritas pembangunan tersebut akan dilaksanakan bertahap selama 5 (lima) tahun melalui sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan, sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan.

Tabel V.2
Keterkaitan Misi dan Prioritas Pembangunan
RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Misi	Prioritas
1.	Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam	1. Pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan
2.	Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat	2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
		3. Peningkatan akses pendidikan berkualitas
		4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		5. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
3.	Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik	6. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas
4.	Menciptakan kondisi investasi yang kondusif	7. Peningkatan investasi



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040, serta arahan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. Arahan tersebut menuntun Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada prioritas pembangunan daerah sekaligus strategi terhadap penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:



Tabel VI.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi: OKU Selatan Bersinar			
Misi 1: Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam			
1. Meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan			
	1.1. Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	1.1.1.Meningkatkan daya saing pariwisata	a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif b. Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital
	1.2. Meningkatnya kesejahteraan petani	1.2.1.Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan	a. Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia b. Pengembangan kawasan klaster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
	1.3. Meningkatnya peran industri dan perdagangan	1.3.1.Meningkatkan daya saing industri	a. Meningkatkan daya saing produk industri kecil dan menengah b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri kecil dan menengah c. Memfasilitasi standarisasi produk industri kecil dan menengah
		1.3.2.Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri	a. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			perlindungan konsumen dan pasar tradisional
			b. Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing
	1.4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1.4.1.Mempercepat penanggulangan kemiskinan	a. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
			b. Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin
			c. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
	1.5. Meningkatnya ketahanan pangan	1.5.1.Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan	a. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam
Misi 2: Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat			
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan			
	2.1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas	2.1.1.Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	a. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government
			b. Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika
		2.1.2.Meningkatkan kerjasama pembangunan	a. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar tingkat pemerintahan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2.2. Meningkatnya pelayanan publik	2.2.1.Menciptakan pelayanan publik yang terpadu, cepat, mudah dan inklusif	a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan di fasilitas pelayanan public b. Mendorong pengutamaan kepentingan publik oleh pelayanan publik dengan pelayanan birokrasi yang berbasis information and technology (IT) c. Revitalisasi sarana, prasarana dan infrastruktur pelayanan public d. Menempatkan petugas pelayanan yang kompeten (<i>right man in the right place</i>) dan menciptakan perilaku pelaksana/petugas dengan memberikan pelayanan secara sopan, ramah serta saling menghargai dan menghormati
		2.2.2.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif	a. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan b. Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) c. Peningkatan pengelolaan satu data pembangunan
		2.2.3.Peningkatan publikasi hasil litbang dan inovasi	a. Riset berbasis kebutuhan b. Meningkatkan kualitas SDM peneliti c. Melakukan koordinasi dengan pembuat kebijakan dan pelaku bisnis d. Meningkatkan fungsi intermediator teknologi e. Inventarisasi permasalahan yang membutuhkan litbang dan inovasi
	2.3. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur	2.3.1.Meningkatkan integritas ASN	a. Peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah di semua bidang



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Pemerintah Daerah		b. Mengoptimalkan pengawasan melekat c. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan menuju pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) d. Meningkatkan tunjangan ASN berbasis kinerja
3. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas			
	3.1. Meningkatnya akses pendidikan berkualitas	3.1.1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas	a. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah b. Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan c. Meningkatkan minat baca masyarakat
4. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat			
	4.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1.1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat/masyarakat miskin	a. Meningkatkan cakupan UHC (universal health coverage) bagi masyarakat/ masyarakat miskin melalui PBI APBN, PBI APBD Kabupaten/Kota b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas pembantu)
		4.1.2. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan terutama tenaga medis dan para medis	a. Melaksanakan program beasiswa dokter spesialis dan sertifikasi tenaga medis lainnya
		4.1.3. Menjamin kecukupan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan hingga pelosok daerah	a. Melakukan seleksi penerimaan CPNS tenaga kesehatan Daerah sesuai dengan kebutuhan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	4.2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	4.2.1. Meningkatkan peran stakeholder dalam pembangunan kepemudaan dan olahraga	b. Distribusi tenaga kesehatan secara proporsional pada wilayah ibu kota kabupaten/kecamatan/kelurahan/desa dan kontrak kerja bersedia untuk ditempatkan di seluruh pelosok daerah c. Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif d. Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat e. Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	5.1. Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak	5.1.1. Menguatkan peran keluarga dan kesetaraan gender 5.1.2. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan hak anak (PUHA)	a. Meningkatkan ketahanan keluarga serta peran dan perlindungan perempuan dan anak a. Penguatan kelembagaan KLA b. Pelaksanaan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator KLA c. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan d. Peningkatan Ketersediaan, dan Pemanfaatan data anak pada sistem informasi gender dan anak (SIGA)
Misi 3: Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik			
6. Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	6.1. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas	6.1.1.Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	a. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik b. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat
		6.1.2.Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	a. Pengembangan lingkungan permukiman sehat b. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
		6.1.3.Meningkatkan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	a. Meningkatkan kelestarian dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air b. Meningkatkan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian c. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi secara partisipatif
		6.1.4.Meningkatkan akses layanan listrik yang memenuhi standar	a. Meningkatkan jangkauan pelayanan listrik untuk kepentingan aktivitas ekonomi, pelayanan publik dan rumah tangga hingga ke pelosok
	6.2. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	6.2.1.Mengurangi risiko bencana	a. Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana
	6.3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	6.3.1.Menjaga kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air dan kualitas udara	a. Meningkatkan kualitas air dan udara b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
		6.3.2.Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	a. Meningkatkan pengelolaan limbah domestik b. Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman c. Meningkatkan tertib tata kelola



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	6.4. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	6.4.1.Mempercepat pembangunan Desa	pertanahan a. Memperkuat infrastruktur dasar Desa dan kawasan perdesaan b. Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan c. Memperkuat Pemerintahan Desa
	6.5. Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	6.5.1.Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah secara konsisten	a. Mengkoordinasikan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan ruang
Misi 4: Menciptakan kondisi investasi yang kondusif			
7. Meningkatkan investasi yang kondusif			
	7.1. Meningkatnya investasi	7.1.1.Meningkatkan investasi daerah	a. Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar
	7.2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja	7.2.1.Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha	a. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar b. Mengembangkan inkubator bisnis
	7.3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban	7.3.1.Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat	a. Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda



Berdasarkan hasil perumusan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau tema tahunan pada periode tahun 2022-2026, antara lain sebagai berikut:

Tabel VI.2
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022-2026

Arah Kebijakan				
2022	2023	2024	2025	2026
Optimalisasi pertumbuhan ekonomi regional	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan, kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik yang prima, bersih, bebas KKN	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	OKU Selatan Bersinar

6.2. Program Pembangunan

Untuk penjabaran program pembangunan daerah yang mengarah langsung pada perwujudan cita-cita daerah yang tertuang dalam visi dan misi tersaji dalam Tabel VI.3 berikut ini:



Tabel VI.3
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2022-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Misi 1: Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam																		
				Tujuan 1 Meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0.37	4.42	4.45		5.00		5.33		5.67		6.04		6.04			
					Persentase Penduduk Miskin	Persen	10.85	9.02	9.00		8.97		8.74		8.51		8.29		8.29			
					Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	3.28	2.29	2.24		2.19		2.14		2.09		2.04		2.04			
				Sasaran 1.1 Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	PAD sektor pariwisata	Persen	0.27	0.46	0.78		1.34		2.28		3.88		6.61		6.61			
3	26	02		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kunjungan wisata	Orang	11,959	14808	18,335		150,000,000	22,703	150,195,000	28,111	150,405,273	34,808	150,630,881	43,099	150,871,890	43,099	752,103,044	Dinas Parbud
3	26	03		Program pemasaran pariwisata	Kunjungan wisata	Orang	11,959	14808	18,335		1,050,000,000	22,703	1,051,365,000	28,111	1,052,836,911	34,808	1,054,416,166	43,099	1,056,103,232	43,099	5,264,721,310	Dinas Parbud
3	26	04		Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	PAD sektor pariwisata	Persen	0.27	0.46	0.78		0	1.34	50,000,000	2.28	50,000,000	3.88	50,000,000	6.61	50,000,000	6.61	200,000,000	Dinas Parbud
3	26	05		Program pengembangan	PAD sektor pariwisata	Persen	0.27	0.46	0.78		150,000,000	1.34	150,195,000	2.28	150,405,273	3.88	150,630,881	6.61	150,871,890	6.61	752,103,044	Dinas Parbud



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2020	2021	2022		2023		2024		2025					2026	
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		T	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif																	
			Sasaran 1.2 Meningkatnya kesejahteraan petani	Kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	Persen	31.09	31.32	31.56		31.79		32.03		32.27		32.52		32.52		
				Nilai tukar petani (NTP)	Persen	104	105	106		107		108		109		110		110		
				Produksi perikanan	Persen	29.50	32.59	36.01		39.79		43.97		48.58		53.67		53.67		
3	27	02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Provitas Padi	Ton/Ha	4.54	4.62	4.69	422,606,678	4.77	695,558,812	4.85	720,310,945	4.93	628,163,079	5.02	748,015,212	5.02	3,214,654,726	Dinas Pertanian
				Provitas Jagung	Ton/Ha	7.15	7.29	7.42		7.57		7.71		7.86		8.00		8.00		
				Provitas Kedelai	Ton/Ha	1.35	1.37	1.39		1.41		1.43		1.45		1.47		1.47		
				Produksi Alpukat	Ton	6,014	7,189	8,593.8		10,273		12,280		14,680		17,549		17,549		
				Produksi Pisang	Ton	632.63	730.43	843.36		973.74		1,124		1,298		1,499		1,498.8		
				Produksi Kopi	Ton	50,854	51,363	51,877		52,395		52,919		53,448		53,983		53,983		
3	27	03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Provitas Padi	Ton/Ha	4.54	4.62	4.69	191,978,144	4.77	4,538,000,000	4.85	4,610,920,000	4.93	4,692,380,000	5.02	4,773,840,000	5.02	18,807,118,144	Dinas Pertanian
				Provitas Jagung	Ton/Ha	7.15	7.29	7.42		7.57		7.71		7.86		8.00		8.00		
				Provitas Kedelai	Ton/Ha	1.35	1.37	1.39		1.41		1.43		1.45		1.47		1.47		
				Produksi Alpukat	Ton	6,014	7,189	8,593.8		10,273		12,280		14,680		17,549		17,549		
				Produksi Pisang	Ton	632.63	730.43	843.36		973.74		1,124		1,298		1,499		1,498.8		
				Produksi Kopi	Ton	50,854	51,363	51,877		52,395		52,919		53,448		53,983		53,983		
3	27	05	Program pengendalian dan penanggulang an bencana pertanian	Provitas Padi	Ton/Ha	4.54	4.62	4.69	0	4.77	285,250,000	4.85	296,660,000	4.93	302,365,000	5.02	308,070,000	5.02	1,192,345,000	Dinas Pertanian
				Provitas Jagung	Ton/Ha	7.15	7.29	7.42		7.57		7.71		7.86		8.00		8.00		
				Provitas Kedelai	Ton/Ha	1.35	1.37	1.39		1.41		1.43		1.45		1.47		1.47		
				Produksi Alpukat	Ton	6,014	7,189	8,593.8		10,273		12,280		14,680		17,549		17,549		
				Produksi Pisang	Ton	632.63	730.43	843.36		973.74		1,124		1,298		1,499		1,498.8		
				Produksi Kopi	Ton	50,854	51,363	51,877		52,395		52,919		53,448		53,983		53,983		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026				
						2020	2021	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	27	07	Program penyuluhan pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Persen	47.10	51.04	55.31	702,274,640	59.94	997,420,133	64.96	1,021,565,626	70.40	1,041,211,118	76.29	1,060,856,611	76.29	4,823,328,128	Dinas Pertanian
3	27	02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	31.09	31.32	31.56	119,904,100	31.79	119,904,100	32.03	122,342,075	32.27	125,351,705	32.52	129,630,731	32.52	617,132,711	Diskanak
3	27	04	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	31.09	31.32	31.56	149,995,250	31.79	149,995,250	32.03	151,690,620	32.27	153,715,487	32.52	154,892,265	32.52	760,288,872	Diskanak
3	25	03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	13.32	15.59	18.24	247,490,000	21.34	267,500,000	24.96	284,705,450	29.21	291,956,675	34.18	306,748,122	34.18	1,398,400,247	Diskanak
3	25	04	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi Perikanan	Persen	29.50	32.59	36.01	627,091,630	39.79	742,229,500	43.97	788,220,100	48.58	792,868,120	53.67	813,653,508	53.67	3,764,062,858	Diskanak
3	25	05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	0.00	0.00	10.00	25,000,000	10.00	30,000,000	20.00	32,650,120	30.00	35,230,225	40.00	40,000,000	40.00	162,880,345	Diskanak
3	25	06	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	31.09	31.32	31.56	135,000,000	31.79	140,000,000	32.03	145,325,230	32.27	148,331,210	32.52	150,717,342	32.52	719,373,782	Diskanak
			Sasaran 1.3 Meningkatnya peran industri dan perdagangan	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil	Persen	22.50	22.81	23.12		23.44		23.77		24.09		24.42		24.42		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				dan sepeda terhadap PDRB																	
				Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	7.94	8.14	8.34		8.55		8.76		8.98		9.21		9.21			
				Persentase koperasi aktif	Persen	18.33	22.45	25.95		27.91		30.00		32.26		34.69		34.69			
2	17	03	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	18.33	22.45	25.95	30,000,000	27.91	30,000,000	30.00	30,000,000	32.26	30,000,000	34.69	30,174,378	34.69	150,174,378	Dinas Koperasi UKM, Perindag	
2	17	05	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi aktif	Persen	18.33	22.45	25.95	50,000,000	27.91	50,000,000	30.00	50,000,000	32.26	50,000,000	34.69	50,000,000	34.69	200,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag	
2	17	07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	6.00	7.00	10.00	30,000,000	15.00	63,000,000	20.00	63,000,000	25.00	63,000,000	30.00	63,000,000	30.00	282,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag	
2	17	08	Program pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	6.00	7.00	10.00	0	15.00	220,000,000	20.00	221,000,000	25.00	221,000,000	30.00	221,000,000	30.00	883,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag	
3	30	02	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	Persen	6.00	7.00	10.00	0	15.00	80,000,000	20.00	80,000,000	25.00	80,000,000	30.00	80,000,000	30.00	320,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag	
3	30	03	Program	Persentase	Persen	6.00	7.00	10.00	0	15.00	55,000,000	20.00	55,000,000	25.00	55,000,000	30.00	55,000,000	30.00	220,000,000	Dinas	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									2022		2023		2024		2025		2026				
							2020	2021	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				peningkatan sarana distribusi perdagangan	pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)															Koperasi UKM, Perindag	
3	30	04		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	Persen	22.50	22.81	23.12	40,000,000	23.44	86,000,000	23.77	90,000,000	24.09	86,000,000	24.42	86,000,000	24.42	388,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag
3	31	02		Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangun-an industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	4.00	6.00	10.00	80,000,000	12.00	1,152,000,000	13.00	1,153,000,000	15.00	1,156,000,000	17.00	1,158,000,000	17.00	4,699,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag
3	31	03		Program pengendalian izin usaha industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri	Persen	N.A	N.A	35.00	0	45.00	50,000,000	55.00	50,000,000	65.00	50,000,000	75.00	50,000,000	75.00	200,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait																
				Sasaran 1.4 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pendapatan per kapita	Juta Rp	24.59	30.93	32.26		33.65		35.09		36.60		38.18		38.18		
1	06	02		Program pemberdayaan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	28.33	32.48	37.25	209,999,480	42.71	210,194,479	48.97	210,404,752	56.14	280,630,359	64.38	280,871,367	64.38	1,192,100,437	Dinas Sosial
1	06	04		Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	66.67	66.67	100	2,924,319,420	100	3,097,614,366	100	3,098,985,850	100	3,312,368,454	100	3,513,940,412	100	15,947,228,502	Dinas Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Sosial			Persen	28.57	28.57	100	100		100		100		100						
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Sosial			Persen	64.00	64.00	100	100		100		100		100						
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial			Persen	50.00	50.00	100	100		100		100		100						
1	06	05		Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	28.33	34.08	41.00	364,999,120	49.32	365,103,119	59.33	365,215,263	71.38	365,335,586	85.87	365,464,123	85.87	1,826,117,211	Dinas Sosial
1	06	06		Program penanganan	Persentase korban	Persen	100	100	100	620,000,000	100	655,940,000	100	706,200,729	100	756,200,000	100	806,200,000	100	3,544,540,729	Dinas Sosial



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			bencana	bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat																	
				Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		100	
1	01	02	Program pengelolaan pendidikan	Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD	Persen	99.00	99.04	99.08	83,926,603,517	99.12	84,035,708,102	99.16	84,153,358,093	99.20	84,279,588,130	99.24	84,414,435,471	99.24	420,809,693,313	Disdik	
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SD	Persen	78.68		78.70	78.72	78.74	78.76	78.78		78.80											
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SMP	Persen	61.83		62.00	62.50	62.80	63.00	63.20		63.50											
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	Persen	47.62		58.48	100	100	100	100		100											
1	02	02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	97.12	97.76	100	66,225,081,959	100	66,311,174,566	100	66,404,010,210	100	66,503,616,225	100	66,610,022,011	100	332,053,904,971	Dinkes	
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan	Persen	94.92	98.26	100		100		100		100							



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				Pelayanan Persalinan																			
				Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	84.32	86.98	100		100		100		100		100		100		100			
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	92.07	92.11	100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	11.00	12.81	100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	3.23	4.42	100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	Persen	19.68	22.05	100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase Penderita Hipertensi Yang	Persen	10.12	40.20	100		100		100		100		100		100		100			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026											
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp								
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)							
				Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	10.12	16.73	100																				
				Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																		100		100		100		100
				Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar																		100		100		100		100
				Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar																		100		100		100		100
				Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar																		100		100		100		100
1	02	04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Persen	100	100	100	207,828,000	100	208,098,176	100	208,389,514	100	208,702,098	100	209,036,021	100	1,042,053,810	Dinkes								
1	02	05	Program pemberdayaan masyarakat	Persentase desa/ kelurahan	Persen	87.70	89.68	91.67	826,914,670	93.65	827,989,659	95.63	829,148,845	97.62	830,392,568	100	831,721,196	100	4,146,166,937	Dinkes								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				bidang kesehatan	yang melaksana- kan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)																
1	03	03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk berakses Air Minum	Persen	83.26	85.13	87.04	4,472,055,000	88.99	4,477,868,672	90.98	4,484,137,688	93.02	4,490,863,894	95.11	4,498,049,276	95.11	22,422,974,530	Dinas PUPR	
				Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak	Persen	54.82	59.08	63.67		68.62		73.95		79.69		85.88		85.88			
1	03	05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Capaian Pelayanan SPALD-S Akses Dasar Air Limbah Domestik	Persen	71.46	72.54	100	3,237,103,000	100	3,241,311,234	100	3,245,849,070	100	3,250,717,843	100	3,255,918,992	100	16,230,900,139	Dinas PUPR	
				Capaian Pelayanan SPALD- S Akses Aman Air Limbah Domestik	Persen	63.38	66.99	100		100		100		100		100					
				Capaian Pelayanan SPALD-T Akses Aman Air Limbah Domestik	Persen	66.43	69.42	100		100		100		100		100					
				Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	63.75	67.86	100		100		100		100		100					
1	03	10	Program penyelenggaraa n jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	53.37	57.59	62.14	757,423,986,932	67.04	916,474,820,681	72.34	563,990,969,337	78.06	1,111,531,368,914	84.22	919,822,252,175	84.22	4,269,243,398,039	Dinas PUPR	
1	04	02	Program pengembangan	Persentase rumah layak	Persen	77.13	77.32	77.52	1,041,344,600	77.71	1,041,793,684	77.91	1,042,277,943	78.10	1,042,797,517	78.30	1,043,352,561	78.30	5,211,566,305	Dinas Perkim	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2020	2021	2022		2023		2024		2025					2026	
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		T	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			perumahan	huni	Persen	75.00	75.00	100		100		100		100		100		100		
				Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota																
				Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota																
1	04	03	Program kawasan permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	3.68	3.00	2.44	731,185,180	1.99	731,185,180	1.62	731,185,180	1.32	731,185,180	1.07	731,185,180	1.07	3,655,925,900	Dinas Perkim
1	04	04	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	22.87	22.84	22.79	2,239,420,100	22.76	2,239,731,346	22.74	2,240,066,970	22.71	2,240,427,070	22.69	2,240,811,754	22.69	11,200,457,240	Dinas Perkim
1	04	05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	0.78	0.79	0.93	28,831,934,700	1.09	28,869,372,568	1.23	28,909,737,684	1.25	28,953,056,936	1.28	28,999,328,107	1.28	144,563,429,995	Dinas Perkim
1	05	02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban	Persentase Penegakan Perda	Persen	100	100	100	2,376,000,000	100	2,411,000,000	100	2,408,000,000	100	2,415,000,000	100	2,418,000,000	100	12,028,000,000	Satpol PP dan Damkar



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	05	03	umum Program penanggulanga n bencana	Respon Cepat Darurat Bencana	Persen	36.11	42.38	100	3,430,000,000	100	4,255,000,000	100	4,935,000,000	100	5,460,000,000	100	5,655,000,000	100	23,735,000,000	BPBD
				Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	49.80	50.54	100		100		100		100		100				
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persen	34.00	34.43	100		100		100		100		100				
2	07	03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	N.A	N.A	0.032	25,067,546	0.054	25,067,546	0.108	25,067,546	0.215	25,105,147	0.323	25,145,315	0.323	125,453,100	Disnakertrans
2	08	02	Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	0.055	0.056	0.063	200,000,000	0.071	200,260,000	0.079	200,540,364	0.087	200,841,175	0.095	201,162,520	0.095	1,002,804,059	Dinas PPKBP3A
2	08	03	Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	16.00	14.00	12.00	13,970,000	10.00	200,000,000	8.00	200,000,000	6.00	200,000,000	4.00	200,000,000	4.00	813,970,000	Dinas PPKBP3A
2	08	07	Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan	Persen	0.022	0.020	0.018	40,070,000	0.016	200,000,000	0.014	200,000,000	0.012	200,000,000	0.010	200,000,000	0.010	840,070,000	Dinas PPKBP3A



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					yang ditangani instansi terkait kabupaten																
2	09	02		Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Penguatan Cadangan Pangan	Persen	31.17	36.08	41.76	30,000,000	48.34	80,104,000	55.95	330,216,146	64.77	80,336,470	74.97	330,465,008	74.97	851,121,624	DKP
2	09	03		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	Persen	99.52	99.55	99.58	985,000,000	99.61	1,100,442,400	99.64	1,097,120,929	99.67	1,098,301,610	99.70	1,099,562,892	99.70	5,380,427,831	DKP
2	09	04		Program penanganan kerawanan pangan	Penguatan Cadangan Pangan	Persen	31.17	36.08	41.76	30,000,000	48.34	205,000,000	55.95	240,000,000	64.77	240,000,000	74.97	250,000,000	74.97	965,000,000	DKP
2	09	05		Program pengawasan keamanan pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	0.00	100	100	0	100	273,610,842	100	248,944,952	100	278,842,428	100	264,725,376	100	1,066,123,598	DKP
2	11	11		Program pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	9.18	13.56	20.04	4,057,592,414	29.61	4,062,867,284	43.75	4,068,555,298	64.64	4,074,658,131	95.50	4,081,177,584	95.50	20,344,850,712	DLH
2	12	02		Program pendaftaran penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	52.12	81.87	87.95	125,000,000	100	125,000,000	100	125,000,000	100	125,000,000	100	125,000,000	100	625,000,000	Disduk dan Capil
				Persentase anak usia 01- 7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	N.A	N.A	10.00		20.00		30.00		40.00		50.00		50.00			
				Kepemilikan akta	Persen	96.84	97.05	97.26		100		100		100		100		100			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	13	04	Program administrasi pemerintahan desa	kelahiran Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	Persen	61.11	60.35	59.59	233,948,680	58.85	4,468,201,493	58.11	368,529,447	57.38	5,218,881,318	56.67	369,257,211	56.67	10,658,818,149	Dinas PMPD
2	13	05	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	Persen	61.11	60.35	59.59	2,139,999,870	58.85	2,142,781,870	58.11	2,145,781,764	57.38	2,149,000,437	56.67	2,152,438,838	56.67	10,730,002,779	Dinas PMPD
2	14	02	Program pengendalian penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	0.37	0.21	0.21	100,000,000	0.20	100,130,000	0.20	100,270,182	0.19	100,420,587	0.19	100,581,260	0.19	501,402,029	Dinas PPKBP3A
2	14	03	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	20.83	21.91	23.05	4,872,666,000	24.25	4,879,000,466	25.51	4,885,831,066	26.84	4,893,159,813	28.23	4,900,988,869	28.23	24,431,646,214	Dinas PPKBP3A
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	30.07	30.00	29.93				29.85				29.78				
2	14	04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	40.80	44.16	47.80	100,000,000	51.74	100,130,000	56.00	100,270,182	60.62	100,420,587	65.61	100,581,260	65.61	501,402,029	Dinas PPKBP3A
2	15	02	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi	Rasio	N,A	N.A	60.00	367,235,930	65.00	367,713,337	70.00	368,228,135	75.00	368,780,478	80.00	369,370,526	80.00	1,841,328,406	Dishub
2	17	03	Program pengawasan dan	Persentase koperasi aktif	Persen	18.33	22.45	25.95	30,000,000	27.91	30,000,000	30.00	30,000,000	32.26	30,000,000	34.69	30,174,378	34.69	150,174,378	Dinas Koperasi UKM, Perindag



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				pemeriksaan koperasi																	
2	17	05		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi aktif	Persen	18.33	22.45	25.95	50,000,000	27.91	50,000,000	30.00	50,000,000	32.26	50,000,000	34.69	50,000,000	34.69	200,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag
2	17	07		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	6.00	7.00	10.00	30,000,000	15.00	63,000,000	20.00	63,000,000	25.00	63,000,000	30.00	63,000,000	30.00	282,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag
2	17	08		Program pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	6.00	7.00	10.00	0	15.00	220,000,000	20.00	221,000,000	25.00	221,000,000	30.00	221,000,000	30.00	883,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag
2	18	02		Program pengembangan iklim penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	906.9 M	1.0 T	1,5 T	19,998,640	2.5 T	320,997,552	3.5 T	359,795,594	4.5 T	446,632,068	5.5 T	549,937,723	5.5 T	1,697,361,577	Dinas PMPPTSP
2	18	03		Program promosi penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	906.9 M	1.0 T	1,5 T	79,998,800	2.5 T	143,997,840	3.5 T	259,196,112	4.5 T	526,553,002	5.5 T	839,795,403	5.5 T	1,849,541,157	Dinas PMPPTSP
2	19	02		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	N.A	N.A	5.00	926,637,590	5.00	2,891,937,500	10.00	3,165,000,000	15.00	3,308,000,000	20.00	4,719,600,000	20.00	15,011,175,090	Diskepora
2	23	02		Program pembinaan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	N.A	N.A	47.50	195,000,000	49.50	2,515,000,000	51.50	2,530,000,000	53.50	2,662,000,000	56.50	2,664,000,000	56.50	10,566,000,000	DPK
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	N.A	N.A	5.10		5.12		5.13		5.14		5.15		5.15		
3	25	03		Program	Produksi	Persen	13.32	15.59	18.24	247,490,000	21.34	267,500,000	24.96	284,705,450	29.21	291,956,675	34.18	306,748,122	34.18	1,398,400,247	Diskanak



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				pengelolaan perikanan tangkap	perikanan kelompok nelayan																
3	25	04		Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi Perikanan	Persen	29.50	32.59	36.01	627,091,630	39.79	742,229,500	43.97	788,220,100	48.58	792,868,120	53.67	813,653,508	53.67	3,764,062,858	Diskanak
3	25	05		Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	0.00	0.00	10.00	25,000,000	10.00	30,000,000	20.00	32,650,120	30.00	35,230,225	40.00	40,000,000	40.00	162,880,345	Diskanak
3	26	02		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kunjungan wisata	Orang	11,959	14808	18,335	150,000,000	22,703	150,195,000	28,111	150,405,273	34,808	150,630,881	43,099	150,871,890	43,099	752,103,044	Dinas Parbud
3	26	03		Program pemasaran pariwisata	Kunjungan wisata	Orang	11,959	14808	18,335	1,050,000,000	22,703	1,051,365,000	28,111	1,052,836,911	34,808	1,054,416,166	43,099	1,056,103,232	43,099	5,264,721,310	Dinas Parbud
3	26	05		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	PAD sektor pariwisata	Persen	0.27	0.46	0.78	150,000,000	1.34	150,195,000	2.28	150,405,273	3.88	150,630,881	6.61	150,871,890	6.61	752,103,044	Dinas Parbud
3	27	02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Provitas Padi	Ton/Ha	4.54	4.62	4.69	422,606,678	4.77	695,558,812	4.85	720,310,945	4.93	628,163,079	5.02	748,015,212	5.02	3,214,654,726	Dinas Pertanian	
				Provitas Jagung	Ton/Ha	7.15	7.29	7.42		7.57		7.71		7.86		8.00		8.00			
				Provitas Kedelai	Ton/Ha	1.35	1.37	1.39		1.41		1.43		1.45		1.47		1.47			
				Produksi Alpukat	Ton	6,014	7,189	8,593.8		10,273		12,280		14,680		17,549		17,549			
				Produksi Pisang	Ton	632.63	730.43	843.36		973.74		1,124		1,298		1,499		1,498.8			
				Produksi Kopi	Ton	50,854	51,363	51,877		52,395		52,919		53,448		53,983		53,983			
				Produksi Kopi	Ton	50,854	51,363	51,877		52,395		52,919		53,448		53,983		53,983			
3	27	03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Provitas Padi	Ton/Ha	4.54	4.62	4.69	191,978,144	4.77	4,538,000,000	4.85	4,610,920,000	4.93	4,692,380,000	5.02	4,773,840,000	5.02	18,807,118,144	Dinas Pertanian	
				Provitas Jagung	Ton/Ha	7.15	7.29	7.42		7.57		7.71		7.86		8.00		8.00			
				Provitas Kedelai	Ton/Ha	1.35	1.37	1.39		1.41		1.43		1.45		1.47		1.47			
				Produksi Alpukat	Ton	6,014	7,189	8,593.8		10,273		12,280		14,680		17,549		17,549			
				Produksi Pisang	Ton	632.63	730.43	843.36		973.74		1,124		1,298		1,499		1,498.8			
				Produksi Kopi	Ton	50,854	51,363	51,877		52,395		52,919		53,448		53,983		53,983			
				Produksi Kopi	Ton	50,854	51,363	51,877		52,395		52,919		53,448		53,983		53,983			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	30	03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/S IUP Toko Swalayan)	Persen	6.00	7.00	10.00	0	15.00	55,000,000	20.00	55,000,000	25.00	55,000,000	30.00	55,000,000	30.00	220,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag
3	31	02	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	4.00	6.00	10.00	80,000,000	12.00	1,152,000,000	13.00	1,153,000,000	15.00	1,156,000,000	17.00	1,158,000,000	17.00	4,699,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag
			Sasaran 1.5 Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	Skor	83.60	85.50	86.50		87.00		87.75		88.50		89.50		89.50		
2	09	02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Penguatan Cadangan Pangan	Persen	31.17	36.08	41.76	30,000,000	48.34	80,104,000	55.95	330,216,146	64.77	80,336,470	74.97	330,465,008	74.97	851,121,624	DKP
2	09	03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama	Persen	99.52	99.55	99.58	985,000,000	99.61	1,100,442,400	99.64	1,097,120,929	99.67	1,098,301,610	99.70	1,099,562,892	99.70	5,380,427,831	DKP



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026										
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp							
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
2	09	04		masyarakat		Persen	31.17	36.08	41.76		30,000,000	48.34		205,000,000	55.95		240,000,000	64.77		240,000,000	74.97		250,000,000	74.97		965,000,000	DKP
2	09	05		Program pengawasan keamanan pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	0.00	100	100		0	100		273,610,842	100		248,944,952	100		278,842,428	100		264,725,376	100		1,066,123,598	DKP
1	02	05		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase desa/ kelurahan yang melaksana- kan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	87.70	89.68	91.67		826,914,670	93.65		827,989,659	95.63		829,148,845	97.62		830,392,568	100		831,721,196	100		4,146,166,937	Dinkes
1	03	03		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk berakses Air Minum	Persen	83.26	85.13	87.04		4,472,055,000	88.99		4,477,868,672	90.98		4,484,137,688	93.02		4,490,863,894	95.11		4,498,049,276	95.11		22,422,974,530	Dinas PUPR
					Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak	Persen	54.82	59.08	63.67			68.62			73.95			79.69			85.88			85.88			
1	03	05		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Capaian Pelayanan SPALD-S Akses Dasar Air Limbah Domestik	Persen	71.46	72.54	100		3,237,103,000	100		3,241,311,234	100		3,245,849,070	100		3,250,717,843	100		3,255,918,992	100		16,230,900,139	Dinas PUPR
					Capaian Pelayanan SPALD- S Akses Aman Air Limbah Domestik	Persen	63.38	66.99	100			100			100			100			100			100			
					Capaian Pelayanan SPALD-T Akses Aman Air Limbah	Persen	66.43	69.42	100			100			100			100			100			100			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Domestik																	
				Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	63.75	67.86	100		100		100		100		100		100			
1	03	06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	40.71	45.09	49.93	1,200,000,000	55.30	1,201,560,000	61.25	1,203,242,184	67.83	1,205,047,047	75.12	1,206,975,123	75.12	6,016,824,354	Dinas PUPR	
1	04	04	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	22.87	22.84	22.79	2,239,420,100	22.76	2,239,731,346	22.74	2,240,066,970	22.71	2,240,427,070	22.69	2,240,811,754	22.69	11,200,457,240	Dinas Perkim	
2	11	02	Program perencanaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	N.A	66.46	66.99	250,000,000	67.53	260,000,000	68.06	270,000,000	68.59	280,000,000	69.12	290,000,000	69.12	1,350,000,000	DLH	
2	11	11	Program pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	9.18	13.56	20.04	4,057,592,414	29.61	4,062,867,284	43.75	4,068,555,298	64.64	4,074,658,131	95.50	4,081,177,584	95.50	20,344,850,712	DLH	
2	14	04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	40.80	44.16	47.80	100,000,000	51.74	100,130,000	56.00	100,270,182	60.62	100,420,587	65.61	100,581,260	65.61	501,402,029	Dinas PPKBP3A	
3	27	02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Provitas Padi	Ton/Ha	4.54	4.62	4.69	422,606,678	4.77	695,558,812	4.85	720,310,945	4.93	628,163,079	5.02	748,015,212	5.02	3,214,654,726	Dinas Pertanian	
		Provitas Jagung		Ton/Ha	7.15	7.29	7.42	7.57		7.71		7.86		8.00		8.00					
		Provitas Kedelai		Ton/Ha	1.35	1.37	1.39	1.41		1.43		1.45		1.47		1.47					
		Produksi Alpukat		Ton	6,014	7,189	8,593.8	10,273		12,280		14,680		17,549		17,549					
		Produksi Pisang		Ton	632.63	730.43	843.36	973.74		1,124		1,298		1,499		1,498.8					
		Produksi Kopi		Ton	50,854	51,363	51,877	52,395		52,919		53,448		53,983		53,983					
3	27	03		Program	Provitas Padi	Ton/Ha	4.54	4.62		4.69		191,978,144		4.77		4,538,000,000		4.85			4,610,920,000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Provitas Jagung	Ton/Ha	7.15	7.29	7.42		7.57		7.71		7.86		8.00		8.00		Pertanian
					Provitas Kedelai	Ton/Ha	1.35	1.37	1.39		1.41		1.43		1.45		1.47				
					Produksi Alpukat	Ton	6,014	7,189	8,593.8		10,273		12,280		14,680		17,549				
					Produksi Pisang	Ton	632.63	730.43	843.36		973.74		1,124		1,298		1,499		1,498.8		
					Produksi Kopi	Ton	50,854	51,363	51,877		52,395		52,919		53,448		53,983		53,983		
				Misi 2: Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat																	
				Tujuan 2 Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	N.A	B	B		B		BB		BB		A		A		
				Sasaran 2.1 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas	Nilai SAKIP	Skor	B	B	B		BB		BB		BB		A		A		
					Indeks kualitas perencanaan		N.A	B	B		B		B		B		A		A		
					Opini BPK		WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
4	01	02		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	100	5,220,968,570	100	5,288,372,052	100	5,544,394,659	100	5,806,472,088	100	6,081,661,943	100	27,941,869,312	Setda
4	01	03		Program perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan Program perekonomian dan pembangun-an	Persen	100	100	100	3,116,339,330	100	3,776,335,657	100	3,962,652,439	100	4,158,285,061	100	4,363,699,314	100	19,377,311,801	Setda
4	02	02		Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase rancangan perda yang dibahas	Persen	100	100	100	22,249,118,900	100	24,474,030,790	100	25,697,732,330	100	26,982,618,946	100	28,331,749,893	100	127,735,250,859	Set DPRD
5	01	02		Program perencanaan, pengendalian	Penjabaran konsistensi program	Persen	100	100	100	2,439,922,200	100	2,443,172,000	100	2,446,592,441	100	2,450,262,329	100	2,454,182,749	100	12,234,131,719	Bappeda Litbang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				dan evaluasi pembangunan daerah	RPJMD ke dalam RKPD																
5	01	03		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	100	3,187,579,880	100	3,309,296,500	100	3,313,929,515	100	3,318,900,409	100	3,324,210,650	100	16,453,916,954	Bappeda Litbang
5	02	02		Program pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	289,878,856,690	WTP	318,750,805,604	WTP	350,753,416,595	WTP	385,828,758,254	WTP	423,448,601,983	WTP	1,768,660,439,126	BPKAD
5	02	03		Program pengelolaan barang milik daerah	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	2,320,691,350	WTP	2,702,760,485	WTP	2,958,036,534	WTP	3,253,840,187	WTP	3,579,224,206	WTP	14,814,552,762	BPKAD
5	02	04		Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	4.33	5.27	5.31	2,939,746,140	5.70	2,943,567,810	6.09	2,947,688,805	6.48	2,952,110,338	6.87	2,956,833,715	6.87	14,739,946,808	Bapenda
				Sasaran 2.2 Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	N.A	N.A	70.20		70.30		70.40		7.50		70.60		70.60		
					Skor indeks inovasi daerah	Skor	358	550	700		1000		1200		1350		1550		1550		
4	01	02		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	100	5,220,968,570	100	5,288,372,052	100	5,544,394,659	100	5,806,472,088	100	6,081,661,943	100	27,941,869,312	Setda
4	01	03		Program perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan Program perekonomian dan pembangunan	Persen	100	100	100	3,116,339,330	100	3,776,335,657	100	3,962,652,439	100	4,158,285,061	100	4,363,699,314	100	19,377,311,801	Setda
2	12	03		Program pencatatan sipil	Persentase pelaksanaan pencatatan sipil	Persen	40.00	50.00	80.00	70,000,000	100	70,000,000	100	70,000,000	100	70,000,000	100	82,000,000	100	362,000,000	Disduk dan Capil
5	05	02		Program	Persentase	Persen	100	100	100	1,139,967,290	100	1,141,449,368	100	1,143,047,397	100	1,144,761,968	100	1,146,593,587	100	5,715,819,610	Bappeda



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				penelitian dan pengembangan daerah	Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah																Litbang
5	03	02		Program kepegawaian daerah	Indeks profesionalis me ASN	Indeks	N.A	N.A	71.00	1,504,338,120	72.00	1,506,293,760	73.00	1,508,402,571	74.00	1,510,665,175	75.00	1,513,082,239	75.00	7,542,781,864	BKPSDM
				Sasaran 2.3 Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah	Skor maturitas SPIP	Skor	2.45	3.00	3.10		3.10		3.20		3.30		3.30		3.30		
6	01	02		Program penyelenggaraa n pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2.45	3.00	3.10	2,236,825,950	3.10	2,280,812,740	3.20	2,478,894,014	3.30	2,695,783,415	3.30	2,933,361,757	3.30	12,625,677,876	Inspektorat Kabupaten
6	01	03		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2.45	3.00	3.10	370,352,010	3.10	390,000,000	3.20	400,000,000	3.30	410,000,000	3.30	420,000,000	3.30	1,990,352,010	Inspektorat Kabupaten
5	03	02		Program kepegawaian daerah	Indeks profesionalis me ASN	Indeks	N.A	N.A	71.00	1,504,338,120	72.00	1,506,293,760	73.00	1,508,402,571	74.00	1,510,665,175	75.00	1,513,082,239	75.00	7,542,781,864	BKPSDM
				Tujuan 3 Meningkatkan akses pendidikan berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65.30	67.01	67.23		67.67		68.30		68.94		69.58		69.58		
					Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.84	8.02	8.21		8.40		8.59		8.79		9.00		9.00		
					Angka harapan lama sekolah	Tahun	11.75	11.79	11.84		11.88		11.92		11.97		12.01		12.01		
				Sasaran 3.1	APM SD/MI	Persen	99.00	99.04	99.08		99.12		99.16		99.20		99.24		99.24		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						2020	2021	2022		2023		2024		2025					2026			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp					
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			Meningkatnya akses pendidikan berkualitas	APM SMP/MTs	Persen	78.68	78.70	78.72		78.74		78.76		78.78		78.80		78.80				
				APM SMA/SMK/MA	Persen	61.83	62.00	62.50		62.80		63.00		63.20		63.50		63.50				
				APK PAUD	Persen	47.62	51.10	54.83		58.83		63.12		67.73		72.68		72.68				
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	N.A	N.A	47.50		49.50		51.50		53.50		56.50		56.50				
1	01	02	Program pengelolaan pendidikan	Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD	Persen	99.00	99.04	99.08	83,926,603,517	99.12	84,035,708,102	99.16	84,153,358,093	99.20	84,279,588,130	99.24	84,414,435,471	99.24	420,809,693,313	Disdik		
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SD	Persen	78.68		78.70	78.72		78.74			78.76				78.78				78.80				78.80
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SMP	Persen	61.83		62.00	62.50		62.80			63.00				63.20				63.50				63.50
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	Persen	47.62		58.48	100		100			100				100				100				100
2	23	02	Program pembinaan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	N.A	N.A	47.50	195,000,000	49.50	2,515,000,000	51.50	2,530,000,000	53.50	2,662,000,000	56.50	2,664,000,000	56.50	10,566,000,000	DPK		
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	N.A	N.A	5.10				5.12				5.13					5.14	
			Tujuan 4 Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65.30	67.01	67.23		67.67		68.30		68.94		69.58		69.58				
				Angka usia harapan hidup	Tahun	67.04	67.48	67.93		68.38		68.83		69.29		69.75		69.75				
			Sasaran 4.1 Meningkatnya	Angka Kesakitan	Persen	17.46	16.39	15.39		14.46		13.57		12.75		11.97		11.97				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2020	2021	2022		2023		2024		2025					2026	
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		T	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			derajat kesehatan masyarakat	Kematian bayi		46	40	35		30		25		20		15		15		
				Kematian ibu		5	4	3		2		1		1		0		0		
				Persentase stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persen	2.79	2.59	2.49		2.39		2.29		2.09		1.89		1.89		
				Kategori kabupaten/ kota sehat (KKS)		-	-	-		Padapa		-		Wistara		-		Wistara		
				Cakupan peserta KB aktif	Persen	69.03	69.41	69.79		70.18		70.56		70.95		71.34		71.34		
1	02	02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	97.12	97.76	100	66,225,081,959	100	66,311,174,566	100	66,404,010,210	100	66,503,616,225	100	66,610,022,011	100	332,053,904,971	Dinkes
	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen		94.92	98.26	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen		84.32	86.98	100	100	100		100		100		100		100				
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen		92.07	92.11	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan	Persen		11.00	12.81	100	100	100		100		100		100		100				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025					2026	
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		T	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																	
				Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	3.23	4.42	100		100		100		100		100		100		100	
				Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	Persen	19.68	22.05	100		100		100		100		100		100		100	
				Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	10.12	40.20	100		100		100		100		100		100		100	
				Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	10.12	16.73	100		100		100		100		100		100		100	
				Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai	Persen	61.71	61.71	100		100		100		100		100		100		100	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Standar	Persen	32.80	36.97	100		100		100		100		100		100			
				Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar																	
				Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar																	
1	02	03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	2.65	2.78	2.91	103,543,170	3.05	103,677,776	3.20	103,822,925	3.36	103,978,659	3.52	104,145,025	3.52	519,167,556	Dinkes	
1	02	04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Persen	100	100	100	207,828,000	100	208,098,176	100	208,389,514	100	208,702,098	100	209,036,021	100	1,042,053,810	Dinkes	
1	02	05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase desa/ kelurahan yang melaksana- kan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	87.70	89.68	91.67	826,914,670	93.65	827,989,659	95.63	829,148,845	97.62	830,392,568	100	831,721,196	100	4,146,166,937	Dinkes	
1	02	02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0.039	0.039	0.043	23,370,146,131	0.048	23,400,527,321	0.053	23,433,288,059	0.058	23,468,437,991	0.062	23,505,987,492	0.062	117,178,386,995	RSUD Muaradua	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	14	02	Program pengendalian penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	0.37	0.21	0.21	100,000,000	0.20	100,130,000	0.20	100,270,182	0.19	100,420,587	0.19	100,581,260	0.19	501,402,029	Dinas PPKBP3A
2	14	03	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	20.83	21.91	23.05	4,872,666,000	24.25	4,879,000,466	25.51	4,885,831,066	26.84	4,893,159,813	28.23	4,900,988,869	28.23	24,431,646,214	Dinas PPKBP3A
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	30.07	30.00	29.93		29.85		29.78		29.71		29.64		29.64		
			Sasaran 4.2 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Peringkat pada porprov	Peringkat	-	3	-		3		-		3		-		3		
2	19	02	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	N.A	N.A	5.00	926,637,590	5.00	2,891,937,500	10.00	3,165,000,000	15.00	3,308,000,000	20.00	4,719,600,000	20.00	15,011,175,090	Diskepora
2	19	03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	N.A	N.A	10	744,000,000	10	892,800,000	10	1,071,360,000	10	1,285,632,000	10	3,993,792,000	10	7,987,584,000	Diskepora
			Tujuan 5 Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Indeks pembangunan gender (IPG)	Indeks	92.62	93.10	93.34		93.59		93.83		94.08		94.33		94.33		
				Indeks pemberdayaan gender	Indeks	55.33	55.87	55.96		56.06		56.14		56.15		56.35		56.35		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Sasaran 5.1 Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak	(IDG)																
					Kategori kabupaten layak anak (KLA)		-	Pratama	Madya		Nindya		Nindya		Utama		KLA		KLA		
				Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		-	-	Pratama		Madya		Madya		Utama		Mentor		Mentor			
2	08	02		Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	0.055	0.056	0.063	200,000,000	0.071	200,260,000	0.079	200,540,364	0.087	200,841,175	0.095	201,162,520	0.095	1,002,804,059	Dinas PPKBP3A
2	08	03		Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	16.00	14.00	12.00	13,970,000	10.00	200,000,000	8.00	200,000,000	6.00	200,000,000	4.00	200,000,000	4.00	813,970,000	Dinas PPKBP3A
2	08	07		Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0.022	0.020	0.018	40,070,000	0.016	200,000,000	0.014	200,000,000	0.012	200,000,000	0.010	200,000,000	0.010	840,070,000	Dinas PPKBP3A
				Misi 3: Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik																	
				Tujuan 6 Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas	Rata-rata waktu tempuh jalan Kabupaten	Km/ jam	N.A	28	30		35		40		40		45		45		
					Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	Persen	54.82	59.08	63.67		68.62		73.95		79.69		85.88		85.88		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	67.25	68.22	69.47		70.72		71.97		73.22		74.47		74.47		
			Sasaran 6.1 Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	53.37	57.59	62.14		67.04		72.34		78.06		84.22		84.22			
				Persentase rumah layak huni	Persen	77.13	77.32	77.52		77.71		77.91		78.10		78.30		78.30			
				Persentase penduduk berakses air minum	Persen	83.26	85.13	87.04		88.99		90.98		93.02		95.11		95.11			
				Rasio Elektrifikasi	Persen	67.62	70.98	74.52		78.22		82.11		86.20		90.49		90.49			
				Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	49,80	52.65	55.66		58.84		62.21		65.77		69.53		69.53			
1	03	02	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	67.25	68.22	69.47	38,358,615,884	70.72	38,259,108,985	71.97	38,259,640,708	73.22	38,260,211,208	74.47	38,260,820,654	74.47	191,398,397,439	Dinas PUPR	
1	03	03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk berakses Air Minum	Persen	83.26	85.13	87.04	4,472,055,000	88.99	4,477,868,672	90.98	4,484,137,688	93.02	4,490,863,894	95.11	4,498,049,276	95.11	22,422,974,530	Dinas PUPR	
				Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak	Persen	54.82	59.08	63.67		68.62		73.95		79.69		85.88		85.88			
1	03	05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Capaian Pelayanan SPALD-S Akses Dasar Air Limbah Domestik	Persen	71.46	72.54	100	3,237,103,000	100	3,241,311,234	100	3,245,849,070	100	3,250,717,843	100	3,255,918,992	100	16,230,900,139	Dinas PUPR	
				Capaian Pelayanan	Persen	63.38	66.99	100		100		100		100		100		100			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					SPALD- S Akses Aman Air Limbah Domestik																
					Capaian Pelayanan SPALD-T Akses Aman Air Limbah Domestik	Persen	66.43	69.42	100		100		100		100		100		100		
					Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	63.75	67.86	100		100		100		100		100		100		
1	03	10		Program penyelenggaraa n jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	53.37	57.59	62.14	757,423,986,932	67.04	916,474,820,681	72.34	563,990,969,337	78.06	1,111,531,368,914	84.22	919,822,252,175	84.22	4,269,243,398,039	Dinas PUPR
2	15	02		Program penyelenggaraa n lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi	Rasio	N,A	N.A	60.00	367,235,930	65.00	367,713,337	70.00	368,228,135	75.00	368,780,478	80.00	369,370,526	80.00	1,841,328,406	Dishub
1	04	02		Program pengembangan perumahan	Persentase rumah layak huni	Persen	77.13	77.32	77.52	1,041,344,600	77.71	1,041,793,684	77.91	1,042,277,943	78.10	1,042,797,517	78.30	1,043,352,561	78.30	5,211,566,305	Dinas Perkim
					Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persen	75.00	75.00	100		100		100		100		100		100		
					Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi	Persen	0.00	10.00	100		100		100		100		100		100		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota																
1	04	05		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	0.78	0.79	0.93	28,831,934,700	1.09	28,869,372,568	1.23	28,909,737,684	1.25	28,953,056,936	1.28	28,999,328,107	1.28	144,563,429,995	Dinas Perkim
1	04	06		Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase rumah layak huni	Persen	77.13	77.32	77.52	0	77.71	200,000,000	77.91	200,000,000	78.10	200,000,000	78.30	200,000,000	78.30	800,000,000	Dinas Perkim
2	16	02		Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persen	N.A	N.A	40.00	1,330,000,000	45.00	1,331,729,000	50.00	1,333,593,421	55.00	1,335,593,811	60.00	1,337,730,761	60.00	6,668,646,992	Dinas Kominfo
				Sasaran 6.2 Meningkatnya ketangguhan	Respon Cepat Darurat Bencana	Persen	36.11	42.38	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026								
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp							
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
			terhadap bencana																					
1	05	03	Program penanggulan n bencana	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	36.11	42.38	100	3,430,000,000	100	4,255,000,000	100	4,935,000,000	100	5,460,000,000	100	5,655,000,000	100	23,735,000,000	BPBD				
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiaga- an Terhadap Bencana	Persen	100	100	100				100				100					100		100	
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persen	49.80	50.54	100				100				100					100		100	
			Sasaran 6.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	N.A	52.60	52.70		52.80		52.90		53.00		53.10		53.10						
				Indeks kualitas udara	Indeks	N.A	92.62	92.72		92.82		92.92		93.02		93.12		93.12						
				Indeks kualitas lahan	Indeks	N.A	41.85	43.94		46.03		48.12		50.21		52.30		52.30						
2	11	02	Program perencanaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	N.A	66.46	66.99	250,000,000	67.53	260,000,000	68.06	270,000,000	68.59	280,000,000	69.12	290,000,000	69.12	1,350,000,000	DLH				
2	11	06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan,	Persen	100	100	100	100,000,000	100	110,000,000	100	120,000,000	100	130,000,000	100	140,000,000	100	600,000,000	DLH				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					izin PPLH dan PUU LH dari yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota																
2	11	10		Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/ kota	Persen	100	100	100	80,459,520	100	80,564,117	100	80,676,907	100	80,797,923	100	80,927,199	100	403,425,666	DLH
2	11	11		Program pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	9.18	13.56	20.04	4,057,592,414	29.61	4,062,867,284	43.75	4,068,555,298	64.64	4,074,658,131	95.50	4,081,177,584	95.50	20,344,850,712	DLH
				Sasaran 6.4 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	Persen	61.11	60.35	59.59		58.85		58.11		57.38		56.67				
2	13	02		Program penataan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0.00	0.00	0.00	0	5.00	100,000,000	5.00	100,140,000	7.00	100,290,210	9.00	100,450,674	9.00	400,880,884	Dinas PMPD
2	13	03		Program peningkatan kerjasama desa	Persentase desa tertinggal dan desa sangat	Persen	61.11	60.35	59.59	0	58.85	100,000,000	58.11	100,140,000	57.38	100,290,210	56.67	100,450,674	56.67	400,880,884	Dinas PMPD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	13	04		Program administrasi pemerintahan desa	tertinggal Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	Persen	61.11	60.35	59.59	233,948,680	58.85	4,468,201,493	58.11	368,529,447	57.38	5,218,881,318	56.67	369,257,211	56.67	10,658,818,149	Dinas PMPD
2	13	05		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	Persen	61.11	60.35	59.59	2,139,999,870	58.85	2,142,781,870	58.11	2,145,781,764	57.38	2,149,000,437	56.67	2,152,438,838	56.67	10,730,002,779	Dinas PMPD
				Sasaran 6.5 Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Rasio	50.72	50.72	54.00		58.00		62.00		66.00		70.00		70.00		
1	03	12		Program penyelenggaraa n penataan ruang	Luas wilayah produktif	Persen	97.74	97.74	97.74	2,529,974,780	97.74	2,533,263,747	97.74	2,536,810,316	97.74	2,540,615,532	97.74	2,544,680,517	97.74	12,685,344,892	Dinas PUPR
				Misi 4: Menciptakan kondisi investasi yang kondusif																	
				Tujuan 7 Meningkatkan investasi yang kondusif	Nilai investasi	Rupiah	906.9 milyar	1,0 triliun	1,5 triliun		2,5 triliun		3,5 triliun		4,5 triliun		5,5 triliun		5,5 triliun		
				Sasaran 7.1 Meningkatnya investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	11	11	14		16		18		22		26		26		
2	18	02		Program pengembangan iklim penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	906.9 M	1.0 T	1,5 T	19,998,640	2.5 T	320,997,552	3.5 T	359,795,594	4.5 T	446,632,068	5.5 T	549,937,723	5.5 T	1,697,361,577	Dinas PMPPTSP
2	18	03		Program promosi penanaman	Nilai investasi berskala nasional	Rupiah	906.9 M	1.0 T	1,5 T	79,998,800	2.5 T	143,997,840	3.5 T	259,196,112	4.5 T	526,553,002	5.5 T	839,795,403	5.5 T	1,849,541,157	Dinas PMPPTSP



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	18	04	modal	(PMDN/PMA)	Rupiah	906,9 M	1.0 T	1,5 T	25,374,200	2.5 T	170,374,200	3.5 T	180,374,200	4.5 T	220,374,200	5.5 T	250,374,200	5.5 T	846,871,000	Dinas PMPPTSP	
2	18	05	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	906,9 M	1.0 T	1,5 T	340,521,720	2.5 T	612,939,096	3.5 T	1,103,290,373	4.5 T	1,985,922,671	5.5 T	3,574,660,808	5.5 T	7,617,334,668	Dinas PMPPTSP	
2	18	06	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	906,9 M	1.0 T	1,5 T	10,243,320.00	2.5 T	18,437,976	3.5 T	33,188,357	4.5 T	59,739,042	5.5 T	107,530,276	5.5 T	229,138,971	Dinas PMPPTSP	
			Sasaran 7.2 Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Persen	71.47	72.88	74.29		75.70		77.11		78.52		79.93		79.93			
2	07	02	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	0.00	0.00	0.00	0	10.00	150,000,000	15.00	150,000,000	20.00	150,210,000	25.00	150,435,315	25.00	600,645,315	Disnakertrans	
2	07	03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	N.A	N.A	0.032	25,067,546	0.054	25,067,546	0.108	25,067,546	0.215	25,105,147	0.323	25,145,315	0.323	125,453,100	Disnakertrans	
2	07	04	Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	N.A	10.00	10.00	74,998,420	10.00	75,095,918	20.00	75,201,052	40.00	75,313,854	50.00	75,434,356	50.00	376,043,600	Disnakertrans	
2	07	05	Program hubungan industrial	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	N.A	N.A	3.32	139,998,970	3.44	140,180,969	3.57	140,377,222	3.71	140,587,788	3.85	140,812,728	3.85	701,957,677	Disnakertrans -	
2	17	05	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi aktif	Persen	18.33	22.45	25.95	50,000,000	27.91	50,000,000	30.00	50,000,000	32.26	50,000,000	34.69	50,000,000	34.69	200,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag	
2	17	07	Program pemberdayaan	Meningkatnya Usaha Mikro	Persen	6.00	7.00	10.00	30,000,000	15.00	63,000,000	20.00	63,000,000	25.00	63,000,000	30.00	63,000,000	30.00	282,000,000	Dinas Koperasi UKM,	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	yang menjadi wirasausaha															Perindag	
2	19	02		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyara-katan	Persen	N.A	N.A	5.00	926,637,590	5.00	2,891,937,500	10.00	3,165,000,000	15.00	3,308,000,000	20.00	4,719,600,000	20.00	15,011,175,090	Diskepora
3	25	03		Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	13.32	15.59	18.24	247,490,000	21.34	267,500,000	24.96	284,705,450	29.21	291,956,675	34.18	306,748,122	34.18	1,398,400,247	Diskanak
3	25	05		Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	0.00	0.00	10.00	25,000,000	10.00	30,000,000	20.00	32,650,120	30.00	35,230,225	40.00	40,000,000	40.00	162,880,345	Diskanak
3	26	02		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kunjungan wisata	Orang	11,959	14808	18,335	150,000,000	22,703	150,195,000	28,111	150,405,273	34,808	150,630,881	43,099	150,871,890	43,099	752,103,044	Dinas Parbud
3	26	03		Program pemasaran pariwisata	Kunjungan wisata	Orang	11,959	14808	18,335	1,050,000,000	22,703	1,051,365,000	28,111	1,052,836,911	34,808	1,054,416,166	43,099	1,056,103,232	43,099	5,264,721,310	Dinas Parbud
3	26	05		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	PAD sektor pariwisata	Persen	0.27	0.46	0.78	150,000,000	1.34	150,195,000	2.28	150,405,273	3.88	150,630,881	6.61	150,871,890	6.61	752,103,044	Dinas Parbud
3	27	07		Program penyuluhan pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Persen	47.10	51.04	55.31	702,274,640	59.94	997,420,133	64.96	1,021,565,626	70.40	1,041,211,118	76.29	1,060,856,611	76.29	4,823,328,128	Dinas Pertanian
				Sasaran 7.3 Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas		0.48	0.37	0.29		0.22		0.17		0.13		0.10		0.10		
					Jumlah konflik	Konflik	5	5	4		0		0		0		0		0		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					IPOLEKSOS-BUD																
1	05	02		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penegakan Perda	Persen	100	100	100	2,376,000,000	100	2,411,000,000	100	2,408,000,000	100	2,415,000,000	100	2,418,000,000	100	12,028,000,000	Satpol PP dan Damkar
8	01	03		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Tingkat Partispasi politik masyarakat dalam pemilu serentak	Persen	86.00	86.00	90.00	1,089,559,558	90.00	1,241,559,558	90.00	1,489,871,470	90.00	1,787,845,764	90.00	2,145,414,916	90.00	7,754,251,266	Badan Kesbang Pol
8	01	04		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakata n	Jumlah konflik IPOLEKSOS-BUD	Konflik	5	5	4	42,596,310	0	194,596,310	0	233,515,572	0	280,218,686	0	336,262,424	0	1,087,189,302	Badan Kesbang Pol
8	01	05		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Jumlah konflik IPOLEKSOS-BUD	Konflik	5	5	4	66,226,960	0	499,465,340	0	599,358,408	0	719,230,090	0	863,076,108	0	2,747,356,906	Badan Kesbang Pol
8	01	06		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Jumlah konflik IPOLEKSOS-BUD	Konflik	5	5	4	79,238,380	0	281,238,380	0	337,486,056	0	404,983,267	0	485,979,921	0	1,588,926,004	Badan Kesbang Pol





BAB VII

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

7.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kewilayahan

Adapun tujuan penataan ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah “Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata dan pertambangan”. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata dan pertambangan. Kebijakan penataan ruang meliputi:

- a. pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan yang optimal;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan yang terpadu dan merata diseluruh wilayah;
- c. peningkatan fungsi kawasan lindung;
- d. pengembangan potensi pertanian dan perkebunan didukung sektor industri pengolahan yang berwawasan lingkungan;
- e. pengembangan pariwisata unggulan yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya;
- f. peningkatan daya saing daerah melalui pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan; dan
- g. penetapan kawasan strategis dalam mengembangkan sektor ekonomi potensial, sosial budaya dan daya dukung lingkungan hidup.

Strategi penataan ruang yang ditetapkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan yang optimal.
 - a. Mengembangkan sistem pusat-pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan; dan
 - b. Memantapkan fungsi pusat-pusat kegiatan dan pengembangan sarana prasarana.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan yang terpadu dan merata diseluruh wilayah.
 - a. Mengembangkan dan mengoptimalkan prasarana transportasi darat dan udara yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung sektor ekonomi wilayah;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan energi listrik dan energi baru terbarukan;
 - c. Mengembangkan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten;
 - d. Mengembangkan dan mengoptimalkan prasarana sumber daya air dengan pembangunan waduk dan jaringan irigasi;



- e. Meningkatkan cakupan wilayah pelayanan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan;
 - f. Mengembangkan sistem pengolahan limbah domestik dan non domestik;
 - g. Mengembangkan cakupan pelayanan jaringan persampahan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah;
 - h. Mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi jaringan evakuasi bencana; dan
 - i. Mengembangkan ruang terbuka hijau pada permukiman perkotaan dengan proporsi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.
3. Peningkatan fungsi kawasan lindung.
- a. Menetapkan luas dan lokasi kawasan lindung;
 - b. Melakukan penghijauan pada kawasan yang memiliki kelerengan di atas 40%;
 - c. Meningkatkan perlindungan kawasan yang memiliki karakteristik fungsi lindung; dan
 - d. Melakukan pengolahan tanah dengan pola terasiring dan penghijauan pada lahan rawan longsor dan erosi.
4. Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan didukung sektor industri pengolahan yang berwawasan lingkungan.
- a. Strategi pengembangan pertanian, meliputi:
 - Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan;
 - Meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan alat teknologi pertanian;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur untuk budidaya pertanian;
 - Mengembangkan dan memelihara jaringan sumber daya air dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - Mengembangkan kawasan agropolitan dengan industri pengolahan; dan
 - Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian
 - b. Strategi pengembangan perkebunan, meliputi:
 - Mengembangkan perkebunan yang produktif berdasarkan karakteristik wilayah;
 - Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan;
 - Meningkatkan produksi perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi; dan
 - Penelitian dan pengembangan sumber daya perkebunan.



5. Pengembangan pariwisata unggulan yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya.
 - a. Mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan;
 - b. Memantapkan dan meningkatkan akses prasarana dan sarana, keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata;
 - c. Memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur termasuk cagar budaya dan situs-situs bersejarah;
 - d. Memelihara, melestarikan dan mengembangkan produk usaha kepariwisataan daerah; dan
 - e. Menjaga kekayaan alam sebagai keterpaduan dengan pengembangan pariwisata.
6. Peningkatan daya saing daerah melalui pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.
 - a. Meningkatkan kegiatan eksplorasi dan produksi wilayah usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan yang melibatkan sinergitas dan integrasi antara Pemerintah dan masyarakat;
 - b. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan yang ramah lingkungan; dan
 - c. Meningkatkan pengelolaan air tanah melalui rencana pemanfaatan, recharging atau pengisian kembali dan pengendalian pemanfaatan
7. Penetapan kawasan strategis dalam mengembangkan sektor ekonomi potensial, sosial budaya dan daya dukung lingkungan hidup.
 - a. Strategi pengembangan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - Mengembangkan dan menata sentra-sentra produksi pertanian dengan komoditas unggulan yang didukung sarana dan prasarana agribisnis;
 - Mengembangkan dan menata objek wisata unggulan yang terkait antar kawasan; dan
 - Mengembangkan dan menata pusat pertumbuhan ekonomi baru.
 - b. Strategi pengembangan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
 - Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya luhur; dan
 - Melestarikan situs sejarah di wilayah kabupaten
 - c. Strategi pengembangan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 - Mengembangkan dan menata ruang wilayah dalam mendukung fungsi kawasan lindung; dan
 - Melestarikan ekosistem dan sumber daya alam bagi perlindungan waduk



7.2. Sistem Pusat Kegiatan

Secara umum kriteria fungsi sistem perkotaan/pusat kegiatan yang digunakan untuk lingkup wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai berikut:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa Kecamatan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan diketahui bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada di Kecamatan Muaradua. PKL Perkotaan Muaradua ini diarahkan sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, pusat ekonomi, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan olahraga, pusat pelayanan transportasi, pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan.

b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa. Arahkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, adalah:

1. Perkotaan Banding Agung di Kecamatan Banding Agung.
2. Perkotaan Kota Way di Kecamatan Buay Pemaca.
3. Perkotaan Pulau Beringin di Kecamatan Pulau Beringin.
4. Perkotaan Simpangan di Kecamatan Simpang.
5. Perkotaan Gunung Terang di Kecamatan Buay Sandang Aji.
6. Perkotaan Pagar Dewa di Kecamatan Muaradua Kisam.

c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Arahkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Ogan Komering Selatan, adalah:

1. Perkotaan Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
2. Perkotaan Tanjung Besar di Kecamatan Mekakau Ilir.
3. Perkotaan Simpang Sender di Kecamatan BPR Ranau Tengah.
4. Perkotaan Gunung Cahya di Kecamatan Buay Rawan.
5. Perkotaan Tenang di Kecamatan Kisam Tinggi
6. Perkotaan Sura di Kecamatan Runjung Agung.
7. Perkotaan Simpang Luas di Kecamatan Sungai Are.
8. Perkotaan Belambangan di Kecamatan Buay Runjung.
9. Perkotaan Ulu Danau di Kecamatan Sindang Danau.
10. Perkotaan Surabaya di Kecamatan Tiga Dihaji.



11. Perkotaan Pulau Kemiling di Kecamatan Kisam Ilir.

12. Perkotaan Jagaraga di Kecamatan Buana Pemaca.

Adapun arahan pengembangan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan perdesaan berbasis potensi dasar yang dimiliki, diantaranya melalui:
 - Kawasan perdesaan yang memiliki potensi dibidang pertanian tanaman pangan perlu dikembangkan sebagai komoditi andalan terutama di Kecamatan Buana Pemaca.
 - Kawasan perdesaan yang berbasis potensi perikanan terutama dikembangkan di Kecamatan Buay Pemaca.
 - Kawasan perdesaan yang berbasis potensi peternakan terutama dikembangkan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
 - Kawasan perdesaan yang berbasis potensi wisata di Kecamatan Sindang Danau.
 - Kawasan perdesaan yang memiliki potensi sebagai pusat pengolahan dan hasil pertanian termasuk lumbung modern pada pusat produksi di kawasan perdesaan.
2. Pengembangan Pusat Desa mulai dari Tingkat Dusun sampai Pusat Desa secara berhirarki, diantaranya melalui:
 - Pembentukan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun terutama pada permukiman perdesaan yang berbentuk cluster;
 - Pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri;
 - Pengembangan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi melalui desa pusat pertumbuhan; serta
 - Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.

Tabel VII.1

Pengembangan Fungsi Pusat Pelayanan Kabupaten

No.	Sistem Perkotaan	Kecamatan	Cakupan Pelayanan	Fungsi Prioritas Yang Diarahkan
1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Muaradua (PKL Muaradua)	Seluruh Wilayah Kabupaten	- Pusat Pemerintahan dan Perkantoran - Pusat perdagangan dan jasa skala regional/lokal - Pusat Pengembangan fasilitas pelayanan skala regional - Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman - Pengembangan terbatas pertanian, perkebunan perikanan dan peternakan
2.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Banding Agung (PPK Banding Agung)	Kecamatan Banding Agung, BPR Ranau Tengah, dan Warkuk	- Pengembangan fasilitas pelayanan skala kawasan - Pengembangan kawasan pariwisata



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Sistem Perkotaan	Kecamatan	Cakupan Pelayanan	Fungsi Prioritas Yang Diarahkan
			Rantau Selatan	- Pengembangan fasilitas transportasi skala regional - Pengembangan jasa pariwisata skala regional - Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman - Pengembangan pertanian
		Buay Pemaca (PPK Kota Way)	Buay Pemaca dan Buay Rawan	- Pengembangan fasilitas pelayanan skala kawasan - Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman - Kawasan sentra peternakan rakyat - Kawasan pertambangan - Pengembangan kawasan pariwisata - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
		Pulau Beringin (PPK Pulau Beringin)	Kecamatan Pulau Beringin, Sungai Are, Sindang Danau dan Mekakau Iliir	- Pengembangan fasilitas pelayanan skala kawasan - Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman - Kawasan Agropolitan - Pengembangan kawasan pariwisata - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
		Buay Sandang Aji (PPK Gunung Terang)	Kecamatan Buay Sandang aji, Tiga Dihaji Runjung Agung dan Buay Runjung	- Pengembangan fasilitas pelayanan skala kawasan - Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman - Kawasan pertambangan - Pengembangan kawasan pariwisata - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
		Muaradua Kisam (PPK Pagar Dewa)	Kecamatan Muaradua Kisam, Kisam Iliir dan Kisam Tinggi	- Pengembangan fasilitas pelayanan skala kawasan - Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman - Kawasan pengembangan energi - Pengembangan kawasan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Sistem Perkotaan	Kecamatan	Cakupan Pelayanan	Fungsi Prioritas Yang Diarahkan
3.	Pusat Pelayan Lingkungan (PPL)	Warkuk Ranau Selatan (IKK Pilla)	Kecamatan Warkuk Ranau Selatan	pariwisata - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
				- Pengembangan fasilitas pelayanan skala kawasan - Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman - Pengembangan kawasan pariwisata - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan - Kawasan Militer
				- Pengembangan fasilitas pelayanan skala lingkungan - Pusat Kawasan Minapolitan - Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman - Pengembangan kawasan pariwisata - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
				- Pengembangan fasilitas pelayanan skala lingkungan - Pengembangan kawasan pariwisata - Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
3.	Pusat Pelayan Lingkungan (PPL)	Warkuk Ranau Selatan (IKK Pilla)	Kecamatan Warkuk Ranau Selatan	- Pengembangan fasilitas pelayanan skala lingkungan - Pusat Kawasan Minapolitan - Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman - Pengembangan kawasan pariwisata - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
				- Pengembangan fasilitas pelayanan skala lingkungan - Pengembangan kawasan pariwisata - Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
				- Pengembangan fasilitas pelayanan skala lingkungan - Pengembangan kawasan pariwisata - Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
				- Pengembangan fasilitas pelayanan skala lingkungan - Pengembangan kawasan pariwisata - Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Sistem Perkotaan	Kecamatan	Cakupan Pelayanan	Fungsi Prioritas Yang Diarahkan
				pertambangan - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan - Kawasan industr
		Kisam Tinggi (IKK Tenang)	Kecamatan Kisam Tinggi	- Pengembangan fasilitas pelayanan skala lingkungan - Pengembangan kawasan pariwisata - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
		Runjung Agung (IKK Sura	Kecamatan Runjung Agung	- Pengembangan fasilitas pelayanan skala lingkungan - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
		Sungai Are (IKK Simpang Luas)	Kecamatan Sungai Are	- Pengembangan fasilitas pelayanan skala lingkungan - Pengembangan kegiatan pertambangan - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
		Buay Runjung (IKK Belambangan	Kecamatan Buay Runjung	- Pengembangan fasilitas pelayanan skala lingkungan - Pengembangan kegiatan pertambangan - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
		Sindang Danau (IKK Ulu Danau)	Kecamatan Sindang Danau	- Pengembangan fasilitas pelayanan skala lingkungan - Pengembangan kawasan pariwisata - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
		Tiga Dihaji (IKK Surabaya)	Kecamatan Tiga dihaji	- Pengembangan fasilitas pelayanan skala lingkungan - Pengembangan kawasan pariwisata - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
		Kisam Ilir (IKK Pulau	Kecamatan Kisam Ilir	- Pengembangan fasilitas pelayanan skala



No.	Sistem Perkotaan	Kecamatan	Cakupan Pelayanan	Fungsi Prioritas Yang Diarahkan
		Kemiling)		lingkungan - Pengembangan kawasan pariwisata - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
		Buana Pemaca (IKK Jagaraga)	Kecamatan Buana Pemaca	- Pengembangan fasilitas pelayanan skala lingkungan - Pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan

Sumber: RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040

7.3. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

7.3.1. Jaringan Jalan

Rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri atas:

1. Jaringan Jalan Provinsi di dalam Wilayah Kabupaten

Jalan Provinsi merupakan Jalan Kolektor Primer (JKP) Dua dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota, atau antar Ibukota Kabupaten/Kota, dan Jalan Strategis Provinsi.

- Ruas Jalan Baturaja-Sp. Martapura;
- Ruas Jalan Sp. Martapura-Muaradua;
- Ruas Jalan Muaradua-Kota Batu-BTS. Prov. Lampung;
- Ruas Jalan Muaradua-Sp. Haji;
- Ruas Jalan Sp. Haji-Sp. Campang; dan
- Ruas Jalan Sp. Campang-Ujan Mas-BTS. Prov. Bengkulu

Peningkatan status Jalan Provinsi di dalam Kabupaten yang diusulkan menjadi status Jalan Nasional dengan fungsi sebagai Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) adalah:

- Ruas Jalan SP. Martapura - Muaradua; dan
- Ruas Jalan Muaradua-Kota Batu-BTS. Prov. Lampung

Peningkatan status Jalan Kabupaten yang diusulkan menjadi status Jalan Provinsi dengan fungsi sebagai Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2), adalah:

- Ruas Jalan Banding Agung-Pulau Beringin;
- Ruas Jalan Sp. Peninggiran-Sukabumi; dan
- Ruas Jalan Villa-Banding Agung.

2. Jaringan Jalan Kabupaten

Jaringan jalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri dari Jalan Kolektor Primer (JKP) Empat dan Jalan Lokal Primer (JLP) dalam sistem jaringan jalan primer tidak termasuk pada Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan Ibukota



Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, antar Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan Jalan Strategis Kabupaten.

- Jalan Kolektor Primer (JKP) Empat
Pengembangan jaringan JKP-4 diarahkan pada ruas jalan yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 600/58/KPTS/PU/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan dan Jembatan Kabupaten serta Ruas Jalan Potensial Yang Menghubungkan Antar Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Jalan Lokal Primer (JLP)
Jalan lingkungan merupakan jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder di dalam kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.

3. Rencana Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan
Berdasarkan arahan rencana jaringan jalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan rencana pengembangan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dapat dilihat pada Tabel VII.2 berikut ini.

Tabel VII.2
Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

No.	Fungsi Jalan	Badan Jalan (M)	Rumaja (M)	Rumija (M)	Ruwasja (M)
A	KOLEKTOR PRIMER K1	9			
1	Perumahan (rumah)		13	18	9
2	Kegiatan usaha		13	18	9
3	Pendidikan		13	18	9
B	KOLEKTOR PRIMER K2	9			
1	Perumahan (rumah)		13	18	8
2	Kegiatan usaha		13	18	8
3	Pendidikan		13	18	8
C	KOLEKTOR PRIMER K3	9			
1	Perumahan (rumah)		13	18	7
2	Kegiatan usaha		13	18	7
3	Pendidikan		13	18	7
D	LOKAL PRIMER	7.5			
1	Perumahan (rumah)		10.5	15	5
2	Kegiatan usaha		10.5	15	5
3	Pendidikan		10.5	15	5
E	LINGKUNGAN	6.5			
1	Perumahan (rumah)		6.5	13	3.5
2	Kegiatan usaha		6.5	13	3.5
3	Pendidikan		6.5	13	3.5
F	JALAN STRATEGIS	6.5			
1	Perumahan (rumah)		10.5	15	5
2	Kegiatan usaha		10.5	15	5
3	Pendidikan		10.5	15	5

Sumber: RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040



4. Rencana Pengembangan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- Untuk menunjang transportasi darat di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diarahkan rencana pengembangan fasilitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun arahan pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
- Pembangunan Terminal Tipe B sebagai terminal induk di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
 - Pengembangan Terminal Tipe C sebagai pendukung kegiatan pusat pelayanan kawasan dan potensi kegiatan.
 - Pengembangan jembatan timbang pada akses utama yang berbatasan dengan Kabupaten sekitar.
 - Pengembangan pangkalan angkutan umum atau halte/shelter di tiap ruas jalan atau pada pusat-pusat kegiatan di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
 - Pengembangan trayek/rute angkutan umum sampai ke pusat-pusat permukiman penduduk dan penambahan jumlah armada angkutan umum.

Arahan rencana pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

- **Terminal Penumpang**
Rencana pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri dari;
 - Pembangunan Terminal Tipe B di Kecamatan Muaradua.
 - Pembangunan Terminal Tipe C di Kecamatan Simpang.
 - Pembangunan Terminal Tipe C di Kecamatan Pulau Beringin.
 - Pembangunan Terminal Tipe C Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
 - Pembangunan Terminal Tipe C Kecamatan Banding Agung.
 - Pembangunan Terminal Tipe C Kecamatan Buay Sandang Aji.
- **Jembatan Timbang**
Rencana pengembangan jembatan timbang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan:
 - Pembangunan jembatan timbang di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
 - Pembangunan jembatan timbang di Kecamatan Simpang.
 - Pembangunan jembatan timbang di Kecamatan Pulau Beringin.
- **Rencana Pengaturan Rute Angkutan umum**
Pengaturan terhadap rute angkutan umum adalah pelayanan angkutan umum dalam trayek dan angkutan umum tidak dalam trayek.
 - **Angkutan Umum Dalam Trayek**
Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan ini terdiri dari jaringan trayek angkutan penumpang dan jaringan lintas angkutan barang. Rencana pengembangan jaringan



pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diarahkan untuk mengembangkan jalur yang sudah ada dengan meningkatkan jumlah armada angkutan penumpang dan barang.

- Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek

Rencana pengembangan angkutan umum tidak dalam trayek meliputi seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Wilayah operasi angkutan umum tidak dalam trayek di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diatur di dalam Keputusan Bupati.

7.3.2. Jaringan Sungai Danau dan Penyebrangan

Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) mempunyai peran yang sangat besar dalam menghubungkan antar daerah. Peran angkutan sungai, danau dan penyeberangan menjadi penyambung moda (multimoda) salah satunya sebagai jembatan yang menyambungkan sistem jaringan jalan raya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Salah satu pengembangan jaringan ASDP di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah mengembangkan jaringan penyeberangan Danau Ranau yang menghubungkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan wilayah sekitar danau dan mengembangkan penyeberangan yang mendukung daya tarik wisata di Kawasan Danau Ranau. Arahkan pengembangan jaringan penyeberangan danau, meliputi:

1. Tatanan Penyeberangan

Jaringan angkutan danau dan penyeberangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi rencana pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan di Kecamatan Banding Agung (Danau Ranau). Pelabuhan lintas penyebrangan menghubungkan antar Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Pelabuhan ini difungsikan sebagai penghubung antar desa dan sebagai penunjang aktifitas pariwisata. Rencana penyeberangan tersebut akan melayani simpul (terminal penyeberangan) khusus Desa-Desa terkait kawasan Danau Ranau.

Untuk mendukung pengembangan sistem transportasi danau tersebut perlu didukung oleh pengembangan sistem dermaga. Dalam hal ini dermaga yang dikembangkan mengacu pada arahan hirarki pusat pelayanan pada RTRW, maka ditetapkan fungsi-fungsi dermaga, sebagai berikut:

- Dermaga adalah dermaga yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan danau, alih muat angkutan danau, dan sebagai penghubung antar obyek wisata melalui jalur air, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan di wilayah sekitar Danau Ranau.



- Perencanaan pengembangan dermaga yang direncanakan di Kecamatan Banding Agung, BPR Ranau Tengah dan Warkuk Ranau Selatan yang terkait dengan kawasan wisata Danau Ranau.
- Pelabuhan penyeberangan angkutan danau berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan berada di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan BPR Ranau Tengah, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.

2. Alur Pelayaran

a) Alur Pelayaran Lintas Penyeberangan

Alur pelayaran melayani alih muat angkutan orang/barang transportasi danau yang direncanakan dari dermaga dalam kawasan Danau Ranau. Alur pelayaran ini merupakan alur pelayaran kelas III, sebagai berikut:

1) Lintas penyeberangan antar Provinsi, meliputi:

- Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan-Lumbok Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung; dan
- Kota Batu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan-Lumbok Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.

2) Lintas penyeberangan dalam Kabupaten, meliputi:

- Banding Agung-Kota Batu;
- Banding Agung-BPR Ranau Tengah; dan
- Kota Batu-BPR Ranau Tengah.

b) Alur Pelayaran Untuk Kegiatan Angkutan Danau

Alur pelayaran untuk angkutan danau merupakan alur khusus dermaga wisata dimanfaatkan untuk berbagai tujuan wisata Kawasan Danau Ranau.

7.3.3. Jaringan Transportasi Udara

Sarana transportasi udara sangat berperan penting bagi pengembangan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terutama dalam hubungan intrawilayah dan antarwilayah. Bandar udara memiliki peran sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya, pintu gerbang kegiatan perekonomian, tempat kegiatan alih moda transportasi, pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan, pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana dan prasarana memperkuat wawasan nusantara dan kedaulatan negara. Pengembangan transportasi udara di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah meningkatkan bandar udara yang telah ada saat ini di Kecamatan Banding Agung. Bandara ini telah dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan diresmikan sebagai lapangan terbang perintis oleh Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 12 Oktober 1995. Di mana pembangunan lapangan terbang perintis tersebut awalnya



dimaksudkan untuk mempercepat usaha promosi Danau Ranau sebagai objek wisata andalan.

a. Tatanan Kebandarudaraan

Tatanan kebandarudaraan adalah suatu sistem kebandarudaraan yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya. Pengembangan transportasi udara berupa Bandar Udara Banding Agung di Kecamatan Banding Agung sebagai bandar udara pengumpan (*spoke*).

Bandar udara ini disiapkan sebagai pendukung adanya pariwisata nasional di Kecamatan Banding Agung serta penghubung antara ibukota Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kota Palembang yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Ibukota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu Muaradua yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pengembangan rute untuk Bandar Udara Banding Agung adalah dari Palembang-Banding Agung (pp).

b. Ruang Udara

Ruang udara untuk penerbangan terdiri atas ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara, ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, dan ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan. Ruang udara bandar udara Banding Agung termasuk bagian dari pengembangan kawasan bandar udara Banding Agung, terdiri atas:

- Pengembangan kawasan fasilitas bandar udara berupa fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat.
- Menetapkan kawasan keselamatan operasi dan penerbangan (KKOP) sebagai kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar bandar udara.
- Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan untuk Bandar Udara Banding Agung ini adalah melayani melayani rute domestik (dalam wilayah NKRI) dan rute internasional.

Pengembangan kawasan bandar udara diatur dalam rencana induk bandar udara, rencana rinci tata ruang, dan dijabarkan secara detail pada rencana teknis penataan

7.3.4. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Arahan pemanfaatan sumber daya energi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai energi listrik adalah, sebagai berikut:



1. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya

a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Dengan memperhatikan tingkat kepentingan dan jumlah kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat seiring dengan upaya mendorong terjadinya percepatan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan mendukung program ketahanan energi Sumatera Selatan, diperlukan pasokan sumber energi dan pengembangan sistem jaringan yang memadai. Rencana pembangunan Waduk Tiga Dihaji di Kecamatan Tiga Dihaji dan Waduk Saka Gilas di Kecamatan Buay Runjung memiliki potensi pengembangan PLTA dengan memanfaatkan potensi waduk.

b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terletak di Kecamatan BPR Ranau Tengah dan Buay Rawan.

c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Pertimbangan daerah dalam memanfaatkan energi panas bumi adalah pengembangannya yang termasuk mahal (*high capital investment*). Hal ini antara lain karena harus membangun infrastruktur di lokasi sumber panas bumi berada, yang kebanyakan berlokasi di tempat terpencil. Panas bumi juga termasuk *high risk & high tecknology* dan mempunyai kelebihan karena sistem teknologi ini ramah lingkungan (*clean, renewable for the benefit of mankind and the environment*). Rencana pengembangan kawasan yang memiliki sumber energi panas bumi meliputi Kecamatan Sindang Danau dengan potensi daya 6 MWV, Kecamatan Muaradua Kisam dengan potensi daya 35 MWC, Danau Ranau (Kecamatan Banding Agung, Warkuk Ranau Selatan, dan BPR Ranau Tengah), dan Kecamatan Mekakau Ilir.

d. Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTMH)

Untuk memanfaatkan potensi sumber daya energi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam melayani kebutuhan listrik masyarakat pedesaan cukup besar. Potensi ini memanfaatkan sumber energi air (air terjun), dalam hal ini pembangkit listrik tenaga air skala mikrohidro (PLTMH). Rencana pengembangan potensi energi air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, meliputi: Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Banding Agung, BPR Ranau Tengah, Buay Pemaca, Mekakau Ilir, Muaradua, Pulau Beringin, Buay Runjung, Sindang Danau, Kisam Tinggi, Sungai Are, Runjung Agung, Tiga Dihaji dan Muaradua Kisam.

e. Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) direncanakan di seluruh Kecamatan.



2. **Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya**
Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik disesuaikan dengan peningkatan kebutuhan daya listrik dan tumbuhnya pusat beban yang baru serta dengan memperhatikan pola jaringan yang sesuai dengan rumusan teknis guna peningkatan mutu dan kualitas listrik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Jaringan transmisi tenaga listrik menghubungkan antara GI Muaradua ke GI Martapura dengan tegangan 150 kV yang selanjutnya akan diturunkan untuk jaringan distribusi tenaga listrik. Arah pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdiri dari:
 - a. **Gardu Induk**
 - Peningkatan kapasitas gardu induk di Kecamatan Buay Rawan tegangan 150 kV dengan kapasitas 2 LB.
 - Rencana pembangunan gardu induk seiring dengan beroperasinya PLTP Danau Ranau dengan transmisi 150 kV di Kecamatan BPR Ranau Tengah.
 - Rencana pembangunan gardu induk di lokasi pengembangan potensi PLTA di Waduk Tiga Dihaji.
 - b. **Jaringan Transmisi Tenaga Listrik**
Berdasarkan rencana jaringan transmisi nasional dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT. PLN (Persero) Tahun 2019-2028. Sudah ada jaringan yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu jaringan Transmisi Muaradua - Martapura tegangan 150 kV. Arah pengembangan adalah, sebagai berikut:
 - Rencana pembangunan jaringan transmisi Muaradua - PLTP Danau Ranau Tegangan 150 kV.
 - PLN telah mengembangkan proyek T/L 150 kV Muaradua-*Phi Connection* yang berlokasi di Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Muaradua, dan Kecamatan Buay Rawan.
 - Pengembangan jaringan transmisi Muaradua-Rencana GI Tiga Dihaji, yang dapat dikembangkan melewati Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Buay Sandang Aji, Pulau Beringin, Sungai Are, Banding Agung dan Warkuk Ranau Selatan.

7.3.5. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi merupakan sarana penunjang yang penting bagi sektor-sektor usaha, karena dengan telekomunikasi akan diperoleh hubungan antar sektor yang cepat dan efektif. Kemajuan diberbagai sektor usaha menuntut diadakannya peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi. Untuk pengembangan kebutuhan sambungan telekomunikasi dimasa yang akan datang penyediaan jaringan lebih berorientasi pada permintaan.



1. Jaringan Tetap

Jaringan tetap suatu jaringan telekomunikasi yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau optik. Rencana pengembangan jaringan tetap telekomunikasi, meliputi:

- Pemantapan jaringan telepon kabel yang menjangkau seluruh Pusat Kota Kecamatan;
- Pemantapan sistem jaringan kabel mengikuti pola jaringan Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten.

2. Jaringan Bergerak

Jaringan bergerak merupakan jaringan telekomunikasi yang melalui medium yang digunakan adalah gelombang udara. Rencana pengembangan jaringan bergerak telekomunikasi, terdiri dari:

- Jaringan Bergerak Terrestrial
Rencana pengembangan jaringan terrestrial di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diarahkan untuk melayani kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan pusat perdesaan untuk menunjang pelayanan kegiatan pemerintahan yang berupa pengembangan dan peningkatan pelayanan transmisi penyiaran radio di Kecamatan Buay Rawan dan Muaradua.
- Jaringan Bergerak Seluler
Untuk wilayah yang sulit dijangkau dengan menggunakan sistem kabel dapat dikembangkan sistem *Ultraphone (Wireless Local Loop)* atau *BTS (based transceiver system)*. Dalam pengembangan kedepannya diarahkan dengan menerapkan sistem menara (tower) bersama, karena pembangunan menara bersama terkait dengan tingkat kepadatan penduduk. Adapun rencana pembangunan jaringan seluler di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berupa rencana pengembangan jaringan seluler berupa pembangunan dan penataan menara telekomunikasi (tower) bersama meliputi seluruh wilayah Kecamatan berdasarkan zona pelayanan.

7.3.6. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

a. Sumber Air

1. Sumber Air Permukaan Pada Wilayah Sungai

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Arahkan pengembangan sumber air di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri dari:

- Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang, meliputi DAS Tulang Bawang;
- Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau, meliputi das Musi;
- Wilayah Sungai Nasal-Padang Guci, meliputi DAS Nasal, DAS Manula, DAS Luas, dan DAS Kinal; dan



- Danau Ranau di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan BPR Ranau Tengah dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
- 2. Sumber Air Permukaan berupa Waduk

Pemerintah Pusat saat ini akan membangun waduk dan bendungan di Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan untuk memenuhi penyediaan air baku untuk keperluan domestik, irigasi dan energi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam skala lokal maupun regional. Adapun rencana pembangunan waduk dan bendungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, meliputi:

 - Pembangunan Waduk di Kecamatan Tiga Dihaji.
 - Pembangunan Waduk Saka di Kecamatan Buay Runjung.
- 3. Sumber Air Permukaan berupa Danau

Dalam pengelolaannya danau mempunyai fungsi utama adalah untuk menstabilkan aliran air, dan di lain sisi danau juga mempunyai fungsi ekonomi yang sangat tinggi, yaitu untuk penyediaan air bersih, baik untuk minum dan irigasi serta untuk perikanan budidaya dan penangkapan ikan. Untuk menjaga fungsi danau secara optimal arahan rencana pengembangan sumber air danau yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berupa revitalisasi danau untuk menjaga kuantitas dan kualitas air danau. Adapun arahan pengembangan danau berupa peningkatan fungsi danau meliputi:

 - Danau Rakihan di Kecamatan Sindang Danau.
 - Danau Rata di Kecamatan Kisam Tinggi.
 - Danau Kasmaran di Kecamatan Buana Pemaca.
 - Danau Halim Kecamatan Buay Rawan.
- 4. Sumber Air Permukaan Berupa Sungai

Salah satu sistem jaringan sumber daya air yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah berasal dari beberapa sungai dan yang merupakan wilayah sungai strategis nasional, yaitu Sungai Saka. Pengembangan sungai disusun berdasarkan wilayah sungai yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, meliputi:

 - Sungai Saka di Kecamatan Simpang, Buana Pemaca, Buay Pemaca;
 - Sungai Gilas di Kecamatan Kisam Tinggi, dan Runjung Agung;
 - Sungai Selulu di Kecamatan Buana Pemaca dan Buay Pemaca;
 - Sungai Giham di Kecamatan Buana Pemaca dan Buay Pemaca;
 - Sungai Tahmi di Kecamatan Buay Pemaca;
 - Sungai Imus di Kecamatan Buana Pemaca dan Buay Pemaca;
 - Sungai Buyuk di Kecamatan Buay Pemaca;



- Sungai Telema di Kecamatan Buana Pemaca, Buay Pemaca dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - Sungai Keruh di Kecamatan Buana Pemaca, Buay Pemaca dan BPR Ranau Tengah;
 - Sungai Selabung di Kecamatan Banding Agung dan Mekakau Ilir;
 - Sungai Ruos di Kecamatan Buay Rawan;
 - Sungai Ngepah di Kecamatan Buay Sandang Aji dan Buay Rawan;
 - Sungai Mekakau di Kecamatan Muaradua, Buay Rawan, Buay Sandang Aji, Tiga Dihaji, dan Mekakau Ilir;
 - Sungai Kemu di Kecamatan Buay Sandang Aji, Kisam Ilir, dan Pulau Beringin;
 - Sungai Singau di Kecamatan Buay Sandang Aji, Tiga Dihaji dan Mekakau Ilir;
 - Sungai Kisam di Kecamatan Kisam Tinggi;
 - Sungai Luas Putih di Kecamatan Sungai Are dan Sindang Danau;
 - Sungai Luas Besar di Kecamatan Sindang Danau;
 - Sungai Are di Kecamatan Sungai Are;
 - Sungai Asahan di Kecamatan Kisam Tinggi;
 - Sungai Meleki di Kecamatan Kisam Ilir dan Buay Sandang Aji;
 - Sungai Singalaga di Kecamatan Kisam Tinggi;
 - Sungai Limpung di Kecamatan Kisam Tinggi; dan
 - Sungai Keni di Kecamatan Buay Runjung dan Muaradua Kisam.
5. Sumber Air Permukaan Berupa Embung
- Embung adalah bangunan yang berfungsi untuk penampung air atau meninggikan muka air (dam parit) yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/*run off*, sungai dan sumber air lainnya untuk suplesi air irigasi. Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika, hingga pengairan. Arahana pengembangan embung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berupa peningkatan dan pembangunan Embung Desa yang tersebar di tiap Kecamatan.
6. Sumber Air Tanah
- Air tanah merupakan sumber yang berharga dalam hal mensuplai kebutuhan air di sebuah wilayah. Oleh karena itu, penanganan yang tepat dari cekungan air tanah harus dijalankan dalam sudut pandang konservasi dan pengembangan. Daerah imbuhan air tanah untuk cekungan air tanah berdasarkan Kepres Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air tanah di Indonesia. Rencana



pengembangan potensi air tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, meliputi:

- CAT Muaraduo-Curup di Kecamatan Buay Runjung, Buay Sandang Aji, Kisam Ilir, Kisam Tinggi, Mekakau Ilir, Muaradua, Muaradua Kisam, Pulau Beringin, Runjung Agung, Simpang, Sindang Danau, Sungai Are, dan Tiga Dihaji;
- CAT Metro-Kotabumi di Kecamatan Banding Agung, Buana Pemaca, Buay Pemaca, BPR Ranau Tengah, Buay Rawan, Buay Sandang Aji, Muaradua, Tiga Dihaji dan Warkuk Ranau Selatan;
- CAT Baturaja di Kecamatan Buana Pemaca, Buay Pemaca dan Simpang; dan
- CAT Ranau di Kecamatan Banding Agung, BPR Ranau Tengah, Buay Sandang Aji, Mekakau Ilir, Pulau Beringin, Sindang Danau, Tiga Dihaji dan Warkuk Ranau Selatan.

b. Prasarana Sumber Daya Air

Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. Pemenuhan kebutuhan akan air bersih dan irigasi dilakukan dengan peningkatan jaringan sampai ke wilayah yang belum terjangkau, sedangkan irigasi dengan peningkatan saluran dari sistem setengah teknis dan sederhana ditingkatkan menjadi irigasi teknis. Arah pengembangan prasarana sumber daya air, meliputi:

1. Jaringan Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPERA Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, pengembangan jaringan irigasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berupa pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan terdiri dari:

- Peningkatan Pemanfaatan Daerah Irigasi (DI) yang menjadi Kewenangan Provinsi.
- Peningkatan kapasitas saluran pada Daerah Irigasi (DI) yang menjadi Kewenangan Kabupaten.

2. Jaringan Air Baku untuk Air Bersih

Pengembangan layanan air bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu dilakukan mengingat fungsi dari air bersih tersebut yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti pipa, tandong, reservoir dan prasarana pendukung lainnya. Rencana pengembangan jaringan air baku untuk air bersih, meliputi:



- a. Rencana pengembangan sumber air baku permukaan, meliputi:
 - Sungai Way Saka yang terletak di Kecamatan Muaradua.
 - Sungai Way Lumay yang terletak di Kecamatan Buay Pemaca.
 - Sungai Kemu yang terletak di Kecamatan Pulau Beringin.
 - Sungai Way Imus yang terletak di Kecamatan Buay Pemaca.
 - Danau Ranau yang terletak di Kecamatan Banding Agung.
 - b. Pengembangan air tanah yang berada di seluruh Kecamatan.
 - c. Rencana penyediaan air baku untuk kegiatan permukiman, kegiatan pertanian, dan kegiatan industri.
3. Rencana Sistem Pengendalian Banjir
- Pengembangan sistem pengendalian banjir adalah pengendalian daya rusak air. Pengendalian daya rusak air merupakan rangkaian kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta operasional dan pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir meliputi pengendalian banjir dan pengamanan longsoran tebing sungai yang terjadi pada wilayah sungai yang meliputi Sub DAS yang berada di Kecamatan Muaradua, Buay Sandang Aji, Buay Runjung, Buay Rawan, Tiga Dihaji, Banding Agung dan Warkuk Ranau Selatan.

7.3.7. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Kebutuhan penduduk akan air bersih di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagian kecil dipenuhi oleh air sungai, dan sebagian besar dipenuhi oleh air tanah/sumur dengan kedalaman berkisar antara 3-10 m. Beberapa kawasan telah dilayani oleh Perusahaan Air Minum “Tirta Saka Selabung”. Rencana pengembangan SPAM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berupa:

- a. Jaringan Perpipaan, meliputi:
 - Unit air baku berupa intake air berada di seluruh Kecamatan;
 - Unit produksi berupa instalasi pengolahan air minum di seluruh Kecamatan; dan
 - Unit distribusi berupa jaringan perpipaan tersebar di seluruh Kecamatan.
- b. Bukan jaringan perpipaan dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan dan rawan kekeringan, meliputi:
 - Sumur dangkal tersebar di tiap Kecamatan di wilayah Kabupaten.
 - Sumur pompa berada di Kecamatan Kisam Tinggi, Runjung Agung, Buay Sandang Aji, Mekakau Ilir, Simpang, Buana Pemaca dan Buay Rawan.
 - Bak penampungan air hujan tersebar di setiap Kecamatan.



- Terminal air berada di Kecamatan Sungai Are dan Sindang Danau.
- Bangunan intake tersebar di tiap Kecamatan di wilayah Kabupaten.
- Penggalan dan atau pengeboran air tanah dilakukan secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Volume air limbah sangat dipengaruhi oleh pola pemakaian air bersih. Pada umumnya volume air limbah yang dihasilkan kurang lebih 70%-80% dari pemakaian air bersih. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan air limbah adalah beban pencemaran air limbah yang ditimbulkan oleh sektor industri dan domestik. Rendahnya jangkauan pelayanan masyarakat menyebabkan beban pencemaran yang tinggi terhadap badan air permukaan. Rencana sistem jaringan pengelolaan limbah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, meliputi:

- a. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga berupa sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
 - Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelayanan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) untuk mengolah air limbah domestik di Kecamatan Buay Rawan dan Muaradua.
 - Sistem pengolahan air limbah setempat, meliputi:
 - 1) Pengolahan skala individual melalui penyediaan tangki septik tersebar di seluruh Kecamatan;
 - 2) Pengolahan skala komunal melalui penyediaan tangki septik komunal tersebar di tiap kawasan perkotaan.
- b. Sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan pertanian di kawasan perdesaan berupa instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan pertanian, meliputi:
 - Sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan pertanian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna; dan
 - Pemanfaatan hasil pengolahan limbah kotoran hewan dan pertanian bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik.

3. Sistem Pengelolaan Limbah B3

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengolahan limbah B3 pada obyek yang ditetapkan menghasilkan limbah B3, meliputi sarana kesehatan, sarana perdagangan dan jasa, kegiatan pertambangan dan lokasi kawasan industri yang tersebar di tiap Kecamatan.

4. Sistem Jaringan Persampahan

Volume timbunan sampah didasarkan pada beberapa faktor, yaitu besarnya peningkatan tingkat pelayanan tiap tahun dan peningkatan jumlah penduduk. Dominasi komposisi sumber sampah untuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diperkirakan tidak

akan berubah terutama dalam waktu dekat, karena pola hidup masyarakat dalam mengurangi sampah belum dapat dirubah dalam jangka pendek. Dengan morfologi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berbukit dan perkembangan wilayah yang tersebar, sebagai alternatif pemecahan permasalahan persampahan ini, memerlukan penambahan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dan penanganan sampah terutama di pusat-pusat kegiatan salah satunya dengan penanganan sampah secara kolektif yang tentunya harus ditunjang dengan penyediaan tempat-tempat sampah dan tempat pengolahan sementara (TPS)

Arahan sistem jaringan persampahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, meliputi:

- a. Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah
Untuk mendukung pengembangan sistem persampahan ini, maka diperlukan pengembangan TPS dan TPA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Untuk TPS, jumlah yang harus disediakan disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan penyediaan TPS. Adapun rencana pengembangan TPS berupa penempatan TPS skala lingkungan di tiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan.
- b. Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah (TPS)
Penyelenggaraan tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle* dan *replace* (TPS 4R) merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan. Penanganan sampah dengan pendekatan infrastruktur TPS 4R lebih menekankan kepada cara pengurangan, pemanfaatan dan pengolahan sejak dari sumbernya pada skala komunal (area permukiman, area komersial, area perkantoran, area pendidikan, area wisata, dan lain-lain).
Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) menggunakan konsep pengolahan sampah dengan prinsip 4R (*reduce, reuse, recycle dan replace*) yang selanjutnya disebut TPS/TPST 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Arahan pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berupa TPS 4R diarahkan di setiap Kecamatan.
- c. Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
TPST merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan



tanggungjawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Pengembangan TPST terletak di Kecamatan Pulau Beringin, Simpang, dan Muaradua Kisam.

d. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Lokasi TPA untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan saat ini berada di Desa Bendi Kecamatan Buay Rawan. TPA ini memiliki luas ± 2 ha dan kapasitas ± 60.000 m³.

Untuk rencana pengembangan TPA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah peningkatan pengelolaan dan kapasitas TPA yang masih berfungsi dengan metode *sanitary landfill* di Kecamatan Buay Rawan.

5. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Arahkan sistem jaringan evakuasi bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, meliputi:

a. Jalur Evakuasi Bencana

Jalur evakuasi bencana adalah lintasan yang digunakan sebagai pemindahan langsung dan cepat dari orang-orang yang akan menjauh dari ancaman atau kejadian yang dapat membahayakan. Kriteria di dalam arahan pengembangan jalur evakuasi bencana, meliputi:

- Jalur yang dipilih merupakan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal.
- Jalur evakuasi dirancang menjauhi aliran sungai.
- Jalur evakuasi tidak melintasi sungai atau jembatan.
- Sudut kemiringan lereng lebih dari 4%.
- Untuk daerah berpenduduk padat, dirancang jalur evakuasi berupa sistem blok, di mana pergerakan masa setiap blok tidak tercampur dengan blok lainnya untuk menghindari kemacetan.

Adapun arahan jalur evakuasi bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, meliputi:

- Mengintegrasikan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai jalur penyelamatan pada kawasan rawan bencana.
- Meningkatkan fungsi alur pelayaran sebagai jalur evakuasi di Danau Ranau.
- Meningkatkan fungsi jalur penerbangan sebagai jalur evakuasi di Bandar Udara Banding Agung.

b. Ruang Evakuasi Bencana

Lokasi ruang evakuasi bencana diarahkan terutama untuk penanggulangan korban bencana banjir dan puting beliung serta



tanah longsor. Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan dengan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan sarana fasilitas sosial dan umum sebagai salah satu kawasan evakuasi. Lokasi tersebut diarahkan di daerah-daerah dengan kriteria:

- Lokasi tersebut jauh dari dampak bencana yang terjadi;
- Diupayakan lokasi tersebut berupa ruang terbuka yang dapat menampung banyak orang;
- Diupayakan memanfaatkan bangunan milik Pemerintah dan fasilitas umum sebagai tempat penampungan pengungsi.

Arahan ruang evakuasi bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tersebar di tiap Kecamatan dengan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan sarana fasilitas sosial dan umum sebagai salah satu kawasan evakuasi, meliputi:

- Peningkatan fungsi ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi di setiap Kecamatan.
- Peningkatan dan pembangunan sarana fasilitas sosial dan seperti lapangan olahraga, kantor pemerintahan dan tempat pemakaman sebagai ruang evakuasi di setiap Kecamatan.
- Peningkatan fungsi pemanfaatan Bandar Udara Banding Agung sebagai ruang evakuasi.
- Peningkatan fungsi pemanfaatan pelabuhan penyeberangan Danau Ranau sebagai ruang evakuasi.



BAB VIII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang seluruh program prioritas pembangunan daerah Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2021-2026 dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun ke depan. Bab ini memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut, dilanjutkan dengan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lima tahun kedepan.



Tabel VIII.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kapasitas rill kemampuan keuangan daerah	956,201,605,612.85	972,692,608,191.90	990,378,274,602.67	1,009,360,803,997.99	1,029,754,334,971.73	1,051,686,436,442.42
1.	Prioritas I	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00	424,085,939,637.00
2.	Prioritas II	532,115,665,975.85	548,606,668,554.90	566,292,334,965.67	585,274,864,360.99	605,668,395,334.73	627,600,496,805.42

Sumber: Hasil analisis, Tahun 2021



Tabel VIII.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	293,386,594,483	100	293,767,997,056	100	294,179,272,252	100	294,620,541,160	100	295,091,934,026	100	1,471,046,338,977	Disdik
1	01	02	Program pengelolaan pendidikan	APM SD/MI	Persen	99.00	99.04	99.08	83,926,603,517	99.12	84,035,708,102	99.16	84,153,358,093	99.20	84,279,588,130	99.24	84,414,435,471	99.24	420,809,693,313	Disdik
			APM SMP/MTs	Persen	78.68	78.70	78.72	78.74		78.76		78.78								
			APM SMA/SMK/MA	Persen	61.83	62.00	62.50	62.80		63.00		63.20								
			Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD	Persen	47.62	58.48	100	100		100		100								
			Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SD	Persen	84.95	93.24	100	100		100		100								
			Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SMP	Persen	56.08	59.83	100	100		100		100								
			Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	Persen	2.00	2.33	100	100		100		100								
1	01	03	Program pengembangan kurikulum	APM SD/MI	Persen	99.00	99.04	99.08	1,655,000,000	99.12	1,755,000,000	99.16	1,840,000,000	99.20	1,940,000,000	99.24	2,055,000,000	99.24	9,245,000,000	Disdik
			APM SMP/MTs	Persen	78.68	78.70	78.72	78.74		78.76		78.78								
			APM SMA/SMK/MA	Persen	61.83	62.00	62.50	62.80		63.00		63.20								
1	01	05	Program pengendalian	APM SD/MI	Persen	99.00	99.04	99.08	434,000,000	99.12	450,000,000	99.16	450,000,000	99.20	450,000,000	99.24	450,000,000	99.24	2,234,000,000	Disdik
			APM SMP/MTs	Persen	78.68	78.70	78.72	78.74		78.76		78.78								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penang-gung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			perizinan pendidikan	APM SMA/SMK/MA	Persen	61.83	62.00	62.50		62.80		63.00		63.20		63.50		63.50			
1	01	06	Program pengembangan bahasa dan sastra	APM SD/MI	Persen	99.00	99.04	99.08	50,000,000	99.12	100,000,000	99.16	100,000,000	99.20	100,000,000	99.24	100,000,000	99.24	450,000,000	Disdik	
				APM SMP/MTs	Persen	78.68	78.70	78.72		78.74		78.76		78.78		78.80					
				APM SMA/SMK/MA	Persen	61.83	62.00	62.50		62.80		63.00		63.20		63.50		63.50			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	41,926,947,622	100	41,981,452,654	100	42,040,226,688	100	42,103,287,028	100	42,170,652,287	100	210,222,566,278	Dinkes	
1	02	02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	97.12	97.76	100	66,225,081,959	100	66,311,174,566	100	66,404,010,210	100	66,503,616,225	100	66,610,022,011	100	332,053,904,971	Dinkes	
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	94.92	98.26	100		100		100		100		100		100			
				Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	84.32	86.98	100		100		100		100		100		100			
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	92.07	92.11	100		100		100		100		100		100			
				Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	11.00	12.81	100		100		100		100		100		100			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	3.23	4.42	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	Persen	19.68	22.05	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	10.12	40.20	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	10.12	16.73	100		100		100		100		100		100		
				Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Persen	61.71	61.71	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	Persen	32.80	36.97	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persen	4.03	4.03	100		100		100		100		100		100		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penang-gung Jawab		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		T	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar																	
1	02	03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	2.65	2.78	2.91	103,543,170	3.05	103,677,776	3.20	103,822,925	3.36	103,978,659	3.52	104,145,025	3.52	519,167,556	Dinkes	
1	02	04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Persen	100	100	100	207,828,000	100	208,098,176	100	208,389,514	100	208,702,098	100	209,036,021	100	1,042,053,810	Dinkes	
1	02	05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	87.70	89.68	91.67	826,914,670	93.65	827,989,659	95.63	829,148,845	97.62	830,392,568	100	831,721,196	100	4,146,166,937	Dinkes	
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	7,825,029,704	100	7,835,202,243	100	7,846,171,526	100	7,857,940,783	100	7,870,513,488	100	39,234,857,744	RSUD Muaradua	
1	02	02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0.039	0.039	0.043	23,370,146,131	0.048	23,400,527,321	0.053	23,433,288,059	0.058	23,468,437,991	0.062	23,505,987,492	0.062	117,178,386,995	RSUD Muaradua	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase pelaksanaan penunjang urusan	Persen	100	100	100	14,215,796,460	100	17,560,473,335	100	18,438,497,002	100	19,360,421,852	100	20,328,442,944	100	89,903,631,593	Dinas PUPR	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Daerah Kabupaten/Kota	pemerintah daerah																
1	03	02	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	67.25	68.22	69.47	38,358,615,884	70.72	38,259,108,985	71.97	38,259,640,708	73.22	38,260,211,208	74.47	38,260,820,654	74.47	191,398,397,439	Dinas PUPR
1	03	03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk berakses Air Minum	Persen	83.26	85.13	87.04	4,472,055,000	88.99	4,477,868,672	90.98	4,484,137,688	93.02	4,490,863,894	95.11	4,498,049,276	95.11	22,422,974,530	Dinas PUPR
				Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak	Persen	54.82	59.08	63.67		68.62		73.95		79.69		85.88		85.88		
1	03	05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Capaian Pelayanan SPALD-S Akses Dasar Air Limbah Domestik	Persen	71.46	72.54	100	3,237,103,000	100	3,241,311,234	100	3,245,849,070	100	3,250,717,843	100	3,255,918,992	100	16,230,900,139	Dinas PUPR
				Capaian Pelayanan SPALD- S Akses Aman Air Limbah Domestik	Persen	63.38	66.99	100		100		100		100		100		100		
				Capaian Pelayanan SPALD-T Akses Aman Air Limbah Domestik	Persen	66.43	69.42	100		100		100		100		100		100		
				Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	63.75	67.86	100		100		100		100		100		100		
1	03	06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	40.71	45.09	49.93	1,200,000,000	55.30	1,201,560,000	61.25	1,203,242,184	67.83	1,205,047,047	75.12	1,206,975,123	75.12	6,016,824,354	Dinas PUPR
1	03	07	Program pengembangan permukiman	Rasio luas kawasan permukiman	Persen	N.A	N.A	10.00	400,000,000	11.00	400,520,000	12.00	401,080,728	13.00	401,682,349	14.00	402,325,041	14.00	2,005,608,118	Dinas PUPR



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penang-gung Jawab		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		T	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab / Kota																
1	03	08	Program penataan bangunan gedung	Rasio bangunan ber- IMB persatuan bangunan	Persen	N.A	N.A	30.17	4,740,000,000	31.88	4,746,162,000	32.83	4,752,806,627	33.75	4,759,935,837	34.75	4,767,551,734	34.75	23,766,456,198	Dinas PUPR	
1	03	10	Program penyelenggaraan jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	53.37	57.59	62.14	757,423,986,932	67.04	916,474,820,681	72.34	563,990,969,337	78.06	1,111,531,368,914	84.22	919,822,252,175	84.22	4,269,243,398,039	Dinas PUPR	
1	03	11	Program pengembangan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	N.A	N.A	40.00	679,987,930	40.00	680,871,914	45.00	681,825,135	45.00	682,847,873	50.00	683,940,429	50.00	3,409,473,281	Dinas PUPR	
1	03	12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Luas wilayah produktif	Persen	97.74	97.74	97.74	2,529,974,780	97.74	2,533,263,747	97.74	2,536,810,316	97.74	2,540,615,532	97.74	2,544,680,517	97.74	12,685,344,892	Dinas PUPR	
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
1	04	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	5,878,340,723	100	6,265,467,303	100	6,543,650,204	100	6,875,429,872	100	7,187,808,899	100	32,750,697,001	Dinas Perkim	
1	04	02	Program pengembangan perumahan	Persentase rumah layak huni	Persen	77.13	77.32	77.52	1,041,344,600	77.71	1,041,793,684	77.91	1,042,277,943	78.10	1,042,797,517	78.30	1,043,352,561	78.30	5,211,566,305	Dinas Perkim	
				Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	75.00	75.00	100		100		100		100		100		100			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Kabupaten/Kota																
				Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0.00	10.00	100		100		100		100		100		100		
1	04	03	Program kawasan permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	3.68	3.00	2.44	731,185,180	1.99	731,185,180	1.62	731,185,180	1.32	731,185,180	1.07	731,185,180	1.07	3,655,925,900	Dinas Perkim
1	04	04	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	22.87	22.84	22.79	2,239,420,100	22.76	2,239,731,346	22.74	2,240,066,970	22.71	2,240,427,070	22.69	2,240,811,754	22.69	11,200,457,240	Dinas Perkim
1	04	05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	0.78	0.79	0.93	28,831,934,700	1.09	28,869,372,568	1.23	28,909,737,684	1.25	28,953,056,936	1.28	28,999,328,107	1.28	144,563,429,995	Dinas Perkim
1	04	06	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase rumah layak huni	Persen	77.13	77.32	77.52	0	77.71	200,000,000	77.91	200,000,000	78.10	200,000,000	78.30	200,000,000	78.30	800,000,000	Dinas Perkim
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN																	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab				
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
			MASYARAKAT																				
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	4,981,276,900	100	4,987,276,900	100	4,993,276,900	100	5,001,276,900	100	5,010,276,900	100	24,973,384,500	Satpol PP dan Damkar			
1	05	02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penegakan Perda	Persen	100	100	100	2,376,000,000	100	2,411,000,000	100	2,408,000,000	100	2,415,000,000	100	2,418,000,000	100	12,028,000,000	Satpol PP dan Damkar			
1	05	04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	75.00	75.00	80.00	4,444,000,000	85.00	4,449,777,200	90.00	4,456,006,888	95.00	4,462,690,898	100	4,469,831,204	100	22,282,306,190	Satpol PP dan Damkar			
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	5,330,521,644	100	6,174,872,334	100	6,604,012,931	100	6,883,155,177	100	7,124,117,293	100	32,116,679,379	BPBD			
1	05	03	Program penanggulangan bencana	Respon Cepat Darurat Bencana	Persen	36.11	42.38	100	3,430,000,000	100	4,255,000,000	100	4,935,000,000	100	5,460,000,000	100	5,655,000,000	100	23,735,000,000	BPBD			
				Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100			100	100	100
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	49.80	50.54	100		100		100		100		100		100			100	100	100
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persen	34.00	34.43	100		100		100		100		100		100			100	100	100
1	06		URUSAN																				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	3,863,028,480	100	4,000,069,920	100	4,115,069,920	100	4,123,104,841	100	4,277,104,841	100	20,378,378,002	Dinas Sosial
1	06	02	Program pemberdayaan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	28.33	32.48	37.25	209,999,480	42.71	210,194,479	48.97	210,404,752	56.14	280,630,359	64.38	280,871,367	64.38	1,192,100,437	Dinas Sosial
1	06	04	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	66.67	66.67	100	2,924,319,420	100	3,097,614,366	100	3,098,985,850	100	3,312,368,454	100	3,513,940,412	100	15,947,228,502	Dinas Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Sosial		Persen	28.57	28.57	100	100		100		100		100						
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Sosial		Persen	64.00	64.00	100	100		100		100		100						
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial		Persen	50.00	50.00	100	100		100		100		100						
1	06	05	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS yang emperoleh bantuan sosial	Persen	28.33	34.08	41.00	364,999,120	49.32	365,103,119	59.33	365,215,263	71.38	365,335,586	85.87	365,464,123	85.87	1,826,117,211	Dinas Sosial
1	06	06	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	620,000,000	100	655,940,000	100	706,200,729	100	756,200,000	100	806,200,000	100	3,544,540,729	Dinas Sosial
				Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah	Persen	100	100	100		100		100		100		100				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota																
1	06	07	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persen	40.00	40.00	40.00	318,000,000	100	518,000,000	100	518,000,000	100	718,000,000	100	718,000,000	100	2,790,000,000	Dinas Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
2	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	2,863,371,400	100	3,198,672,692	100	3,203,404,712	100	3,208,233,212	100	3,213,333,212	100	15,687,015,228	Disnaker-trans
2	07	02	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	0.00	0.00	0.00	0	10.00	150,000,000	15.00	150,000,000	20.00	150,210,000	25.00	150,435,315	25.00	600,645,315	Disnaker-trans
2	07	03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	N.A	N.A	0.032	25,067,546	0.054	25,067,546	0.108	25,067,546	0.215	25,105,147	0.323	25,145,315	0.323	125,453,100	Disnaker-trans
2	07	04	Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	N.A	10.00	10.00	74,998,420	10.00	75,095,918	20.00	75,201,052	40.00	75,313,854	50.00	75,434,356	50.00	376,043,600	Disnaker-trans
2	07	05	Program hubungan industrial	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	N.A	N.A	3.32	139,998,970	3.44	140,180,969	3.57	140,377,222	3.71	140,587,788	3.85	140,812,728	3.85	701,957,677	Disnaker-trans



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
2	08	02	Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	0.055	0.056	0.063	200,000,000	0.071	200,260,000	0.079	200,540,364	0.087	200,841,175	0.095	201,162,520	0.095	1,002,804,059	Dinas PPKBP3A
2	08	03	Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	16.00	14.00	12.00	13,970,000	10.00	200,000,000	8.00	200,000,000	6.00	200,000,000	4.00	200,000,000	4.00	813,970,000	Dinas PPKBP3A
2	08	04	Program peningkatan kualitas keluarga	Rasio KDRT	Rasio	0.055	0.050	0.032	71,210,800	0.025	200,000,000	0.020	200,000,000	0.018	200,000,000	0.015	200,000,000	0.0015	871,210,800	Dinas PPKBP3A
2	08	06	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0.022	0.020	0.018	160,229,200	0.016	200,000,000	0.014	200,000,000	0.012	200,000,000	0.010	200,000,000	0.0010	960,229,200	Dinas PPKBP3A
2	08	07	Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0.022	0.020	0.018	40,070,000	0.016	200,000,000	0.014	200,000,000	0.012	200,000,000	0.010	200,000,000	0.010	840,070,000	Dinas PPKBP3A
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
2	09	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	2,126,243,000	100	2,139,020,116	100	2,142,014,744	100	2,145,227,766	100	2,148,660,131	100	10,701,165,757	DKP
2	09	02	Program	Penguatan	Persen	31.17	36.08	41.76	30,000,000	48.34	80,104,000	55.95	330,216,146	64.77	80,336,470	74.97	330,465,008	74.97	851,121,624	DKP



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penang-gung Jawab		
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		T	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Cadangan Pangan																
2	09	03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	Persen	99.52	99.55	99.58	985,000,000	99.61	1,100,442,400	99.64	1,097,120,929	99.67	1,098,301,610	99.70	1,099,562,892	99.70	5,380,427,831	DKP
2	09	04	Program penanganan kerawanan pangan	Penguatan Cadangan Pangan	Persen	31.17	36.08	41.76	30,000,000	48.34	205,000,000	55.95	240,000,000	64.77	240,000,000	74.97	250,000,000	74.97	965,000,000	DKP
2	09	05	Program pengawasan keamanan pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	0.00	100	100	0	100	273,610,842	100	248,944,952	100	278,842,428	100	264,725,376	100	1,066,123,598	DKP
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
2	10	02	Program pengelolaan izin lokasi	Persentase penyelesaian izin lokasi	Persen	N.A	N.A	16.67	44,333,800	16.67	44,391,434	16.67	44,453,582	16.67	44,520,262	16.67	44,591,495	16.67	222,290,573	Dinas Perkim
2	10	04	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian kasus tanah garapan	Persen	N.A	N.A	16.00	308,198,440	16.00	319,959,440	16.00	369,959,440	16.00	319,959,440	16.00	309,989,875	16.00	1,628,066,635	Dinas Perkim
2	10	05	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	N.A	12.50	12.50	32,797,600	12.50	32,840,237	12.50	32,886,213	12.50	32,935,543	12.50	32,988,239	12.50	164,447,832	Dinas Perkim
2	10	07	Program penetapan tanah ulayat	Penetapan Tanah Ulayat	Persen	N.A	100	100	34,046,000	100	304,090,260	100	34,137,986	100	34,189,193	100	34,243,896	100	440,707,335	Dinas Perkim
2	10	08	Program pengelolaan tanah kosong	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	Persen	N.A	100	100	8,030,000	100	8,040,439	100	8,051,696	100	8,063,773	100	8,076,675	100	40,262,583	Dinas Perkim
2	10	09	Program	Persentase	Persen	N.A	N.A	20.00	62,292,400	20.00	62,373,380	20.00	62,460,703	20.00	62,554,394	20.00	62,654,481	20.00	312,335,358	Dinas



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			pengelolaan izin membuka tanah	pengelolaan izin membuka tanah umum																Perkim
2	10	10	Program penatagunaan tanah	Persentase Penatagunaan Tanah	Persen	N.A	0.02	0.04	127,475,950	0.11	127,641,669	0.11	127,820,367	0.24	128,012,098	0.34	128,216,917	0.34	639,167,000	Dinas Perkim
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	2,735,483,732	100	2,739,039,861	100	2,742,874,517	100	2,746,988,828	100	2,751,384,011	100	13,715,770,948	DLH
2	11	02	Program perencanaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	N.A	66.46	66.99	250,000,000	67.53	260,000,000	68.06	270,000,000	68.59	280,000,000	69.12	290,000,000	69.12	1,350,000,000	DLH
2	11	03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	N.A	52.60	52.70	150,000,000	52.80	150,000,000	52.90	150,000,000	53.00	150,000,000	53.10	150,000,000	53.10	750,000,000	DLH
2	11	06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100,000,000	100	110,000,000	100	120,000,000	100	130,000,000	100	140,000,000	100	600,000,000	DLH
2	11	07	Program pengakuan	Penetapan hak MHA		-	-	-	0	1	55,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000	1	250,000,000	DLH



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penang-gung Jawab		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		T	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH																		
2	11	08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	Orang	-	-	-	0	1	5,000,000	1	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	20,000,000	DLH	
2	11	09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71		0	0	0	0	50	65,000,000	60	70,000,000	70	75,000,000	80	80,000,000	80	290,000,000	DLH	
2	11	10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	80,459,520	100	80,564,117	100	80,676,907	100	80,797,923	100	80,927,199	100	403,425,666	DLH	
2	11	11	Program pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	9.18	13.56	20.04	4,057,592,414	29.61	4,062,867,284	43.75	4,068,555,298	64.64	4,074,658,131	95.50	4,081,177,584	95.50	20,344,850,712	DLH	
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
2	12	01	Program Penunjang	Presentase pelaksanaan	Persen	100	100	100	3,619,655,930	100	3,619,955,930	100	3,620,155,930	100	3,619,655,930	100	3,615,155,930	100	18,094,579,650	Disduk dan Capil	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	penunjang urusan pemerintah daerah																
2	12	02	Program pendaftaran penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	52.12	81.87	87.95	125,000,000	100	125,000,000	100	125,000,000	100	125,000,000	100	125,000,000	100	625,000,000	Disduk dan Capil
				Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	N.A	N.A	10.00		20.00		30.00		40.00		50.00		50.00		
				Kepemilikan akta kelahiran	Persen	96.84	97.05	97.26		100		100		100		100		100		
2	12	03	Program pencatatan sipil	Persentase pelaksanaan pencatatan sipil	Persen	40.00	50.00	80.00	70,000,000	100	70,000,000	100	70,000,000	100	70,000,000	100	82,000,000	100	362,000,000	Disduk dan Capil
2	12	04	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persen	40.00	50.00	80.00	15,000,000	100	16,000,000	100	15,000,000	100	15,500,000	100	15,500,000	100	77,000,000	Disduk dan Capil
2	12	05	Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	0.00	0.00	10.00	22,000,000	15.00	22,000,000	20.00	22,000,000	25.00	23,000,000	30.00	24,000,000	30.00	113,000,000	Disduk dan Capil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
2	13	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	3,486,493,050	100	3,491,025,491	100	3,495,912,927	100	3,501,156,796	100	3,506,758,647	100	17,481,346,911	Dinas PMPD
2	13	02	Program penataan	Persentase	Persen	0.00	0.00	0.00	0	5.00	100,000,000	5.00	100,140,000	7.00	100,290,210	9.00	100,450,674	9.00	400,880,884	Dinas



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang-gung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			desa	peningkatan status desa mandiri																PMPD
2	13	03	Program peningkatan kerjasama desa	Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	Persen	61.11	60.35	59.59	0	58.85	100,000,000	58.11	100,140,000	57.38	100,290,210	56.67	100,450,674	56.67	400,880,884	Dinas PMPD
2	13	04	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	Persen	61.11	60.35	59.59	233,948,680	58.85	4,468,201,493	58.11	368,529,447	57.38	5,218,881,318	56.67	369,257,211	56.67	10,658,818,149	Dinas PMPD
2	13	05	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	Persen	61.11	60.35	59.59	2,139,999,870	58.85	2,142,781,870	58.11	2,145,781,764	57.38	2,149,000,437	56.67	2,152,438,838	56.67	10,730,002,779	Dinas PMPD
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
2	14	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	3,138,081,320	100	3,142,160,826	100	3,146,559,851	100	3,151,279,691	100	3,156,321,738	100	15,734,403,426	Dinas PPKBP3A
2	14	02	Program pengendalian penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	0.37	0.21	0.21	100,000,000	0.20	100,130,000	0.20	100,270,182	0.19	100,420,587	0.19	100,581,260	0.19	501,402,029	Dinas PPKBP3A
2	14	03	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	20.83	21.91	23.05	4,872,666,000	24.25	4,879,000,466	25.51	4,885,831,066	26.84	4,893,159,813	28.23	4,900,988,869	28.23	24,431,646,214	Dinas PPKBP3A
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak	Persen	30.07	30.00	29.93		29.85		29.78		29.71		29.64		29.64		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penang-gung Jawab		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		T	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					terpenuhi (unmet need)																
2	14	04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	40.80	44.16	47.80	100,000,000	51.74	100,130,000	56.00	100,270,182	60.62	100,420,587	65.61	100,581,260	65.61	501,402,029	Dinas PPKBP3A	
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	4,296,916,179	100	4,302,502,170	100	4,308,525,673	100	4,314,988,462	100	4,321,892,443	100	21,544,824,928	Dishub	
2	15	02	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi	Rasio	N,A	N.A	60.00	367,235,930	65.00	367,713,337	70.00	368,228,135	75.00	368,780,478	80.00	369,370,526	80.00	1,841,328,406	Dishub	
2	15	03	Program pengelolaan pelayaran	Persentase pengelolaan pelayaran	Persen	40.00	40.00	40.00	20,999,330	45.00	21,026,629	50.00	21,056,066	55.00	21,087,651	60.00	21,121,391	60.00	105,291,067	Dishub	
2	15	04	Program pengelolaan penerbangan	Persentase pengelolaan penerbangan	Persen	40.00	40.00	40.00	0	45.00	200,000,000	50.00	200,000,000	55.00	200,000,000	60.00	200,000,000	60.00	800,000,000	Dishub	
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	3,474,576,800	100	3,479,093,750	100	3,483,616,572	100	3,488,145,273	100	3,492,679,862	100	17,418,112,257	Dinas Kominfo	
2	16	02	Program pengelolaan informasi dan	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran	Persen	N.A	N.A	40.00	1,330,000,000	45.00	1,331,729,000	50.00	1,333,593,421	55.00	1,335,593,811	60.00	1,337,730,761	60.00	6,668,646,992	Dinas Kominfo	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			komunikasi publik	penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota																
2	16	03	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	N.A	N.A	40.00	228,700,000	45.00	228,997,310	50.00	229,317,906	55.00	229,661,883	60.00	230,029,342	60.00	1,146,706,441	Dinas Kominfo
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	3,880,685,000	100	4,053,116,275	100	4,059,916,275	100	4,065,916,275	100	4,060,916,275	100	20,120,550,100	Dinas Koperasi UKM, Perindag
2	17	03	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	18.33	22.45	25.95	30,000,000	27.91	30,000,000	30.00	30,000,000	32.26	30,000,000	34.69	30,174,378	34.69	150,174,378	Dinas Koperasi UKM, Perindag
2	17	05	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi aktif	Persen	18.33	22.45	25.95	50,000,000	27.91	50,000,000	30.00	50,000,000	32.26	50,000,000	34.69	50,000,000	34.69	200,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag
2	17	07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	6.00	7.00	10.00	30,000,000	15.00	63,000,000	20.00	63,000,000	25.00	63,000,000	30.00	63,000,000	30.00	282,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag
2	17	08	Program	Meningkatnya	Persen	6.00	7.00	10.00	0	15.00	220,000,000	20.00	221,000,000	25.00	221,000,000	30.00	221,000,000	30.00	883,000,000	Dinas



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang-gung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			pengembangan UMKM	Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha																Koperasi UKM, Perindag
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	3,080,443,320	100	5,894,797,976	100	10,610,636,357	100	20,015,145,442	100	33,137,261,796	100	72,738,284,891	Dinas PMPPTSP
2	18	02	Program pengembangan iklim penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	906.9 M	1.0 T	1,5 T	19,998,640	2.5 T	320,997,552	3.5 T	359,795,594	4.5 T	446,632,068	5.5 T	549,937,723	5.5 T	1,697,361,577	Dinas PMPPTSP
2	18	03	Program promosi penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	906.9 M	1.0 T	1,5 T	79,998,800	2.5 T	143,997,840	3.5 T	259,196,112	4.5 T	526,553,002	5.5 T	839,795,403	5.5 T	1,849,541,157	Dinas PMPPTSP
2	18	04	Program pelayanan penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	906.9 M	1.0 T	1,5 T	25,374,200	2.5 T	170,374,200	3.5 T	180,374,200	4.5 T	220,374,200	5.5 T	250,374,200	5.5 T	846,871,000	Dinas PMPPTSP
2	18	05	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	906.9 M	1.0 T	1,5 T	340,521,720	2.5 T	612,939,096	3.5 T	1,103,290,373	4.5 T	1,985,922,671	5.5 T	3,574,660,808	5.5 T	7,617,334,668	Dinas PMPPTSP
2	18	06	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	906.9 M	1.0 T	1,5 T	10,243,320.00	2.5 T	18,437,976	3.5 T	33,188,357	4.5 T	59,739,042	5.5 T	107,530,276	5.5 T	229,138,971	Dinas PMPPTSP
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
2	19	01	Program Penunjang Urusan	Presentase pelaksanaan penunjang	Persen	100	100	100	4,441,336,000	100	7,395,148,620	100	8,726,725,534	100	10,373,885,534	100	12,106,007,534	100	43,043,103,222	Diskepora



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penang-gung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	urusan pemerintah daerah																	
2	19	02	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	N.A	N.A	5.00	926,637,590	5.00	2,891,937,500	10.00	3,165,000,000	15.00	3,308,000,000	20.00	4,719,600,000	20.00	15,011,175,090	Diskepora	
2	19	03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	N.A	N.A	10	744,000,000	10	892,800,000	10	1,071,360,000	10	1,285,632,000	10	3,993,792,000	10	7,987,584,000	Diskepora	
2	19	04	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100	100	100	1,000,000,000	100	1,200,000,000	100	1,440,000,000	100	1,728,000,000	100	2,073,600,000	100	7,441,600,000	Diskepora	
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																		
2	20	02	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	10.00	10.00	20.00	60,000,000	20.00	60,078,000	30.00	60,162,109	40.00	60,252,352	50.00	60,348,756	50.00	300,841,218	Dinas Kominfo	
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	10.00	10.00	20.00		20.00		30.00		40.00		50.00		50.00			
2	21		URUSAN																		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang- gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
2	21	02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	N.A	N.A	40.00	10,000,000	45.00	10,013,000	50.00	10,026,017	55.00	10,039,051	60.00	10,052,101	60.00	50,130,169	Dinas Kominfo
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2	22	02	Program pengembangan kebudayaan	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		-	-	1	510,001,560	1	510,664,562	2	511,379,492	2	512,146,562	3	512,965,996	3	2,557,158,172	Dinas Parbud
2	22	03	Program pengembangan kesenian tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	1	1	4	50,000,000	4	50,065,000	4	50,135,091	4	50,210,294	4	50,290,630	4	250,701,015	Dinas Parbud
2	22	05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	4,88	6.10	7.63	0	9.53	50,000,000	11.91	50,000,000	14.89	50,000,000	18.62	50,000,000	18.62	200,000,000	Dinas Parbud
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
2	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	3,117,703,000	100	3,121,756,014	100	3,126,126,472	100	3,130,815,662	100	3,135,824,967	100	15,632,226,115	DPK
2	23	02	Program pembinaan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	N.A	N.A	47.50	195,000,000	49.50	2,515,000,000	51.50	2,530,000,000	53.50	2,662,000,000	56.50	2,664,000,000	56.50	10,566,000,000	DPK
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	N.A	N.A	5.10		5.12		5.13		5.14		5.15		5.15		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
2	24	02	Program pengelolaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawa ban		N.A	N.A	22.21	85,000,000	23.00	150,000,000	24.00	150,000,000	25.00	215,000,000	26.00	215,000,000	26.00	815,000,000	DPK
2	24	03	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawa ban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		N.A	N.A	22.21	0	23.00	120,000,000	24.00	120,000,000	25.00	120,000,000	26.00	120,000,000	26.00	480,000,000	DPK
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
3	25	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	31.09	100	100	3,156,743,020	100	3,160,517,219	100	3,290,301,629	100	3,327,894,786	100	3,374,140,780	100	16,309,597,434	Diskanak
3	25	03	Program	Produksi	Persen	13.32	15.59	18.24	247,490,000	21.34	267,500,000	24.96	284,705,450	29.21	291,956,675	34.18	306,748,122	34.18	1,398,400,247	Diskanak



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			pengelolaan perikanan tangkap	perikanan kelompok nelayan																
3	25	04	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi Perikanan	Persen	29.50	32.59	36.01	627,091,630	39.79	742,229,500	43.97	788,220,100	48.58	792,868,120	53.67	813,653,508	53.67	3,764,062,858	Diskanak
3	25	05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	0.00	0.00	10.00	25,000,000	10.00	30,000,000	20.00	32,650,120	30.00	35,230,225	40.00	40,000,000	40.00	162,880,345	Diskanak
3	25	06	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	31.09	31.32	31.56	135,000,000	31.79	140,000,000	32.03	145,325,230	32.27	148,331,210	32.52	150,717,342	32.52	719,373,782	Diskanak
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
3	26	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	5,095,714,740	100	5,102,339,169	100	5,109,482,444	100	5,117,146,668	100	5,125,334,102	100	25,550,017,123	Dinas Parbud
3	26	02	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kunjungan wisata	Orang	11,959	14808	18,335	150,000,000	22,703	150,195,000	28,111	150,405,273	34,808	150,630,881	43,099	150,871,890	43,099	752,103,044	Dinas Parbud
3	26	03	Program pemasaran pariwisata	Kunjungan wisata	Orang	11,959	14808	18,335	1,050,000,000	22,703	1,051,365,000	28,111	1,052,836,911	34,808	1,054,416,166	43,099	1,056,103,232	43,099	5,264,721,310	Dinas Parbud
3	26	04	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	PAD sektor pariwisata	Persen	0.27	0.46	0.78	0	1.34	50,000,000	2.28	50,000,000	3.88	50,000,000	6.61	50,000,000	6.61	200,000,000	Dinas Parbud
3	26	05	Program pengembangan	PAD sektor pariwisata	Persen	0.27	0.46	0.78	150,000,000	1.34	150,195,000	2.28	150,405,273	3.88	150,630,881	6.61	150,871,890	6.61	752,103,044	Dinas Parbud



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif																	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	9,381,882,818	100	12,256,846,954	100	12,399,612,383	100	12,724,090,197	100	13,061,726,466	100	59,824,158,818	Dinas Pertanian
3	27	02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Provitas Padi	Ton/Ha	4.54	4.62	4.69	422,606,678	4.77	695,558,812	4.85	720,310,945	4.93	628,163,079	5.02	748,015,212	5.02	3,214,654,726	Dinas Pertanian
		Provitas Jagung		Ton/Ha	7.15	7.29	7.42	7.57		7.71		7.86		8.00		8.00				
		Provitas Kedelai		Ton/Ha	1.35	1.37	1.39	1.41		1.43		1.45		1.47		1.47				
		Produksi Alpukat		Ton	6,014	7,189	8,593.8	10,273		12,280		14,680		17,549		17,549				
		Produksi Pisang		Ton	632.63	730.43	843.36	973.74		1,124		1,298		1,499		1,498.8				
		Produksi Kopi		Ton	50,854	51,363	51,877	52,395		52,919		53,448		53,983		53,983				
3	27	03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Provitas Padi	Ton/Ha	4.54	4.62	4.69	191,978,144	4.77	4,538,000,000	4.85	4,610,920,000	4.93	4,692,380,000	5.02	4,773,840,000	5.02	18,807,118,144	Dinas Pertanian
		Provitas Jagung		Ton/Ha	7.15	7.29	7.42	7.57		7.71		7.86		8.00		8.00				
		Provitas Kedelai		Ton/Ha	1.35	1.37	1.39	1.41		1.43		1.45		1.47		1.47				
		Produksi Alpukat		Ton	6,014	7,189	8,593.8	10,273		12,280		14,680		17,549		17,549				
		Produksi Pisang		Ton	632.63	730.43	843.36	973.74		1,124		1,298		1,499		1,498.8				
		Produksi Kopi		Ton	50,854	51,363	51,877	52,395		52,919		53,448		53,983		53,983				
3	27	05	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Provitas Padi	Ton/Ha	4.54	4.62	4.69	0	4.77	285,250,000	4.85	296,660,000	4.93	302,365,000	5.02	308,070,000	5.02	1,192,345,000	Dinas Pertanian
		Provitas Jagung		Ton/Ha	7.15	7.29	7.42	7.57		7.71		7.86		8.00		8.00				
		Provitas Kedelai		Ton/Ha	1.35	1.37	1.39	1.41		1.43		1.45		1.47		1.47				
		Produksi Alpukat		Ton	6,014	7,189	8,593.8	10,273		12,280		14,680		17,549		17,549				
		Produksi Pisang		Ton	632.63	730.43	843.36	973.74		1,124		1,298		1,499		1,498.8				
		Produksi Kopi		Ton	50,854	51,363	51,877	52,395		52,919		53,448		53,983		53,983				
3	27	07	Program penyuluhan pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Persen	47.10	51.04	55.31	702,274,640	59.94	997,420,133	64.96	1,021,565,626	70.40	1,041,211,118	76.29	1,060,856,611	76.29	4,823,328,128	Dinas Pertanian
3	27	02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	31.09	31.32	31.56	119,904,100	31.79	119,904,100	32.03	122,342,075	32.27	125,351,705	32.52	129,630,731	32.52	617,132,711	Diskanak
3	27	04	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	31.09	31.32	31.56	149,995,250	31.79	149,995,250	32.03	151,690,620	32.27	153,715,487	32.52	154,892,265	32.52	760,288,872	Diskanak



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang-gung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			veteriner																	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
3	30	02	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIU P Toko Swalayan)	Persen	6.00	7.00	10.00	0	15.00	80,000,000	20.00	80,000,000	25.00	80,000,000	30.00	80,000,000	30.00	320,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag
3	30	03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIU P Toko Swalayan)	Persen	6.00	7.00	10.00	0	15.00	55,000,000	20.00	55,000,000	25.00	55,000,000	30.00	55,000,000	30.00	220,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag
3	30	04	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	Persen	22.50	22.81	23.12	40,000,000	23.44	86,000,000	23.77	90,000,000	24.09	86,000,000	24.42	86,000,000	24.42	388,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag
3	30	06	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	Persen	N.A	N.A	25.00	0	35.00	50,000,000	45.00	60,000,000	55.00	60,000,000	65.00	60,000,000	65.00	230,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag
3	30	07	Program penggunaan dan	Kontribusi perdagangan	Persen	22.50	22.81	23.12	80,000,000	23.44	84,000,000	23.77	90,000,000	24.09	90,000,000	24.42	90,000,000	24.42	434,000,000	Dinas Koperasi



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang-gung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			pemasaran produk dalam negeri	besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB																UKM, Perindag
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
3	31	02	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	4.00	6.00	10.00	80,000,000	12.00	1,152,000,000	13.00	1,153,000,000	15.00	1,156,000,000	17.00	1,158,000,000	17.00	4,699,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag
3	31	03	Program pengendalian izin usaha industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	N.A	N.A	35.00	0	45.00	50,000,000	55.00	50,000,000	65.00	50,000,000	75.00	50,000,000	75.00	200,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag
3	31	04	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		-	-	-	0	Ada	30,000,000	Ada	30,000,000	Ada	30,000,000	Ada	30,000,000	Ada	120,000,000	Dinas Koperasi UKM, Perindag
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
3	32	02	Program	Kawasan	Perbub/	-	-	1	62,999,870	1	63,081,770	2	64,000,000	2	65,264,839	3	63,366,063	3	318,712,542	Disnaker-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang-gung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Rp (8)	(9)	Rp (10)	(11)	Rp (12)	(13)	Rp (14)	(15)	Rp (16)	(17)	Rp (18)	(19)
			perencanaan kawasan transmigrasi	transmigrasi yang sudah ditetapkan dengan perbub	Perda															trans
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH																	
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	40,459,533,275	100	46,475,488,655	100	48,781,513,087	100	51,202,338,742	100	53,743,705,679	100	240,662,579,438	Setda
4	01	02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	100	5,220,968,570	100	5,288,372,052	100	5,544,394,659	100	5,806,472,088	100	6,081,661,943	100	27,941,869,312	Setda
4	01	03	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan Program perekonomian dan pembangunan	Persen	100	100	100	3,116,339,330	100	3,776,335,657	100	3,962,652,439	100	4,158,285,061	100	4,363,699,314	100	19,377,311,801	Setda
4	02		SEKRETARIAT DPRD																	
4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	43,797,069,538	100	48,176,775,413	100	50,585,614,183	100	53,114,894,893	100	55,770,639,637	100	251,444,993,664	Set DPRD
4	02	02	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase rancangan perda yang dibahas	Persen	100	100	100	22,249,118,900	100	24,474,030,790	100	25,697,732,330	100	26,982,618,946	100	28,331,749,893	100	127,735,250,859	Set DPRD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Rp (8)	(9)	Rp (10)	(11)	Rp (12)	(13)	Rp (14)	(15)	Rp (16)	(17)	Rp (18)	(19)
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01		PERENCANAAN																	
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	6,734,867,830	100	6,625,972,371	100	6,635,248,732	100	6,645,201,605	100	6,655,833,928	100	33,297,124,466	Bappeda Litbang
5	01	02	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	100	100	2,439,922,200	100	2,443,172,000	100	2,446,592,441	100	2,450,262,329	100	2,454,182,749	100	12,234,131,719	Bappeda Litbang
5	01	03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	100	3,187,579,880	100	3,309,296,500	100	3,313,929,515	100	3,318,900,409	100	3,324,210,650	100	16,453,916,954	Bappeda Litbang
5	02		KEUANGAN																	
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	61,395,699,798	100	67,520,019,778	100	74,256,771,756	100	81,667,198,931	100	89,727,162,574	100	374,566,852,837	BPKAD
5	02	02	Program pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	289,878,856,690	WTP	318,750,805,604	WTP	350,753,416,595	WTP	385,828,758,254	WTP	423,448,601,983	WTP	1,768,660,439,126	BPKAD
5	02	03	Program pengelolaan barang milik daerah	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	2,320,691,350	WTP	2,702,760,485	WTP	2,958,036,534	WTP	3,253,840,187	WTP	3,579,224,206	WTP	14,814,552,762	BPKAD
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	6,409,770,969	100	6,418,103,671	100	6,427,089,016	100	6,436,729,650	100	6,447,028,417	100	32,138,721,724	Bapenda
5	02	04	Program	Persentase PAD	Persen	4.33	5.27	5.31	2,939,746,140	5.70	2,943,567,810	6.09	2,947,688,805	6.48	2,952,110,338	6.87	2,956,833,715	6.87	14,739,946,808	Bapenda



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang-gung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Rp (8)	(9)	Rp (10)	(11)	Rp (12)	(13)	Rp (14)	(15)	Rp (16)	(17)	Rp (18)	(19)
			pengelolaan pendapatan daerah	terhadap pendapatan daerah																
5	03		KEPEGAWAIAN																	
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	4,634,806,410	100	4,640,831,658	100	4,647,328,823	100	4,654,299,816	100	4,661,746,696	100	23,239,013,402	BKPSDM
5	03	02	Program kepegawaian daerah	Indeks profesionalisme ASN	Indeks	N.A	N.A	71.00	1,504,338,120	72.00	1,506,293,760	73.00	1,508,402,571	74.00	1,510,665,175	75.00	1,513,082,239	75.00	7,542,781,864	BKPSDM
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
5	04	02	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	Persen	37.23	38.06	38.90	1,122,345,670	39.76	1,123,804,719	40.65	1,125,378,046	41.55	1,127,066,113	42.47	1,128,869,419	42.47	5,627,463,967	BKPSDM
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
5	05	02	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	100	100	1,139,967,290	100	1,141,449,368	100	1,143,047,397	100	1,144,761,968	100	1,146,593,587	100	5,715,819,610	Bappeda Litbang
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH																	
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase pelaksanaan penunjang urusan	Persen	100	100	100	5,648,180,140	100	5,771,646,886	100	5,887,079,824	100	6,021,794,198	100	6,160,900,136	100	29,489,601,184	Inspektorat Kabupaten



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Daerah Kabupaten/Kota	pemerintah daerah																
6	01	02	Program penyelenggaraan pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2.45	3.00	3.10	2,236,825,950	3.10	2,280,812,740	3.20	2,478,894,014	3.30	2,695,783,415	3.30	2,933,361,757	3.30	12,625,677,876	Inspektorat Kabupaten
6	01	03	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2.45	3.00	3.10	370,352,010	3.10	390,000,000	3.20	400,000,000	3.30	410,000,000	3.30	420,000,000	3.30	1,990,352,010	Inspektorat Kabupaten
7			UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01		KECAMATAN																	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	5,184,718,604	100	5,191,458,738	100	5,198,726,780	100	5,206,524,871	100	5,214,855,310	100	25,996,284,304	Kec. Muaradua
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	98,454,150	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	498,454,150	Kec. Muaradua
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	2,580,000,000	100	2,580,000,000	100	2,580,000,000	100	2,580,000,000	100	2,580,000,000	100	12,900,000,000	Kec. Muaradua
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	120,000,000	Kec. Muaradua
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	320,000,000	Kec. Muaradua
7	01	06	Program	Cakupan	Persen	100	100	100	0	100	180,000,000	100	180,000,000	100	180,000,000	100	180,000,000	100	720,000,000	Kec.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa																Muaradua
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	1,524,071,610	100	1,518,439,514	100	1,826,412,444	100	1,872,161,444	100	1,897,961,444	100	8,639,046,456	Kec. Pulau Beringin
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	0	100	50,000,000	100	100,000,000	100	110,000,000	100	200,000,000	100	460,000,000	Kec. Pulau Beringin
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Pulau Beringin
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Pulau Beringin
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Pulau Beringin
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	10,001,950	100	5,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	7,000,000	100	52,001,950	Kec. Pulau Beringin
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	3,702,882,264	100	3,707,281,672	100	3,708,782,872	100	3,709,071,352	100	3,710,288,592	100	18,538,306,752	Kec. Banding Agung
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	71,952,460	100	66,305,335	100	66,398,162	100	66,497,760	100	66,604,156	100	337,757,873	Kec. Banding Agung



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													PD Penang-gung Jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	453,510,736	100	453,510,736	100	453,510,736	100	453,510,736	100	453,510,736	100	2,267,553,680	Kec. Banding Agung
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Banding Agung
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Banding Agung
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Banding Agung
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	2,255,148,200	100	2,258,079,893	100	2,261,241,205	100	2,264,633,066	100	2,268,256,479	100	11,307,358,843	Kec. Mda Kisam
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	38,365,000	100	38,365,000	100	38,365,000	100	38,365,000	100	38,365,000	100	191,825,000	Kec. Mda Kisam
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Mda Kisam
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Mda Kisam
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Mda Kisam
7	01	06	Program pembinaan dan	Cakupan Pembinaan dan	Persen	100	100	100	5,000,000	100	5,006,500	100	5,013,509	100	5,021,029	100	5,029,063	100	25,070,101	Kec. Mda Kisam



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			pengawasan pemerintahan desa	Pengawasan Pemerintah Desa																
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	1,346,008,305	100	1,347,758,116	100	1,349,644,977	100	1,351,669,445	100	1,353,832,116	100	6,748,912,959	Kec. Simpang
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	39,999,660	100	40,051,660	100	40,107,732	100	40,167,893	100	40,232,162	100	200,559,107	Kec. Simpang
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Simpang
7	01	04	Program koordinasi ketentrman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentrman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Simpang
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Simpang
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Simpang
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	2,660,417,480	100	2,663,876,023	100	2,667,605,449	100	2,671,606,857	100	2,675,881,428	100	13,339,387,238	Kec. BSA
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	32,586,720	100	32,629,083	100	32,674,763	100	32,723,776	100	32,776,134	100	163,390,475	Kec. BSA
7	01	03	Program pemberdayaan	Persentase Pemberdayaan	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. BSA



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			masyarakat desa dan kelurahan	Masyarakat Desa dan Kelurahan																
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. BSA
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. BSA
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	5,000,000	100	5,006,500	100	5,013,509	100	5,021,029	100	5,029,063	100	25,070,101	Kec. BSA
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	2,130,394,610	100	2,123,706,322	100	2,128,484,774	100	2,133,461,692	100	2,135,694,048	100	10,651,741,446	Kec. Buay Runjung
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	82,145,590	100	82,145,590	100	82,145,590	100	82,145,590	100	82,145,590	100	410,727,950	Kec. Buay Runjung
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Buay Runjung
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Buay Runjung
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Buay Runjung
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Buay Runjung



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	01	01	desa																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	1,513,855,200	100	1,515,823,212	100	1,517,945,364	100	1,520,222,282	100	1,522,654,638	100	7,590,500,696	Kec. Mekakau Ilir
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	32,000,000	100	32,041,600	100	32,086,458	100	32,134,558	100	32,186,003	100	160,448,619	Kec. Mekakau Ilir
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Mekakau Ilir
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Mekakau Ilir
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Mekakau Ilir
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	4,600,000	100	4,605,980	100	4,612,428	100	4,619,347	100	4,626,738	100	23,064,493	Kec. Mekakau Ilir
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	1,776,088,730	100	1,767,934,842	100	1,771,213,294	100	1,774,690,212	100	1,776,922,568	100	8,866,849,646	Kec. Buay Pemaca
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	100,082,270	100	100,082,270	100	100,082,270	100	100,082,270	100	100,082,270	100	500,411,350	Kec. Buay Pemaca
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Buay Pemaca



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													PD Penang-gung Jawab
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
70104	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Buay Pemaca	
70105	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Buay Pemaca	
70106	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Buay Pemaca	
70101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	1,461,774,320	100	1,463,674,771	100	1,465,723,915	100	1,467,922,501	100	1,470,271,177	100	7,329,366,684	Kec. Kisam Tinggi	
70102	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	45,010,000	100	45,068,513	100	45,131,609	100	45,199,306	100	45,271,625	100	225,681,053	Kec. Kisam Tinggi	
70103	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	0	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	24,000,000	Kec. Kisam Tinggi	
70104	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	0	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	16,000,000	Kec. Kisam Tinggi	
70105	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	8,000,000	100	8,000,000	100	8,000,000	100	8,000,000	100	32,000,000	Kec. Kisam Tinggi	
70106	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	0	100	32,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	128,000,000	Kec. Kisam Tinggi	
70101	Program	Presentase	Persen	100	100	100	1,346,008,305	100	1,347,758,116	100	1,349,644,977	100	1,351,669,445	100	1,353,832,116	100	6,748,912,958	Kec. Kisam	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penang-gung Jawab		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		T	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah																Iilir	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	39,999,660	100	40,051,660	100	40,107,732	100	40,167,893	100	40,232,162	100	200,559,107	Kec. Kisam Iilir	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Kisam Iilir	
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Kisam Iilir	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Kisam Iilir	
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Kisam Iilir	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	3,535,984,526	100	3,540,581,306	100	3,545,538,120	100	3,550,856,427	100	3,556,537,797	100	17,729,498,176	Kec. BPR Ranau Tengah	
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	98,454,150	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	498,454,150	Kec. BPR Ranau Tengah	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	441,000,150	100	441,573,450	100	442,191,653	100	442,854,941	100	443,563,508	100	2,211,183,702	Kec. BPR Ranau Tengah	
7	01	04	Program koordinasi	Persentase pelaksanaan	Persen	100	100	100	0	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	80,000,000	Kec. BPR Ranau	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			ketentraman dan ketertiban umum	koordinasi ketentraman dan ketertiban umum																Tengah
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	320,000,000	Kec. BPR Ranau Tengah
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	0	100	180,000,000	100	180,000,000	100	180,000,000	100	180,000,000	100	720,000,000	Kec. BPR Ranau Tengah
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	2,019,576,000	100	2,022,201,449	100	2,025,032,531	100	2,028,070,080	100	2,031,314,992	100	10,126,195,051	Kec. Warkuk Ranau Selatan
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	33,315,000	100	33,358,410	100	33,405,011	100	33,455,119	100	33,508,647	100	167,042,187	Kec. Warkuk Ranau Selatan
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Warkuk Ranau Selatan
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Warkuk Ranau Selatan
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Warkuk Ranau Selatan
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	5,100,000	100	5,006,500	100	5,013,509	100	5,021,029	100	5,029,063	100	25,170,101	Kec. Warkuk Ranau Selatan
7	01	01	Program Penunjang Urusan	Presentase pelaksanaan penunjang	Persen	100	100	100	1,608,774,000	100	1,610,865,406	100	1,613,120,618	100	1,615,540,299	100	1,618,125,163	100	8,066,425,486	Kec. Runjung Agung



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penang-gung Jawab		
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		T	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	urusan pemerintah daerah																
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	98,454,150	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	498,454,150	Kec. Runjung Agung
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Runjung Agung
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	15,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	135,000,000	Kec. Runjung Agung
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	40,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	360,000,000	Kec. Runjung Agung
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	90,000,000	100	180,000,000	100	180,000,000	100	180,000,000	100	180,000,000	100	810,000,000	Kec. Runjung Agung
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	1,433,062,420	100	1,434,925,401	100	1,436,934,297	100	1,439,089,698	100	1,441,392,242	100	7,185,404,058	Kec. Sungai Are
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	28,105,000	100	28,141,537	100	28,180,935	100	28,223,206	100	28,268,363	100	140,919,040	Kec. Sungai Are
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Sungai Are
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Sungai Are



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Sungai Are
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	5,100,000	100	5,106,630	100	5,113,779	100	5,121,450	100	5,129,644	100	25,571,504	Kec. Sungai Are
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	1,337,840,200	100	1,339,579,392	100	1,341,454,803	100	1,343,466,986	100	1,345,616,533	100	6,707,957,914	Kec. Sindang Danau
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	37,540,000	100	37,588,802	100	37,641,426	100	37,697,888	100	37,758,205	100	188,226,322	Kec. Sindang Danau
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Sindang Danau
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Sindang Danau
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Sindang Danau
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	4,375,000	100	4,380,688	100	4,386,820	100	4,393,401	100	4,400,430	100	21,936,339	Kec. Sindang Danau
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	Persen	100	100	100	1,917,000,000	100	1,919,000,000	100	1,922,000,000	100	1,925,000,000	100	1,928,000,000	100	9,611,000,000	Kec. Buana Pemaca



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	01	02	Kabupaten/Kota	daerah																
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	34,000,000	100	34,000,000	100	34,000,000	100	34,000,000	100	34,000,000	100	170,000,000	Kec. Buana Pemaca
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	50,000,000	Kec. Buana Pemaca
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	50,000,000	Kec. Buana Pemaca
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	50,000,000	Kec. Buana Pemaca
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	30,000,000	Kec. Buana Pemaca
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	1,535,517,134	100	1,937,470,942	100	2,309,512,586	100	2,752,506,559	100	3,287,646,524	100	11,822,653,745	Kec. Tiga Dihaji
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	29,311,480	100	29,349,585	100	29,390,674	100	29,434,760	100	29,481,856	100	146,968,355	Kec. Tiga Dihaji
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	0	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	24,000,000	Kec. Tiga Dihaji
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	0	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	16,000,000	Kec. Tiga Dihaji



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang-gung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	8,000,000	100	8,000,000	100	8,000,000	100	8,000,000	100	32,000,000	Kec. Tiga Dihaji
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	0	100	32,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	128,000,000	Kec. Tiga Dihaji
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	2,095,314,000	100	2,352,807,000	100	2,352,807,000	100	2,352,807,000	100	2,302,807,000	100	11,456,542,000	Kec. Buay Rawan
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	10,611,620	100	67,000,000	100	67,000,000	100	67,000,000	100	17,000,000	100	228,611,620	Kec. Buay Rawan
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	0	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	Kec. Buay Rawan
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	120,000,000	Kec. Buay Rawan
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	0	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	320,000,000	Kec. Buay Rawan
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	0	100	180,000,000	100	180,000,000	100	180,000,000	100	180,000,000	100	720,000,000	Kec. Buay Rawan
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01		KESATUAN																	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penang-gung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			BANGSA DAN POLITIK																	
8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	1,865,712,180	100	2,785,712,180	100	3,344,054,616	100	4,009,265,539	100	4,807,518,647	100	16,812,263,162	Badan Kesbang Pol
8	01	02	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD	Konflik	5	5	4	15,870,020	0	216,870,020	0	260,244,024	0	312,292,829	0	374,751,395	0	1,180,028,288	Badan Kesbang Pol
8	01	03	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Tingkat Partispasi politik masyarakat dalam pemilu serentak	Persen	86.00	86.00	90.00	1,089,559,558	90.00	1,241,559,558	90.00	1,489,871,470	90.00	1,787,845,764	90.00	2,145,414,916	90.00	7,754,251,266	Badan Kesbang Pol
8	01	04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD	Konflik	5	5	4	42,596,310	0	194,596,310	0	233,515,572	0	280,218,686	0	336,262,424	0	1,087,189,302	Badan Kesbang Pol
8	01	05	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD	Konflik	5	5	4	66,226,960	0	499,465,340	0	599,358,408	0	719,230,090	0	863,076,108	0	2,747,356,906	Badan Kesbang Pol
8	01	06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD	Konflik	5	5	4	79,238,380	0	281,238,380	0	337,486,056	0	404,983,267	0	485,979,921	0	1,588,926,004	Badan Kesbang Pol
			TOTAL						2,052,723,040,032		2,300,132,998,763		2,002,509,817,905		2,623,587,405,635		2,508,162,176,769		11,487,065,439,105	



*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026*



BAB IX

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan. Indikator kinerja makro tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Provinsi dan Nasional.



Tabel IX.1
Proyeksi Indikator Makro
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun ke					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65.30	67.01	67.23	67.67	68.30	68.94	69.58	69.58
2.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10.85	9.02	9.00	8.97	8.74	8.51	8.29	8.29
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.28	2.29	2.24	2.19	2.14	2.09	2.04	2.04
4.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0.37	4.42	4.45	5.00	5.33	5.67	6.04	6.04
5.	Pendapatan per kapita	Juta Rp	24.59	30.93	32.26	33.65	35.09	36.60	38.18	38.18
6.	Ketimpangan pendapatan	Indeks	0.271	0.264	0.257	0.250	0.244	0.237	0.231	0.231



Tabel IX.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun ke					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0.37	4.42	4.45	5.00	5.33	5.67	6.04	6.04
2.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10.85	9.02	9.00	8.97	8.74	8.51	8.29	8.29
3.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	3.28	2.29	2.24	2.19	2.14	2.09	2.04	2.04
4.	PAD sektor pariwisata	Persen	0.27	0.46	0.78	1.34	2.28	3.88	6.61	6.61
5.	Kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	Persen	31.09	31.32	31.56	31.79	32.03	32.27	32.52	32.52
6.	Nilai tukar petani (NTP)	Persen	104	105	106	107	108	109	110	110
7.	Produksi perikanan	Persen	29.50	32.59	36.01	39.79	43.97	48.58	53.67	53.67
8.	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	Persen	22.50	22.81	23.12	23.44	23.77	24.09	24.42	24.42
9.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	7.94	8.14	8.34	8.55	8.76	8.98	9.21	9.21
10.	Persentase koperasi aktif	Persen	18.33	22.45	25.95	27.91	30.00	32.26	34.69	34.69
11.	Pendapatan per kapita	Juta Rp	24.59	30.93	32.26	33.65	35.09	36.60	38.18	38.18
12.	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	Skor	83.60	85.50	86.50	87.00	87.75	88.50	89.50	89.50
13.	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	N.A	B	B	B	BB	BB	A	A
14.	Nilai SAKIP	Skor	B	B	B	BB	BB	BB	A	A
15.	Indeks kualitas perencanaan		N.A	B	B	B	B	B	A	A
16.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	N.A	N.A	70.20	70.30	70.40	7.50	70.60	70.60
18.	Skor indeks inovasi daerah	Skor	358	550	700	1000	1200	1350	1550	1550
19.	Skor maturitas SPIP	Skor	2.45	3.00	3.10	3.10	3.20	3.30	3.30	3.30
20.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65.30	67.01	67.23	67.67	68.30	68.94	69.58	69.58
21.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.84	8.02	8.21	8.40	8.59	8.79	9.00	9.00
22.	Angka harapan lama sekolah	Tahun	11.75	11.79	11.84	11.88	11.92	11.97	12.01	12.01
23.	APM SD/MI	Persen	99.00	99.04	99.08	99.12	99.16	99.20	99.24	99.24
24.	APM SMP/MTs	Persen	78.68	78.70	78.72	78.74	78.76	78.78	78.80	78.80



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun ke					Kondisi
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
25.	APM SMA/SMK/ MA	Persen	61.83	62.00	62.50	62.80	63.00	63.20	63.50	63.50
26.	APK PAUD	Persen	47.62	51.10	54.83	58.83	63.12	67.73	72.68	72.68
27.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	N.A	N.A	47.50	49.50	51.50	53.50	56.50	56.50
28.	Angka usia harapan hidup	Tahun	67.04	67.48	67.93	68.38	68.83	69.29	69.75	69.75
29.	Angka Kesakitan	Persen	17.46	16.39	15.39	14.46	13.57	12.75	11.97	11.97
30.	Kematian bayi		46	40	35	30	25	20	15	15
31.	Kematian ibu		5	4	3	2	1	1	0	0
32.	Persentase Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita	Persen	2.79	2.59	2.49	2.39	2.29	2.09	1.89	1.89
33.	Kategori kabupaten/kota sehat (KKS)		-	-	-	Padapa	-	Wistara	-	Wistara
34.	Cakupan peserta KB aktif	Persen	69.03	69.41	69.79	70.18	70.56	70.95	71.34	71.34
35.	Peringkat pada porprov	Peringkat	-	3	-	3	-	3	-	3
36.	Indeks pembangunan gender (IPG)	Indeks	92.62	93.10	93.34	93.59	93.83	94.08	94.33	94.33
37.	Indeks pemberdayaan gendar (IDG)	Indeks	55.33	55.87	55.96	56.06	56.14	56.15	56.35	56.35
38.	Kategori kabupaten layak anak (KLA)		-	Pratama	Madya	Nindya	Nindya	Utama	KLA	KLA
39.	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		-	-	Pratama	Madya	Madya	Utama	Mentor	Mentor
40.	Rata-rata waktu tempuh jalan Kabupaten	Km/jam	N.A	28	30	35	40	40	45	45
41.	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	Persen	54.82	59.08	63.67	68.62	73.95	79.69	85.88	85.88
42.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	67.25	68.22	69.47	70.72	71.97	73.22	74.47	74.47
43.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	53.37	57.59	62.14	67.04	72.34	78.06	84.22	84.22
44.	Persentase rumah layak huni	Persen	77.13	77.32	77.52	77.71	77.91	78.10	78.30	78.30
45.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	83.26	85.13	87.04	88.99	90.98	93.02	95.11	95.11
46.	Rasio Elektrifikasi	Persen	67.62	70.98	74.52	78.22	82.11	86.20	90.49	90.49
47.	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	49,80	52.65	55.66	58.84	62.21	65.77	69.53	69.53
48.	Respon Cepat Darurat Bencana	Persen	36.11	42.38	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
49.	Indeks kualitas air	Indeks	N.A	52.60	52.70	52.80	52.90	53.00	53.10	53.10



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun ke					Kondisi
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
50.	Indeks kualitas udara	Indeks	N.A	92.62	92.72	92.82	92.92	93.02	93.12	93.12
51.	Indeks kualitas lahan	Indeks	N.A	41.85	43.94	46.03	48.12	50.21	52.30	52.30
52.	Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	Persen	61.11	60.35	59.59	58.85	58.11	57.38	56.67	56.67
53.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Rasio	50.72	50.72	54.00	58.00	62.00	66.00	70.00	70.00
54.	Nilai investasi	Rupiah	906.9 milyar	1,0 triliun	1,5 triliun	2,5 triliun	3,5 triliun	4,5 triliun	5,5 triliun	5,5 triliun
55.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	11	11	14	16	18	22	26	26
56.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Persen	71.47	72.88	74.29	75.70	77.11	78.52	79.93	79.93
57.	Angka kriminalitas		0.48	0.37	0.29	0.22	0.17	0.13	0.10	0.10
58.	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD	Konflik	5	5	4	0	0	0	0	0



Tabel IX.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
2.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
2.2.1.1.	Pertumbuhan PDRB									
	▪ PDRB ADHB	Milyar Rp	8,975.76	9,548.21	10,157.18	10,804.98	11,494.10	12,227.17	13,006.99	13,006.99
	▪ PDRB ADHK	Milyar Rp	5,731.91	5,946.56	6,169.25	6,400.27	6,639.95	6,888.60	7,146.57	7,146.57
	▪ Laju Perubuhan Ekonomi	Persen	0.37	4.42	4.45	5.00	5.33	5.67	6.04	6.04
2.2.1.2.	PDRB Perkapita									
	▪ ADHB	Juta Rp	24.59	25.86	27.20	28.61	30.09	31.65	33.28	33.28
	▪ ADHK	Juta Rp	15.70	16.28	16.73	17.19	17.67	18.15	18.66	18.66
2.2.1.3.	Indeks Gini	Indeks	0.271	0.264	0.257	0.250	0.244	0.237	0.231	0.231
2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial									
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	65.30	67.01	67.23	67.67	68.30	68.94	69.58	69.58
2.2.2.1.1.	Pendidikan									
	▪ Angka melek huruf	Persen	99.33	99.41	99.49	99.57	99.65	99.72	99.80	99.80
	▪ Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.84	8.02	8.21	8.40	8.59	8.79	9.00	9.00
	▪ Angka harapan lama sekolah	Tahun	11.75	11.79	11.84	11.88	11.92	11.97	12.01	12.01
2.2.2.1.2.	Kesehatan									
	▪ Angka usia harapan hidup	Tahun	67.04	67.48	67.93	68.38	68.83	69.29	69.75	69.75
	▪ Persentase balita gizi buruk	Persen	0.420	0.414	0.410	0.310	0.210	0.110	0.010	0.010
	▪ Prevalensi balita gizi kurang	Persen	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
	▪ Cakupan desa siaga aktif	Persen	88.41	89.82	91.25	92.70	94.18	95.68	97.20	97.20
2.2.2.1.3.	Ketenagakerjaan									
	▪ Angka partisipasi angkatan kerja	Persen	63.98	67.96	72.19	76.68	81.45	86.51	91.89	91.89
	▪ Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	71.47	72.88	74.29	75.70	77.11	78.52	79.93	79.93
	▪ Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3.28	2.29	2.24	2.19	2.14	2.09	2.04	2.04



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	▪ Rasio penduduk yang bekerja	Rasio	96.72	97.00	97.28	97.56	97.85	98.13	98.42	98.42
	▪ Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Rasio	60.28	60.82	61.37	61.92	62.47	63.03	63.60	63.60
	▪ Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Persen	53.80	55.42	57.10	58.82	60.60	62.43	64.31	64.31
2.2.2.2.	Sosial									
2.2.2.2.1.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	89.15	90.98	91.00	91.03	91.26	91.49	91.71	91.71
2.2.2.2.2.	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	Persen	40.80	44.16	47.80	51.74	56.00	60.62	65.61	65.61
2.2.2.3.	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	3.45	5.27	5.31	5.70	6.09	6.48	6.87	6.87
2.2.2.4.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.2.5.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	83.60	85.50	86.50	87.00	87.75	88.50	89.50	89.50
2.2.2.6.	Penguatan cadangan pangan	Persen	31.17	36.08	41.76	48.34	55.95	64.77	74.97	74.97
2.2.2.7.	Produksi sektor pertanian									
2.2.2.7.1.	Produksi tanaman pangan									
	▪ Padi	Ton	194,779.62	195,204.60	195,630.51	196,057.34	196,485.11	196,913.81	197,343.45	197,343.45
	▪ Jagung	Ton	365,193.40	408,505.34	456,954.07	511,148.82	571,771.07	639,583.12	715,437.68	715,437.68
	▪ Ketela Pohon	Ton	1,238.04	1,284.34	1,332.38	1,382.21	1,433.90	1,487.53	1,543.16	1,543.16
	▪ Ketela Rambat	Ton	139.68	145.08	150.69	156.52	162.57	168.86	175.39	175.39
	▪ Kedelai	Ton	194.40	86.98	105.85	128.82	156.78	190.80	232.20	232.20
	▪ Kacang Hijau	Ton	1.25	1.84	2.60	3.67	5.18	7.32	10.35	10.35
2.2.2.7.2.	Produksi Sayur-Sayuran									
	▪ Bawang daun	Ton	1,844	1,991.52	2,150.84	2,322.91	2,508.74	2,709.44	2,926.20	2,926.20
	▪ Kentang	Ton	0	180	180	180	180	180	180	180
	▪ Kubis	Ton	1,954	2,051.31	2,153.46	2,260.71	2,373.29	2,491.48	2,615.56	2,615.56
	▪ Petsai/Sawi	Ton	1,611	1,691.07	1,775.11	1,863.34	1,955.94	2,053.15	2,155.20	2,155.20
	▪ Kacang Merah	Ton	563	612.04	665.35	723.30	786.30	854.78	929.23	929.23
	▪ Kacang Panjang	Ton	1,352	1,555.75	1,790.20	2,059.98	2,370.42	2,727.64	3,138.70	3,138.70
	▪ Cabe Besar	Ton	12,924	15,700.08	19,072.45	23,169.21	28,145.96	34,191.71	41,536.09	41,536.09



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	▪ Cabe Rawit	Ton	15,443	16,822.06	18,324.27	19,960.63	21,743.11	23,684.77	25,799.82	25,799.82
2.2.2.7.3.	Provitas Sayur-Sayuran									
	▪ Provitas cabe	Ton/ha	10.29	10.76	11.25	11.77	12.31	12.87	13.46	13.46
	▪ Provitas bawang merah	Ton/ha	3.00	3.00	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90	3.90
2.2.2.7.4.	Produksi Buah-Buahan									
	▪ Alpukat	Ton	6,014	7,189.14	8,593.89	10,273.14	12,280.51	14,680.12	17,548.62	17,548.62
	▪ Duku	Ton	9,190	10,821.23	12,741.99	15,003.70	17,666.85	20,802.72	24,495.20	24,495.20
	▪ Durian	Ton	1,979	2,249.53	2,557.04	2,906.59	3,303.92	3,755.56	4,268.95	4,268.95
	▪ Jeruk	Ton	15,111	16,626.63	18,294.28	20,129.20	22,148.16	24,369.62	26,813.89	26,813.89
	▪ Mangga	Ton	15,630	17,615.01	19,852.12	22,373.34	25,214.75	28,417.02	32,025.98	32,025.98
	▪ Nangka	Ton	164	185.60	210.04	237.70	269.01	304.44	344.53	344.53
	▪ Pepaya	Ton	7,464	8,360.43	9,364.51	10,489.19	11,748.94	13,159.99	14,740.51	14,740.51
	▪ Pisang	Ton	632.63	730.43	843.36	973.74	1,124.28	1,298.10	1,498.78	1,498.78
2.2.2.7.5.	Provitas Buah-Buahan									
	▪ Provitas Pisang	Ton/ha	63.26	64.94	66.66	68.42	70.24	72.10	74.01	74.01
	▪ Provitas Alpukat	Ton/ha	23.18	24.00	24.85	25.72	26.63	27.57	28.54	28.54
	▪ Provitas Durian	Ton/ha	35.19	36.79	38.47	40.23	42.06	43.98	45.98	45.98
	▪ Provitas Duku	Ton/ha	17.00	17.51	18.04	18.58	19.13	19.71	20.30	20.30
2.2.2.7.6.	Populasi Ternak									
	▪ Sapi	Ekor	13,840	14,031	14,225	14,421	14,620	14,822	15,026	15,026
	▪ Kerbau	Ekor	370	377	385	392	400	407	415	415
	▪ Domba	Ekor	67	79	94	111	131	155	183	183
	▪ Kambing	Ekor	31,857	31,98	32,112	32,240	32,368	32,497	32,627	32,627
2.2.2.7.	Produksi sektor perkebunan									
	▪ Kopi robusta	Ton	50,854.44	51,362.98	51,876.61	52,395.38	52,919.33	53,448.53	53,983.01	53,983.01
	▪ Karet	Ton	3,481.50	3,560.88	3,642.07	3,725.11	3,810.04	3,896.91	3,985.76	3,985.76
	▪ Kakao	Ton	554.40	3,560.88	3,642.07	3,725.11	3,810.04	3,896.91	3,985.76	3,985.76
	▪ Lada	Ton	2,749.75	2,787.42	2,825.61	2,864.32	2,903.56	2,943.34	2,983.66	2,983.66
	▪ Tembakau	Ton	26.40	27.84	29.36	30.96	32.66	34.44	36.32	36.32
2.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga									



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.2.3.1.	Jumlah grup kesenian	Grup	52	53	53	53	53	54	54	54
2.2.3.2.	Jumlah gedung kesenian	Gedung	1	1	1	1	2	2	2	2
2.2.3.3.	Jumlah gedung olahraga	Gedung	6	7	7	7	7	8	8	8
2.2.3.4.	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	27	27	30	30	30	30	30	30
2.2.3.5.	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	0	1	2	2	2	2	2	2
2.3.	Aspek Pelayanan Umum									
2.3.1.	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib									
2.3.1.1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2.3.1.1.1.	Pendidikan									
2.3.1.1.1.1.	APK PAUD	Persen	47.62	51.10	54.83	58.83	63.12	67.73	72.68	72.68
2.3.1.1.1.2.	Angka Partisipasi Kasar									
	▪ SD/MI	Persen	110.60	111.53	112.47	113.41	114.36	115.32	116.29	116.29
	▪ SLTP/MTS	Persen	87.88	88.37	88.87	89.36	89.87	90.37	90.87	90.87
	▪ SLTA/SMK/MA	Persen	76.53	76.62	76.71	76.81	76.90	76.99	77.08	77.08
2.3.1.1.1.3.	Angka Partisipasi Murni									
	▪ SD/MI	Persen	99.00	99.04	99.08	99.12	99.16	99.20	99.24	99.24
	▪ SMP/MTs	Persen	78.68	78.70	78.72	78.74	78.76	78.78	78.80	78.80
	▪ SMA/SMK/MA	Persen	61.83	62.00	62.50	62.80	63.00	63.20	63.50	63.50
2.3.1.1.1.3.	Angka Partisipasi Sekolah									
	▪ 7-12	Persen	99.60	99.70	99.80	99.90	100.00	100.10	100.20	100.20
	▪ 13-15	Persen	91.61	91.69	91.77	91.86	91.94	92.02	92.11	92.11
	▪ 16-18	Persen	71.03	71.09	71.15	71.21	71.27	71.33	71.39	71.39
2.3.1.1.1.4.	Angka Kelulusan									
	▪ Angka kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	▪ Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	▪ Angka kelulusan (AL) SMA/ SMK/ MA	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.1.1.1.5.	Angka Melanjutkan (AM)									
	▪ Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	88.28	89.43	90.59	91.77	92.96	94.17	95.39	95.39
	▪ Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke	Persen	69.91	70.92	71.94	72.97	74.02	75.09	76.17	76.17



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	SMA/SMK/MA									
2.3.1.1.1.6.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	93.33	94.16	95.00	95.84	96.70	97.56	98.43	98.43
2.3.1.1.1.7.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	87.59	88.17	88.75	89.34	89.93	90.52	91.12	91.12
2.3.1.1.1.8.	Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	Persen	51.93	56.22	60.87	65.91	71.36	77.26	83.65	83.65
2.3.1.1.1.9.	Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	Persen	43.01	46.39	50.03	53.96	58.20	62.77	67.70	67.70
2.3.1.1.1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar									
	▪ SD/MI	Rasio	1 : 167	1 : 159	1 : 152	1 : 145	1 : 139	1 : 133	1 : 127	1 : 127
	▪ SMP/MTs	Rasio	1 : 326	1 : 308	1 : 290	1 : 274	1 : 258	1 : 244	1 : 230	1 : 230
2.3.1.1.1.11.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar									
	▪ SD/MI	Rasio	1 : 12.45	1 : 12.41	1 : 12.37	1 : 12.33	1 : 12.29	1 : 12.25	1 : 12.21	1 : 12.21
	▪ SMP/MTs	Rasio	1 : 13.49	1 : 13.38	1 : 13.26	1 : 13.15	1 : 13.04	1 : 12.93	1 : 12.82	1 : 12.82
2.3.1.1.1.12.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio	1 : 13.37	1 : 13.20	1 : 13.03	1 : 12.87	1 : 12.70	1 : 12.54	1 : 12.38	1 : 12.38
2.3.1.1.1.13.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	75.11	76.88	78.69	80.55	82.44	84.39	86.37	86.37
2.3.1.1.1.14.	Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD	Persen	47.62	58.48	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.1.15.	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SD	Persen	84.95	93.24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.1.16.	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SMP	Persen	56.08	59.83	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.1.17.	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	Persen	2.00	2.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.1.18.	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	Persen	40.94	40.94	45.07	50.00	55.00	60.00	65.00	65.00
2.3.1.1.2.	Kesehatan									
2.3.1.1.2.1.	Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan	Persen	17.46	16.39	15.39	14.46	13.57	12.75	11.97	11.97
2.3.1.1.2.2.	Angka Kematian Bayi (AKB)		46	42	44	40	38	36	34	34
2.3.1.1.2.3.	Angka Kematian Ibu		5	4	3	2	1	1	0	0
2.3.1.1.2.4.	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	8.63	8.74	8.85	8.96	9.08	9.19	9.31	9.31
2.3.1.1.2.5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	1 : 5954	1 : 5,703	1 : 5,462	1 : 5,232	1 : 5,011	1 : 4,799	1 : 4,597	1 : 4,597
2.3.1.1.2.6.	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0.00240	0.00240	0.00240	0.00240	0.00240	0.00240	0.00240	0.00240
2.3.1.1.2.7.	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0.074	0.08	0.09	0.11	0.12	0.14	0.16	0.16



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.3.1.1.2.8.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	2.65	2.78	2.91	3.05	3.20	3.36	3.52	3.52
2.3.1.1.2.9.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	94.92	95.71	96.50	97.30	98.11	98.93	99.75	99.75
2.3.1.1.2.10.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	83.01	84.22	85.45	86.70	87.96	89.25	90.55	90.55
2.3.1.1.2.11.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.12.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	90.31	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.13.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	0.36	0.42	0.49	0.57	0.66	0.77	0.90	0.90
2.3.1.1.2.14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	32.80	35.26	41.11	47.92	55.86	65.11	75.90	75.90
2.3.1.1.2.15.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		98.85	92.36	86.29	80.62	75.32	70.37	65.75	65.75
2.3.1.1.2.16.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		0.48	0.46	0.45	0.43	0.42	0.41	0.39	0.39
2.3.1.1.2.17.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	32.80	38.02	44.06	51.07	59.20	68.61	79.53	79.53
2.3.1.1.2.18.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	99.51	99.52	99.53	99.54	99.55	99.56	99.57	99.57
2.3.1.1.2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.20.	Penderita diare yang ditangani	Persen	46.41	49.02	51.77	54.68	57.76	61.00	64.43	64.43
2.3.1.1.2.21.	Angka kejadian malaria		0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
2.3.1.1.2.22.	Tingkat kematian akibat malaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.2.23.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.24.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
2.3.1.1.2.25.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	77.68	78.94	80.22	81.52	82.84	84.18	85.54	85.54
2.3.1.1.2.26.	Cakupan kunjungan bayi	Persen	99.61	99.67	99.73	99.79	99.85	99.91	99.97	99.97
2.3.1.1.2.27.	Cakupan puskesmas		0.0046	0.00476	0.0046	0.0048	0.0049	0.0050	0.0050	0.0050
2.3.1.1.2.28.	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	15.48	15.48	15.48	17.86	19.84	21.83	23.81	23.81
2.3.1.1.2.29.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	97.12	97.53	97.94	98.35	98.76	99.18	99.59	99.59
2.3.1.1.2.30.	Cakupan pelayanan nifas	Persen	94.92	95.18	95.43	95.69	95.95	96.21	96.47	96.47



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.3.1.1.2.31.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	98.31	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.32.	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	70.26	74.12	78.19	82.48	87.01	91.78	96.82	96.82
2.3.1.1.2.33.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.34.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	10.63	11.83	13.16	14.65	16.30	18.14	20.19	20.19
2.3.1.1.2.35.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	77.68	80.65	83.73	86.93	90.25	93.69	97.27	97.27
2.3.1.1.2.36.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.37.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2.38.	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	PKM	19	19	19	19	19	19	19	19
2.3.1.1.2.39.	Persentase Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita	Persen	2.79	2.59	2.49	2.39	2.29	2.09	1.89	1.89
2.3.1.1.2.40.	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa/Kel	221	226	231	236	241	246	252	252
2.3.1.1.2.41.	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Desa/Kel	171	226	231	236	241	246	252	252
2.3.1.1.2.42.	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.43.	Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persen	2.65	2.78	2.91	3.05	3.20	3.36	3.52	3.52
2.3.1.1.2.44.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	61.33	65.98	70.99	76.38	82.18	88.42	95.13	95.13
2.3.1.1.2.45.	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	97.12	97.76	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.46.	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	94.92	98.26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.47.	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	84.32	86.98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.48.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	92.07	92.11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.49.	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	11.00	12.81	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.3.1.1.2.50.	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	3.23	4.42	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.51.	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	Persen	19.68	22.05	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.52.	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	10.12	40.20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.53.	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	10.12	16.73	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.54.	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Persen	61.71	61.71	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.55.	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	Persen	32.80	36.97	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.56.	Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Persen	4.03	4.03	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.2.57.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0.039	0.039	0.043	0.048	0.053	0.058	0.062	0.062
2.3.1.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
2.3.1.1.3.1.	Pekerjaan Umum									
2.3.1.1.3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	53.37	57.59	62.14	67.04	72.34	78.06	84.22	84.22
2.3.1.1.3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0.1504	0.1557	0.1611	0.1668	0.1726	0.1786	0.1849	0.1849
2.3.1.1.3.1.3.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	2.07	2.49	3.00	3.60	4.34	5.22	6.28	6.28
2.3.1.1.3.1.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	77.71	78.58	79.58	80.58	81.58	82.58	83.58	83.58
2.3.1.1.3.1.5.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	40.71	45.09	49.93	55.30	61.25	67.83	75.12	75.12
2.3.1.1.3.1.6.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	15.58	19.35	24.02	29.83	37.04	45.99	57.11	57.11
2.3.1.1.3.1.7.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	67.25	68.22	69.47	70.72	71.97	73.22	74.47	74.47
2.3.1.1.3.1.8.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	83.26	85.13	87.04	88.99	90.98	93.02	95.11	95.11
2.3.1.1.3.1.9.	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	Persen	54.82	59.08	63.67	68.62	73.95	79.69	85.88	85.88



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.3.1.1.3.1.10.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Persen	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
2.3.1.1.3.1.11.	Capaian Pelayanan SPALD-S Akses Dasar Air Limbah Domestik	Persen	71.46	72.54	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.3.1.12.	Capaian Pelayanan SPALD- S Akses Aman Air Limbah Domestik	Persen	63.38	66.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.3.1.13.	Capaian Pelayanan SPALD-T Akses Aman Air Limbah Domestik	Persen	66.43	69.42	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.3.1.14.	Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	63.75	67.86	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.3.1.15.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	N.A	N.A	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	14.00
2.3.1.1.3.1.16.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	N.A	N.A	40.00	40.00	45.00	45.00	50.00	50.00
2.3.1.1.3.2.	Penataan Ruang									
2.3.1.1.3.2.1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Rasio	50.72	50.72	54.00	58.00	62.00	66.00	70.00	70.00
2.3.1.1.3.2.2.	Jumlah bangunan ber-IMB	Unit	687	813	961	1,137	1,345	1,591	1,881	1,881
2.3.1.1.3.2.3.	Rasio bangunan ber- IMB persatuan bangunan	Persen	N.A	N.A	30.17	31.88	32.83	33.75	34.75	34.75
2.3.1.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
2.3.1.1.4.1.	Persentase rumah layak huni	Persen	77.13	77.32	77.52	77.71	77.91	78.10	78.30	78.30
2.3.1.1.4.2.	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
2.3.1.1.4.3.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	3.68	3.00	2.44	1.99	1.62	1.32	1.07	1.07
2.3.1.1.4.4.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.4.5.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.4.6.	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	22.87	22.84	22.79	22.76	22.74	22.71	22.69	22.69
2.3.1.1.4.7.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	0.78	0.79	0.93	1.09	1.23	1.25	1.28	1.28



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.3.1.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
2.3.1.1.5.1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	0.1679	0.1670	0.1661	0.1652	0.1643	0.1634	0.1625	0.1625
2.3.1.1.5.2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	75.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00
2.3.1.1.5.3.	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.5.4.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	Rasio	6.65	6.67	6.68	6.70	6.72	6.73	6.75	6.75
2.3.1.1.5.5.	Jumlah Linmas Pemilu Per Jumlah 10.000 Penduduk	Rasio	93.62	94.38	95.14	95.91	96.69	97.47	98.26	98.26
2.3.1.1.5.6.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP	Kegiatan	1	1	2	2	4	4	5	5
2.3.1.1.5.7.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	1	1	2	2	4	4	5	5
2.3.1.1.5.8.	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	Ormas	25	25	25	25	27	27	30	30
2.3.1.1.5.9.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Desa	2	2	2	4	6	8	8	8
2.3.1.1.5.10.	Banyaknya sistem peringatan dini	Sistem	1	1	5	10	15	19	19	19
2.3.1.1.5.11.	Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah									
	▪ Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD),	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	1
	▪ Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB),	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	1
	▪ Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	1
	▪ Rencana kontigensi Menghadapi Bencana Banjir Kabupaten OKU Selatan	Dokumen	1	1	2	2	2	2	2	2
	▪ Kajian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Kabupaten OKU Selatan	Dokumen	1	1	2	2	2	2	2	2
2.3.1.1.5.12.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.5.13.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	49.80	50.54	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.5.14.	Respon Cepat Darurat Bencana	Persen	36.11	42.38	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.5.15.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persen	34.00	34.43	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.3.1.1.6.	Sosial									
2.3.1.1.6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	28.33	34.08	41.00	49.32	59.33	71.38	85.87	85.87
2.3.1.1.6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	28.33	32.48	37.25	42.71	48.97	56.14	64.38	64.38
2.3.1.1.6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	7.13	9.28	12.09	15.74	20.50	26.69	34.75	34.75
2.3.1.1.6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	0.00	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41
2.3.1.1.6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	0.00	0.00	50.00	50.00	75.00	75.00	100.00	100.00
2.3.1.1.6.6.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.6.7.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	86.53	87.08	87.64	88.20	88.77	89.33	89.91	89.91
2.3.1.1.6.8.	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan	KPM	18,383	18,383	18,383	18,383	18,383	18,383	18,383	18,383
2.3.1.1.6.9.	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi									
	▪ Jumlah panti asuhan	Panti	6	6	6	6	6	6	6	6
	▪ Jumlah panti jompo	Panti	0	0	0	1	1	1	1	1
	▪ Panti rehabilitasi	Panti	0	0	0	1	1	1	1	1
2.3.1.1.6.10.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	66.67	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.6.11.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	28.57	28.57	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.6.12.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	64.00	64.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.6.13.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persen	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.1.6.14.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	daerah kabupaten/kota									
2.3.1.1.6.15.	Cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persen	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2.3.1.2.1.	Tenaga Kerja									
2.3.1.2.1.1.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	N.A	10.00	10.00	10.00	20.00	40.00	50.00	50.00
2.3.1.2.1.2.	Keselamatan dan perlindungan kerja	Persen	39.93	41.61	43.35	45.18	47.07	49.05	51.11	51.11
2.3.1.2.1.3.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	N.A	15.00	15.00	25.00	30.00	35.00	40.00	40.00
2.3.1.2.1.4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	N.A	10.00	10.00	10.00	20.00	40.00	50.00	50.00
2.3.1.2.1.5.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	20.00	25.00	25.00
2.3.1.2.1.6.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	N.A	N.A	0.032	0.054	0.108	0.215	0.323	0.323
2.3.1.2.1.7.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	N.A	10.00	10.00	10.00	20.00	40.00	50.00	50.00
2.3.1.2.1.8.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	N.A	N.A	3.32	3.44	3.57	3.71	3.85	3.85
2.3.1.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.3.1.2.2.1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	92.62	93.10	93.34	93.59	93.83	94.08	94.33	94.33
2.3.1.2.2.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	55.33	55.87	55.96	56.06	56.14	56.15	56.35	56.35
2.3.1.2.2.3.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
2.3.1.2.2.4.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45
2.3.1.2.2.5.	Rasio KDRT	Rasio	0.055	0.050	0.032	0.025	0.020	0.018	0.015	0.015
2.3.1.2.2.6.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Perda	1	1	1	1	2	2	2	2
2.3.1.2.2.7.	Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Managerial	Persen	16.13	16.33	16.54	16.75	16.96	17.17	17.39	17.39
2.3.1.2.2.8.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	0.055	0.056	0.063	0.071	0.079	0.087	0.095	0.095
2.3.1.2.2.9.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	16.00	14.00	12.00	10.00	8.00	6.00	4.00	4.00
2.3.1.2.2.10.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	0.022	0.050	0.018	0.016	0.014	0.012	0.010	0.010



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	instansi terkait kabupaten									
2.3.1.2.3.	Pangan									
2.3.1.2.3.1.	Ketersediaan pangan utama	Persen	99.52	99.55	99.58	99.61	99.64	99.67	99.70	99.70
2.3.1.2.3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita									
	▪ Ketersediaan energi perkapita (Kkal)	Kkal	3,186	3,422	3,676	3,949	4,242	4,557	4,895	4,895
	▪ Ketersediaan protein perkapita (gr)	Gr	78.96	79.10	79.24	79.39	79.53	79.67	79.82	79.82
2.3.1.2.3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.2.3.4.	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari	Kawasan	1	1	1	2	4	6	6	6
2.3.1.2.4.	Pertanahan									
2.3.1.2.4.1.	Persentase penyelesaian izin lokasi	Persen	N.A	N.A	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67
2.3.1.2.4.2.	Persentase penyelesaian kasus tanah garapan	Persen	N.A	N.A	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
2.3.1.2.4.3.	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persen	N.A	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
2.3.1.2.4.4.	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	Persen	N.A	100	100	100	100	100	100	100
2.3.1.2.4.5.	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	Persen	N.A	100	100	100	100	100	100	100
2.3.1.2.4.6.	Persentase pengelolaan izin membuka tanah umum	Persen	N.A	N.A	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.1.2.4.7.	Persentase Penatagunaan Tanah	Persen	N.A	0.02	0.04	0.11	0.11	0.24	0.34	0.34
2.3.1.2.5.	Lingkungan Hidup									
2.3.1.2.5.1.	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	N.A	52.60	52.70	52.80	52.90	53.00	53.10	53.10
2.3.1.2.5.2.	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	N.A	92.62	92.72	92.82	92.92	93.02	93.12	93.12
2.3.1.2.5.3.	Hasil pengukuran indeks kualitas lahan	Indeks	N.A	41.85	43.94	46.03	48.12	50.21	52.30	52.30
2.3.1.2.5.4.	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.2.5.5.	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina		0	0	0	1	1	2	2	2
2.3.1.2.5.6.	Jumlah MHA yang diakui		1	1	1	1	2	4	6	6



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.3.1.2.5.7.	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang di verifikasi		1	1	1	1	2	4	6	6
2.3.1.2.5.8.	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi		1	1	1	1	2	4	6	6
2.3.1.2.5.9.	Penetapan hak MHA		0	0	0	1	1	1	1	1
2.3.1.2.5.10.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Persen	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.2.5.11.	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persen	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.2.5.12.	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Pelatihan	0	0	1	1	2	2	2	2
2.3.1.2.5.13.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.1.2.5.14.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.2.5.15.	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	76.89	79.61	82.43	85.35	88.37	91.50	94.74	94.74
2.3.1.2.5.16.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 4R	Persen	0	0	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	50.00
2.3.1.2.5.17.	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	0.0069	0.0073	0.0078	0.0082	0.0087	0.0092	0.0098	0.0098
2.3.1.2.5.18.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	9.18	13.56	20.04	29.61	43.75	64.64	95.50	95.50
2.3.1.2.5.19.	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71		0	0	0	50	60	70	80	80
2.3.1.2.5.20.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	0	0	50	60	70	80	90	90
2.3.1.2.5.21.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	0	0	50	60	70	80	90	90
2.3.1.2.5.22.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	3.20	3.38	3.56	3.76	3.97	4.19	4.42	4.42
2.3.1.2.5.23.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	N.A	66.46	66.99	67.53	68.06	68.59	69.12	69.12
2.3.1.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2.3.1.2.6.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Rasio	0.88	0.89	0.90	0.92	0.93	0.94	0.95	0.95
2.3.1.2.6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0.61	0.66	0.71	0.77	0.83	0.90	0.97	0.97



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.3.1.2.6.3.	Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran	Persen	96.41	96.63	96.85	97.08	97.30	97.52	97.75	97.75
2.3.1.2.6.4.	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0.33	0.35	0.37	0.39	0.41	0.44	0.46	0.46
2.3.1.2.6.5.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.1.2.6.6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
2.3.1.2.6.7.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	52.12	81.87	87.95	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.2.6.8.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	96.84	97.05	97.26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.2.6.9.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	N.A	N.A	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	50.00
2.3.1.2.6.10.	Persentase pelaksanaan pencatatan sipil	Persen	40.00	50.00	80.00	100	100	100	100	100
2.3.1.2.6.11.	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persen	40.00	50.00	80.00	100	100	100	100	100
2.3.1.2.6.12.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00	30.00	30.00	30.00
2.3.1.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2.3.1.2.7.1.	Jumlah Desa tertinggal	Desa	139	137	135	133	131	129	127	127
2.3.1.2.7.2.	Jumlah Desa sangat tertinggal	Desa	15	13	11	9	7	6	4	4
2.3.1.2.7.3.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	91,27	92.16	93.05	93.95	94.86	95.78	96.71	96.71
2.3.1.2.7.4.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Rata-rata	0,08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10
2.3.1.2.7.5.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Rata-rata	0,52	0.61	0.73	0.86	1.01	1.20	1.42	1.42
2.3.1.2.7.6.	Persentase LPM berprestasi	Persen	0,00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00
2.3.1.2.7.7.	Persentase PKK aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.1.2.7.8.	Persentase Posyandu aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.1.2.7.9.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	7.00	9.00	9.00
2.3.1.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
2.3.1.2.8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0.37	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19
2.3.1.2.8.2.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rata-rata	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.24	2.24	2.24
2.3.1.2.8.3.	Ratio akseptor KB	Rasio	0.65	0.69	0.72	0.76	0.80	0.85	0.89	0.89



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.3.1.2.8.4.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	69.03	69.41	69.79	70.18	70.56	70.95	71.34	71.34
2.3.1.2.8.5.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)	Persen	1.35	1.33	1.30	1.28	1.26	1.24	1.22	1.22
2.3.1.2.8.6.	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0.93	0.94	0.94	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96
2.3.1.2.8.7.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	30.07	30.00	29.93	29.85	29.78	29.71	29.64	29.64
2.3.1.2.8.8.	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	20.83	21.91	23.05	24.25	25.51	26.84	28.23	28.23
2.3.1.2.8.9.	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	Persen	57.13	57.44	57.75	58.06	58.37	58.69	59.01	59.01
2.3.1.2.8.10.	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	Persen	3.18	3.20	3.21	3.23	3.25	3.27	3.28	3.28
2.3.1.2.8.11.	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	Persen	40.87	43.35	45.99	48.79	51.75	54.90	58.24	58.24
2.3.1.2.8.12.	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	6.89	6.97	7.05	7.14	7.22	7.31	7.39	7.39
2.3.1.2.8.13.	Cakupan peserta KB aktif	Persen	69.03	69.41	69.79	70.18	70.56	70.95	71.34	71.34
2.3.1.2.8.14.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	0.37	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19
2.3.1.2.9.	Perhubungan									
2.3.1.2.9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	83,996	86,499	89,077	91,731	94,465	97,280	100,179	100,179
2.3.1.2.9.2.	Rasio ijin trayek per 10.000 penduduk	Rasio	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.49
2.3.1.2.9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	430	471	516	564	618	678	744	744
	▪ Mobil penumpang umum		0	0	0	0	0	0	0	0
	▪ Mobil bus		93	98	104	109	115	122	129	129
	▪ Mobil barang		337	373	412	455	503	556	615	615
	▪ Kereta gandengan		0	0	0	0	0	0	0	0
	▪ Kereta tempelan		0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.9.4.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis									
	▪ Jumlah dermaga	Buah	2	2	2	2	3	4	4	4
	▪ Terminal type B Muaradua	Buah	1	1	1	1	1	1	1	1
	▪ Lapangan terbang Banding Agung	Buah	1	1	1	1	1	1	1	1



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.3.1.2.9.5.	Pemasangan Rambu-rambu	Buah	576	680	802	947	1,118	1,319	1,557	1,557
2.3.1.2.9.6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi	Rasio	N,A	N.A	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00
2.3.1.2.9.7.	Persentase pengelolaan pelayaran	Persen	40.00	40.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00
2.3.1.2.9.8.	Persentase pengelolaan penerbangan	Persen	40.00	40.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00
2.3.1.2.10.	Komunikasi dan Informatika									
2.3.1.2.10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.1.2.10.2.	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	49,80	52.65	55.66	58.84	62.21	65.77	69.53	69.53
2.3.1.2.10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	78.22	78.26	78.30	78.34	78.38	78.42	78.45	78.45
2.3.1.2.10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	0.70	0.72	0.74	0.76	0.78	0.80	0.82	0.82
2.3.1.2.10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	0.45	0.47	0.48	0.50	0.52	0.54	0.56	0.56
2.3.1.2.10.6.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	N.A	N.A	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00
2.3.1.2.10.7.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	N.A	N.A	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00
2.3.1.2.11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
2.3.1.2.11.1.	Persentase koperasi aktif	Persen	18.33	22.45	25.95	27.91	30.00	32.26	34.69	34.69
2.3.1.2.11.2.	Persentase usaha mikro dan kecil	Persen	99.07	99.08	99.09	99.10	99.11	99.12	99.13	99.13
2.3.1.2.11.3.	Jumlah BPR/LKM		0	0	0	1	1	1	1	1
2.3.1.2.11.4.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	6.00	7.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	30.00
2.3.1.2.12.	Penanaman Modal									
2.3.1.2.12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	906.9 milyar	1,0 triliun	1,5 triliun	2,5 triliun	3,5 triliun	4,5 triliun	5,5 triliun	5,5 triliun
2.3.1.2.12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	11	11	14	16	18	22	26	26
2.3.1.2.12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	48.91	53.08	57.60	62.51	67.83	73.61	79.88	79.88



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.3.1.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga									
2.3.1.2.13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.2.13.2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6
2.3.1.2.13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	77.78	78.56	79.34	80.14	80.94	81.75	82.57	82.57
2.3.1.2.13.4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Persen	18.52	78.56	79.34	80.14	80.94	81.75	82.57	82.57
2.3.1.2.13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	2.44	2.56	2.69	2.82	2.97	3.11	3.27	3.27
2.3.1.2.13.6.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	N.A	N.A	5.00	5.00	10.00	15.00	20.00	20.00
2.3.1.2.14.	Statistik									
2.3.1.2.14.1.	Buku "kabupaten dalam angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.1.2.14.2.	Buku "PDRB"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.1.2.14.3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.1.2.14.4.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	40.00	50.00	50.00
2.3.1.2.14.5.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	40.00	50.00	50.00
2.3.1.2.15.	Persandian									
2.3.1.2.15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	1,64	1.93	2.27	2.68	3.15	3.71	4.37	4.37
2.3.1.2.15.2.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	N.A	N.A	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00
2.3.1.2.16.	Kebudayaan									
2.3.1.2.16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	1	1	4	4	4	4	4	4
2.3.1.2.16.2.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	4,88	6.10	7.63	9.53	11.91	14.89	18.62	18.62
2.3.1.2.16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		0	0	1	1	2	2	3	3
2.3.1.2.16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		0	0	1	1	2	2	3	3



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.3.1.2.17.	Perpustakaan									
2.3.1.2.17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1,690	1,880	2,091	2,326	2,588	2,879	3,202	3,202
2.3.1.2.17.2.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
2.3.1.2.17.3.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	Orang	1,200	1,262	1,327	1,395	1,467	1,543	1,622	1,622
2.3.1.2.17.4.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	5,081	5,767	6,545	7,429	8,432	9,570	10,862	10,862
2.3.1.2.17.5.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Persen	0	0	1	4	4	6	8	8
2.3.1.2.17.6.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	N.A	N.A	47.50	49.50	51.50	53.50	56.50	56.50
2.3.1.2.17.7.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	N.A	N.A	5.10	5.12	5.13	5.14	5.15	5.15
2.3.1.2.18.	Kearsipan									
2.3.1.2.18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	7.55	15.09	30.19	45.28	60.38	75.47	90.57	90.57
2.3.1.2.18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan									
	▪ Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	0	1	1	2	3	4	5	5
2.3.1.2.18.3.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban		N.A	N.A	22.21	23.00	24.00	25.00	26.00	26.00
2.3.1.2.18.4.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		N.A	N.A	22.21	23.00	24.00	25.00	26.00	26.00
2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan									
2.3.2.1.	Pariwisata									
2.3.2.1.1.	Kunjungan wisata	Orang	11,959	14,808	18,335	22,703	28,111	34,808	43,099	43,099
2.3.2.1.2.	Lama kunjungan Wisata									
	▪ Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	Orang	974	1,204	1,490	1,842	2,278	2,817	3,483	3,483
2.3.2.1.3.	PAD sektor pariwisata	Persen	0.27	0.46	0.78	1.34	2.28	3.88	6.61	6.61
2.3.2.2.	Pertanian									



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.3.2.2.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	31.09	31.32	31.56	31.79	32.03	32.27	32.52	32.52
2.3.2.2.2.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar									
	▪ Provititas padi	Ton/ha	4.54	4.62	4.69	4.77	4.85	4.93	5.02	5.02
	▪ Provititas jagung	Ton/ha	7.15	7.29	7.42	7.57	7.71	7.86	8.00	8.00
	▪ Provititas kedelai	Ton/ha	1.35	1.37	1.39	1.41	1.43	1.45	1.47	1.47
2.3.2.2.3.	Cakupan bina kelompok petani	Persen	47.10	51.04	55.31	59.94	64.96	70.40	76.29	76.29
2.3.2.3.	Energi dan Sumber Daya Mineral									
2.3.2.3.1.	Rasio Elektrifikasi	Persen	67.62	70.98	74.52	78.22	82.11	86.20	90.49	90.49
2.3.2.4.	Perdagangan									
2.3.2.4.1.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	15.85	16.18	16.52	16.86	17.21	17.57	17.94	17.94
2.3.2.4.2.	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	Persen	22.50	22.81	23.12	23.44	23.77	24.09	24.42	24.42
2.3.2.4.3.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	6.00	7.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	30.00
2.3.2.4.4.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	N.A	N.A	25.00	35.00	45.00	55.00	65.00	65.00
2.3.2.5.	Perindustrian									
2.3.2.5.1.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	7.94	8.14	8.34	8.55	8.76	8.98	9.21	9.21
2.3.2.5.2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	4.00	6.00	10.00	12.00	13.00	15.00	17.00	17.00
2.3.2.5.3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	N.A	N.A	35.00	45.00	55.00	65.00	75.00	75.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.3.2.5.4.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.2.6.	Transmigrasi									
2.3.2.6.1.	Persentase transmigran swakarsa	Persen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
2.3.2.6.2.	Kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan dengan perbub	Perbub/ Perda	0	0	1	1	2	2	3	3
2.3.2.7.	Kelautan dan Perikanan									
2.3.2.7.1.	Produksi perikanan	Persen	29.50	32.59	36.01	39.79	43.97	48.58	53.67	53.67
2.3.2.7.2.	Konsumsi ikan	Persen	96.25	96.82	97.39	97.96	98.54	99.12	99.71	99.71
2.3.2.7.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	0	0	10.00	10.00	20.00	30.00	40.00	40.00
2.3.2.7.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	13.32	15.59	18.24	21.34	24.96	29.21	34.18	34.18
2.3.3.	Penunjang Urusan									
2.3.3.1.	Perencanaan Pembangunan									
2.3.3.1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.3.1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.3.1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.3.1.4.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.3.1.5.	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.3.1.6.	Indeks kualitas perencanaan		N.A	B	B	B	B	B	A	A
2.3.3.2.	Keuangan									
2.3.3.2.1.	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.3.3.2.2.	Penetapan APBD		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
2.3.3.2.3	Persentase penatausahaan Keuangan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.3.3.2.4.	Kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Sesuai SAP)		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.3.3.2.5.	Persentase kesesuaian pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.3.2.6.	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	4.33	5.27	5.31	5.70	6.09	6.48	6.87	6.87
2.3.3.3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
2.3.3.3.1.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	37.23	38.06	38.90	39.76	40.65	41.55	42.47	42.47
2.3.3.3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	5.73	6.95	8.42	10.21	12.38	15.02	18.21	18.21
2.3.3.3.3.	Indeks profesionalisme ASN	Indeks	N.A	N.A	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	75.00
2.3.3.4.	Penelitian dan pengembangan									
2.3.3.4.1.	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.3.4.2.	Skor Indeks Inovasi Daerah	Skor	358	550	700	1000	1200	1350	1550	1550
2.3.3.5.	Pengawasan									
2.3.3.5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	91.04	92.03	93.04	94.05	95.07	96.11	97.16	97.16
2.3.3.5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0.0772	0.0760	0.0748	0.0736	0.0724	0.0713	0.0701	0.0701
2.3.3.5.3.	Jumlah temuan BPK	Kasus	48	46	44	42	40	39	37	37
2.3.3.5.4.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2.45	3.00	3.10	3.10	3.20	3.30	3.30	3.30
2.3.3.5.4.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2.45	3.00	3.10	3.10	3.20	3.30	3.30	3.30
2.3.3.6.	Sekretariat Dewan									
2.3.3.6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.3.6.2.	Persentase rancangan perda yang dibahas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.3.7.	Kesatuan Bangsa dan Politik									



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.3.3.7.1.	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD	Konflik	5	5	4	0	0	0	0	0
2.3.3.7.2.	Tingkat Partispasi politik masyarakat dalam pemilu serentak	Persen	86.00	86.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah									
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
2.4.1.1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga									
	▪ ADHB (milyar rupiah)	Rupiah	5,958.01	6,077.17	6,198.71	6,322.69	6,449.14	6,578.12	6,709.69	6,709.69
	▪ ADHK (milyar rupiah)	Rupiah	3,490.09	3,559.89	3,631.09	3,703.71	3,777.79	3,853.34	3,930.41	3,930.41
2.4.1.2.	Nilai Tukar Petani		104	105	106	107	108	109	110	110
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
2.4.2.1.	Perhubungan									
2.4.2.1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1.46	1.49	1.52	1.55	1.58	1.61	1.64	1.64
2.4.2.1.2.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	83,996	86,499	89,077	91,731	94,465	97,280	100,179	100,179
2.4.2.1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	79,761	86,182	93,119	100,616	108,715	117,467	126,923	126,923
2.4.2.2.	Penataan ruang									
2.4.2.2.1.	Luas wilayah produktif	Persen	97.74	97.74	97.74	97.74	97.74	97.74	97.74	97.74
2.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi									
2.4.3.1.	Angka kriminalitas		0.48	0.37	0.29	0.22	0.17	0.13	0.10	0.10
2.4.3.2.	Lama proses perizinan	Hari	1	1	1	1	1	1	1	1
2.4.3.3.	Jenis dan jumlah bank dan cabang		6	6	6	6	6	6	6	6
2.4.3.4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah		33	33	33	33	33	33	33	33
2.4.3.5.	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Perda	1	1	1	2	3	3	3	3
2.4.3.6.	Persentase Desa berstatus swasembada	Persen	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia									
2.4.4.1.	Rasio ketergantungan	Rasio	42.75	42.29	41.84	41.40	40.96	40.52	40.09	40.09



*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021-2026*



BAB X P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, memperhatikan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, serta RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, dijadikan pedoman dalam:

1. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) dan perencanaan penganggaran;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan antara lintas OPD wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan maupun dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, sangat tergantung pada kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Ogan Komering Ulu Selatan sebagai bagian dari proses pencapaian visi **“OKU Selatan Bersinar”**. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggungjawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026.

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO